



# Business Optimization & Cost Efficiency for Commercial Excellence





## TENTANG LAPORAN TAHUNAN ABOUT THE ANNUAL REPORT

# Business Optimization & Cost Efficiency for Commercial Excellence

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis tempat Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Pada pelaporan di tahun 2022 ini Perseroan juga membuat Laporan Keberlanjutan pertama kembali. Laporan Keberlanjutan dibuat sesuai dengan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 dan diterbitkan terpisah dari buku Laporan Tahunan. SEOJK telah mengatur bahwa dalam hal Laporan Keberlanjutan diterbitkan terpisah, maka informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (JTSL) dapat diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dan tidak dimuat dalam Laporan Tahunan. Walaupun demikian, Perusahaan tetap mengungkapkan informasi kegiatan JTSL dalam Laporan Tahunan ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini disampaikan per akhir tahun pelaporan pada 31 Desember 2022 dari PT Multi Terminal Indonesia yang selanjutnya dapat disebut sebagai "Perseroan", "Perusahaan", "PT MTI", dan "MTI". Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau "Rp" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia dan "USD" untuk satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

This annual report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, excluding historical matters. Such forward looking statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that can cause the actual results to differ materially from the expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts its business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

For the reporting period of 2022, the Company published its first Sustainability Report. The Sustainability Report was made by referring to SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 and was published separately from this Annual Report. Nevertheless, the Corporate still discloses the information of its social and environmental responsibility (CSR) in this Annual Report to follow the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

This Annual Report contains information as of the end of reporting period on December 31, 2022, of PT Multi Terminal Indonesia which from this moment can be referred to as "The Company," "PT MTI," and "MTI". This Annual Report used "Rupiah" or "Rp", which refers to the Republic of Indonesia's official currency and "USD" is used for the currency of the United States Dollar.

# Daftar Isi

## Table of Contents

06	Jejak Langkah Milestones
08	Peristiwa Penting 2022 Significant Events 2022
12	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications



### Kilas Kinerja Performance Overview

16	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights
20	Ikhtisar Operasional Operational Highlights
20	Ikhtisar Saham, Obligasi, Aksi Korporasi Highlights of Stocks, Bond, and Corporate Action



### Laporan Manajemen Management Report

24	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners
32	Laporan Direksi Report of the Board of Directors
40	Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Accountability Statement from the Board of Commissioners and Board of Directors



### Profil Perusahaan Company Profile

44	Informasi Umum General Information
46	Sejarah Perusahaan Company History
47	Bidang Usaha Line of Business
48	Produk dan Jasa Products and Services
50	Visi, Misi dan Tata Nilai Vision, Mission, and Corporate Values
52	Makna dan Sejarah Logo Logo Meaning and History
54	Informasi Saham Stock Information

56	Struktur Organisasi Organizational Structure
----	---

58	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
----	--

65	Profil Direksi Board of Directors Profile
----	--

70	Pejabat Struktural Structural Officers
----	---

72	Informasi Entitas Anak dan Asosiasi Information on Subsidiaries and Associates
----	---

73	Lembaga dan Profesional Penunjang Supporting Professionals and Institutions
----	--

75	Informasi Wilayah Kerja Operational Areas
----	--

76	Informasi pada Website Perusahaan Information on the Company's Website
----	---

77	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit
----	---

79	Keanggotaan Asosiasi Association Membership
----	--



### Tinjauan Pendukung Bisnis

#### Business Supporting Overview

82	Sumber Daya Manusia Human Resources
----	--

96	Teknologi Informasi Information Technology
----	---



### Analisa dan Pembahasan Manajemen

#### Management Discussion and Analysis

100	Tinjauan Umum Ekonomi dan Industri General Overview of the Economy and Industry
-----	--

101	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
-----	-------------------------------------

103	Tinjauan Kinerja Operasi Operational Performance Overview
-----	--

105	Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview
-----	---

117	Investasi Barang Modal Capital Expenditure
-----	---

118	Pencapaian Target 2022, Prospek Usaha dan Proyeksi 2023 Achievement of 2022 Targets, Business Prospects and Projections for 2023
-----	--

122	Informasi Kelangsungan Usaha Going Concern
-----	---

124	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to the Accountant Report Date
-----	--

125	Pembagian Dividen Dividend Payment
-----	---------------------------------------

126	Pembayaran Pajak Tax Payment
-----	---------------------------------

126	Informasi Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring
-----	---

127	Informasi Transaksi Material Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/ Related Parties
-----	---

130	Pengaruh Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perseroan Impact of Changes in Laws and Regulations on the Company
-----	---

130	Perubahan Kebijakan Akuntansi Amendments to Accounting Policy
-----	--

131	Informasi Lainnya Other Information
-----	--



## Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

134	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Commitment to Good Corporate Governance	184	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Diverse Composition of the Board of Commissioners and the Board Of Directors	221	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data
135	Perkembangan Penerapan GCG Tahun 2022 Improvement of GCG Implementation in 2022	185	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners	222	Budaya Perusahaan Corporate Culture
136	Struktur GCG GCG Structure	187	Komite Audit Audit Committee	223	Kode Etik Code of Conduct
137	Sosialisasi dan Internalisasi GCG GCG Socialization and Internalization	193	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	226	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy
137	Penilaian Penerapan GCG Assessment of the Implementation of GCG	197	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	227	Kebijakan Anti Gratifikasi Anti-Gratification Policy
141	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	197	Sekretaris Perusahaan & Hukum Corporate Secretary & Legal	228	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Policy
146	Dewan Komisaris Board of Commissioners	200	Audit Internal Internal Audit	229	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Official Wealth Report (LHKPN)
166	Direksi Board of Directors	205	Akuntan Publik Public Accountant	229	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
180	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors	206	Manajemen Risiko Risk Management	232	Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance
		218	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	233	Informasi Bad Corporate Governance Information on Bad Corporate Governance
		220	Perkara Penting dan Sanksi Important Issues and Sanctions		



## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility

236	Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Commitment to Social and Environmental Responsibility (CSR)	240	Informasi TJSL Lainnya Diungkapkan pada Laporan Keberlanjutan Tahun 2022 Other Information Related to TJSL is Disclosed in the Sustainability Report 2022
238	Struktur Organisasi Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Organizational Structure of Corporate Governance and Social Responsibility	240	Program-Program TJSL CSR Programs
239	Realisasi Anggaran Program TJSL Realization of the Budgets for CSR Programs		



## Laporan Keuangan Audited 2022

### 2022 Audited Financial Statements

246	Laporan Keuangan Financial Statements
-----	--

## Jejak Langkah Milestones

### 2002

Pada tanggal 15 Februari 2002, PT Multi Terminal Indonesia didirikan melalui notaris Hermadimansyah Chaidirsyah, S.H., dengan nomor akta 15. PT Multi Terminal Indonesia merupakan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan komposisi kepemilikan saham 99% milik PT Pelindo dan 1% dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok. On February 15, 2002, PT Multi Terminal Indonesia was established through notary Hermadimansyah Chaidirsyah, SH, with deed number 15. PT Multi Terminal Indonesia was a PT Pelabuhan Indonesia (Persero) subsidiary with a share ownership composition of 99% owned by PT Pelindo and 1% owned by Maritime Employees Cooperative (KOPEGMAR) of Tanjung Priok.

### 2003

Perusahaan melakukan perubahan susunan jabatan Direksi pada tanggal 4 Desember 2003 dengan komposisi Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Administrasi, dan Direktur Operasi.

The Company changed the composition of the Board of Directors' positions on December 4, 2003, with the composition of President Director, Director of Finance and Administration, and Director of Operation.

### 2008

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terjadi tanggal 14 Agustus 2008 dengan pengaturan ruang lingkup Tugas dan Kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, benturan kepentingan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan.

The Company's Articles of Association was amended on August 14, 2008, with the arrangement of the Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, Meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners, conflict of interest, work plans, and the Company's budget.

### 2010

Perusahaan melakukan perubahan susunan jabatan Komisaris pada tanggal 24 September 2010.

The Company changed the composition of the Board of Commissioners' positions on September 24, 2010.

### 2011

Perusahaan melakukan perubahan dan susunan jabatan Direksi pada tanggal 14 Juli 2011.

The Company changed the composition of the Board of Directors' positions on July 14, 2011.

### 2012

- Pada tahun 2012, terjadi perubahan AD/ART Perusahaan. Perubahan dimaksud adalah dalam proses kegiatan usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
- Pada tanggal 1 Juni 2012, PT Multi Terminal Indonesia melakukan perubahan dan penambahan jabatan Direksi dengan komposisi Direktur Utama, Direktur Keuangan & SDM, Direktur Operasi, dan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
- In 2012, the Company's Articles of Association was amended. The amendment in question was in the business activities process as a Port Business Entity (BUP).
- On June 1, 2012, PT Multi Terminal Indonesia changed and added the Board of Directors positions with the composition of President Director, Director of Finance & HR, Director of Operation, and Director of Marketing and Business Development.

### 2014

- Perusahaan melakukan perubahan dan susunan jabatan Komisaris pada tanggal 23 April 2014.
- Perusahaan melebihi target pendapatan usaha mencapai Rp856 miliar.
- The Company changed the composition of the Board of Commissioners' positions on April 23, 2014.
- The Company exceeded its operating revenue target of Rp856 billion.



### 2017

- Perusahaan melakukan perubahan susunan jabatan Direksi.
- Perusahaan melakukan perubahan susunan jabatan Dewan Komisaris.
- Perusahaan melakukan penambahan jabatan Direksi, sehingga komposisi Direksi meliputi Direktur Utama, Direktur Keuangan & SDM, Direktur Operasi dan Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis.
- The Company changed the composition of the Board of Directors' positions.
- The Company changed the composition of the Board of Commissioners' positions.
- The Company added the Board of Directors' positions so that the composition of the Board of Directors included President Director, Director of Finance & HR, Director of Operation, and Director of Commercial & Business Development.

### 2016

- Membentuk unit usaha Perusahaan dengan mendirikan UPA (Unit Pengusahaan Alat) sebagai penyedia dan penyewaan alat bongkar muat.
- Perluasan bisnis logistik Perusahaan dengan beroperasinya unit MKE (Multi Kargo Ekspres).
- Mendirikan Halal Logistik & Cold Storage sebagai cabang yang dikhususkan melayani kebutuhan produk halal.
- Perusahaan berperan aktif dalam program Tol Laut Pemerintah untuk menekan disparitas harga di Kepulauan Natuna dengan mengoperasikan Gudang Muatan Tol Laut & pendistribusiannya.
- Established a business unit of UPA (Equipment Procurement Unit) as a provider and rental of loading and unloading equipment.
- Expansion of the Company's logistics business with the operation of the MKE (Multi Cargo Express) unit.
- Established Halal Logistics & Cold Storage as a branch specialized in serving the needs of halal products.
- The Company played a part in the Government's Sea Toll program to depress price disparities in the Natuna Islands by operating Sea Toll Load Warehouse and its distribution.

### 2015

- Restrukturisasi bisnis di lingkungan anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai pemegang saham utama.
- PT Multi Terminal Indonesia mengubah logo, visi dan misi serta nilai Perusahaan sesuai arahan dari Pemegang Saham.
- PT Multi Terminal Indonesia membuka 6 (enam) cabang untuk perluasan bisnis Perseroan di Surabaya, Semarang, Banten, Cirebon, Bandung, dan Jakarta.
- Membentuk *contact center* untuk melayani kebutuhan informasi bagi pelanggan.
- Restructuring of business within the subsidiary engaged in logistics services by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the major shareholder. PT Multi Terminal Indonesia changed the Company's logo, vision, mission, and values according to Shareholders' directions.
- PT Multi Terminal Indonesia opened 6 (six) branches for the Company's business expansion in Surabaya, Semarang, Banten, Cirebon, Bandung, and Jakarta.
- Established a contact center to serve the information needs of customers.

## 2018

- Perusahaan melakukan perubahan susunan jabatan Direksi.
- Penandatanganan MoU PT Multi Terminal Indonesia dengan PT Putra Dwimitra Lestarindo tentang kerja sama pelayanan jasa usaha pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*).
- PT Multi Terminal Indonesia meraih penghargaan TOP CSR dalam bidang logistik.
- Penandatanganan MoU PT Multi Terminal Indonesia dengan PT Terminal Petikemas Surabaya tentang optimalisasi *Container Freight Station (CFS)*.
- Perusahaan menjangkau pasar pelumas dengan bermitra bersama PT Wiraswasta Gemilang Indonesia.
- The Company changed the composition of the Board of Directors' positions.
- Signing of MoU between PT Multi Terminal Indonesia and PT Putra Dwimitra Lestarindo concerning cooperation in the Freight Forwarding.
- The Company won the TOP CSR Awards in logistics.
- Signing of MoU between PT Multi Terminal Indonesia and PT Terminal Petikemas Surabaya concerning Container Freight Station (CFS) optimization.
- The Company entered the lubricant market by partnering with PT Wiraswasta Gemilang Indonesia.

## 2019

- Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi dengan pemberhentian Direktur Utama.
- Perusahaan melakukan perubahan Dewan Komisaris dengan pemberhentian anggota Komisaris.
- Perusahaan melakukan perubahan susunan jabatan Direksi.
- Perusahaan melakukan perubahan Dewan Komisaris dengan pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama.
- Perusahaan melakukan penambahan susunan jabatan Direksi yaitu pengangkatan Direktur Utama & Direktur Operasi.
- Perusahaan melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Manajemen.
- Pengoperasian Lini 2 di IPC Cabang Pontianak oleh Perusahaan.
- The Company changed the Board of Directors' composition with the President Director's dismissal.
- The Company changed the Board of Commissioners with the Board of Commissioners members' dismissal.
- The Company changed the composition of the Board of Directors' positions.
- The Company changed the Board of Commissioners with the dismissal and appointment of the President Commissioner.
- The Company added the composition of the Board of Directors' positions, namely the appointment of the President Director and Director of Operation.
- The Company changed the Organizational Structure and Management Work Procedures.
- Operation of Line 2 at IPC Pontianak Branch by the Company.

## 2020

- Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi dengan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi.
- Perusahaan melakukan perubahan Dewan Komisaris dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.
- Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terjadi tanggal 27 Maret 2020 dengan mengubah kegiatan Usaha.
- Perubahan Logo PT Multi Terminal Indonesia dari IPC Logistic Services mejadi IPC Logistics serta perubahan Visi, Misi dan *Values* Perusahaan.
- Perubahan *Values* Perusahaan dari M.A.J.U menjadi AKHLAK sesuai arahan Kementerian BUMN dan Pemegang Saham.
- PT Multi Terminal Indonesia changed the composition of the Board of Directors with the dismissal and appointment of members of the Board of Directors.
- PT Multi Terminal Indonesia changed the Board of Commissioners with the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners.
- The Company's Articles of Association was amended by changing business activities on March 27, 2020.
- Change in PT Multi Terminal Indonesia's Logo from IPC Logistic Services to IPC Logistics and changes to the Company's Vision, Mission, and Values.
- Change of the Company's Values from M.A.J.U to AKHLAK according to the Ministry of SOEs and Shareholders' directions.

## 2022

- Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi dengan mengganti Direktur Keuangan & SDM.
- Perusahaan melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dengan mengganti Komisaris Utama.
- Perusahaan melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dengan mengganti anggota Komisaris.
- Perusahaan melakukan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.
- Perusahaan melakukan perubahan logo baru dari IPC Logistics menjadi Pelindo Solusi Logistik/MTI Multi SCM.
- Penyempurnaan organisasi dan tata kerja Manajemen Perusahaan.
- The Company changed the composition of the Board of Directors by replacing the Finance & HR Director.
- The Company changed the composition of the Board of Commissioners by replacing the President Commissioner.
- The Company changed the composition of the Board of Commissioners by replacing a member of the Board of Commissioners.
- The Company re-appointed all members of the Board of Commissioners.
- The Company changed its logo from IPC Logistics to Pelindo Solusi Logistik/MTI Multi SCM.
- Improvement of the organization and working procedures of the Company's Management.

## 2021

- Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi dengan pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi yakni Direktur Utama & Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis.
- Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi dengan pemberhentian Anggota Direksi yakni Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis.
- Perubahan nama pemegang saham Perusahaan yang semula PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan pengalihan seluruh saham PT MTI kepada PT Pelindo Solusi Logistik yakni suatu perseroan terbatas dengan Pelindo sebagai pemegang saham mayoritas yang akan menjadi perusahaan *Sub-holding*.
- Penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja manajemen Perusahaan.
- Perusahaan melakukan Penyaluran Dana Bantuan CSR Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan dan Sosial Kemasyarakatan.
- The Company changed the composition of the Board of Directors with the dismissal and appointment of members of the Board of Directors, namely the President Director and Director of Commercial & Business Development.
- The Company changed the composition of the Board of Directors with the dismissal of a Member of the Board of Directors, namely the Director of Commercial & Business Development.
- Change in the name of the Company's shareholder from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) transferred all of the Company's shares to PT Pelindo Solusi Logistik, a limited liability company with Pelindo as the majority shareholder, which will become a Sub-holding company.
- Improvement to the organization and management work procedures of the Company.
- The Company distributed CSR Assistance Funds for Education, Health, Environment, and Social Community.



## Peristiwa Penting 2022

### Significant Events 2022



7

**Januari**  
 January

PT MTI menggelar acara silaturahmi dengan Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami).

PT MTI invited the Forum of the Indonesian Maritime Journalists (Forwami) on a courtesy visit.



1

**Februari**  
 February

PT MTI menggelar acara evaluasi bertajuk Rapat Dinas Kinerja 2021 & Sinkronisasi Program Kerja Tahun 2022.

PT MTI organized an evaluation event which entitled the 2021 Performance Meeting & the 2022 Synchronization.



15

**Februari**  
 February

PT MTI merayakan HUT ke-20 dengan menggelar syukuran potong tumpeng yang dimeriahkan dengan perlombaan.

PT MTI celebrated its 20th birthday through a symbolic cone-shape rice dish known as tumpeng, celebrated by contests.



15

**Februari**  
 February

PT MTI mengadakan program CSR di bidang kesehatan bertema "Peduli Mata" dengan melakukan pemeriksaan kesehatan mata dan memberikan bantuan kacamata gratis.

PT MTI organized a healthcare CSR program of "Eye Caring" through eye examination and free glasses.



18

**Maret**  
 March

PT MTI menggelar acara untuk meresmikan perpindahan anggota Komisaris dan menyambut anggota Komisaris baru.

PT MTI organized an event to bid farewell to a member of the Board of Commissioners and welcome a new member of the Board of Commissioners.



18

**Maret**  
 March

PT MTI menggelar in house training mengenai perpajakan PPN & PPNBM.

PT MTI organized an in house training on VAT & luxury tax.



**20**  
Maret  
March

Dukung kesehatan pekerja, PT MTI membagikan vitamin untuk menjaga imunitas selama masa pandemi.

To keep employees healthy, PT MTI distributed vitamins to protect their immune system during the pandemic.



**7**  
April  
April

PT MTI raih penghargaan STAR 4 & TOP Leader on CSR Comittment 2022 dalam ajang TOP CSR Award 2022.

PT MTI obtained the award of STAR 4 & TOP Leader on CSR Comittment 2022 during the TOP CSR Award 2022.



**7**  
April  
April

PT MTI mengangkut 7 (tujuh) kontainer komoditas pinang biji di Muaro Jambi.

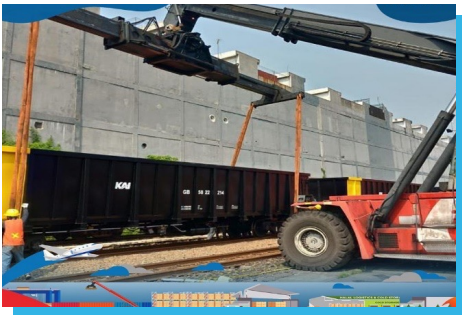
PT MTI transported 7 (seven) containers of are nuts in Muaro Jambi.



**13**  
April  
April

PT MTI melaksanakan program CSR Berbagi Ramadhan saat perayaan bulan suci Ramadhan 1443H.

PT MTI donated several packages during the holy month of Ramadhan 1443H as a realization of its CSR program.



**18**  
April  
April

PT MTI membongkar 100 unit gerbong di Lapangan Pasoso untuk mengangkut batu bara milik PT KAI.

PT MTI prepared 100 units of containers at the Pasoso Field to transport the coal of PT KAI.



**22**  
April  
April

Perseroan mengumumkan logo baru PT MTI yang telah disahkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS.

The Company announced the new logo of PT MTI which has been ratified through the Shareholders' Decision Outside the GMS.



**3**  
Juni  
June

PT MTI menggelar acara perpisahan Direktur Keuangan & SDM yang lama dan menyambut Direktur Keuangan & SDM yang baru.

PT MTI held a farewell event for the past Finance & HR Director and welcomed the new Finance & HR Director.





**27**  
Juni  
June

KADIN Jakarta Utara melakukan kunjungan kerja ke PT MTI. The Chamber of Commerce of the North Jakarta (KADIN) made an official visit to PT MTI.



**29**  
Juni  
June

PT MTI membagikan 100 paket makanan untuk mendukung program Vaksinasi COVID yang diselenggarakan Polres Kalibaru.

PT MTI donated 100 meal packages to support the COVID Vaccination program of the Kalibaru Police.



**9**  
Juli  
July

PT MTI memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di lingkungan sekitar Perseroan dalam rangka memeriahkan Idul Adha 1443H.

PT MTI helped the surrounding community to celebrate Eid al-Adha 1443H by donating sacrificial animals.



**27**  
Juli  
July

PT MTI mendonasikan sejumlah kaki palsu kepada para penyandang disabilitas sebagai bentuk realisasi program TJSI.

PT MTI donated several prosthetic legs to people with disability as part of the Company's CSR (TJSI) programs.



**24**  
Agustus  
August

PT MTI menggelar pelatihan audit mutu internal ISO 9001:2015. PT MTI organized a training to enhance the quality of the internal audit based on ISO 9001:2015.



**6**  
September  
September

PT MTI meraih penghargaan STAR 3 dalam ajang TOP GRC Awards 2022.

PT MTI obtained the STAR 3 award during the TOP GRC Awards 2022.



**23**  
September  
September

PT MTI menggelar pemilihan ketua serikat pekerja untuk periode 2022-2025 dalam musyawarah kerja luar biasa.

PT MTI organized an extraordinary meeting to elect the new chairman of the union for the 2022-2025 period.





**31**  
Oktober  
October

PT MTI melakukan serah terima SK Pensiun kepada seorang pekerja dari LRI.

PT MTI submitted the Retirement Decree to a worker from the LRI.



**2**  
November  
November

PT MTI melaksanakan *sharing session* untuk menjaga harmonisasi hubungan industrial antara Manajemen & serikat pekerja.

PT MTI obtained the award of STAR 4 & TOP Leader on CSR Commitment 2022 during the TOP CSR Award 2022.



**17**  
November  
November

PT MTI menerima kunjungan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

PT MTI welcomed the National Board of the Special Economic Zone (KEK).



**21**  
November  
November

PT MTI berhasil meraih penghargaan Silver Winner pada 2022 Spot Light Awards.

PT MTI received the Silver Winner Award during the 2022 Spot Light Awards.



**22**  
November  
November

PT MTI memberikan bantuan sembako pada korban bencana gempa bumi di Cianjur.

PT MTI donated staple food packages to victims of the earthquake in Cianjur.



**2**  
Desember  
December

PT MTI berkolaborasi dengan SPSL Group menanam 25.100 benih pohon mangrove di Pantai Mangkang Wetan dan Tambak Desa Mangunharjo Semarang.

PT MTI collaborated with the SPSL Group planted 25,100 seeds of mangrove tree at the Mangkang Wetan Beach and the Ponds of Mangunharjo Village in Semarang.

# Penghargaan dan Sertifikasi

## Awards and Certifications

Penghargaan yang diterima Perusahaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The awards the Company received in 2022 were as follows:



### Penanganan Klaim Terbaik Tahun 2021

#### The Best in Handling Claim for 2021

Diberikan oleh PT Pelindo Head Cabang Tanjung Priok dalam Acara Juklak Klaim tanggal 15 Maret 2022

Awarded by PT Pelindo Head Cabang Tanjung Priok during the "Juklak Klaim" Event on March 15, 2022

### Top CSR Awards 2022

#### #4 Star and Top Leader on CSR Commitment 2022

Diberikan oleh Majalah TOP Business dalam Acara TOP CSR Award 2022 tanggal 7 April 2022

Awarded by TOP Business Magazine during the TOP CSR Award 2022 Event on April 7, 2022



### Top GRC Award 2022 #3 Star

#### The Best in Handling Claim for 2021

Diberikan oleh Majalah TOP Business dalam Acara TOP GRC Award 2022 tanggal 7 September 2022

Awarded by TOP Business Magazine during the TOP GRC Award 2022 Event on September 7, 2022

### 2022 Spotlight Awards

#### Global Communications Competition

PT MULTI TERMINAL INDONESIA

**Entry Highlights:**  
Use Competition GRC Performance

Company/Agency Name:	PT MULTI TERMINAL INDONESIA / PT MULTI TERMINAL INDONESIA
Company/Agency Web Site:	multiterminal.co.id / multiterminal.co.id
Project Name:	REINFORCING SYNERGY THROUGH INNOVATION AND IMPROVEMENT
Competition Category:	Report: Annual Report
Annual Revenue:	\$100 million - \$1 billion
Employee Base:	100 to 1,000 employees
Award Tiered:	Silver
Top 100 Rank:	71

**Judging Results**

First Impression:	28 out of 30
Overall Narrative:	10 out of 10
Overall Visual Design:	10 out of 10
Creativity:	19 out of 20
Message Clarity:	19 out of 20
Relevance/Reference:	10 out of 10
<b>Total Score:</b>	<b>97 out of 100</b>



### Silver Winner Spotlight Awards Global Communications Competition

Diberikan oleh League of American Communication Professional (LACP) dalam Acara Spotlight Award tanggal 21 November 2022

Awarded by League of American Communication Professional (LACP) during the Spotlight Award Event on November 21, 2022



**Peringkat Early Improvement**  
Early Improvement Rank

Diberikan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam Acara SNI Award tanggal 29 November 2022

Awarded by National Standardization Agency during the SNI Award on November 29, 2022

Berikut adalah sertifikat yang dimiliki Perusahaan dengan masa berlaku hingga akhir 2022 dan seterusnya:

The following are information regarding all certificates the Company owns that are valid until the end of 2022 and beyond:



**Halal Assurance System Status**

Diberikan oleh LPPOM-MUI dengan masa berlaku dari 16 September 2021 hingga 15 September 2022

Given by LPPOM-MUI which valid from September 16, 2021 to September 15, 2022



**Sertifikasi SMAP ISO 37001 : 2016**  
ISO 37001: 2016

Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification

Diberikan oleh ASRICERT dengan masa berlaku dari 18 Januari 2022 hingga 17 Januari 2023

Given by ASRICERT which valid from January 18, 2022 to January 17, 2023







1

# Kilas Kinerja

## Performance Overview

---

Laba tahun 2022 menjadi laba tertinggi yang dicapai Perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

The income for 2022 is the highest in the past 3 (three) years.



# Ikhtisar Keuangan

## Financial Highlights

### Laporan Posisi Keuangan

(Dalam ribu Rupiah)

### Statement of Financial Position

(In thousand Rupiah)

Keterangan   Description	2022	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar Current Assets	<b>668.092.689</b>	529.982.051	531.795.377	474.234.547	467.565.239
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	<b>240.173.689</b>	330.799.029	376.972.128	410.490.867	430.980.500
<b>Jumlah Aset Total Assets</b>	<b>908.266.378</b>	<b>860.781.080</b>	<b>908.767.505</b>	<b>884.725.414</b>	<b>898.545.739</b>
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	<b>364.825.711</b>	250.489.328	315.196.934	260.459.423	275.361.577
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	<b>42.543.933</b>	45.194.630	39.554.508	34.849.215	28.870.606
<b>Jumlah Liabilitas Total Liabilities</b>	<b>407.369.704</b>	<b>295.683.958</b>	<b>354.751.442</b>	<b>295.308.638</b>	<b>304.232.183</b>
<b>Jumlah Ekuitas Total Equity</b>	<b>500.896.674</b>	<b>565.097.122</b>	<b>565.097.122</b>	<b>554.016.063</b>	<b>594.313.556</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity</b>	<b>908.266.378</b>	<b>860.781.080</b>	<b>908.767.505</b>	<b>884.725.414</b>	<b>898.545.739</b>

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam ribu Rupiah)

### Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(In thousand Rupiah)

Keterangan   Description	2022	2021	2020	2019	2018
Pendapatan Operasi Operating Revenues	<b>612.413.190</b>	571.668.330	545.801.103	492.877.737	402.745.180
Beban Operasi Operating Expenses	<b>(537.433.940)</b>	(541.129.353)	(532.613.855)	(468.799.518)	(393.294.917)
<b>Laba Usaha Income from Operations</b>	<b>89.138.848</b>	<b>19.391.116</b>	<b>13.187.248</b>	<b>24.078.219</b>	<b>9.450.263</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax</b>	<b>94.084.644</b>	<b>22.588.597</b>	<b>4.285.008</b>	<b>33.091.073</b>	<b>44.664.668</b>
<b>Laba Tahun Berjalan Income for the Year</b>	<b>83.847.760</b>	<b>10.063.583</b>	<b>(10.009.775)</b>	<b>19.780.842</b>	<b>31.650.693</b>
<b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year</b>	<b>85.799.552</b>	<b>11.081.059</b>	<b>(8.084.352)</b>	<b>20.423.776</b>	<b>33.043.426</b>

**Rasio**

(Dalam persentase)

**Ratio**  
(In percentage)

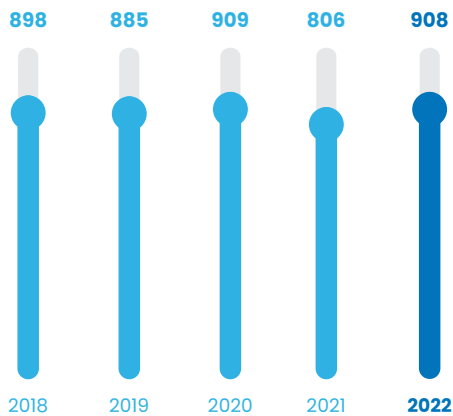
Keterangan   Description	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Solvabilitas</b> Solvency					
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	<b>72,83</b>	52,32	64,03	50,10	51,19
<b>Likuiditas</b> Liquidity					
Rasio Kas Cash Ratio	<b>92,22</b>	76,96	45,68	58,90	56,51
Rasio Lancar Current Ratio	<b>183,13</b>	211,58	168,72	182,08	169,80
<b>Profitabilitas</b> Profitability					
Tingkat Pengembalian terhadap Aset Return on Assets (ROA)	<b>8,54</b>	1,29	(0,89)	2,31	3,68
Tingkat Pengembalian terhadap Investasi Return on Investment (ROI)	<b>12,49</b>	1,29	3,13	7,74	10,63
Tingkat Pengembalian terhadap Ekuitas Return on Equity (ROE)	<b>21,17</b>	1,82	1,81	3,36	5,33
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	<b>87,84</b>	94,66	97,58	95,11	97,65
Kolektibilitas Piutang (hari) Receivable Collectability (day)	<b>33,84</b>	79,74	60,23	55,54	77,10

## Grafik Laporan Posisi Keuangan

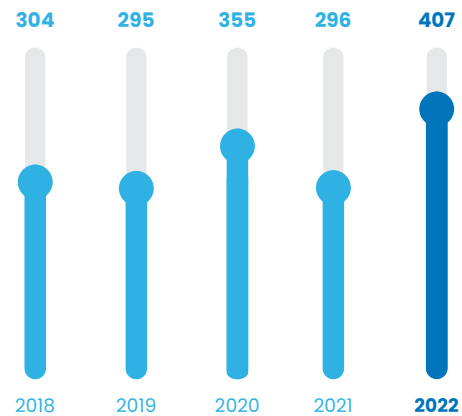
### Charts of Statement of Financial Position



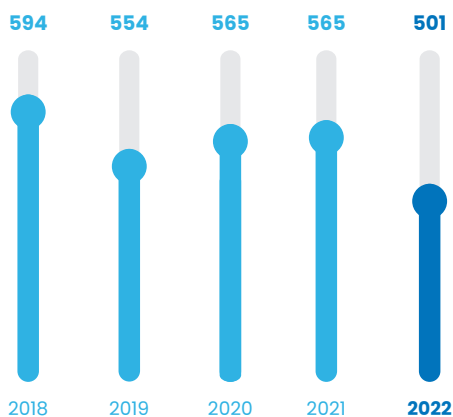
**Jumlah Aset**  
**Total Assets**  
 (dalam juta Rupiah)  
 (in million Rupiah)



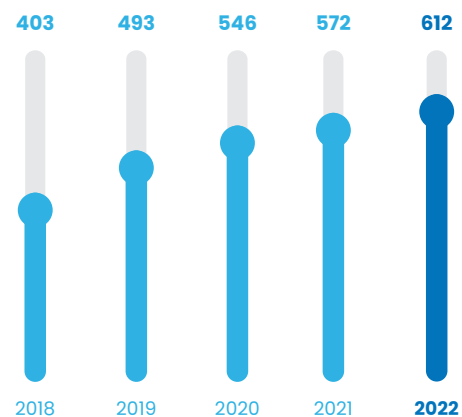
**Jumlah Liabilitas**  
**Total Liabilities**  
 (dalam juta Rupiah)  
 (in million Rupiah)



**Jumlah Ekuitas**  
**Total Equity**  
 (dalam juta Rupiah)  
 (in million Rupiah)



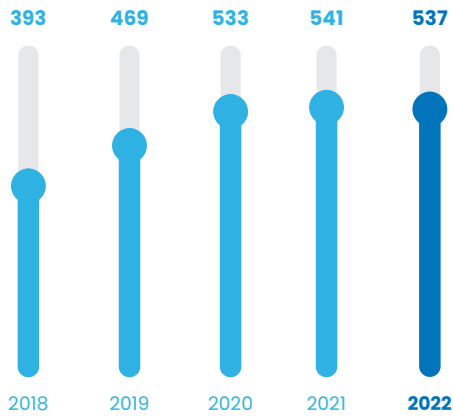
**Pendapatan Operasi**  
**Operating Revenues**  
 (dalam juta Rupiah)  
 (in million Rupiah)



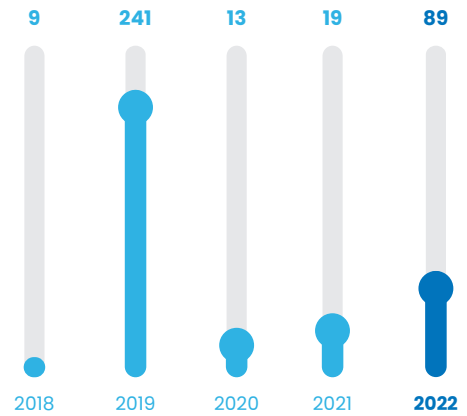




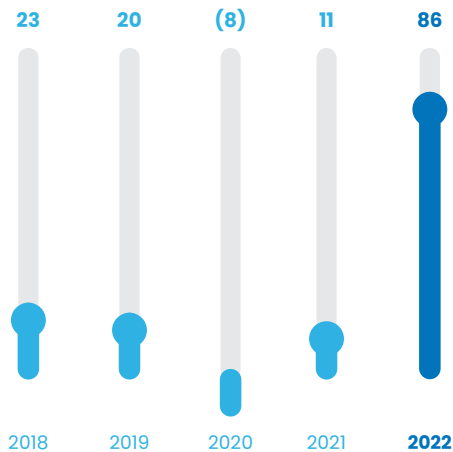
**Beban Operasi**  
**Operating Expenses**  
(dalam juta Rupiah)  
(in million Rupiah)



**Labanya Usaha**  
**Income from Operations**  
(dalam juta Rupiah)  
(in million Rupiah)



**Labanya Komprehensif Tahun Berjalan**  
**Comprehensive Income for the Year**  
(dalam juta Rupiah)  
(in million Rupiah)



## Ikhtisar Operasional

### Operational Highlights

Uraian   Description	Satuan   Unit	2022	2021	2020
<b>Segmen Logistik – Penumpukan</b> Logistic Segment – Storage				
Penumpukan – Warehousing Storage – Warehousing	Ton atau m <sup>3</sup> Ton or m <sup>3</sup>	<b>159.675</b>	144.617	115.956
Penumpukan – Lapangan Storage – Yard	Box	<b>113.897</b>	392.408	477.323
Lift Off-Lift On Bongkar Muat Lift Off-Lift On Stevedoring	Box	<b>216.995</b>	225.524	31.450
<b>Konsolidasi Freight Forwarding</b> Freight Forwarding Consolidation				
1. Freight	Box	<b>898</b>	2.743	9.445
2. Clearance	Box	<b>6.779</b>	4.587	7.131
<b>Transportasi</b> Transportation				
1. Trucking	Box	<b>110.601</b>	114.152	157.548
2. Wingbox	Trip	<b>3.058</b>	4.977	5.435
Segmen Lahan Dermaga Dock Segment	Box	<b>192.484</b>	195.604	198.015
	Teus	<b>298.827</b>	297.577	302.992

## Ikhtisar Saham, Obligasi, Aksi Korporasi

### Highlights of Stocks, Bond, and Corporate Action

MTI bukanlah perusahaan publik sehingga tidak terdapat informasi mengenai ikhtisar pergerakan saham di bursa efek. Selain itu, hingga akhir periode pelaporan tahun 2022, MTI juga tidak pernah melakukan aksi korporasi yang menyebabkan pencatatan saham ataupun obligasi di bursa efek.

MTI is not a public company and therefore there is no information regarding stock movements on any stock exchange. In addition, by the end of the reporting period of 2022, MTI did not conduct any corporate action which resulted in the listing of stocks or bonds on any stock exchange.

**KILAS KINERJA**

LAPORAN MANAJEMEN  
PROFIL PERUSAHAAN  
TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS  
ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
LAPORAN KEUANGAN

**PERFORMANCE OVERVIEW**

MANAGEMENT REPORTS  
COMPANY PROFILE  
BUSINESS SUPPORTING OVERVIEW  
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS  
CORPORATE GOVERNANCE  
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY  
FINANCIAL REPORT

Halaman ini sengaja dikosongkan.  
This page intentionally left blank.



# 2

## Laporan Manajemen

### Management Reports

---

Poin-poin Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang berhasil direalisasikan mayoritas berpusat pada rencana pengembangan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, terutama untuk merealisasikan pelayanan konsolidasi ekspor dan impor.

Most of RKM points that have been realized were centered on collaboration with various parties, especially to consolidate export and import services.







# Roy Leonard

**Komisaris Utama**  
President Commissioner



# Laporan Dewan Komisaris

## Report of the Board of Commissioners

### Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tahun 2022 menjadi tahun pencapaian terbaik bagi Perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Dewan Komisaris melihat bagaimana Direksi dan segenap Insan Perusahaan telah berupaya maksimal untuk mencapai *commercial excellence* sebagai bagian dari rencana jangka panjang MTI.

Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Direksi sepanjang tahun 2022. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Penilaian Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi terutama yang berkaitan dengan aspek operasional dan keuangan. Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022.

Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan ekonomi nasional saat kasus COVID-19 sudah mulai menurun. Penurunan ini sangat erat kaitannya dengan penetrasi program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Aktivitas ekonomi secara nasional mulai berangsur normal dan situasi ini berpengaruh positif terhadap perkembangan industri transportasi dan logistik secara khusus.

Direksi telah bekerja dengan cermat dalam mengelola operasional memanfaatkan situasi ekonomi dan industri yang positif. Sejumlah rencana kerja sama juga telah berhasil terealisasi sehingga mendukung pencapaian laba. Realisasi laba bersih tahun 2022 adalah sebesar Rp85,80 miliar atau 67,38% di atas RKAP yang ditetapkan sebesar Rp51,26 miliar. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian laba tahun 2022 meningkat signifikan 67,42%.

### Our Esteemed Shareholders and Stakeholders

All praise to God Almighty. It was an excellent year in 2022 for the Company for showing its best achievement in the last 3 (three) years. The Board of Commissioners considers the Board of Directors and all personnel have given their best to achieve the commercial excellence as part of MTI's long term plan.

The Board of Commissioners has also carried out its supervisory function over business management carried that the Board of Directors has conducted throughout 2022. The supervisory function by the Board of Commissioners is part of good corporate governance implementation as governed by the prevailing laws and regulations.

### Assessment of the Board of Directors' Performance

The Board of Commissioners assessed the performance of the Board of Directors, especially in terms of operational and financial aspects. The assessment was carried out based on the targets set out in the 2022 Corporate Plan and Budget (RKAP).

It was a national economic revival in 2022 when COVID-19 cases declined. It was primarily due to the Indonesian Government's accelerated vaccination program. National economy started to return to its normal state and this situation has positively influenced the transportation and logistics industry to grow.

The Board of Directors has managed the operation splendidly to gain the momentum of economic and industrial growth. A number of cooperation plans have also been successfully implemented to help the Company gained profits. The net profit in 2022 amounted Rp85.80 billion or 67.38% above the targeted Rp51.26 billion set out in the RKAP. When compared to the previous year, the profit in 2022 increased significantly by 67.42%.

### Mekanisme Pengawasan Atas Implementasi Strategi Perusahaan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham, Dewan Komisaris telah mengawasi strategi dan keputusan yang diambil oleh Direksi pada sepanjang tahun 2022.

Pada tahun 2022, kami telah mengadakan 14 kali rapat internal antar anggota Dewan Komisaris dan 12 kali rapat gabungan dengan Direksi. Agenda dalam setiap rapat membahas mengenai Kinerja Bulanan. Secara khusus, kami telah memberikan rekomendasi mengenai:

1. Program Kerja Audit Tahunan
2. Usulan RKAP 2023
3. Perubahan Anggaran Dasar
4. Usulan Restrukturisasi Organisasi

### Pandangan Atas Prospek Usaha

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini bisa dikatakan dalam posisi yang stabil saat kasus COVID-19 semakin terkendali dan aktivitas ekonomi berangsur normal. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5%-5,3% dan tidak jauh berbeda dari pertumbuhan 2022 sebesar 5,1%. Secara nasional pertumbuhan bisnis logistik akan semakin kuat sejalan dengan keberhasilan pemerintah menangani penyebaran pandemi COVID-19.

Walaupun tahun 2023 diperkirakan ekonomi nasional akan tetap kuat, namun Direksi juga perlu bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Terdapat ancaman kemungkinan adanya resesi keuangan global yang menimpa beberapa negara di dunia. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dapat membawa peluang dan juga tantangan. Perusahaan harus terus memperkuat kapasitas teknologi informasi untuk menjadikan pelayanan logistik lebih terintegrasi dan dapat diandalkan pelanggan, terutama dari hal *track & tracing*.

Dengan berdasarkan asumsi prospek usaha ke depannya, kami menilai bahwa rencana bisnis Perusahaan telah disusun dengan tepat. Perumusan strategi telah sesuai untuk menghadapi tantangan dan kesempatan di tahun mendatang. Kami optimis bahwa target usaha dapat dicapai dan terus mengingatkan Direksi untuk tetap waspada dalam menyesuaikan strategi bisnis dengan dinamika usaha yang terjadi.

### Supervising on the Company Strategy

As a form of accountability to shareholders, the Board of Commissioners has supervised the Board of Directors throughout 2022 concerning corporate strategies and decisions.

In 2022, we have convened in 14 internal meetings among members of the Board of Commissioners and 12 joint meetings with the Board of Directors. Each meeting we discussed the Monthly Performance. Specifically, we have provided recommendations regarding:

1. Annual Audit Program
2. Proposal of RKAP 2023
3. Amendment to the Articles of Association
4. Proposal of Organizational Restructuring

### Views on Business Prospects

Indonesia's current economic situation is considered to be stable because COVID-19 cases are now under control and economic activity has returned to normal. Bank Indonesia estimated that Indonesia's economic growth in 2023 will remain strong between 4.5% and 5.3% and is not much different from 2022 growth of 5.1%. Nationally, the logistics growth will be stronger following the government's success in handling the COVID-19 pandemic.

Even if the national economy in 2023 is estimated to remain strong, the Board of Directors needs to be thoughtful in making decisions. There is a possible threat of global financial recession. On the other hand, information technology trend may also bring opportunities and challenges. The Company must strengthened its information technology to make logistics services more integrated and reliable for customers, especially in terms of *track & tracing*.

Based on business assumptions in the future, we consider the Company's business plan has been prepared appropriately. The formulation of strategy has considered the challenges and opportunities in the coming year. We are optimistic about achieving business target and will remind the Board of Directors to remain vigilant in altering business strategies to adapt with the volatile situation.



## Pandangan Atas Penerapan *Good Corporate Governance*

Kami terus menjalankan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan. Dewan Komisaris menilai, penerapan atas prinsip-prinsip GCG di Perseroan telah dijalankan dengan baik. Kami sangat mengapresiasi bagaimana MTI secara konsisten menjalankan *assessment* GCG secara internal dengan mengandalkan bantuan dari konsultan independen. Skor capaian *assessment* GCG pada tahun 2022 mencapai 92,16 dengan kualifikasi "Sangat Baik". Hasil ini mengindikasikan konsistensi dari kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan setiap tahunnya, mengingat pada tahun 2021 skor GCG mencapai 90,90 dengan kategori "Sangat Baik".

MTI juga terus memperkuat pelaksanaan GCG melalui pedoman internal yang menopang *soft structure* GCG. Salah satu upaya tersebut adalah melalui kepemilikan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan juga pemutakhiran pedoman dalam Surat Keputusan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor: HK.48/20/1/1/MTI-2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di di Lingkungan PT Multi Terminal Indonesia, tertanggal 20 Januari 2021. Upaya Perusahaan dalam terus memperbaiki sejumlah pedoman internal menjadi sebuah dasar bagi setiap insan MTI untuk memiliki integritas kuat dalam menjalankan usaha secara bertanggung jawab dan terbebas dari risiko benturan kepentingan, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan suap.

Kami tentunya berharap agar kinerja positif dari penerapan GCG yang telah berjalan pada tahun 2022 dapat terus ditingkatkan dan dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Tentunya sebagai Dewan Komisaris kami akan terus mengawasi untuk memastikan penerapan nilai-nilai GCG secara maksimal di setiap proses usaha.

## Penilaian Terhadap Kinerja Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Pada praktiknya penerapan GCG tidak terlepas dari mekanisme *check and balance* terutama yang berkaitan dengan hal material. Komite di bawah Dewan Komisaris juga turut andil dalam memberikan pandangan mereka akan setiap isu penting yang harus diperhatikan oleh Dewan Komisaris.

## Views on the Implementation of *Good Corporate Governance*

We have carried out our function as the Board of Commissioners, supervising the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles within the Company. The Board of Commissioners assessed that the Company has implemented the GCG principles splendidly. We really appreciate how MTI has been consistent in making internal assessments of its GCG practice with the help of independent consultant. The GCG assessment score in 2022 reached 92.16 and considered to be "Very Good". This indicates how the Company remains consistent on the quality of its GCG implementation every year, considering that in 2021 the GCG score was 90.90 and also considered to be "Very Good".

MTI continues to strengthen its GCG implementation through internal guidelines that support the GCG soft structure. The Company has obtained the ISO 37001:2016 of Anti-Bribery Management System and updated the guidelines through the Decree of the Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia Number: HK.48/20/1/1/MTI-2021 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Multi Terminal Indonesia, dated January 20, 2021. The Company's efforts to update its internal guidelines have become the basis for every employee to have strong integrity in running the business responsibly and free from the risk of conflicts of interest, especially those related to corruption and bribery.

We certainly hope that the positive performance of GCG implementation in 2022 can continue to be improved into the following years. Of course, as the Board of Commissioners, we will continue to supervise to ensure the GCG values are implemented consistently in every business process.

## Assessment of the Performance of Committees Under the Board of Commissioners

In practice, the implementation of GCG cannot be separated from check and balance, especially those related to material issues. Committees under the Board of Commissioners also participates in providing their views on important issues for the Board of Commissioners to focus on.

Saat ini komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Kami menilai bahwa kinerja kedua komite dalam mendukung pengawasan oleh Dewan Komisaris sudah baik.

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya dalam mengawasi proses pengendalian internal dan memastikan Perusahaan memenuhi proses audit yang memadai. Komite Audit telah mengadakan 10 kali rapat untuk memantau kepatuhan Perusahaan terdapat hukum yang berlaku Komite Manajemen Risiko dan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang menjalankan fungsi Audit Internal juga turut hadir dalam beberapa rapat.

Komite Audit juga terus berperan aktif dalam memberikan rekomendasi dan tanggapan, antara lain mencakup:

1. Telaah Laporan Keuangan Bulanan
2. Telaah Laporan Keuangan Triwulan
3. Telaah Laporan Keuangan Semesteran
4. Telaah Laporan hasil Audit KAP
5. Telaah Laporan atas Audit Khusus Dekom
6. Menyiapkan Laporan Tahunan
7. Menyiapkan Rencana Kerja Tahu 2023

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris terkait dengan mengidentifikasi, memetakan, menganalisis, dan memitigasi risiko atas seluruh proses bisnis Perusahaan. Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 10 kali rapat. Komite Manajemen Risiko telah melakukan penilaian terhadap penanganan risiko usaha dan memberikan rekomendasi yang tepat dalam memitigasi risiko.

Secara keseluruhan, para komite telah menunjukkan performa optimal dalam melakukan tinjauan yang seksama terhadap aktivitas bisnis Perseroan secara keseluruhan. Temuan-temuan yang diidentifikasi telah ditindaklanjuti dan menjadi rekomendasi dalam pengawasan di tahun mendatang.

### **Pandangan Terkait Efektivitas Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Perusahaan memanfaatkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) untuk melindungi diri dari pelanggaran dan kecurangan. Selaku Dewan Komisaris, kami terlibat secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan WBS. Penerapan WBS didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor HK.48/2/11/1/MTI-2021 tentang Kebijakan Pelaporan Dugaan Penyimpangan dan saat ini masih dikelola secara terintegrasi dengan Induk Perusahaan dari PT Pelindo Solusi Logistik yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang penerapannya sejalan dengan program Pelindo Bersih.

The committees under the Board of Commissioners are the Audit Committee and the Risk Management Committee. We assessed performance of the two committees in terms of their assistance with our supervision and considered that the two have done a great job.

Throughout 2022, the Audit Committee has monitored the internal control process and ensured the Company to meet the standard audit process. The Audit Committee has held 10 meetings to monitor the Company's compliance with prevailing laws. The Risk Management Committee and the Internal Supervisory Unit (SPI) which carry out the Internal Audit function were also present at several meetings.

The Audit Committee also gave recommendations and responses in terms of:

1. Monthly Financial Reports
2. Quarterly Financial Reports
3. Semester Financial Reports
4. KAP audit
5. Special Audit as requested by the Board of Commissioners
6. Annual Reports
7. 2023 Work Plan

The Risk Management Committee was formed to assist the Board of Commissioners in identifying, mapping, analyzing and mitigating risks for all of the Company's business processes. During 2022, the Risk Management Committee held 10 meetings. The Risk Management Committee has assessed business risk management and provided appropriate recommendations for mitigating risks.

Overall, the committees have demonstrated excellent performance in reviewing the Company's activities. The findings have been followed up and became part of monitoring recommendations in the coming year.

### **Views of Violation Reporting System**

The Company utilizes the Whistleblowing System (WBS) to protect from violations and fraud. As the Board of Commissioners, we have been involved in supervising the WBS. The WBS is managed based on the Decree of the Board of Directors Number HK.48/2/11/1/MTI-2021 concerning the Alleged Deviation Report and currently the system is managed by the parent company of PT Pelindo Solusi Logistik, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and the implementation is in line with the Clean Pelindo program.

Selama tahun 2022, tidak terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS dan kami mengapresiasi semua insan Perseroan akan keberhasilan tersebut. Akan tetapi, tentu saja kami terus mengingatkan semua insan Perusahaan untuk terus mempertahankan sikap bertanggung jawab.

There were no reports of violations submitted via WBS in 2022 and we applaud all personnel for this. We will continue to remind all personnel to walys be responsible for their action.

### Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2022 terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris yaitu pada tanggal 14 Maret 2022 dan pada tanggal 26 April 2022. Pergantian tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pemegang saham yang keduanya telah disahkan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia. Berikut disampaikan kronologi susunan Dewan Komisaris pada tahun 2022 dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022.

### Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners

In 2022 there were several changes in the composition of the Board of Commissioners on March 14 and April 26 of 2022. These changes were all made based on the instructions of shareholder and have been ratified through Circular Resolutions of Shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT Multi Terminal Indonesia. The following is the chronology of the composition of the Board of Commissioners in 2022 and the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022.

### Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2022

### Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners throughout 2022

Periode 1 Januari–14 Maret 2022 From January 1 until March 4, 2022	Periode 14 Maret–26 April 2022 From March 14 until April 26, 2022	Periode 26 April–31 Desember 2022 From April 26 until December 31, 2022
<b>Ogi Rulino</b> Komisaris Utama President Commissioner	<b>Ogi Rulino</b> Komisaris Utama President Commissioner	<b>Roy Leonard</b> Komisaris Utama President Commissioner
<b>Edison Simanjuntak</b> Komisaris Commissioner	<b>Edison Simanjuntak</b> Komisaris Commissioner	<b>Edison Simanjuntak</b> Komisaris Commissioner
<b>Buyung Lalana</b> Komisaris Commissioner	<b>Buyung Lalana</b> Komisaris Commissioner	<b>Buyung Lalana</b> Komisaris Commissioner
<b>Solikhin</b> Komisaris Commissioner	<b>Sahat Martin Philip Sinurat</b> Komisaris Independen Independent Commissioner	<b>Sahat Martin Philip Sinurat</b> Komisaris Independen Independent Commissioner

### Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

### Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Roy Leonard	Komisaris Utama President Commissioner	Diangkat menjadi Komisaris Utama MTI berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/01/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia tanggal 26 April 2022.  He was appointed as the President Commissioner of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/03/01/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia dated April 26, 2022.
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa melalui RUPS Nomor KP.03/14/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dan No. HK. 566/01/19/KPM.TPK-20 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 14 Juli 2020.  He was appointed as a Commissioner of MTI based on Resolutions of the General Meeting of Shareholders Outside the GMS (Circular GMS) Number KP.03/14/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 and No. HK. 566/01/19/KPM.TPK-20 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners dated July 14, 2020.

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Buyung Lalana	Komisaris Commissioner	<p>Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di luar RUPS No. SK.03 /27/12/2/PBI/UT/P/1/PII-17 dan No. HK.566/03/15/KPM.Tpk.17 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 27 Desember 2017.</p> <p>He was appointed as a Commissioner of MTI based on the Resolutions of General Meeting of Shareholders Outside the GMS (Circular GMS) No. SK.03 /27/12/2/PBI/UT/P/1/PII-17 and No. HK.566/03/15/KPM.Tpk.17 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners dated December 27, 2017.</p>
Sahat Martin Philip Sinurat	Komisaris Independen Independent Commissioner	<p>Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia Nomor SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/02/02/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia tanggal 14 Maret 2022.</p> <p>He was appointed as a Commissioner of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia Number SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/02/02/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia dated March 14, 2022.</p>

### Penutup dan Apresiasi

Tahun 2022 telah berhasil dilalui dengan baik dengan sejumlah pencapaian penting yang menumbuhkan kinerja usaha. Kami sangat mengapresiasi jajaran Direksi serta semua karyawan yang telah memberikan komitmen terbaik untuk kemajuan Perusahaan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan yang selalu mendukung upaya Perusahaan untuk terus maju menjadi entitas usaha bernilai tinggi demi kemajuan kita semua.

### Penutup dan Apresiasi

Tahun 2022 telah berhasil dilalui dengan baik dengan sejumlah pencapaian penting yang menumbuhkan kinerja usaha. Kami sangat mengapresiasi jajaran Direksi serta semua karyawan yang telah memberikan komitmen terbaik untuk kemajuan Perusahaan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan yang selalu mendukung upaya Perusahaan untuk terus maju menjadi entitas usaha bernilai tinggi demi kemajuan kita semua.

**Atas nama Dewan Komisaris,**  
 On Behalf of the Board of Commissioners,



**Roy Leonard**  
 Komisaris Utama  
 President Commissioner









# Gunta Prabawa

**Direktur Utama**  
President Director



# Laporan Direksi

## Report of the Board of Directors

### Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Tahun 2022 merupakan tahun kebangkitan bagi perekonomian nasional dan industri secara keseluruhan setelah program vaksinasi COVID-19 sukses menurunkan angka kasus. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Perusahaan mampu memanfaatkan situasi yang positif dan meningkatkan kinerja usaha. Ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan dan bersama dengan ini, perkenankan kami sebagai Direksi menyampaikan Laporan Direksi dalam mengelola Perusahaan pada tahun 2022.

### Peran Direksi Dalam Proses Penentuan Strategi Usaha

Tentunya jika berbicara mengenai rencana jangka panjang, MTI sudah memiliki RJPP Perusahaan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Dengan berdasarkan RJPP untuk mempersiapkan strategi usaha setiap tahunnya, sebagai Direksi MTI, kami bekerja sama dengan jajaran Manajemen untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang juga dibantu dengan arahan dari Dewan Komisaris. Perumusan ini dilakukan sebelum penentuan RKAP Perusahaan untuk tahun berjalan.

Proses penentuan strategi berjalan secara terus-menerus yang dipenuhi dengan sejumlah telaah dan evaluasi dari sisi perencanaan, target, dan manajemen biaya. Proses telaah secara berjenjang dilakukan oleh tim terkait untuk meningkatkan kualitas dari strategi usaha. Direksi terlibat secara langsung dalam proses ini terutama yang berkaitan dengan analisa ekonomi dan industri, serta penentuan strategi operasional dan keuangan yang mempengaruhi pengendalian biaya dan pencapaian target.

Selain proses rutin penentuan strategi melalui RKAP, Direksi juga terlibat dalam proses pengembangan yang bersifat khusus. Strategi pengembangan disusun berawal dari arahan Pelindo Group yang mendapatkan instruksi khusus dari Negara terkait dengan visi dan misi nasional mewujudkan "Poros Maritim Dunia".

Dalam tingkat strategis, penyusunan strategi dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan dan target kerja sama serta investasi untuk pengembangan usaha. Hasilnya kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan Manajemen

### Our Esteemed Shareholders and Stakeholders

The national economy and industry have fully revived in 2022 after the successful COVID-19 vaccination program in reducing the number of cases. We are very grateful to God Almighty because the Company was able to take advantage of the positive situation and improve business performance. This is a proud achievement and along with this, please allow us as the Board of Directors to submit our brief report in managing the Company throughout 2022.

### The Role of the Board of Directors in Determining Business Strategy

When talking about long term plans, MTI has prepared the RJPP beforehand. The RJPP becomes the basis to prepare business strategies every year and as the Board of Directors, we work together with the Management Team to formulate strategies and policies with the help from the Board of Commissioners. This formulation is carried out before determining the Company's RKAP for the current year.

The process in determining strategy runs continuously through reviews and evaluations in terms of planning, targets, and cost management. The review is done in stages by the relevant team to improve the quality of the strategy. The Board of Directors is directly involved in this process, especially when it comes to economic and industrial analysis and operational and financial strategies that influence cost control and target achievement.

In addition to the routine process of determining strategy through RKAP, the Board of Directors is also involved in special development processes. The strategy starts when there is a direction from the Pelindo Group to take on special instructions from the State regarding the national vision and mission of the "World Maritime Axis".

When it comes to the strategic level, the was based on the actual conditions on the field and targets that have been set covering cooperation and investment of business development. The results are then outlined in

(RKM) Tahun 2022. Setiap poin RKM tentunya juga melibatkan Dewan Komisaris. Rekomendasi dan keputusan Dewan Komisaris menjadi penting sebagai proses *check and balance* dari program pengembangan yang akan dilaksanakan.

### Kinerja Perusahaan

Situasi pada tahun 2022 merupakan peningkatan dari tahun 2021. Ketika tahun 2021 masih dibatasi oleh pandemi COVID-19, situasi pada tahun 2022 secara global maupun nasional sudah sangat membaik. Aktivitas industri, pasar, dan arus pasokan barang mulai menuju normal, kecuali Cina yang masih menetapkan kebijakan total *lockdown* di pertengahan tahun dan juga ketegangan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina. Inflasi masih tetap terjadi karena berbagai faktor, seperti meningkatnya harga BBM, namun secara keseluruhan kondisi pasar sudah semakin stabil. Sejumlah faktor makro ini tentunya juga mempengaruhi kinerja Perusahaan pada tahun 2022.

Dari sisi RKM, Perusahaan berhasil merealisasikan sejumlah poin RKM sebagai berikut:

1. Konsolidasi ekspor di Gudang CDC Banda telah berjalan dengan dukungan sistem informasi;
2. Perpanjangan kontrak Kerjasama Pengelolaan Lini II (*Common Area*) dengan NPCTI dan PT Graha Segara;
3. Restrukturisasi organisasi untuk mendukung kebutuhan transformasi bisnis;
4. Pengembangan aplikasi *inhouse billing* MTI dengan aplikasi Bank Mandiri untuk mengakomodasi pembayaran;
5. Evaluasi efektivitas manajemen audit internal terhadap audit aktivitas, ketaatan prosedur dan efektivitas kegiatan operasional;
6. Pembangunan sistem *track and trace* kargo;
7. Realisasi sistem *Dashboard Performance Indicator* (DPI) yang menampilkan data produksi dan pendapatan;
8. *Local Area Network* (LAN) dan *Wireless Access Point* (WAP) telah tersedia dan beroperasi;
9. Pelayanan Lapangan dan Gudang telah terlaksana sesuai KPI Operasi;
10. Penentuan ToP sudah dituangkan dalam Perjanjian (*Quotation*).

Poin RKM yang belum tercapai adalah target peningkatan pendapatan Gudang, Lapangan, dan FF yang terkendala akibat keterlambatan mulainya proyek dan pendekatan ke mitra baru yang memerlukan waktu. Selain itu poin RKM terkait *Feasibility Study* untuk kerja sama dengan SGL Jepang belum terealisasi karena masih dalam tahap pendalaman bisnis.

Berdasarkan realisasi RKM dan situasi makro, pada tahun 2022 Perusahaan merealisasikan laba bersih sebesar Rp85,80 miliar secara komprehensif. Meningkat 674,29% dibandingkan tahun lalu dan 67,38% di atas

the Management Activity Plan (RKM) for 2022. Each point of the RKM has considered the instruction from the Board of Commissioners. The recommendations and decrees of the Board of Commissioners are important as a check and balance for the program.

### Company performance

The situation in 2022 is better than in 2021. When 2021 was limited by the COVID-19 pandemic, the global and national situation in 2022 has greatly improved. The industry and how the markets have grown, along with the flow of supplies of goods have all returned to normal, except for China when the country implemented a total lockdown mid year and when geopolitical situation intensified because of the war between Russia and Ukraine. Inflation still occurs due to various factors, such as high fuel prices, but in overall the market is now more stable. This macro situation also influenced the Company's performance in 2022.

In terms of RKM, the Company succeeded in realizing most of its points as follows:

1. The CDC Banda Warehouse has information system to support the export consolidation;
2. Extension of the Line II (*Common Area*) Management Cooperation contract with NPCTI and PT Graha Segara;
3. Organizational restructuring to support business transformation;
4. In house billing application with Bank Mandiri for new payment channel;
5. Evaluation of the effectiveness of internal audit management regarding audit activities, compliance with procedures and effectiveness of operational activities;
6. Development of a cargo track and trace system;
7. Installation of *Dashboard Performance Indicator* (DPI) which displays production and income data;
8. Installation of *Local Area Network* (LAN) and *Wireless Access Point* (WAP);
9. Field and Warehouse Services operating in accordance with Operational KPIs;
10. ToP that has been set out in the Agreement (*Quotation*).

Some points of the RKM that have not been achieved are higher Warehouse, Field and FF income and could not be achieved because there was a delay on the start of the project and the Company struggled to find quick settlement with new partners. In addition, another point was related to the *Feasibility Study* of the SGL Japan cooperation because the process is still ongoing.

Based on the RKM and the macro situation in 2022 the Company achieved a comprehensive net income of Rp85.80 billion. Increased by 674.29% compared to last year and 67.38% above RKAP. This is in line with the plans to expand



RKAP. Pencapaian ini sejalan dengan realisasi rencana perluasan dan penguatan segmen bisnis *forwarding* dan optimalisasi pendapatan atas *asset-based* di Pelabuhan Tanjung Priok, Pontianak, dan Palembang. Pencapaian laba juga dipengaruhi perolehan pendapatan atas perubahan tarif dan penyesuaian besaran sharing, serta penjualan alat *Gantry Luffing Crane* (GLC) dan alat bantu lainnya ke PT Pelabuhan Tanjung Priok.

### Kendala dan Upaya Mengatasi Tantangan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor logistik merupakan sektor bisnis dengan tingkat persaingan ketat sehingga mempengaruhi pencapaian pendapatan. Saat ini pendapatan Perusahaan masih dipengaruhi oleh *asset-based business* sedangkan bisnis ini sangat membutuhkan penetrasi pasar yang luas dari dukungan *non-asset-based business*.

Poin-poin RKM Perusahaan mayoritas memang berpusat pada rencana pengembangan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, terutama untuk merealisasikan pelayanan konsolidasi ekspor dan impor. Upaya ini tentunya juga diperkuat dengan investasi dalam memperkuat kapabilitas teknologi informasi Perusahaan.

Teknologi informasi, terutama terkait *track and trace* kargo sangat diperlukan untuk memenangkan hati pelanggan. Kapabilitas ini akan membuat MTI menjadi entitas bisnis yang semakin dipercaya oleh pelanggan.

Di sisi lain, kerja sama dengan berbagai pihak tentunya tidaklah mudah karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran proses kerja sama. Sebagai contoh yaitu poin RKM terkait peningkatan pendapatan Gudang, Lapangan, dan FF yang terkendala akibat keterlambatan mulainya proyek dan pendekatan ke mitra baru yang memerlukan waktu. Situasi ini juga terjadi dengan poin RKM terkait *feasibility study* dengan SGL Jepang yang belum terealisasi karena masih dalam tahap pendalaman bisnis. Dibutuhkan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, terutama untuk kerja sama yang membutuhkan arahan dari Pelindo Group. Kami terus berupaya untuk melakukan pendekatan dan bersikap agresif untuk merealisasikan rencana kerja sama. Walaupun demikian, hasilnya mungkin belum dapat terealisasi di tahun ini, namun sudah dalam proses sehingga diharapkan dapat terlihat di tahun mendatang.

### Prospek Usaha

Tahun 2023 diperkirakan situasi berangsur normal dan tidak lagi terbatas oleh pandemi COVID-19. Ekonomi nasional akan tetap melanjutkan performa positifnya sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

and strengthen the forwarding business segment and optimize asset-based revenues at several Ports including Tanjung Priok, Pontianak, and Palembang. The profit was also influenced by income from changes in tariffs and adjustments to sharing amounts, along with sales of Gantry Luffing Crane (GLC) equipment and other equipment to PT Pelabuhan Tanjung Priok.

### Obstacles and Efforts to Overcome Challenges

The level of competition is tight in the logistics sector and without a doubt it affected the revenue achievement. The Company still relies on the asset-based business and it really needs the support of vast market penetration from non-asset-based business.

Most of our RKM points are centered on collaboration with various parties, especially to consolidate export and import services. This is of course strengthened by investment to strengthen the Company's information technology.

Information technology, especially for cargo track and trace, is critical to win customers. This will make MTI a business entity trusted by customers.

On the other hand, collaboration is not going to be easy because it needs to consider many factors that influence its success. For example, the RKM of higher income from Warehouse, Field and FF are obstructed by delays in starting projects and time in approaching new partners. This is true when seen on RKM related to the feasibility study with SGL Japan that could not be realized because of the long process. Intensive communication is required, especially in terms of collaboration that requires the approval from Pelindo Group. We continue to be aggressive in making a successful cooperation. The results may not be realized this year, but it is already in motion and hopefully we can see the result in the near future.

### Business Prospect

It is estimated that in 2023 the situation will become normal and no longer be limited by the COVID-19 pandemic. The national economy will continue its positive performance in line with the increase in mobility from the community after the Community Activity Restrictions (PPKM) policy is revoked along with the improving business prospects, inflows of Foreign Investment (PMA), and completion of National Strategic Projects (PSN).

Walaupun cenderung positif, Perusahaan tetap perlu mewaspadai ancaman kemungkinan adanya resesi keuangan global. Di sisi lain, situasi positif juga mendorong Perusahaan untuk terus memperkuat kapasitas teknologi informasi sebagai *backbone* layanan operasional. Perusahaan harus terus mengembangkan diri sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis logistik yang sejalan dengan pemulihan situasi pasca pandemi COVID-19.

Berdasarkan situasi makro yang akan dihadapi Perusahaan, kami telah menyusun RKAP 2023 dengan strategi yang menekankan kepada sejumlah hal yaitu:

- Kerja sama strategis dengan mitra potensial untuk peningkatan layanan;
- Sentralisasi pengelolaan penjualan logistik yang didukung oleh *Customer Relationship Management (CRM)*;
- Peningkatan ketersediaan dan peremajaan alat bongkar muat;
- Pengembangan *Logistic Control Tower*;
- Sentralisasi pengendalian penerbitan nota untuk kegiatan *non-asset based (freight forwarding)*;
- Penanganan piutang secara komprehensif dalam rangka meminimalisir piutang macet.

Sejumlah rencana tersebut akan menjadi dasar bagi Perusahaan untuk mengembangkan poin-poin RKM tahun 2023. Diharapkan nantinya akan membawa Perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya mencapai pendapatan usaha Rp653,613 miliar, laba bersih Rp56,172 miliar, EBITDA Rp97,242 miliar, dan *operating ratio* 89,80%.

#### Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kami terus mendorong segenap Insan MTI untuk memprioritaskan praktik GCG untuk mewujudkan usaha yang akuntabel. Secara konsisten Perusahaan terus melaksanakan prinsip-prinsip fundamental GCG. Setiap organ tata kelola juga telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan regulasi. Perusahaan terus berjalan dengan berpedoman pada perangkat kebijakan internal yang memperkuat *soft structure* GCG untuk membawa pengelolaan usaha dengan tingkat kepatuhan yang tinggi *'beyond governance'*.

#### Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kami tidak pernah melupakan tanggung jawab Perusahaan dalam hal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kami percaya bahwa perkembangan usaha tidaklah dapat dipisahkan dari dukungan para pemangku kepentingan, terutama masyarakat sekitar area operasi. Kehadiran Perusahaan harus membawa manfaat positif bagi perkembangan kehidupan mereka dalam berbagai hal.

The trend is positive, but the Company still need to be aware of the global recession. On the other hand, this situation also pushes the Company to strengthen its information technology as a backbone for the operation. The Company must continue to grow to anticipate the logistics trend that has recovered from the COVID-19 pandemic.

From what the Company will face, we have prepared the 2023 RKAP with strategies that are focused on a number of things including:

- Strategic collaboration with potential partners to improve service;
- Centralized logistics sales management supported by Customer Relationship Management (CRM);
- Increasing the availability and improving the stevedoring equipment;
- Logistics Control Tower;
- Centralized control of invoice issuance for non-asset based activities (freight forwarding);
- Handling receivables comprehensively to minimize bad debts.

These plans will become the basis for the Company to prepare RKM points in 2023. Hopefully it will lead the Company to improve its performance to reach operating revenues of Rp653.613 billion, net profit of Rp56.172 billion, EBITDA of Rp97.242 billion, and an operating ratio of 89.80%.

#### Good Corporate Governance

We continue to push all personnel to prioritize GCG practices to make our business accountable. The Company continues to implement the fundamental principles of GCG. Each governance organ has also carried out its duties by following the regulations. The Company continues to operate under the guidance of internal policies as tools that strengthen the GCG soft structure for achieving a high level of compliance *'beyond governance'*.

#### Corporate Social Responsibility

We never forget the Company's responsibility in terms of Social and Environmental Responsibility (TJSL). We believe that business development cannot be separated from the support of stakeholders, especially the community around the operational area. The presence of the Company must benefits their lives in any way possible.

Secara keseluruhan, Perusahaan telah melaksanakan sejumlah program TJSJ untuk 4 (empat) bidang yaitu pendidikan, lingkungan, kesehatan, serta kemasyarakatan dan sosial. Program-program tersebut telah menghabiskan biaya total sebesar Rp538.988.750.

Program TJSJ yang dilakukan MTI juga berkolaborasi dengan Pelindo Group, namun juga ada beberapa program yang kami lakukan atas inisiasi sendiri. Salah satu program tersebut adalah program pemeriksaan penglihatan untuk anak-anak di jenjang Sekolah Dasar yang masuk dalam kategori tidak mampu. Pemeriksaan ini juga berfungsi untuk mendeteksi secara dini apabila mereka memiliki kekurangan buta huruf. Dalam kesempatan ini Perusahaan juga memberikan kaca mata baca secara cuma-cuma. Program ini diselenggarakan setelah Perusahaan berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka. Metode ini merupakan salah satu cara yang telah dilakukan secara konsisten untuk memastikan program TJSJ tepat sasaran dan kami akan terus melakukannya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat melalui program TJSJ yang bermanfaat.

### Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Pada tahun 2022 terdapat pergantian susunan Direksi yaitu pada tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan keputusan pemegang saham yang telah disahkan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia. Berikut disampaikan kronologi susunan Direksi pada tahun 2022 dan per 31 Desember 2022.

#### Kronologi Perubahan Susunan Direksi Sepanjang Tahun 2022

Periode 1 Januari–1 Juni 2022 From January 1 until June 4, 2022	Periode 1 Juni–31 Desember 2022 From June 1 until December 31, 2022
<b>Gunta Prabawa</b> Direktur Utama President Director	<b>Gunta Prabawa</b> Direktur Utama President Director
<b>Ruri Indrasari Rachmaputri</b> Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director	<b>Ruri Indrasari Rachmaputri</b> Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director
<b>Budi Priyanto</b> Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	<b>Budi Azmi</b> Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director

#### Susunan Direksi per 31 Desember 2022

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Gunta Prabawa	Direktur Utama President Director	Diangkat menjadi Direktur Utama Sementara Waktu Sampai Dengan Adanya Penetapan Direktur Utama Definitif di MTI berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MTI No. KP.03/19/2/1/MTA/UT/PLI-21 dan No. HK.566/01/12/KPM.TPK-21 tanggal 19 Februari 2021.  He was appointed as the Ad Interim President Director until the Definitive President Director was determined at MTI based on Shareholders' Resolution Letter through the Circular General Meeting of Shareholders of PT MTI No. KP.03/19/2/1/MTA/UT/PLI-21 and No. HK.566/01/12/KPM.TPK-21 dated February 19, 2021.

#### Composition of the Board of Directors as of December 31, 2022

The Company has conduct a number of TJSJ programs in education, environment, health, and community and social affairs. These programs costed a total of Rp538,988,750.

The TJSJ program was also conducted in collaboration with the Pelindo Group, but there are others that we carry out on our own initiative. One is a vision screening for disadvantaged children at elementary. It also functions as an early detection if they are suffering from illiteracy. On this occasion the Company also provided free reading glasses. This program was conducted after the Company communicated with the locals to find what they need. We have been using this method to ensure that the TJSJ program is right on target and we will continue to maintain good relations with the local community through impactful TJSJ program.

### Changes in the Composition of Members of the Board of Directors

In 2022 the composition of the Board of Directors was changeed on June 1, 2022, as instructed by shareholders and it has been ratified through a Circular Resolution of Shareholders outside the General Meeting of Shareholders of PT Multi Terminal Indonesia. The following is the chronology in 2022 and as of December 31, 2022.

#### Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors throughout 2022



Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ruri Indrasari Rachmaputri	Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director	<p>Diangkat menjadi Direktur Operasi MTI berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MTI No. KP.03/3/II/1/MTA/UT/ PL.II-2020 dan No. HK.566/03/01/KPM.TPK20 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia tanggal 3 November 2020.</p> <p>She was appointed as the Operation Director of MTI based on Shareholders' Resolutions through the Circular General Meeting of Shareholders of PT MTI No. KP.03/3/II/1/MTA/UT/PL.II-2020 and No. HK.566/03/01/KPM.TPK20 concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia dated November 3, 2020.</p>
Budi Azmi	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	<p>Diangkat menjadi Direktur Keuangan dan SDM MTI berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/12/KP.TPK-22 tanggal 01 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia.</p> <p>He was appointed as the Finance and HR Director of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566 /03/12/KP.TPK-22 dated June 1, 2022, concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia.</p>

### Penutup dan Apresiasi

Sebagai penutup dari laporan kami selaku Direksi yang mengelola MTI pada tahun 2022, perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan serta kepercayaan yang diberikan. Kami juga memberikan apresiasi kepada karyawan atas kerja keras dan komitmen dalam menjaga kinerja MTI untuk tetap positif dan terus bertumbuh. Perusahaan memiliki peran krusial untuk kepentingan industri nasional dan bersama-sama mari kita wujudkan visi besar MTI untuk pertumbuhan bangsa ini.

### Closing and Appreciation

To close our report as the Board of Directors that manages MTI in 2022, allow us to thank the shareholders, Board of Commissioners, and all stakeholders for all the support and trust. We applaud all employees for their hard work and commitment in maintaining MTI's performance to remain positive and continue to grow. The Company's role is crucial for the national industry and together we can achieve MTI's major vision for the growth of this nation.

**Atas nama Direksi,**  
On Behalf of the Board of Directors,



**Gunta Prabawa**  
Direktur Utama  
President Director



# Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2022 PT Multi Terminal Indonesia

## Accountability Statement from the Board of Commissioners and Board of Directors on the Accountability of the 2022 Annual Report of PT Multi Terminal Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Multi Terminal Indonesia tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Multi Terminal Indonesia for 2022 has been presented in its entirety and we are fully responsible for the validity of the contents of this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2023 | May 2023

### Dewan Komisaris Board of Commissioners



**ROY LEONARD**  
Komisaris Utama  
President Commissioner



**EDISON SIMANJUNTAK**  
Komisaris  
Commissioner



**BUYUNG LALANA**  
Komisaris  
Commissioner



**SAHAT MARTIN PHILIP SINURAT**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner



Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Multi Terminal Indonesia tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Multi Terminal Indonesia for 2022 has been presented in its entirety and we are fully responsible for the validity of the contents of this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2023 | May 2023

**Direksi**  
Board of Directors



**GUNTA PRABAWA**  
Direktur Utama  
President Director



**RURI INDRASARI RACHMAPUTRI**  
Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis  
Acting Commercial and Business Development Director



**BUDI AZMI**  
Direktur Keuangan dan SDM  
Finance and HR Director





PELINDO  
SOLUSI LOGISTIK  
MTI MULTI SCM

PT. MULTITRAK

16

13

20

PELINDO  
SOLUSI LOGISTIK  
MTI MULTI SCM



# 3

## Profil Perusahaan

### Company Profile

---

Perusahaan senantiasa memberikan layanan logistik terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas rantai pasok secara nasional.

The Company strives in providing an integrated logistics service in making the national supply chain more effective.





# Informasi Umum

## General Information

### Nama Perusahaan

Company Name

**PT Multi Terminal Indonesia/PT MTI**

### Badan Hukum Perusahaan

Legal Entity

Perseroan Terbatas

Limited Liability Company

### Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

1. Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 15 Februari 2002 dengan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-06123.HT.01.01. TH.2002 tanggal 11 April 2002.
2. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu berdasarkan Akta Notaris No. 85 tanggal 14 Agustus 2008 di hadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H. Selanjutnya dilakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 9 Februari 2012 di hadapan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 27 Maret 2020 di hadapan Notaris N.M Dipo Nusantara Pua UPA, S.H. Perubahan atas Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0034834.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 11 Mei 2020.

### Modal Dasar

Authorized Capital

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham melalui RUPS Sirkuler Nomor SK.03/28/2/2/PBAN/UTMA/PLND-22 & Nomor HK.566/01/14/KPM.TPK-22 tentang Pengalihan Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam Perseroan kepada PT Pelindo Solusi Logistik. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menerima dan menyetujui pengalihan seluruh saham dalam Perseroan sebanyak 34.283.150 (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh) lembar saham yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada PT Pelindo Solusi Logistik dan 1% (satu persen) kepada Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok.

### Bidang Usaha

Line of Business

Pelayanan Jasa Logistik

Logistics Services

### Tanggal Pendirian

Date of Establishment

15 Februari 2002

February 15, 2002

### Kepemilikan Saham

Shares Ownership

1. PT Pelindo Solusi Logistik : 99%
2. Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok Maritime Employees Cooperative (KOPEGMAR) of Tanjung Priok: 1%

1. Deed of Establishment Number 15 dated February 15, 2002, with Notary Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., ratified by the Minister of Justice and Human Rights in Decree No. C-06123.HT.01.01. TH. 2002 dated April 11, 2002.

2. The Company's Articles of Association has been amended several times, namely based on Notarial Deed No. 85 dated August 14, 2008, before Notary Herdimansyah Chaidirsyah, S.H. Then, the Articles of Association was amended based on the Notarial Deed No. 24 dated February 9, 2012, before Notary Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., and the latest amendment based on the Notarial Deed No. 2 dated March 27, 2020, before Notary N.M Dipo Nusantara Pua UPA, S.H. The amendment to the Articles of Association has been ratified by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU-0034834.AH.01.02. of 2020, May 11, 2020.

Based on Shareholders' Resolutions through the Circular GMS Number SK.03/28/2/2/PBAN/UTMA/PLND-22 and Number HK.566/01/14/KPM.TPK-22 regarding the Transfer of Shares of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in the Company to PT Pelindo Solusi Logistik. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) accepted and approved the transfer of all shares in the Company totaling 34,283,150 (thirty-four million two hundred eighty-three thousand one hundred fifty) shares representing 99% (ninety-nine percent) of the total issued and fully paid shares in the Company to PT Pelindo Solusi Logistik and 1% (one percent) to the Maritime Employees Cooperative of Tanjung Priok.

## Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

### Issued and Fully Paid Capital

Telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri dengan cara sebagai berikut:

#### 1. PT Pelindo Solusi Logistik

Sebanyak 34.283.150 (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp17.141.575.000,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;

#### 2. Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok

Sebanyak 346.289 (tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh Sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp173.144.000 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mewakili 1% (satu persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

It has been fully paid to the Company by each founder in the following manner:

#### 1. PT Pelindo Solusi Logistik

34,283,150 (thirty four million two hundred eighty three thousand one hundred and fifty) shares with a total nominal value of Rp17,141,575,000.00 (seventeen billion one hundred forty one million five hundred and seventy five thousand Rupiah), representing 99% (Ninety nine percent) of the total issued and fully paid shares in the Company;

#### 2. The Maritime Employees Cooperative of Tanjung Priok

as many as 346,289 (three hundred forty six thousand two hundred eighty nine) shares with a total nominal value of Rp173,144,000 (one hundred seventy three million one hundred and forty four thousand Rupiah), representing 1% (one percent) of the total issued and fully paid shares in the Company.

## Wilayah Kerja

### Line of Business

Wilayah kerja MTI mencakup Jakarta, Jawa Tengah (wilayah Semarang), Jawa Timur (wilayah Surabaya), Bali, Sumatera (Padang), Kalimantan (Pontianak), Natuna, dan Kepulauan Bangka Belitung. MTI's working areas cover Jakarta, Central Java (Semarang area), East Java (Surabaya area), Bali, Sumatera (Padang), Kalimantan (Pontianak), Natuna and Bangka Belitung Islands.

## Total Pekerja

### Total Employees

702 orang (pekerja organik dan non-organik)  
702 people (organic and non-organic)

## Kantor Pusat

### Head Office

Jalan Pulau Payung No. 1,  
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310  
customercare@multiterminal.co.id  
Telp / Phone: +62 21 291 104000 (Call center)  
www.mtimultiscm.co.id



## Sejarah Perusahaan Company History

PT Multi Terminal Indonesia adalah anak perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik, *sub holding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada kluster bisnis *Logistics & Hinterland Development* yang berdiri sejak 29 September 2021. MTI didirikan pada tanggal 15 Februari 2002 dengan komposisi saham 99% dimiliki oleh PT Pelindo Solusi Logistik dan 1% oleh Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) Tanjung Priok.

Sejak berdirinya, MTI memiliki 3 (tiga) unit bisnis yaitu Terminal Multipurpose, Terminal Petikemas, dan Logistik. Pada tahun 2015, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan restrukturisasi bisnis di lingkungan anak perusahaan dan fokus MTI adalah pada bisnis logistik. Sejalan dengan perubahan arah bisnis, MTI mengubah logo serta visi, misi, dan nilai korporasi.

Saat ini MTI mengoperasikan sejumlah kantor cabang dan operasional yang tersebar di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Pontianak, Lampung, Makassar, Jambi. Layanan MTI antara lain mencakup jasa *Freight Forwarding (Sea Freight, Air Freight, Inland Transport (Truck & Rail), Customs Clearance, Halal Logistics, Project Cargo, Warehouse (Cold Storage, Cargo Distribution Center, Integrated Inspection, Export Consolidation), Yard (Open Yard Handling, Lift On/Lift Off, Before & After Behandle Area, Backup Yard)*.

PT Multi Terminal Indonesia is a subsidiary of PT Pelindo Solusi Logistik, a sub-holding of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in the cluster of Logistics & Hinterland Development business, which was established on September 29, 2021. MTI was established on February 15, 2002, with shares ownership of 99% belong to PT Pelindo Solusi Logistik and the rest (1%) belong to the Maritime Employees Cooperative (Kopegmar) of Tanjung Priok.

Since its establishment, MTI operates its 3 (three) business units including Multipurpose Terminals, Container Terminals, and Logistics. In 2015, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) restructured its subsidiaries, and MTI was set to focus on logistics, thus the Company changed its logo, vision, mission, and values.

Currently, MTI operates a number of branches and operational offices across the islands of Jawa, Sulawesi, Sumatera and Kalimantan including Jakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Pontianak, Lampung, Makassar, Jambi. MTI's service covers the Freight Forwarding (Sea Freight, Air Freight, Inland Transport (Truck & Rail), Customs Clearance, Halal Logistics, Project Cargo, Warehouse (Cold Storage, Cargo Distribution Center, Integrated Inspection, Export Consolidation), Yard (Open Yard Handling, Lift On/Lift Off, Before & After Behandle Area, Backup Yard).

## Informasi Perubahan Nama Changes in the Company's Name

Sejak berdirinya hingga akhir periode pelaporan tahun 2022, PT Multi Terminal Indonesia tidak pernah melakukan perubahan nama.

Since its establishment until the end of the reporting period in 2022, PT Multi Terminal Indonesia has never changed its name.



## Bidang Usaha Line of Business

### Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Berdasarkan Keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS 27 Maret 2020, Nomor 2 oleh Notaris N.M Dipo Nusantara Pua UPA, S.H. tentang Perubahan Kegiatan Usaha, dengan uraian sebagai berikut:

- Transportasi;
- Pergudangan;
- Konsolidasi Muatan;
- Penyediaan Ruang Muatan;
- Kepabeanaan;
- Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang terkait sesuai maksud dan tujuan Perseroan.

### Business Activities According to Articles of Association

According to the GMS Resolutions set out in the Deed of GMS Resolutions Statement Number 2, dated March 27, 2020, by Notary N.M Dipo Nusantara Pua UPA, S.H. regarding Changes in Business Activities, the following is the Company's business:

- Transportation;
- Warehousing;
- Payload Consolidation;
- Cargo Space;
- Customs;
- Other related activities according to the Company's purposes and objectives.



## Produk dan Jasa

### Products and Services

#### **CARGO CONSOLIDATION CENTER**

Perseroan mengoperasikan gudang terintegrasi dengan fasilitas lengkap di area Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Panjang (Lampung) dengan pelayanan:

- *Stuffing dan Stripping*
- *Warehouse Storage*
- *Integrated Inspection*
- *Export Consolidation*
- *Cold Storage*
- *Behandle*

#### **CARGO CONSOLIDATION CENTER**

The Company operates an integrated warehouse facilities at Tanjung Priok Port (Jakarta) and Panjang Port (Lampung) and offers the following services:

- *Stuffing and Stripping*
- *Warehouse Storage*
- *Integrated Inspections*
- *Export Consolidation*
- *Cold Storage*
- *Behandles*



#### **CARGO CONSOLIDATION DISTRIBUTION CENTER**

Terdapat fasilitas lapangan untuk penumpukan petikemas yang telah dilengkapi dengan peralatan bongkar muat seperti *Rubber Tired Gantry Crane, Reach Stacker, Side Loader, Forklift, Reach Truck*. Layanan ini tersedia di Jakarta, Pontianak, Palembang, Makassar, Jambi. Terdapat juga *container yard* dalam mendukung kegiatan ekspor, impor, dan domestik.

#### **CARGO CONSOLIDATION DISTRIBUTION CENTER**

There are field to stack containers that have been equipped with stevedoring facilities such as *Rubber Tired Gantry Cranes, Reach Stackers, Side Loaders, Forklifts, Reach Trucks*. The facility is available in Jakarta, Pontianak, Palembang, Makassar, Jambi. There are also container yards to support the export, import, and domestic cargo activities.



#### **SUPPLY CHAIN MANAGEMENT**

Pelabuhan yang dikelola Perseroan dilengkapi dengan fasilitas unggul dengan sistem terintegrasi untuk mendukung layanan logistik berbasis pelabuhan. Perseroan senantiasa menjaga arus produksi dan distribusi barang melalui Manajemen Rantai Pasokan yang unggul dengan layanan *Door to Door, Door to Port, Port to Door*.

#### **SUPPLY CHAIN MANAGEMENT**

The Company operates ports and their facilities through an integrated system to support port based logistics services. The Company carefully operates the flow of production and distribution of goods through Supply Chain Management of *Door to Door, Door to Port, Port to Door* services.



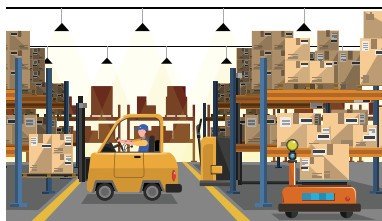
#### **INTEGRATED MULTIMODA TRANSPORT**

Layanan pengiriman barang terintegrasi melalui jalur laut, udara, darat, dan kereta api dari titik penjemputan ke tempat tujuan yang mencakup layanan transportasi (*freight forwarding*), pergudangan, konsolidasi kargo, penyediaan ruang kargo, bea cukai.

#### **INTEGRATED MULTIMODAL TRANSPORT**

An integrated delivery services from the pick-up point to the destination via sea, air, land and train which includes transportation services (*freight forwarding*), warehousing, cargo consolidation and space, and customs clearance.





**HALAL LOGISTIC & COLD STORAGE**

Perseroan mengelola satu-satunya gudang *Cold Storage* seluas 3.600 hektar dan *Open Storage* seluas 20.000 hektar di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

*Cold Storage:*  
Area ini dilengkapi dengan 23 *chamber*. 14 unit *freezer*, 8 unit *chiller*, 1 unit ruangan dingin. Peralatan pendukung yang digunakan adalah *Forklift*, *Pallet*, *Racking System*.

*Open Storage:*  
Area penyimpanan terbuka yang dilengkapi dengan peralatan penanganan kargo kontainer seperti *Reach Stacker*, *Side Loader*, *Forklift*, *Reach Truck*.

**PROJECT CARGO**

MTI menangani kargo bernilai tinggi dan *Out of Gauge* (OOG) untuk pelanggan. Pengelolaan proyek kargo dilakukan secara terintegrasi agar barang tiba dengan selamat dan tepat waktu di tempat tujuan.

Perseroan menangani barang berat dan kargo berukuran besar ke luar negeri dari laut dan darat, baik domestik atau internasional.

**HALAL LOGISTICS & COLD STORAGE**

The Company operates the only *Cold Storage* with the size of 3,600 hectares and an *Open Storage* of 20,000 hectares at the Tanjung Priok Port.

*Cold Storage:*  
This facility holds 23 *chambers*: 14 *freezer* units, 8 *chiller* units, 1 *cold room* unit. Other supporting facilities are *Forklift*, *Pallet*, *Racking System*.

*Open Storage:*  
An open storage area with container cargo handling facilities such as *Reach Stacker*, *Side Loader*, *Forklift*, *Reach Truck*.

**PROJECT CARGO**

MTI handles high value and *Out of Gauge* (OOG) cargo. The Company operates an integrated cargo management to assure the goods arrive at the destination safely and timely.

The Company distributes major goods and large sized cargo abroad through the sea and land, both domestically and internationally.





## Visi, Misi dan Tata Nilai

### Vision, Mission, and Corporate Values

Pada tahun 2015, pemegang saham utama telah melakukan restrukturisasi bisnis di lingkungan anak perusahaan dan fokus MTI adalah bisnis logistik. Sejalan dengan perubahan arah bisnis Perusahaan, MTI melakukan perubahan logo serta visi, misi, nilai perusahaan, *tagline*, dan *website*. Perumusan tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja sembari memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Perubahan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Direksi yang disampaikan pada tanggal 11 Mei 2015 dengan Nomor Surat UM.260 /3/5/ MTI- 2015 perihal usulan *brand*.

Pada tahun 2020 Direksi kembali mengusulkan perubahan logo, visi, misi kepada Komisaris pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor Surat HK.48 /18/11/1/ MTI-2020 perihal Penetapan Logo, Visi, Misi dan Nilai Perusahaan PT Multi Terminal Indonesia.

Pada tahun 2022 pemegang saham menetapkan perubahan logo dengan Keputusan RUPS Sirkuler No.SK/03/22/4/2/ PAPR/DIUT/PLSL-22 dan HK.566/02/19/KPM.TPK 222 tanggal 22 April 2022 perihal Persetujuan Perubahan Logo PT Multi Terminal Indonesia.

Visi, Misi dan Nilai MTI saat ini adalah sebagai berikut:

In 2015, the major shareholder restructured the subsidiaries and MTI is set to focus on the logistics. The new line of business made MTI changed its logo, vision, mission, corporate values, tagline, and website. The preparation involves all relevant parties including the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees with consideration of stakeholders' interests. The Board of Commissioners approved this amendment through the Board of Directors' recommendations on May 11, 2015, with Letter Number UM.260 /3/5/MTI-2015 regarding the brand proposal.

In 2020, the Board of Directors proposed another change to the logo, vision, and mission to the Board of Commissioners on May 27, 2015, with Letter Number HK.48 /18/11/1/MTI-2020 regarding the Logo, Vision, Mission, and Corporate Values of PT Multi Terminal Indonesia.

In 2022, the shareholders determined the new logo through the Circular GMS Resolutions No. SK/03/22/4/2/PAPR/ DIUT/ PLSL-22 and HK.566/02/19/KPM.TPK 222 dated April 22, 2022, regarding the Logo of PT Multi Terminal Indonesia.

Currently, the Vision, Mission, and Corporate Values of PT MTI are:



### **VISI** VISION

**Menjadi perusahaan logistik pelabuhan yang terintegrasi dengan konektivitas rantai pasok.**

Becoming an integrated logistics company with supply chain connectivity.



### **MISI** MISSION

**Memberikan layanan bisnis terbaik dengan meningkatkan efektivitas rantai pasok guna mendukung pertumbuhan usaha dan ekonomi nasional.**

Giving the best service by making the supply chain more effective to support business growth and the national economy.

## TATA NILAI

Dengan terbitnya SE-7/MBU/07/2020 mengenai Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, maka Perusahaan melakukan implementasi dan internalisasi Nilai BUMN AKHLAK ke dalam Tata Nilai Perusahaan dan menerapkannya sebagai Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) sesuai dengan semangat visi dan misi MTI dan menyesuaikan dengan kondisi bisnis logistik dan tantangan dalam menghadapi ketatnya kompetisi bisnis.

Nilai AKHLAK telah disebarluaskan ke seluruh pekerja pada tanggal 13 Desember 2023 melalui Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) dengan Tema “*Team Together Everyone Achieves More*”.

## CORPORATE VALUES

With the issuance of SE-7/MBU/07/2020 regarding Corporate Values (*Core Values*) of Human Resources of State-Owned Enterprises, the Company implements and internalizes the SOE Values of AKHLAK as Corporate Values and a Corporate Culture according to the spirit of MTI’s vision and mission in adapting to the current business situation and challenges in facing the fierce business competition.

The values of AKHLAK has been disseminated to all employees on December 13, 2023, through an internal event called Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi) during the “*Team Together Everyone Achieves More*” session.

# AKHLAK

## AMANAH | TRUSTWORTHY

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.  
Hold fast to the trust given.

- Memenuhi janji dan komitmen | Keep promises and commitments
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan | Responsible for the duties, decisions, and actions carried out
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika | Hold fast to moral and ethical values

## KOMPETEN | COMPETENT

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.  
Continue to learn and develop capabilities.

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah | Improve self-competence to respond to everchanging challenges
- Membantu orang lain belajar | Help others learn
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik | Complete duties with the best quality

## HARMONIS | HARMONIOUS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.  
Care for each other and respect differences.

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya | Respect everyone regardless of their background
- Suka menolong orang lain | Likes to help others
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif | Build a conducive work environment

## LOYAL | LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

- Dedicated and prioritize the interests of the nation and state.
- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara | Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State
  - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar | Willing to sacrifice to achieve a greater goal
  - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika | Obey the leaders as long as it is not against the law and ethics

## ADAPTIF | ADAPTIVE

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.  
Continue to innovate and be enthusiastic about moving or facing changes.

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik | Quickly adapt to be better
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi | Continuously make improvements to keep up with technological developments
- Bertindak proaktif | Act proactively

## KOLABORATIF | COLLABORATIVE

Membangun kerja sama yang sinergis.  
Build strategic alliance.

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi | Provide opportunities for various parties to contribute
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah | Open to working together to generate added value
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama | Mobilize the utilization of various resources for common goals

## Makna dan Sejarah Logo

### Logo Meaning and History



#### Makna Logo

- Mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegrasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut – sebagai urat nadi perekonomian nasional – sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.
- Mengambil huruf P yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.
- Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholders.
- PT Pelindo Solusi Logistik merupakan salah satu *sub holding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada klaster bisnis Logistik & *Hinterland Development* yang berdiri sejak 29 September 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 21 serta berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0061322.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 oleh Notaris Nanda Fauz Iwan SH., M.KN dengan Komposisi Pemegang Saham 0,1% saham oleh PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dan 99,9% Saham oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang kini berubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- Kata “MTI Multi SCM” menandakan PT Multi Terminal Indonesia, salah satu anak perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik yang bergerak di bidang logistik.

#### Logo Meaning

- Taking inspiration from the shape of a busy, congested, and mazy track or route. It describes Pelindo as a provider of integrated port and logistics services that is always active and plays a major role in sea transportation – as the lifeblood of the national economy – as well as supporting the realization of the Indonesian sea toll.
- Taking the letter P, which is the initials of Pelindo and is in the form of a fish, a symbol of the habitat of important sea creatures for Indonesia, a maritime country. This is also a symbol of Pelindo’s commitment to preserving Indonesia’s natural wealth by continuing to contribute to supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.
- The Color blue is the color of the Indonesian sea, which is very close to Pelindo. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism, and devotion. This color also symbolizes Pelindo’s efforts, as part of SOEs, to always provide the best for all stakeholders.
- PT Pelindo Solusi Logistik is one of the sub holdings of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in the Logistics & Hinterland Development business cluster. It was established on September 29, 2021, based on the Company Establishment Deed Number: 21 and based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU- 0061322.AH.01.01. of 2021 dated September 30, 2021 by Notary Nanda Fauz Iwan SH., M.KN with the shareholders composition of 0.1% shares owned by PT Integrasi Logistik Cipta Solusi and 99.9% shares owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which has now changed into PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- The wordmark “MTI Multi SCM” signifies PT Multi Terminal Indonesia, a subsidiary of PT Pelindo Solusi Logistik, which is engaged in logistics.



## Perjalanan Logo Logo's Journey

**2002**



Perusahaan didirikan dengan unit bisnis Terminal Petikemas, Terminal Multipurpose dan Logistik.

The Company was established with business units of Container Terminal, Multipurpose Terminal, and Logistics.

**2013**



Perubahan logo menyesuaikan perubahan identitas logo Pemegang Saham.

Changes to the logo adjusted changes in the identity of the Shareholder's logo.

**2014**



Keputusan RUPS Sirkuler Perubahan Logo & Brand Perusahaan menyesuaikan perubahan bisnis utama dari pelayanan terminal menjadi pelayanan logistik.

Circular GMS Resolution for Changes of the Company Logo & Brand adjusted changes of the main business from terminal services to logistics services.

**2015**



Transformasi logistik perubahan logo serta Visi & Misi.

Logistics transformation of changes of the logo as well as Vision & Mission.

**2020**



Penyesuaian Logo, Perubahan Visi & Misi dan Nilai menyesuaikan RJPP Perusahaan.

Logo Adjustment, Changes in Vision & Mission, and Values adjusted the Company's RJPP.

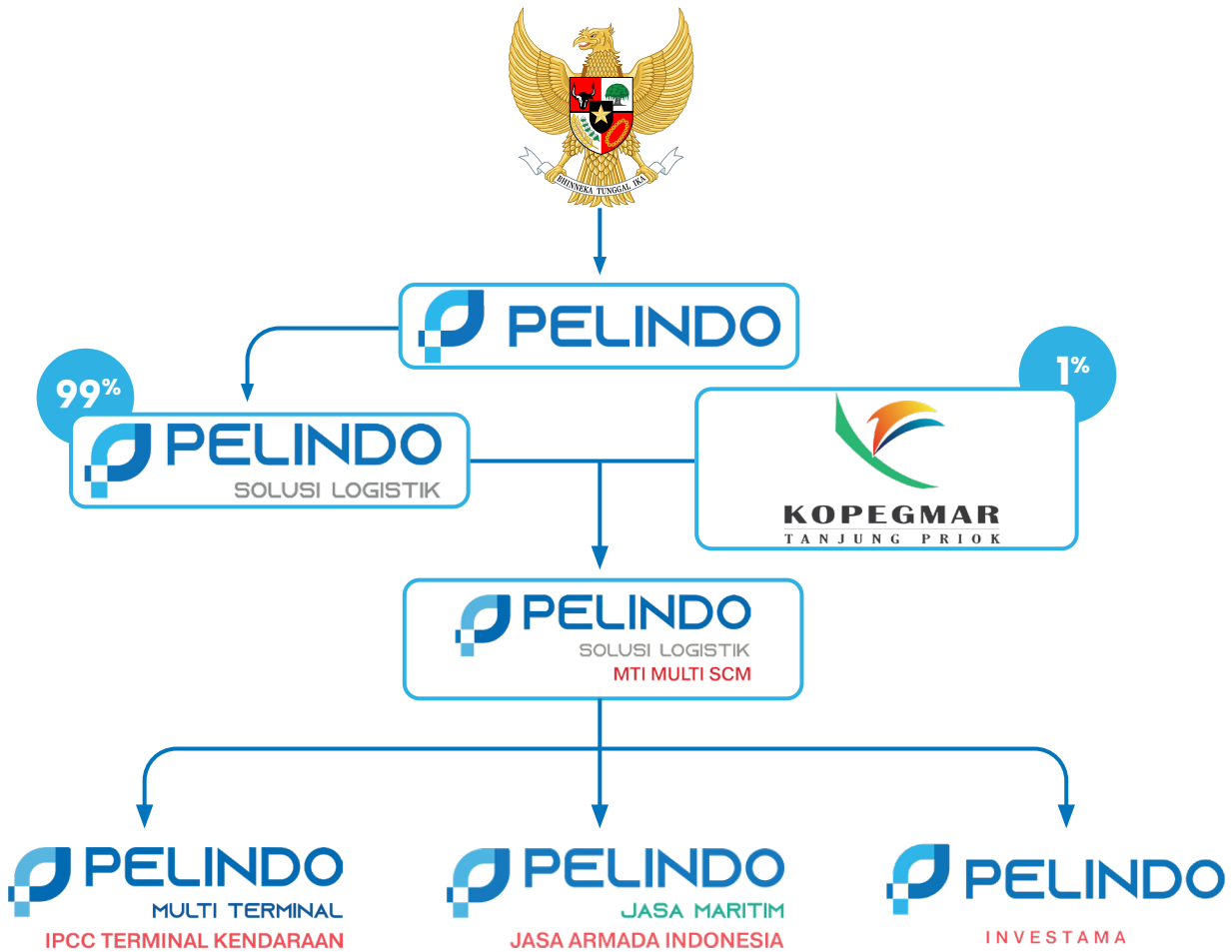
**2022**



Keputusan RUPS Sirkuler Perubahan Logo dengan PT Pelindo Solusi Logistik sebagai *sub-holding*.

Circular GMS Resolution for the Change of Logo with PT Pelindo Solusi Logistik as sub-holding.

## Informasi Saham Stock Information



## Struktur Grup Group Structure

Dalam kluster bisnis Logistik & Hinterland Development, MTI merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik yang merupakan *sub holding* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

In the cluster of the Logistics & Hinterland Development business, MTI is a subsidiary of PT Pelindo Solusi Logistik, a sub holding of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

MTI memiliki 3 (tiga) saham di anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan persentase masing-masing PT Indonesia Kendaraan Terminal sebesar 0,72%, PT Jasa Armada Indonesia Tbk sebesar 0,11%, dan PT Pelabuhan Indonesia Investama sebesar 1%.

MTI owns 3 (three) shares in the subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) including PT Indonesia Kendaraan Terminal by 0.72%, PT Jasa Armada Indonesia Tbk by 0.11%, and PT Pelabuhan Indonesia Investama by 1%.

Bisnis Logistik Logistics Business	Bisnis Hinterland Development Hinterland Development Business
PT Prima Indonesia Logistik (PIL)	PT Prima Pengembangan Kawasan (PPK)
PT Multi Terminal Indonesia (MTI)	PT Menara Maritim Indonesia (MMI)
PT Nusantara Terminal Service (NTS)	PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)

## Sekilas Informasi Pemegang Saham Utama

A Brief of the Major Shareholders

### PT PELINDO SOLUSI LOGISTIK

PT Pelindo Solusi Logistik (selanjutnya dapat juga disebut "PSL") dimiliki oleh Pelindo (99,97%) dan PT Pelabuhan Indonesia Investama (0,03%). PSL didirikan untuk melaksanakan aspek kontribusi dan pengoperasian perjanjian konsesi *New Priok Terminal*, Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan oleh PSL adalah Pengelolaan Pelabuhan, Pengelolaan Proyek, Pengembangan Jalan Tol, Pengembangan Properti.

Hingga akhir tahun 2022, Pemerintah Republik Indonesia memiliki 99,97% saham Pelindo. Dengan demikian, entitas pemilik akhir MTI adalah Pemerintah Republik Indonesia.

PT Pelindo Solusi Logistik (hereinafter referred to as "PSL") is owned by Pelindo (99.97%) and PT Pelabuhan Indonesia Investama (0.03%). PSL was established to contribute in the operation of the New Priok Terminal concession agreement of the Tanjung Priok Port. PSL at the moment is engaged in Port Management, Project Management, Toll Road Development, Property Development.

By the end of 2022, the Government of the Republic of Indonesia owns 99.97% of Pelindo's shares. Therefore, the ultimate owner of MTI is the Government of the Republic of Indonesia.

## Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership of Board of Commissioners and Board of Directors

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham di PT MTI.

As of December 31, 2022, the Board of Commissioners and Board of Directors did not own shares in PT MTI.

## Kepemilikan Saham Masyarakat Kurang Dari 5%

Public Share Ownership of Less Than 5%

Sampai dengan 31 Desember 2022, saham MTI tidak diperdagangkan di bursa efek sehingga tidak terdapat informasi terkait kepemilikan saham masyarakat, termasuk berdasarkan kategori mencakup institusi lokal, institusi asing, individu lokal, ataupun individu asing. Direksi tidak memiliki saham di PT MTI.

As of December 31, 2022, MTI's stocks have not been traded on the stock exchange and therefore there is no information regarding public share ownership, including those by local and foreign institutions and local or foreign individuals.

## Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2022, MTI belum tidak saham dan/atau obligasi di bursa mana pun sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologi pencatatan saham, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa tersebut. Kepemilikan saham Perusahaan 99% oleh PT Pelindo Solusi Logistik dan 1% oleh Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok.

As of December 31, 2022, MTI has not listed shares and/or bonds on any exchange, therefore there is no information regarding the share listing chronology, types of corporate actions, changes in the number of shares, or the name of the stock exchange. The Company's ownership of 99% is owned by PT Pelindo Solusi Logistik, and the rest (1%) is owned by Maritime Employees Cooperative (KOPEGMAR) of Tanjung Priok.

## Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2022, MTI tidak mencatatkan obligasi, sukuk, dan/atau efek lainnya di bursa efek mana pun sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologi penerbitan efek, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa, maupun peringkat efek.

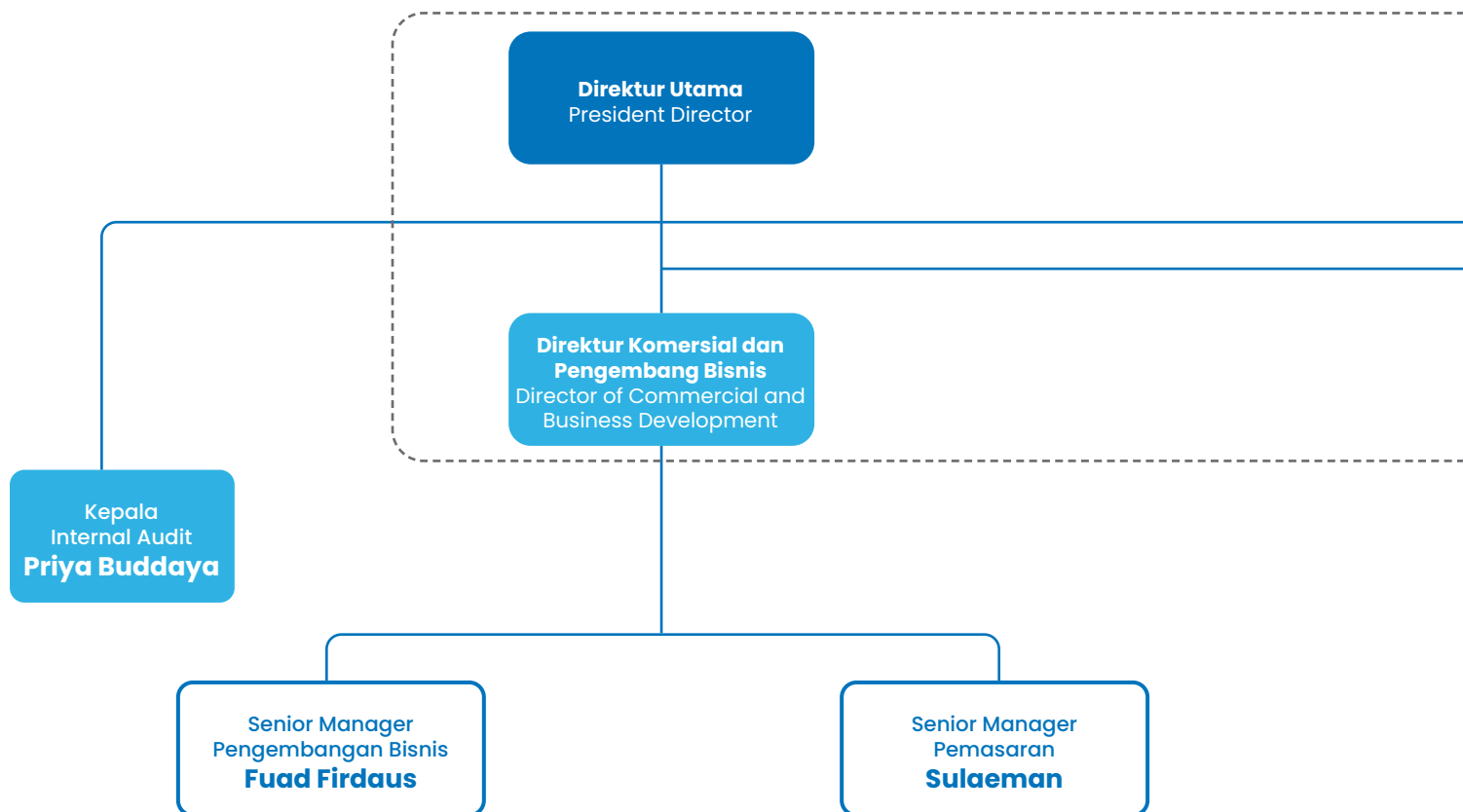
As of December 31, 2022, MTI has not listed bonds, sukuk, and/or other securities on any stock exchange, therefore there is no information regarding the chronology of securities issuance, types of corporate actions, changes in the number of securities, stock exchange name, or securities ratings.



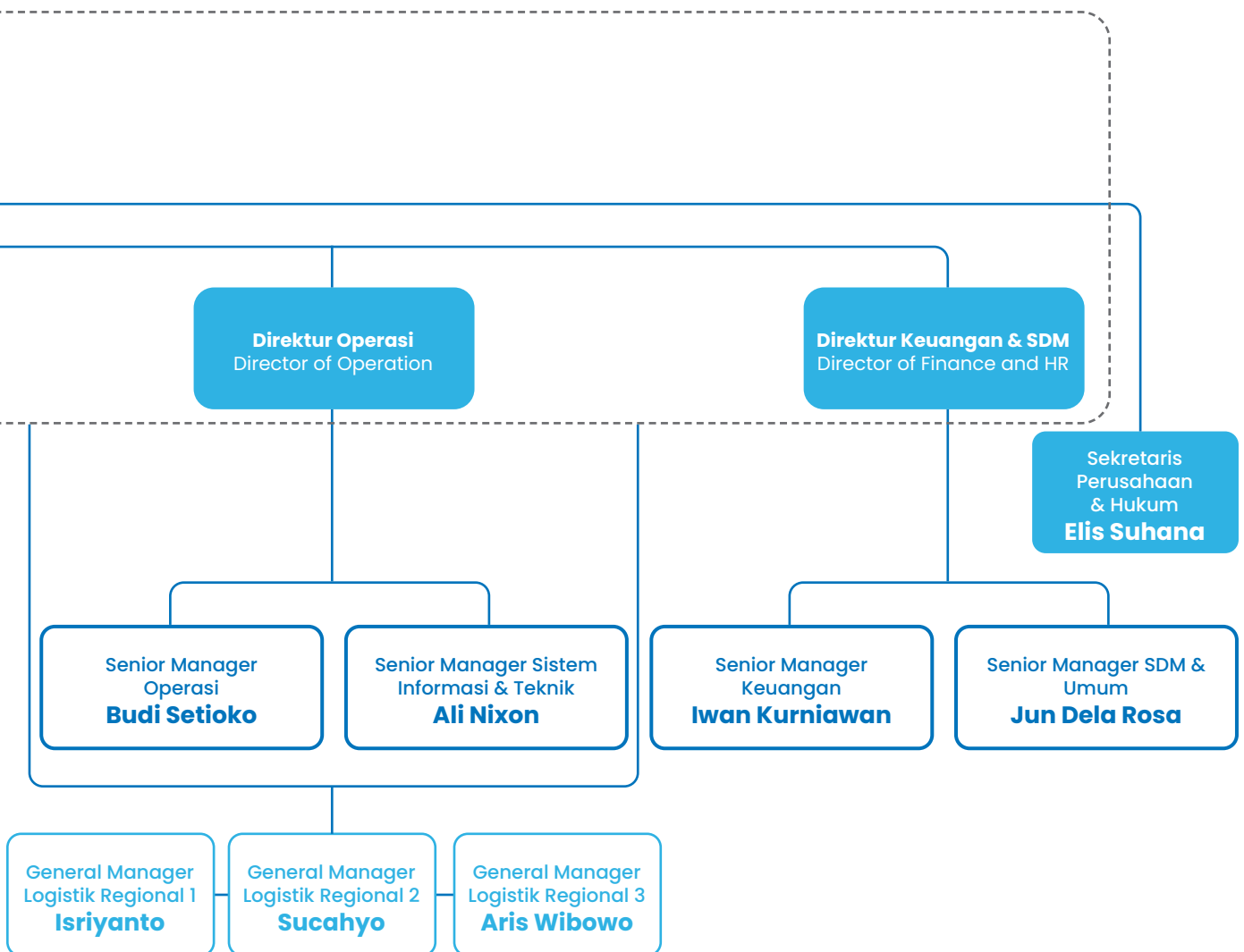
# Struktur Organisasi

## Organizational Structure

Struktur organisasi MTI telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.48/23/9/1/MTI-2020 tanggal 23 September 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Multi Terminal Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) Direktorat, 3 (tiga) Business Unit, dan 6 (enam) *Supporting Unit*.



The organizational structure of MTI has been established based on the Decree of the President Director Number HK.48/23/9/1/MTI-2020 dated September 23, 2021, regarding the Organization and Management Work Procedures of PT Multi Terminal Indonesia, which consisted of 4 (four) Directorates, 3 (three) Business Units, and 6 (six) Supporting Units.



## Profil Dewan Komisaris

### Board of Commissioners Profile

Berikut adalah informasi mengenai profil Dewan Komisaris yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun semenjak tanggal pengangkatan hingga RUPS tahun kelima.

Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022, yaitu pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia Nomor SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/02/02/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia, yang memutuskan memberhentikan Sdr. Solikhin sebagai anggota Komisaris PT Multi Terminal Indonesia, dan mengangkat Sdr. Sahat Martin Philip Sinurat sebagai Komisaris Independen PT Multi Terminal Indonesia, sehingga komposisi Dewan Komisaris per tanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut:

The following is the information regarding the profile of the Board of Commissioners who have a term of 5 (five) years from the date of appointment until the fifth year of the GMS.

The dismissal and appointment of the Board of Commissioners occurred 2 (two) times in 2022 on March 14, 2022, based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia Number SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/02/02/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia. It decides to dismiss Mr. Solikhin as a member of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia and appoint Mr. Sahat Martin Philip Sinurat as Independent Commissioner of PT Multi Terminal Indonesia, so the composition of the Board of Commissioners as of March 14, 2022, is as follows:

Nama   Name	Jabatan   Position	Keterangan   Information
Ogi Rulino	Komisaris Utama President Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 14 Juni 2019 Serving as President Commissioner since June 14, 2019
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 14 Maret 2022 Serving as Independent Commissioner since March 14, 2022
Buyung Lalana	Komisaris Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris sejak 27 Desember 2017 Serving as Commissioner since December 27, 2017
Sahat Martin Philip Sinurat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris sejak 14 Juli 2020 Serving as Commissioner since July 14, 2020

Selanjutnya, pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris terjadi pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/01/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia, yang memutuskan memberhentikan Sdr. Ogi Rulino dari Komisaris Utama, dan mengangkat Sdr. Roy Leonard sebagai Komisaris Utama Perseroan. Dengan adanya keputusan tersebut, maka komposisi Dewan Komisaris per tanggal 26 April 2022 hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Furthermore, the dismissal and appointment of the Board of Commissioners occurred on April 26, 2022, based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/03/01/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia, which decides to dismiss Mr. Ogi Rulino as the President Commissioner and appointed Mr. Roy Leonard as President Commissioner of the Company. With this resolution, the composition of the Board of Commissioners as of April 26, 2022 until the end of 2022, is as follows:

Nama   Name	Jabatan   Position	Keterangan   Information
Roy Leonard	Komisaris Utama President Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 26 April 2022 Serving as President Commissioner since April 26, 2022
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 14 Maret 2022 Serving as Independent Commissioner since March 14, 2022
Buyung Lalana	Komisaris Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris sejak 27 Desember 2017 Serving as Commissioner since December 27, 2017
Sahat Martin Philip Sinurat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Menjabat sebagai Komisaris sejak 14 Juli 2020 Serving as Commissioner since July 14, 2020



## Profil Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

Profile of the Board of Commissioners as of December 31, 2022



### ROY LEONARD

**Komisaris Utama**  
President Commissioner

Indonesia

45 Tahun | Years Old

Jakarta

<p><b>Dasar Pengangkatan Pertama</b> Basis of First Appointment</p>	<p>Diangkat menjadi Komisaris Utama MTI berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/01/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia tanggal 26 April 2022.</p> <p>He was appointed as the President Commissioner of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/03/01/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia dated April 26, 2022.</p>
<p><b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background</p>	<p>Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta (2002) Bachelor's Degree in Economics Accounting, University of Indonesia, Jakarta, (2002)</p>
<p><b>Pengalaman Kerja</b> Work Experiences</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CFO di New Priok Container Terminal One, Indonesia (2015-2021)</li> <li>• Group CFO/Executive Vice President di Lazada Indonesia, (2014-2015)</li> <li>• Assurance Asisten Manager dan Senior Manager PricewaterhouseCoopers, Indonesia (2007-2014)</li> <li>• Assurance Manager PricewaterhouseCoopers, Helsinki, Finland (2009-2011)</li> <li>• Assurance Associate dan Senior Associate PricewaterhouseCoopers, Indonesia (2003-2007)</li> <li>• Junior Auditor dan Semi Senior Auditor KPMG (2002-2003)</li> <li>• CFO of New Priok Container Terminal One, Indonesia (2015-2021)</li> <li>• Group CFO/Executive Vice President of Lazada Indonesia, (2014-2015)</li> <li>• Assurance Asisten Manager and Senior Manager of PricewaterhouseCoopers, Indonesia (2007-2014)</li> <li>• Assurance Manager of PricewaterhouseCoopers, Helsinki, Finland (2009-2011)</li> <li>• Assurance Associate and Senior Associate PricewaterhouseCoopers, Indonesia (2003-2007)</li> <li>• Junior Auditor and Semi Senior Auditor KPMG (2002-2003)</li> </ul>
<p><b>Rangkap Jabatan</b> Concurrent Position</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Keuangan &amp; SDM PT Pelindo Solusi Logistik</li> <li>• Komisaris PT Prima Multi Terminal</li> <li>• Director of Finance &amp; HR of PT Pelindo Solusi Logistik</li> <li>• Commissioner of PT Prima Multi Terminal</li> </ul>
<p><b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliation</p>	<p>Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, namun memiliki hubungan afiliasi (profesional) dengan pemegang saham mayoritas.</p> <p>He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners, but has an affiliation (professional) with the major shareholder.</p>
<p><b>Kepemilikan Saham</b> Ownership</p>	<p>Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.</p>



## Edison Simanjuntak

**Komisaris**  
Commissioner

**Indonesia**  
62 Tahun | Years Old  
Bekasi

<b>Dasar Pengangkatan Pertama</b> Basis of First Appointment	<p>Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa melalui RUPS Nomor KP.03/14/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 dan No. HK. 566/01/19/KPM.TPK-20 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 14 Juli 2020.</p> <p>He was appointed as a Commissioner of MTI based on Resolutions of the General Meeting of Shareholders Outside the GMS (Circular GMS) Number KP.03/14/7/7/MTA/UT/PI.II-2020 and No. HK. 566/01/19/KPM.TPK-20 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners dated July 14, 2020.</p>
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<p>Sarjana Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), 2010 Bachelor's Degree from the University of Jenderal Achmad Yani (Unjani), 2010</p>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experiences	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komandan Lapangan Kesatuan TNI</li> <li>• Pimpinan Staf Unit Kerja TNI</li> <li>• Inspektorat Pemeriksaan &amp; Pengawasan Kinerja TNI</li> <li>• Field Commander of the Indonesian Armed Forces (TNI)</li> <li>• Chief of Work Unit Staff of TNI</li> <li>• Inspectorate for Inspection &amp; Supervision of TNI Performance</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b> Concurrent Position	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. Does not hold concurrent positions in other companies.</p>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliation	<p>Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham. He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.</p>
<b>Kepemilikan Saham</b> Ownership	<p>Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.</p>



## Buyung Lalana

**Komisaris**  
Commissioner

**Indonesia**

**65 Tahun | Years Old**

**Jakarta**

<p><b>Dasar Pengangkatan Pertama</b> Basis of First Appointment</p>	<p>Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di luar RUPS No. SK.03 /27/12/2/PBI/UT/P/I/PL.II-17 dan No. HK.566/ 03/15/KPM.Tpk.17 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 27 Desember 2017. He was appointed as a Commissioner of MTI based on the Resolutions of General Meeting of Shareholders Outside the GMS (Circular GMS) No. SK.03 /27/12/2/PBI/UT/P/I/PL.II-17 and No. HK.566/ 03/15/KPM.Tpk.17 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners dated December 27, 2017.</p>
<p><b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background</p>	<p>Sarjana Akademi Angkatan Laut (1983) Bachelor's Degree from the Naval Academy (1983)</p>
<p><b>Pengalaman Kerja</b> Work Experiences</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komandan Korps Marinir (2015)</li> <li>• Danlantamal XI Merauke (2013)</li> <li>• Yontaifib Danpasmar 2</li> <li>• Satgas Delegasi RI On Counter of Terrorism (2011)</li> <li>• Satgas Muara dan Perairan II Nangroe Aceh Darussalam (2004)</li> <li>• Latsitarda Nusantara 88 Kalimantan Barat, Satgas Kosektor I Ambon (2001)</li> <li>• Satgas Cakra KTT Asean di Filipina (1987)</li> <li>• Satgas Sapu Jagat Timor Timur (1986)</li> <li>• Satgas Keris Timor Timur (1984)</li> <li>• Marine Corps Commander (2015)</li> <li>• Commander of the Merauke Navy Main Base (Danlantamal) XI (2013)</li> <li>• Commander of the Marines Yontaifib (Danpasmar) 2</li> <li>• Task Force (Satgas) Indonesian Delegation on Counter of Terrorism (2011)</li> <li>• Satgas Estuary and Waters II of Nangroe Aceh Darussalam (2004)</li> <li>• Integrity Training of Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara 88 of West Kalimantan, Task Force of Kosektor I of Ambon (2001)</li> <li>• Satgas Cakra Asean Summit in the Philippines (1987)</li> <li>• Satgas Sapu Jagat Timor Timur (1986)</li> <li>• Satgas Keris Timor Timur (1984)</li> </ul>
<p><b>Rangkap Jabatan</b> Concurrent Position</p>	<p>Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Special Staff to the Minister of Transportation for Inter-Institutional Relations</p>
<p><b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliation</p>	<p>Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham. He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.</p>
<p><b>Kepemilikan Saham</b> Ownership</p>	<p>Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.</p>





## Sahat Martin Philip Sinurat

**Komisaris Independen**  
Independent Commissioner

Indonesia  
34 Tahun | Years Old  
Jakarta

### Dasar Pengangkatan Pertama

Basis of First Appointment

Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia Nomor SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/02/02/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia tanggal 14 Maret 2022.

He was appointed as a Commissioner of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia Number SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/02/02/ KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia dated March 14, 2022.

### Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung
- Sarjana Teknik Geodesi & Geomatika, Institut Teknologi Bandung
- Bachelor's Degree in Geodesy & Geomatics Engineering, Bandung Institute of Technology
- Master's Degree in Development Studies, Bandung Institute of Technology

### Pengalaman Kerja

Work Experiences

- Komisaris PT Pengembangan Investasi Riau (BUMD) (2021)
- Investor KOPI BAHAGIA.ID (2019)
- Komisaris PT Inovasi Persada Utama (2018)
- Investor PT Toba Nauli Wisata (2016)
- Peneliti Pengembangan SDM dan Manajemen PT Wacana Tata Akamedika (2015-2017)
- Komisaris dan Management PT Sopo Helios Edukasi (2015)
- Commissioner of PT Pengembangan Investasi Riau (BUMD) (2021)
- Investor of KOPI BAHAGIA.ID (2019)
- Commissioner of PT Inovasi Persada Utama (2018)
- Investor of PT Toba Nauli Wisata (2016)
- Researcher of HR Development and Management of PT Wacana Tata Akamedika (2015-2017)
- Commissioner and Management of PT Sopo Helios Edukasi (2015)

### Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.  
Does not hold concurrent positions in other companies.

### Hubungan Afiliasi

Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham.  
He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.

### Kepemilikan Saham

Ownership

Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.  
Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.

## Profil Dewan Komisaris yang Digantikan pada Tahun 2022

Profile of the Board of Commissioners who were Replaced in 2022

<b>Ogi Rulino</b> Komisaris Utama   President Commissioner	
<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia
<b>Usia per 31 Desember 2022</b> Age as of December 31, 2022	54 Tahun   Years Old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta
<b>Dasar Pengangkatan Pertama</b> Basis of First Appointment	Diangkat menjadi Komisaris Utama MTI berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT MTI No. SK.03/14/6/4/MTA/UT/PLII-19 dan No. HK.566/02/11/KPM/TPK.19 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama tanggal 14 Juni 2019. He was appointed as the President Commissioner of MTI through the General Meeting of Shareholders based on Shareholders' Resolutions of PT MTI No. SK.03/14/6/4/MTA/UT/PLII-19 and No. HK.566/02/11/KPM/TPK.19 concerning Dismissal and Appointment of the President Commissioner dated June 14, 2019.
<b>Dasar Pemberhentian</b> Basis of Dismissal	Diberhentikan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/01/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia. He was dismissed based on the Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/03/01/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia.
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Engineering, University of Electro-Communications, Tokyo (1995)</li> <li>• Bachelor of Science, University of Electro-Communications, Tokyo (1993)</li> <li>• Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1991)</li> <li>• Master of Engineering, University of Electro-Communications, Tokyo (1995)</li> <li>• Bachelor of Science, University of Electro-Communications, Tokyo (1993)</li> <li>• Bachelor of Mechanical Engineering, Bandung Institute of Technology (1991)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experiences	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Strategi &amp; Komersial di Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) (2021-sekarang)</li> <li>• Direktur Transformasi &amp; Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2019-2021)</li> <li>• Direktur Logistik &amp; Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018-2019)</li> <li>• Direktur Logistik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015-2018)</li> <li>• Direktur PT Portco Infranasantara (2014-2015)</li> <li>• General Manager Pengembangan Bisnis PT Nusantara Infrastruktur (Persero) Tbk (2012-2015)</li> <li>• Regional Process Leader Mitsui OSK Lines (Asia) Hongkong (2009-2012)</li> <li>• Manager National Logistics &amp; Operation PT Mitsui OSK Lines (1998-2009)</li> <li>• Account Manager PT Dentsu Indonesia (1998)</li> <li>• Business Development Executive Mitsui &amp; Co. Ltd (1995-1998)</li> <li>• Director of Strategy &amp; Commercial at PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)'s Sub Holding (2021-present)</li> <li>• Director of Transformation &amp; Business Development of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2019-2021)</li> <li>• Director of Logistics &amp; Business Development of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2018-2019)</li> <li>• Director of Logistics of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2015-2018)</li> <li>• Director of PT Portco Infranasantara (2014-2015)</li> <li>• General Manager of Business Development of PT Nusantara Infrastruktur (Persero) Tbk (2012-2015)</li> <li>• Regional Process Leader of Mitsui OSK Lines (Asia) - Hongkong (2009-2012)</li> <li>• Manager of National Logistics &amp; Operation of PT Mitsui OSK Lines (1998-2009)</li> <li>• Account Manager of PT Dentsu Indonesia (1998)</li> <li>• Business Development Executive of Mitsui &amp; Co. Ltd (1995-1998)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b> Concurrent Position	Direktur Strategi & Komersial di Sub Holding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) (2021-sekarang) Director of Strategy & Commercial of PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)'s Sub Holding (2021-present)
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham. He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.
<b>Kepemilikan Saham</b> Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.

## Solikhin

Komisaris | Commissioner

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia
<b>Usia per 31 Desember 2022</b> Age as of December 31, 2022	60 Tahun   Years Old
<b>Domisili</b> Domicile	Bekasi
<b>Dasar Pengangkatan Pertama</b> Basis of First Appointment	<p>Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MTI No. SK.03/19/12/10/MTS/UT/ P.II-19 dan No. HK.566/04/07/KPM-Tpk-19 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris tanggal 19 Desember 2019.</p> <p>He was appointed as a Commissioner of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT MTI No. SK.03/19/12/10/MTS/UT/PI.II-19 and No. HK.566/04/07/KPM-Tpk-19 concerning Appointment of Members of Board of Commissioners on December 19, 2019.</p>
<b>Dasar Pemberhentian</b> Basis of Dismissal	<p>Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia Nomor SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/02/02/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia.</p> <p>He was dismissed based on the Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia Number SK.03/14/3/1/PAPR /DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/02/02/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia.</p>
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<p>Sarjana Nautika, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) (1985) Bachelor's Degree in Nautics, Education and Training Center for Nautical Science (BP2IP) (1985)</p>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experiences	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Cirebon (2016-2018)</li> <li>• General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Operasi I Cabang Tanjung Priok (2014-2016)</li> <li>• Deputy General Manager Terminal Operasi II Cabang Tanjung Priok (2012-2014)</li> <li>• General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Pontianak (2009-2012)</li> <li>• Manager Petikemas Cabang Pelabuhan Panjang (2008)</li> <li>• General Manager of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Cirebon (2016-2018)</li> <li>• General Manager of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Operasi I Cabang Tanjung Priok (2014-2016)</li> <li>• Deputy General Manager of Operation Terminal II of Tanjung Priok Branch (2012-2014)</li> <li>• General Manager of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) of Pontianak Branch (2009-2012)</li> <li>• Container Manager of Panjang Port Branch (2008)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b> Concurrent Position	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. Does not hold concurrent positions in other companies.</p>
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliation	<p>Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham. He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.</p>
<b>Kepemilikan Saham</b> Ownership	<p>Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.</p>



## Profil Direksi

### Board of Directors Profile

Berikut adalah informasi mengenai profil Direksi yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun semenjak tanggal pengangkatan hingga RUPS tahun kelima.

Terdapat perubahan susunan Direksi MTI sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/12/KP.TPK-22 tanggal 01 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia. Pemegang saham memberhentikan Sdr. Budi Priyanto sebagai Direktur Keuangan dan SDM serta mengangkat Sdr. Budi Azmi sebagai Direktur Keuangan dan SDM. Dengan demikian, komposisi Direksi MTI per 1 Juni 2022 hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The following is the information regarding the profile of the Board of Directors who have a term of 5 (five) years from the date of appointment until the fifth year of the GMS.

There was a change in the composition of the Board of Directors of MTI as stated in the Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/03/12/KP.TPK-22 dated June 1, 2022, concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia. The shareholders dismissed Mr. Budi Priyanto as Finance and HR Director and appointed Mr. Budi Azmi as Finance and HR Director. Accordingly, the composition of the Board of Directors of MTI as of June 1, 2022, until the end of 2022 is as follows:

Nama   Name	Jabatan   Position	Keterangan   Information
Gunta Prabawa	Direktur Utama President Director	Menjabat definitif sebagai Direktur Utama sejak 22 April 2021 Serving definitively as President Director since April 22, 2021
Ruri Indrasari Rachmaputri	Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director	Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak 3 November 2020, dan menjalankan tugas sebagai Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis Sementara Waktu sejak 15 Oktober 2021 Serving as Operation Director since November 3, 2020, and has carried out the duties as Ad Interim of Commercial & Business Development Director since October 15, 2021
Budi Azmi	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM sejak 1 Juni 2022 Serving as Finance and HR Director since June 1, 2022

## Profil Direksi per 31 Desember 2022

Profile of the Board of Directors as of December 31, 2022



### Gunta Prabawa

**Direktur Utama**  
 President Director

Indonesia  
 56 Tahun | Years Old  
 Jakarta

#### Dasar Pengangkatan Pertama

Basis of First Appointment

Diangkat menjadi Direktur Utama Sementara Waktu Sampai Dengan Adanya Penetapan Direktur Utama Definitif di MTI berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MTI No. KP.03/19/2/1/MTA/UT/PI.II-21 dan No. HK.566/01/12/KPM.TPK-21 tanggal 19 Februari 2021.

He was appointed as the Ad Interim President Director until the Definitive President Director was determined at MTI based on Shareholders' Resolution Letter through the Circular General Meeting of Shareholders of PT MTI No. KP.03/19/2/1/MTA/UT/PI.II-21 and No. HK.566/01/12/KPM.TPK-21 dated February 19, 2021.

#### Riwayat Pendidikan

Educational Background

- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret (1994) | Bachelor's Degree in Civil Engineering, Sebelas Maret University (1994)
- Magister, National University Singapore, (2013) | Master's Degree, National University Singapore (2013)

#### Pengalaman Kerja

Work Experiences

- Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (2017-2020) | President Director of PT Jakarta International Container Terminal (2017-2020)
- Chief Specialist Komersial & Pengembangan Usaha Kantor Pusat (2017) | Chief Specialist of Commercial & Business Development of Head Office (2017)
- Direktur Utama IPC TPK (2015-2107) | President Director of IPC TPK (2015-2107)
- General Manager Cabang Pelabuhan Palembang (2013-2017) | General Manager of Palembang Port Branch (2013-2017)
- Staf Utama Teknik Sr. Kantor Pusat (2011-2013) | Senior Main Staff of Engineering of Head Office (2011-2013)
- Kepala Unit Tanjung Priok Car Terminal (2007-2011) | Head Unit of Tanjung Priok Car Terminal (2007-2011)
- Pemimpin Proyek (2006-2007) | Project Leader (2006-2007)
- Ass.Senior Manager Perenc. dan Rancang Bangun (2004-2006) | Assistant Senior Manager of Planning and Design (2004-2006)
- Staf Muda Senior pada Dit.Pemas.& Pengemb. Usaha (2004) | Senior Young Staff at Directorate of Marketing & Business Development (2004)
- Staf Muda Senior pada Direktorat Teknik (2002-2004) | Senior Young Staff at the Engineering Directorate (2002-2004)
- Asisten Manager Perencanaan (2000-2002) | Assistant Manager of Planning (2000-2002)
- Supervisor Estimasi & Design (1999-2000) | Supervisor of Estimation & Design (1999-2000)
- Pj. Kasubdin Perenc. Din. Teksip Div. Teknik (1998-1999) | Acting Head of the Planning Sub-Department of the Civil Engineering Service, Engineering Division (1998-1999)

#### Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.  
 Does not hold concurrent positions in other companies.

#### Hubungan Afiliasi

Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham.  
 He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.

#### Kepemilikan Saham

Ownership

Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.  
 Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.



## Ruri Indrasari Rachmaputri

**Direktur Operasi & Direktur Komersial  
dan Pengembangan Bisnis**  
Operation Director & Commercial and  
Business Development Director

Indonesia

45 Tahun | Years Old

Jakarta

<p><b>Dasar Pengangkatan Pertama</b> Basis of First Appointment</p>	<p>Diangkat menjadi Direktur Operasi MTI berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MTI No. KP.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan No. HK.566/03/01/KPM.TPK20 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia tanggal 3 November 2020. She was appointed as the Operation Director of MTI based on Shareholders' Resolutions through the Circular General Meeting of Shareholders of PT MTI No. KP.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 and No. HK.566/03/01/KPM.TPK20 concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia dated November 3, 2020.</p>
<p><b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background</p>	<p>Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Trisakti (1999) Bachelor's Degree in Economics, Trisakti University (1999)</p>
<p><b>Pengalaman Kerja</b> Work Experiences</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Warehouse Advisor PT Amman Mineral Nusa Tenggara (2018-2020)</li> <li>• Country Operation Key Account Manager PT Panalpina Nusajaya Transport (2016-2018)</li> <li>• Advisor Operation Director PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2014-2016)</li> <li>• General Manager SCM PT Multi Terminal Indonesia (2013-2014)</li> <li>• General Manager PT Nova Jaya Tracking/Damco Trucking Indonesia (2012-2013)</li> <li>• Asisten General Manager PT MM Logistics (2008-2012)</li> <li>• Impor Ekspor Logistik Account Manager PT Maersk Logistik Indonesia (2006-2007)</li> <li>• SCM Customer Services Supervisor PT Maersk Logistik Indonesia (2002-2004)</li> <li>• SCM Customer Services Representative PT Maersk Logistik Indonesia (2000 -2002)</li> <li>• Warehouse Advisor of PT Amman Mineral Nusa Tenggara (2018-2020)</li> <li>• Country Operation Key Account Manager of PT Panalpina Nusajaya Transport (2016-2018)</li> <li>• Advisor Operation Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2014-2016)</li> <li>• General Manager of SCM PT Multi Terminal Indonesia (2013-2014)</li> <li>• General Manager of PT Nova Jaya Tracking/Damco Trucking Indonesia (2012-2013)</li> <li>• Assistant General Manager of PT MM Logistics (2008-2012)</li> <li>• Account Manager of Logistics Import Export of PT Maersk Logistik Indonesia (2006-2007)</li> <li>• SCM Customer Services Supervisor PT Maersk Logistik Indonesia (2002-2004)</li> <li>• SCM Customer Services Representative of PT Maersk Logistik Indonesia (2000 -2002)</li> </ul>
<p><b>Rangkap Jabatan</b> Concurrent Position</p>	<p>Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain. Does not hold concurrent positions in other companies.</p>
<p><b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliation</p>	<p>Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham. She has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.</p>
<p><b>Kepemilikan Saham</b> Ownership</p>	<p>Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.</p>





## Budi Azmi

**Direktur Keuangan dan SDM**  
 Finance and HR Director

Indonesia

49 Tahun | Years Old

Jakarta

### Dasar Pengangkatan Pertama

#### Basis of First Appointment

Diangkat menjadi Direktur Keuangan dan SDM MTI berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/12/KP.TPK-22 tanggal 01 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia.

He was appointed as the Finance and HR Director of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566 /03/12/KP.TPK-22 dated June 1, 2022, concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia.

### Riwayat Pendidikan

#### Educational Background

- Magister Pemasaran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2001)
- Sarjana Akutansi, Universitas Sumatera Utara, Medan, (1997)
- Master's Degree in Marketing, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2001)
- Bachelor's Degree in Accounting, University of North Sumatera, Medan (1997)

### Pengalaman Kerja

#### Work Experiences

- General Manager cabang Lhokseumawe PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2018-2022)
- General Manager Keuangan & Umum PT Prima Husada Cipta Medan - subsidiary of PT Pelindo I (Persero) (2017-2018)
- Manager Keuangan Cabang Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2013-2016)
- General Manager of Lhokseumawe branch of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2018-2022)
- General Manager of Finance & General Affairs of PT Prima Husada Cipta Medan - a subsidiary of PT Pelindo I (Persero) (2017-2018)
- Finance Manager of Belawan Branch of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2013-2016)

### Rangkap Jabatan

#### Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.  
 Does not hold concurrent positions in other companies.

### Hubungan Afiliasi

#### Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham.  
 He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.

### Kepemilikan Saham

#### Ownership

Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.  
 Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.

## Profil Direksi yang Digantikan pada Tahun 2022

Profile of the Board of Directors who was Replaced in 2022

<b>Budi Priyanto</b> Direktur Keuangan dan SDM   Finance and HR Director	
<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	Indonesia
<b>Usia per 31 Desember 2022</b> Age as of December 31, 2022	57 Tahun   Years Old
<b>Domisili</b> Domicile	Jakarta
<b>Dasar Pengangkatan Pertama</b> Basis of First Appointment	Diangkat menjadi Direktur Keuangan dan SDM MTI berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS No. KP.03/15/7/9/MTA/UT/PL.II-20 dan No. HK.566/02/02/KPM.TPK-20 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia tanggal 15 Juli 2020. He was appointed as the Finance and HR Director of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside the GMS (Circular GMS) No. KP.03/15/7/9/MTA/UT/PL.II-20 and No. HK.566/02/02/KPM.TPK-20 concerning Dismissal and Appointment of Directors of PT Multi Terminal Indonesia dated July 15, 2020.
<b>Dasar Pemberhentian</b> Basis of Dismissal	Diberhentikan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/12/KP.TPK-22 tanggal 01 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia. He was dismissed based on the Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/03/12/KP.TPK-22 dated June 1, 2022, concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia.
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master in Maritime Economics and Logistics, Erasmus University, Rotterdam, Belanda (2010)</li> <li>• Magister Manajemen, Universitas Trisakti (1999)</li> <li>• Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Gajah Mada (1990)</li> <li>• Master's Degree in Maritime Economics and Logistics, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands (2010)</li> <li>• Master's Degree in Management, Trisakti University (1999)</li> <li>• Bachelor's Degree in Management Economics, Gajah Mada University (1990)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experiences	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junior Chief Specialist Direktorat Sumber Daya Manusia (2019-2020)</li> <li>• Direktur SDM &amp; Keuangan PT Pengerukan Indonesia (2017-2019)</li> <li>• Direktur Keuangan &amp; SDM PT IPC Terminal Petikemas (2014-2017)</li> <li>• Koord. Utama PMO Bidang Unlock Capacity Sr. Kantor Pusat (2013-2014)</li> <li>• Direktur HRA PT JICT (2012-2013)</li> <li>• SM. Perencanaan &amp; Pengembangan Bisnis II Kantor Pusat (2012)</li> <li>• Staf Utama Komersial &amp; Pengemb. Usaha Sr. Kantor Pusat (2010-2012)</li> <li>• Staf Utama Senior pada Direktorat Operasi (2009-2010)</li> <li>• Senior Manager Pengembangan Usaha (2005-2009)</li> <li>• Asisten Senior Manager Anev Segmen Usaha II (1999-2004)</li> <li>• Kabag Evaluasi dan Pentariffan (1997-1999)</li> <li>• Pj. Kepala Bagian Evaluasi &amp; Pentariffan (1994-1997)</li> <li>• Junior Chief Specialist of HR Directorate (2019-2020)</li> <li>• Director of HR &amp; Finance of PT Pengerukan Indonesia (2017-2019)</li> <li>• Director of Finance &amp; HR of PT IPC Terminal Petikemas (2014-2017)</li> <li>• Senior Main Coordinator of PMO of Unlock Capacity of Head Office (2013-2014)</li> <li>• Director of HR &amp; Administration of PT JICT (2012-2013)</li> <li>• Senior Manager of Business Planning &amp; Development II of Head Office (2012)</li> <li>• Senior Main Staff of Commercial &amp; Business Development of Head Office (2010-2012)</li> <li>• Senior Main Staff at the Operation Directorate (2009-2010)</li> <li>• Senior Manager of Business Development (2005-2009)</li> <li>• Assistant Senior Manager of Analysis and Evaluation of Business Segment II (1999-2004)</li> <li>• Division Head of Evaluation and Tariff (1997-1999)</li> <li>• Acting Division Head of Evaluation &amp; Tariff (1994-1997)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b> Concurrent Position	Direktur Strategi & Komersial di <i>Sub Holding</i> PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) (2021-sekarang) Director of Strategy & Commercial of PT Pelindo Multi Terminal (SPMT)'s Sub Holding (2021-present)
<b>Hubungan Afiliasi</b> Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, ataupun dengan pemegang saham. He has no affiliation with other members of the Board of Directors and Commissioners or with shareholders.
<b>Kepemilikan Saham</b> Ownership	Tidak memiliki saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. Does not own shares of the Company, either directly or indirectly.

## Pejabat Struktural

### Structural Officers

#### Direktorat Utama

Main Directorate



**Priya Buddaya**  
Internal Auditor



**Elis Suhana**  
Sekretaris Perusahaan & Hukum  
Corporate Secretary & Legal

#### Direktorat Komersial dan Pengembang Bisnis

Commercial and Business Development Directorate



**Fuad Firdaus**  
Senior Manager  
Pengembangan Bisnis &  
Pelayanan Pelanggan  
Senior Manager of Business  
Development & Customer  
Services



**Sulaeman**  
Senior Manager Pemasaran  
Senior Manager of Marketing



## Direktorat Keuangan dan SDM

Finance and HR Directorate



**Iwan Kurniawan**  
Senior Manager Keuangan  
Senior Manager of Finance



**Jun Dela Rosa**  
Senior Manager SDM dan Umum  
Senior Manager of HR and General Affairs

## Direktorat Operasi

Operation Directorate



**Budi Setioko**  
Senior Manager Operasi  
Senior Manager of Operation



**Ali Nixon**  
Senior Manager Sistem Informasi dan Teknik  
Senior Manager of Information System and Engineering

## General Manager



**Isriyanto**

General Manager Logistik Regional 1



**Suchyo**

General Manager Logistic Regional 2



**Aris Wibowo**

General Manager Logistic Regional 3

## Informasi Entitas Anak dan Asosiasi

### Information on Subsidiaries and Associates

Hingga 31 Desember 2022, MTI tidak memiliki anak perusahaan, perusahaan patungan ataupun *special purpose vehicle* (SPV), namun memiliki 3 (tiga) perusahaan asosiasi dengan persentase penyertaan saham yang berbeda pada setiap perusahaan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

As of December 31, 2022, MTI did not have a subsidiary, joint venture company or special purpose vehicle (SPV), however, MTI owns 3 (three) associates with different ownership in each company, as described below:

#### PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

<b>Kepemilikan Saham   Ownership</b>	0,72%
<b>Tanggal Pendirian   Date of Establishment</b>	5 November 2012   November 5, 2012
<b>Status</b>	Beroperasi   Operate
<b>Bidang Usaha   Line of Business</b>	Usaha Bongkar Muat dari dan ke Kapal Stevedoring (Loading or Offloading) to and/or from Ships
<b>Alamat   Address</b>	Jl. Sindang Laut, Cilincing, Jakarta Utara 1411
<b>Telepon   Telephone</b>	+62 21 4393 2251
<b>Website</b>	<a href="http://www.indonesiacarterminal.co.id/">http://www.indonesiacarterminal.co.id/</a>
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:info@indonesiacarterminal.co.id">info@indonesiacarterminal.co.id</a>

#### PT Jasa Armada Indonesia Tbk

<b>Kepemilikan Saham   Ownership</b>	0,11%
<b>Tanggal Pendirian   Date of Establishment</b>	1 September 2014   September 1, 2014
<b>Status</b>	Beroperasi   Operate
<b>Bidang Usaha   Line of Business</b>	Layanan pemanduan & penundaan kapal, angkutan laut dan layanan maritim Vessel pilotage & towage services, sea freight and maritime services
<b>Alamat   Address</b>	Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta 14430
<b>Telepon   Telephone</b>	+62 21 4306789
<b>Website</b>	<a href="http://www.ipcmarine.co.id/">http://www.ipcmarine.co.id/</a>
<b>E-mail</b>	corsec@ipcmarine.co.id

#### PT Pelabuhan Indonesia Investama

<b>Kepemilikan Saham   Ownership</b>	1%
<b>Tanggal Pendirian   Date of Establishment</b>	17 November 2017   November 17, 2017
<b>Status</b>	Beroperasi   Operate
<b>Bidang Usaha   Line of Business</b>	Penanganan bongkar muat peti kemas Container stevedoring
<b>Alamat   Address</b>	Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
<b>Telepon   Telephone</b>	+62 21 5739977
<b>Website</b>	<a href="http://www.ipc-investco.com/">http://www.ipc-investco.com/</a>
<b>E-mail</b>	corsec@ipc-investco.com

## Lembaga dan Profesional Penunjang Supporting Professionals and Institutions

<b>Kantor Akuntan Publik   Public Accounting Firm</b>	
<b>Nama Lembaga   Institution Name</b>	KAP Purwantono, Sungjoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)
<b>Alamat   Address</b>	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
<b>Surat Penunjukan   Appointment Letter</b>	PL.516/7/11/I/MTI-2022
<b>Periode Penunjukan   Appointment Period</b>	Tahun Buku 2022 Financial Year 2022
<b>Jasa yang Diberikan   Service Types</b>	Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Multi Terminal Indonesia Tahun Buku 2022 Audited the Consolidated Financial Statements of PT Multi Terminal Indonesia for the Financial Year 2022
<b>Biaya Jasa   Fee</b>	Rp772.572.210



**Notaris | Notary**

<b>Nama Lembaga   Institution Name</b>	<b>Irma Devita Purnamasari S.H., M.KN.</b>
<b>Alamat   Address</b>	Jl.Pulau Singkep Blok E3/6 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara
<b>Periode Penunjukan   Appointment Period</b>	Tahun Buku 2022 Financial Year 2022
<b>Jasa yang Diberikan   Service Types</b>	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Terminal Indonesia Audited the Consolidated Financial Statements of PT Multi Terminal Indonesia for the Financial Year 2022
<b>Biaya Jasa   Fee</b>	Rp8.000.000

**Konsultan GCG | GCG Consultant**

<b>Nama Lembaga   Institution Name</b>	<b>PT Pratama Indomitra Konsultan</b>
<b>Alamat   Address</b>	Antam Office Park Tower B, 8th Floor Jl. TB Simatupang No.1 Jakarta Selatan
<b>Surat Penunjukan   Appointment Letter</b>	PL.519/13/4/1/MTI-2023
<b>Periode Penunjukan   Appointment Period</b>	13 April 2023 April 13, 2022
<b>Jasa yang Diberikan   Service Types</b>	Assessment GCG Tahun 2022 GCG Assessment in 2022
<b>Biaya Jasa   Fee</b>	Rp93.454.000

**Konsultan Survei | Survey Consultant**

<b>Nama Lembaga   Institution Name</b>	<b>PT Multi Utama Risetindo</b>
<b>Alamat   Address</b>	MUC Building Lt6 Jl. TB Simatupang No.15 Jakarta Selatan
<b>Surat Penunjukan   Appointment Letter</b>	PL.519/20/10/1/MTI-2022
<b>Periode Penunjukan   Appointment Period</b>	20 Oktober 2022 October 20, 2022
<b>Jasa yang Diberikan   Service Types</b>	Kegiatan Survei Kepuasan Pekerja, Pelanggan & Vendor Tahun 2022 Satisfaction Survey in 2022 on Employee, Customers & Vendors
<b>Biaya Jasa   Fee</b>	Rp122.100.000

**Konsultan Hukum | Legal Consultant**

<b>Nama Lembaga   Institution Name</b>	<b>SS &amp; R Legal Consultants</b>
<b>Alamat   Address</b>	Menara Kuningan Lt.1, Unit C-1 Jl. Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7
<b>Surat Penunjukan   Appointment Letter</b>	PL.519/20/10/1/MTI-2022
<b>Periode Penunjukan   Appointment Period</b>	4 Februari 2022 February 4, 2022
<b>Jasa yang Diberikan   Service Types</b>	<i>Legal Advisor</i>
<b>Biaya Jasa   Fee</b>	Rp169.290.000

# Informasi Wilayah Kerja

## Operational Areas



### Kantor Cabang

Branch

#### LOGISTICS REGIONAL I

##### JAKARTA

Jl. Pulau Payung No.1, Tanjung Priok, Jakarta 14310

##### CDC BANDA

Jl. Banda No 1 Tanjung Priok, Jakarta 14310  
Telp | Phone: 021-2910-4000

##### Halal Logistics & Cold Storage

Jl. Sulawesi No. 1 Tanjung Priok, Jakarta 14310  
Telp | Phone: +62 21 29104000

##### Common Area

Jl. Kalibaru 1, Cilincing, Jakarta Utara  
Telp | Phone: +62 21-29104000 ext (530)

#### LOGISTICS REGIONAL II

##### SURABAYA

Jl. Perak Timur No. 152A Surabaya  
Telp | Phone: +62-31-3292-299

##### SEMARANG

Jl. Pamularsih Raya No 5-H Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah 50148  
Telp | Phone: +62-24-7663-0796

##### BALI

Jl. Pendidikan No. 62 Sidakarya Denpasar Selatan, Bali

##### PONTIANAK

Jl. Pak Kasih No. 11, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

##### MAKASSAR

Jl. H.I.A Salih D9. Tompo No.11, Losari Ujung Pandang, Kota Makassar, 90112 Sulawesi Selatan

#### LOGISTICS REGIONAL III

##### PALEMBANG

Jl. R.E. Martadinata Blok A No. 18B, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan 30111

##### JAMBI

Pelabuhan Talang Duku, Jl. Raya Pelabuhan Km. 9, Talang Duku, Muara Jambi, Jambi

##### LAMPUNG

Jl. Yos Sudarso No.337, Pidada, Panjang, Panjang Utara, Kec Panjang, Kota Bandar Lampung

##### NATUNA

Pelabuhan Selat Lampa, Natuna

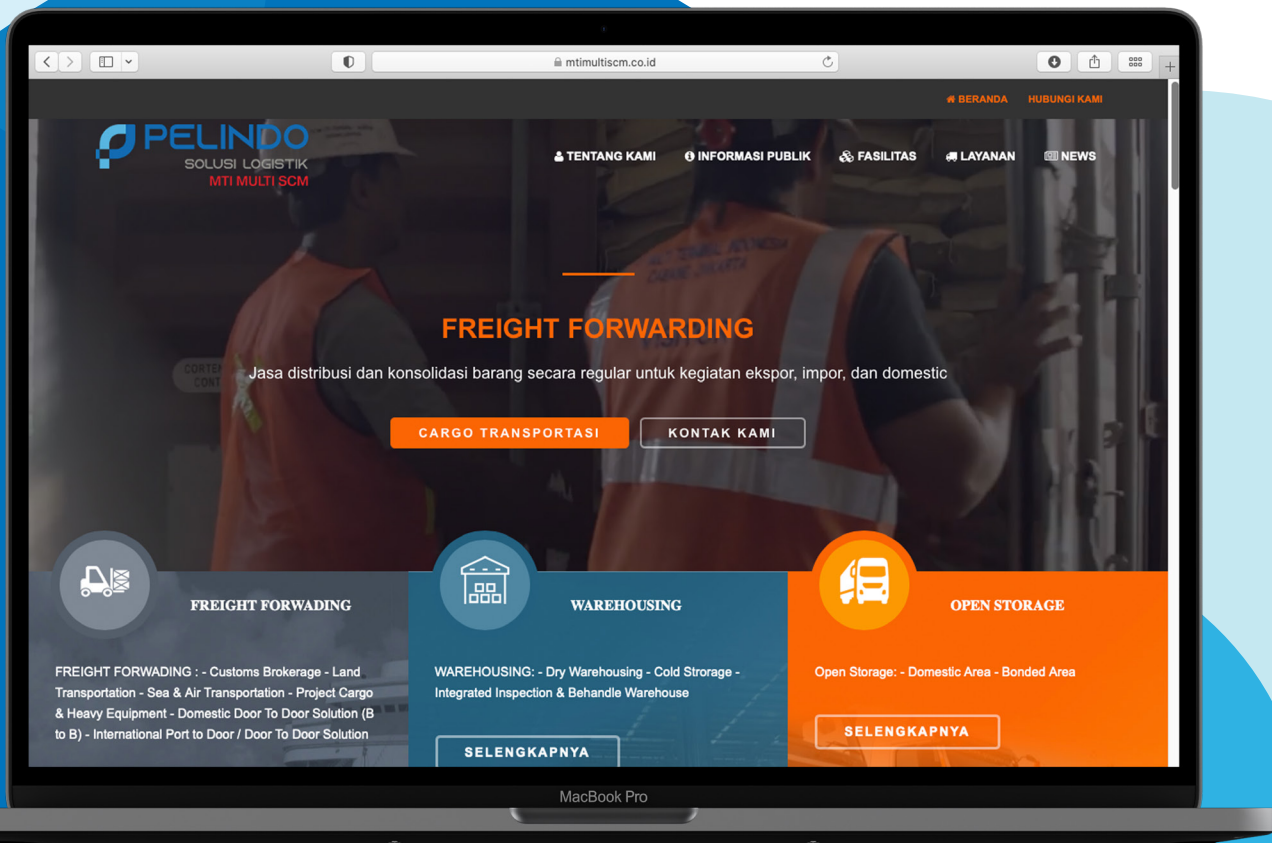
## Informasi pada Website Perusahaan

### Information on the Company's Website

MTI telah memiliki website Perusahaan yaitu **www.mtimultism.com.id** yang senantiasa diperbarui secara berkala. Adapun informasi website meliputi paling kurang:

MTI has a corporate website at **www.mtimultism.com.id** which is updated regularly. The website contains at least the following information:

Keterangan Information	Tautan Link
Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholders' Information up to the ultimate individual owner	<a href="https://mtimultism.com.id/about/profil-perusahaan">https://mtimultism.com.id/about/profil-perusahaan</a>
Isi Kode Etik Contents of Code of Conduct	<a href="https://mtimultism.com.id/about/good-corporate-governance">https://mtimultism.com.id/about/good-corporate-governance</a>
Laporan Keuangan Tahunan terpisah Separate Annual Financial Statements	<a href="https://mtimultism.com.id/about/annual-report">https://mtimultism.com.id/about/annual-report</a>
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Directors	<a href="https://mtimultism.com.id/about/manajemen">https://mtimultism.com.id/about/manajemen</a>
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Manual/Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	<a href="https://mtimultism.com.id/about/good-corporate-governance">https://mtimultism.com.id/about/good-corporate-governance</a>





# Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

## Dewan Komisaris

### Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Materi Material	Tanggal Date	Lokasi Location	Narasumber Speakers
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	Teknik identifikasi, perolehan, pengolahan, dan analisis data elektronik dalam mendukung audit investigasi yang efektif Learning the technique to identify, acquire, process, and analyze electronic data for an effective investigative audit	24-25 November 2022 November 24-25, 2022	Online	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing Fraud Auditing Improvement Institution

## Direksi

### Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Materi Material	Tanggal Date	Lokasi Location	Narasumber Speakers
Gunta Prabawa	Direktur Utama President Director	Sharing session "Harmonisasi Hubungan Industrial" Sharing session "Harmonious Industrial Relationship"	2 November 2022 November 2, 2022	PT MTI	Disnakertrans Ministry of manpower and transmigration
Budi Azmi	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	Sharing session "Harmonisasi Hubungan Industrial" Sharing session "Harmonious Industrial Relationship"	2 November 2022 November 2, 2022	PT MTI	Disnakertrans Ministry of manpower and transmigration

### Komite Audit Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Materi Material	Tanggal Date	Lokasi Location	Narasumber Speakers
Yoke Hasbyanto	Anggota Member	Teknik identifikasi, perolehan, pengolahan, dan analisis data elektronik dalam mendukung audit investigasi yang efektif Learning the technique to identify, acquire, process, and analyze electronic data for an effective investigative audit	24-25 November 2022 November 24-25, 2022	Online	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing Fraud Auditing Improvement Institution

### Sekretaris Perusahaan & Hukum Corporate Secretary & Legal

Nama Name	Jabatan Position	Materi Material	Tanggal Date	Lokasi Location	Narasumber Speakers
Elis Suhana	Sekretaris Perusahaan & Hukum Corporate Secretary & Legal	GRC ( <i>Governance, Risk Management, Compliance</i> )	10 Februari 2022 February 10, 2022	PMLI Ciawai	-
Agus Achruddin	Asisren Spesialis Junior Tata Kelola Perusahaan Junior Specialist of Corporate Governance	Audit Internal Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 900115:2015 Internal Audit of Quality Management ISO 900115:2015	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Jakarta	<i>In House Training</i>
		<i>Sharing and Learning "World Class Leading Terminal Operator"</i>	3 Juni 2022 June 3, 2022	Online	<i>Sub Holding Pelindo terminal Petikemas (SPTP)</i>

### Audit Internal Internal Audit

Nama Name	Jabatan Position	Materi Material	Tanggal Date	Lokasi Location	Narasumber Speakers
Yaumil Abidin	Auditor	Workshop Preparing <i>Step By Step Risk-Based Annual Audit Plan</i>	17 November 2022 November 17, 2022	Jakarta	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia Indonesian Professional Auditor Association
Susandi	Officer	Audit Internal Sertifikasi Manajemen mutu ISO 900115:2015 Internal Audit of Quality Management ISO 900115:2015	22 Agustus 2022 August 22, 2022	Jakarta	<i>In House Training</i>

# Keanggotaan Asosiasi

## Association Membership

Nama Asosiasi Associations	Posisi Position
ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia)	Anggota Member
APTESINDO (Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia)	Anggota Member
FIATA	Anggota Member
IMTA/BUAM	Anggota Member
KADIN	Anggota Member
Asosiasi Cold Chain	Anggota Member
APTRINDO (Asosiasi Pengusaha Truck Indonesia)	Anggota Member





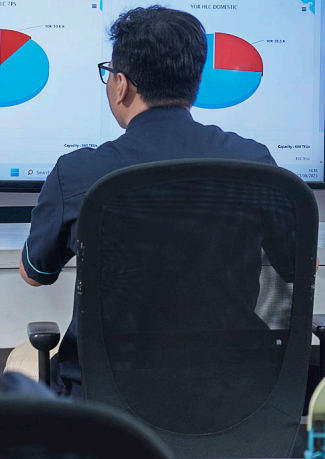
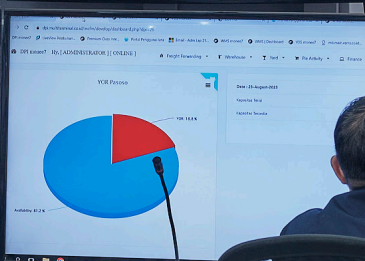
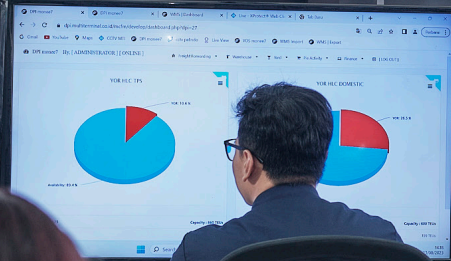
# LOGISTICS CONTROL



Gatepass & Truck Monitoring  
23/08/2023 - 14:18:31

SAR IN	61 TRUCK
NPCT1 YARD	101 TRUCK
SAR OUT	0 TRUCK

2240 TRUCK



# 4

## Tinjauan Pendukung Bisnis

### Business Supporting Overview

Pengembangan karyawan dan infrastruktur teknologi informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pendukung bisnis korporasi untuk mengembangkan kapasitas usaha secara keseluruhan.

Employee development and information technology infrastructure cannot be separated with the development of our corporate business to improve the capacity of our overall business.





## Sumber Daya Manusia

### Human Resources

Perusahaan terus mengelola sumber daya manusia (SDM) yang Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. MTI memperlakukan para pekerja lebih dari sekadar aset dan Perusahaan sangat memperhatikan semua pekerja dengan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan peraturan berlaku. Pemikiran ini telah membuat MTI menggunakan pendekatan yang sama dalam mengelola sumber daya manusia selama beberapa tahun terakhir melalui pembinaan, konseling, *sharing knowledge*, bimbingan, kaderisasi, pemberian instruksi, dan pelaporan.

Perencanaan, kapasitas dan pengembangan kompetensi, kebutuhan organisasi, manajemen kinerja, imbal jasa, dan hubungan industrial yang harmonis menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perusahaan untuk mengembangkan kompetensi pekerja. Pengembangan kompetensi ini juga disesuaikan berdasarkan *roadmap* pengembangan SDM yang telah disusun untuk periode 2021–2025 sebagai berikut. Penetapan *roadmap* ini dilakukan agar seluruh pengembangan operasional, termasuk SDM, mampu mendukung rencana jangka panjang MTI yang telah ditetapkan selama 2021–2025 dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompetitif dan mencapai tujuan besar usaha.

The Company continues to managing its human resources (HR) to be Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. MTI treats its employees more than just assets and the Company is very concerned in assuring that all employees are taken care off and receive their rights in accordance with applicable regulations. This thinking has made MTI uses the same approach of human resources management in the past few years through coaching, counseling, knowledge sharing, mentoring, regeneration, directing, and reporting.

The planning, capacity and competency development, organizational needs, performance management, salaries and allowances, and collaborative industrial relations become an inseparable part of the Company to develop the competencies of employees. This development is also synced with the HR development roadmap of the 2021–2025 period as follows. This roadmap was prepared to assure all operational development, including human resources, is capable of supporting MTI's long-term plan of 2021–2025 in facing the competition and achieving corporate goals.

#### Roadmap Pengembangan SDM

#### HR Development Roadmap

No.	Strategi Strategy	Program Program	Jadwal   Schedule				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Budaya Organisasi Organizational Culture	Mengidentifikasi budaya organisasi yaitu meliputi: budaya eksisting, budaya yang diinginkan dan budaya yang dibutuhkan, pembentukan budaya organisasi, sosialisasi dan internalisasi budaya ke dalam diri setiap individu. Identify the organizational culture, including the existing culture, the desired culture, and the needed culture—the formation of organizational culture; socialization, and internalization of culture into each individual.		✓	✓	✓	✓
2.	Sistem Pembinaan SDM HR Fostering System	Penyusunan Direktori Kompetensi, Penyusunan Direktori Pelatihan Berbasis Kompetensi, Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi, Penghasilan Berbasis Kompetensi. Preparation of Competency Directory, Competency-Based Training Directory, Competency-Based Performance Management, Competency-Based Remuneration.		✓	✓	✓	✓
3.	Organisasi Perusahaan Company Organization	Program pengembangan organisasi dalam periode 2020–2024 meliputi kajian organisasi yang menitikberatkan pada konsep <i>holding company</i> , dengan konsep organisasi yang lebih berorientasi kepada pelanggan serta terwujudnya organisasi yang membawahi unit bisnis secara sinkron dan selaras. The organizational development program for the 2020–2024 period includes an organizational study focusing on the holding company concept, with a more customer-oriented organizational concept and the realization of an organization that oversees business units synchronously and harmoniously.	✓	✓	✓	✓	✓



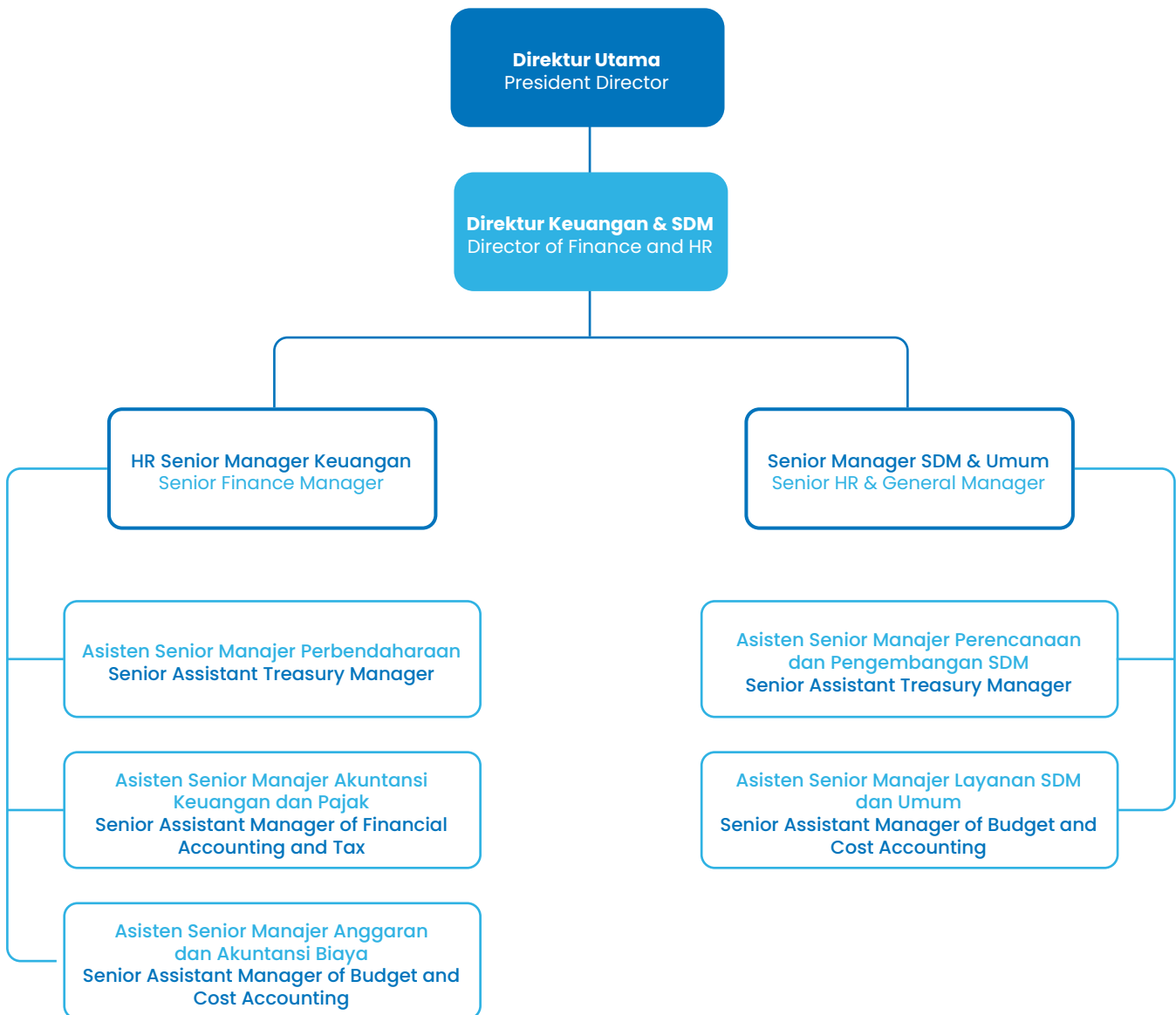
No.	Strategi Strategy	Program Program	Jadwal   Schedule				
			2021	2022	2023	2024	2025
4.	Perencanaan SDM (Komposisi SDM) HR Planning (HR Composition)	Pengganti pekerja yang pensiun dan kaderisasi, Pengembangan usaha, pengoperasian fasilitas dan alat produksi. Substitute for retired employees and regeneration, business development, operation of production facilities and equipment.	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Pendidikan dan Latihan Pekerja Employee Education And Training	Program diklat untuk mengantisipasi pengembangan usaha, program diklat untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dan sertifikasi, program diklat untuk peningkatan <i>level of service</i> , program diklat untuk perubahan mental dan sikap kerja. Education and training programs to anticipate business development, education and training programs to maintain and improve competence and certification, education and training programs to increase the level of service, and education and training programs for mental and work attitude changes.		✓	✓	✓	✓
6.	Pengembangan SDM HR Development	<i>Assessment Individu, mapping kompetensi, knowledge management, performance management, penyempurnaan pola karier, talent pool/akselerasi kader manajemen.</i> Individual assessment, competency mapping, knowledge management, performance management, career pattern refinement, talent pool/management cadre acceleration.	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Administrasi SDM HR Administration	Komputerisasi dalam administrasi kepersonaliaan antara lain data pekerja, cuti, dan <i>reimbursement</i> . Computerization in personnel administration, including employee, leave, and reimbursement data.	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Kesejahteraan dan Hubungan Industrial SDM HR Welfare and Industrial Relations	Survei penghasilan pekerja, kajian terhadap kompensasi dan <i>benefit</i> mengenai tunjangan transportasi dan pemberian tunjangan perumahan, kajian sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , perumusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam forum bipartit antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja. Survey of employees' remuneration, the compensation and benefits study regarding transportation allowance and the provision of housing allowance, reward and punishment system study, formulation of Collective Labor Agreements (PKB) in the bipartite forum between the Company management and labor union.		✓	✓	✓	✓
9.	<i>Employee Profiling</i>	Membuat <i>platform</i> untuk mencatat dan memetakan profil pekerja sebagai bahan analisa <i>HR Management</i> dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Create a platform to record and map employee profiles as material for HR Management analysis in fulfilling organizational needs.	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Pengarsipan Filing	Penataan arsip dengan bekerja sama dengan Arsip Nasional sesuai arahan Kantor Pusat. Melakukan sentralisasi kearsipan pada cabang-cabang MTI. Archive arrangement in collaboration with the National Archives according to the direction of Head Office. Centralize archives at MTI's branches.		✓	✓	✓	✓

**Struktur Pengelola SDM**

Pengelolaan SDM dilaksanakan oleh Divisi SDM & Umum di bawah Direktorat Keuangan & SDM. Divisi SDM & Umum diketuai oleh Sdr. Jun Dela Rosa.

**HR Management Structure**

HR management is carried out by the HR & General Affairs Division under the Finance & HR Directorate. The HR & General Affairs Division is led by Mr. Jun Dela Rosa.



## Profil Senior Manager SDM & Umum

## Profile of Senior Manager of HR & General Affairs



**Jun Dela Rosa**

Senior Manager (SM) SDM dan Umum  
Senior Manager (SM) of HR and General Affairs

Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun. Diangkat menjadi Kepala Divisi SDM & Umum berdasarkan Surat Keputusan Nomor KP.33/28/9/1/MTI-2018. Memperoleh gelar Magister Manajemen Pemasaran dari STIE Kampus Ungu pada tahun 2006.

Sebelum menjabat sebagai SM SDM & Umum, beliau telah menduduki sejumlah jabatan antara lain SM HR & General Affairs PT Multi Terminal Indonesia (2019), General Manager PPJK & FF Jakarta (2018), SVP Pemasaran & Pengembangan Bisnis PT Multi Terminal Indonesia (2018), SVP Operasi, Manajemen Risiko & Mutu PT Multi Terminal Indonesia (2017), Staf Direksi sebagai VP Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2016-2017).

Indonesian citizen, 46 years old. He was appointed as Head of HR & General Affairs Division based on Decree Number KP.33/28/9/1/MTI-2018. He obtained a Master's degree in Marketing Management from STIE Kampus Ungu in 2006.

Before serving as Senior Manager of HR & General Affairs, he has held several positions, including Senior Manager of HR & General Affairs at PT Multi Terminal Indonesia (2019), General Manager of PPJK & FF, Jakarta (2018), SVP of Marketing & Business Development at PT Multi Terminal Indonesia (2018), SVP of Operation, Risk & Quality Management of PT Multi Terminal Indonesia (2017), Staff of the Board of Directors as VP of Operation of PT Multi Terminal Indonesia (2016-2017).

### Tugas Pokok Divisi SDM & Umum

Divisi SDM & Umum khususnya yang berhubungan langsung dengan pengelolaan SDM memiliki fungsi mengembangkan strategi dan roadmap pengembangan SDM yang sesuai dengan strategi korporasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab pokok lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan SDM meliputi:

1. Membuat kebijakan dan prosedur yang mengatur Man Power Planning;
2. Melakukan perencanaan SDM (*Manpower Planning*) sesuai kebutuhan melalui proses analisa seperti *Job Profiling*, *Beban kerja*, *Employee Profiling*, dan *Struktur Organisasi*;
3. Menjalankan proses seleksi dan rekrutmen berdasarkan hasil analisa *Man Power Planning* yang telah disetujui oleh Direksi sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan;
4. Membuat Skema Pola Karir (*career path*) berdasarkan prosedur sebagai acuan pelaksanaan proses promosi, mutasi, dan demosi;
5. Menyusun perencanaan posisi pengisian jabatan berdasarkan hasil evaluasi, seperti *Career Journey*, *Employee Profiling*, dan *Performance Appraisal*;
6. Mengkoordinir penyusunan *Training Need Analysis* (TNA) berdasarkan analisa *Gap Competency* yang mengacu pada Kamus Kompetensi yang telah ditetapkan;
7. Mengorganisasi pelatihan/peningkatan kompetensi pekerja.

### Main Duties of HR & General Affairs Division

The HR & General Affairs Division, especially those directly related to HR management, has the function of developing HR development strategy and roadmap according to corporate strategy.

Other main duties and responsibilities related to HR management include:

1. Prepare Man Power Planning policies and procedures;
2. Prepare HR planning (*Man Power Planning*) based on analysis such as *Job profiling*, *Workload*, *Employee Profiling*, and *Organizational Structure*;
3. Selecting and recruiting to meet the *Man Power Planning* that the Board of Directors has approved;
4. Prepare a *Career Path* as a reference for promotion, transfer, and demotion;
5. Prepare the planning to fill in any vacant position according to *Career Journey*, *Employee Profiling*, and *Performance Appraisal*;
6. Coordinating the *Training Need Analysis* (TNA) preparation based on the *Gap Competency* analysis according to the *Competency Dictionary*;
7. Organizing training/improvement of employee competence.



### Kebijakan Pengelolaan SDM

Perusahaan menetapkan kebijakan pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rencana ketenagakerjaan yang telah disusun dan dirumuskan oleh unit kerja akan diajukan kepada HRD dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan. Berikut sejumlah kebijakan pengelolaan SDM yang terdapat di MTI:

#### 1. Perencanaan Ketenagakerjaan

Rencana ketenagakerjaan disiapkan dan dikembangkan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja Perseroan dan diserahkan kepada HRD.

#### 2. Rekrutmen dan Seleksi

Dalam memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan rencana manpower planning yang telah ditetapkan, Perseroan menerapkan proses seleksi dan rekrutmen secara bertahap melalui metode yang efisien, efektif, dan transparan.

#### 3. Pengembangan Karier Pekerja

Perusahaan memiliki kebijakan pengembangan karier bagi pekerja dengan kesempatan karier yang sama, tanpa membedakan ras, agama, atau latar belakang lainnya, dengan meninjau potensi, dan kinerja mereka.

#### 4. Pengembangan Kompetensi Pekerja

Strategi pengembangan kompetensi pekerja diarahkan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan bidang keahlian dan pekerjaan.

#### 5. Penilaian Kinerja

Perseroan menerapkan mekanisme penilaian kinerja yang terukur dan teratur menggunakan metrik yang disesuaikan dengan masing-masing unit kerja. Hasil penilaian kinerja menjadi salah satu acuan bagi Perseroan dan pekerja untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang dan juga menjadi dasar dalam memberikan kesempatan pengembangan karier.

#### 6. Program Kesejahteraan Pekerja

Perseroan menawarkan program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan program kesejahteraan lainnya untuk menjaga dan memelihara loyalitas pekerja serta mencapai produktivitas yang maksimal dan kinerja yang optimal dari kegiatan usaha yang kami jalankan.

### Fokus Pengembangan SDM 2022

Fokus pengembangan SDM pada tahun 2022 disesuaikan dengan *roadmap* pengembangan SDM 2021-2025 yang telah disusun. Realisasi pengembangan SDM pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi mutasi para pekerja untuk pekerja organik dan tenaga alih daya (TAD) atau *outsource*. Secara total terealisasi 366 pekerja pada tahun 2022 dibandingkan target 380 pekerja;
2. Realisasi produktivitas pekerja mencapai Rp92.482.385 dari target Rp125.960.250. Realisasi ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp47.012.916;
3. Realisasi survei kepuasan pekerja dengan hasil Indeks Kepuasan Pekerja sebesar 3,81;

### HR Management Policy

The Company sets its HR management policies according to what the organization needed. The plan which each unit has prepared and formulated is submitted to HRD in consideration of the Company. The following is some of the HR management policies within MTI:

#### 1. Man Power Planning

Man power planning is prepared and developed by a responsible work unit, taking into account the needs of the Company's manpower, and submitted to HRD.

#### 2. Recruitment and Selection

To meet HR needs according to the predetermined manpower planning, the Company implements a selection and recruitment process in stages through efficient, effective, and transparent methods.

#### 3. Employee Career Development

The Company has a career development policy for employees with equal career opportunities, regardless of race, religion, or other backgrounds, by reviewing their potential and performance.

#### 4. Employee Competency Development

The employee competency development strategy is directed by organizing education and training tailored to the field of expertise and work.

#### 5. Performance Assessment

The Company implements a measurable and regular performance assessment mechanism using metrics tailored to each work unit. The performance assessment results become one of the references for the Company and employees to improve their performance in the future and become the basis for providing career development opportunities.

#### 6. Employee Welfare Program

The Company offers health insurance programs, employment insurance, and other welfare programs to guard and maintain employee loyalty and achieve maximum productivity and optimal performance from the business activities we run.

### HR Development Focus in 2022

The HR development in 2022 was focused on the realization of the HR development roadmap of 2021-2025. In 2022, the realization was as follows:

1. Transfers of organic employees and outsourced (TAD). In total, 366 employees were mutated in 2022 compared to the targeted 380 employees;
2. Employee productivity reached Rp92,482,385 of the targeted Rp125,960,250. It was higher than the Rp47,012,916 reached last year;
3. Employee satisfaction survey reached a score of 3.81;

4. Realisasi sistem manajemen tenaga kerja mencakup *Oracle-Sigma* (penggajian), *Absensi Handkey* (penyempurnaan sistem absensi yang terintegrasi dengan tingkat kedisiplinan dan pengkinian laporan secara *real time*), *Oracle-Belant* (pembayaran tagihan terkait biaya SDM dan biaya Umum).

4. Implementation of employee management system that includes the Oracle Sigma (payroll), Handkey Attendance (improvement of an integrated attendance system with discipline levels and real time reports update), Oracle Belant (bill payment related to HR and general expenses).

### Komposisi dan Demografi Pekerja

Pada 31 Desember 2022, jumlah pekerja Perusahaan tercatat sebanyak 702 orang yang terdiri dari PKWTT sebanyak 366 pekerja, PKWT sebanyak 2 pekerja, dan Tenaga Alih Daya (TAD) sejumlah 334 pekerja. Jumlah tersebut menurun dibandingkan jumlah pekerja tahun 2021 sebanyak 775 orang. Jumlah tersebut telah memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis Perusahaan selama tahun 2022. Informasi demografi pekerja Perusahaan berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin, level jabatan, kompetensi, dan status kepegawaian dimuat pada tabel-tabel berikut.

### Composition and Demography of Our Employees

As of December 31, 2022, the Company's total employees were 702 people, consisting of 366 PKWTT (permanent) employees, 2 workers of PKWT (contract), and 334 TAD (outsourced) employees. This number decreased compared to total employees in 2021, which amounted 775 people. However, this number has fulfilled the Company's business development needs during 2022. Demographic information of the Company's employees based on age, education, gender, position level, competence, and employment status are contained in the following tables.

#### Jumlah Pekerja Berdasarkan Usia

#### Number of Employees by Age

No.	Deskripsi Description	2022				2021			
		Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
1.	<26	0	0	0	0	3	0	3	0,78%
2.	26-35	112	9	121	33,06%	138	12	150	39,06%
3.	36-45	134	23	157	42,90%	144	23	167	43,48%
4.	46-50	56	3	59	16,12%	37	2	39	10,15%
5.	51-55	22	1	23	6,28%	21	0	21	5,46%
6.	>55	6	0	6	1,64%	4	0	4	1,04%
<b>Jumlah   Total</b>		<b>330</b>	<b>36</b>	<b>366</b>	<b>100,00%</b>	<b>347</b>	<b>37</b>	<b>384</b>	<b>100,00%</b>

#### Jumlah Pekerja Berdasarkan Unit Kerja

#### Number of Employees by Work Unit

No.	Unit Kerja Work Unit	2022	2021	2020
1.	Audit Internal   Internal Audit	5	5	6
2.	Sekretaris Perusahaan & Hukum   Corporate Secretary & Legal	5	4	3
3.	Pemasaran & Pelayanan Pelanggan   Marketing & Customer Services	5	5	4
4.	Pengembangan Bisnis   Business Development	8	8	7
5.	Operasi   Operation	10	12	8
6.	Sistem Informasi & Teknik   Information System & Engineering	18	12	13
7.	Keuangan   Finance	16	15	12
8.	SDM & Umum   HR & General Affairs	18	18	133
9.	Logistik Regional 1   Logistics Region 1	245	263	33
10.	Logistik Regional 2   Logistics Region 2	23	24	10
11.	Logistik Regional 3   Logistics Region 3	13	18	20
<b>Jumlah   Total</b>		<b>366</b>	<b>384</b>	<b>394</b>

**Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan**
**Number of Employees by Education Level**

No.	Deskripsi Description	2022				2021			
		Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
1.	Magister   Master's Degree	3	0	3	0,82%	3	0	3	0,78%
2.	Sarjana   Bachelor's Degree	70	23	93	25,41%	74	25	99	25,78%
3.	Sarjana Muda   Baccalaureate's Degree	17	7	24	6,56%	22	6	28	7,29%
4.	SLTA   Senior High School	220	6	226	61,75%	234	6	240	62,50%
5.	SLTP   Junior High School	20	0	20	5,46%	14	0	14	3,64%
6.	SD   Elementary School	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah   Total</b>		<b>330</b>	<b>36</b>	<b>366</b>	<b>100,00%</b>	<b>347</b>	<b>37</b>	<b>384</b>	<b>100,00%</b>

**Jumlah Pekerja Berdasarkan Kelas Jabatan**
**Number of Employees by Class of Position**

No.	Deskripsi Description	2022				2021			
		Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
1.	Kelas Jabatan (5-8) Class of Position (5-8)	12	0	12	3,28%	12	0	12	3,12%
2.	Kelas Jabatan (9-12) Class of Position (9-12)	10	3	13	3,55%	10	3	13	3,38%
3.	Kelas Jabatan (13-16) Class of Position (13-16)	18	7	25	6,83%	19	7	26	6,77%
4.	Kelas Jabatan (17-20) Class of Position (17-20)	21	10	31	8,47%	25	11	36	9,37%
5.	Kelas Jabatan (21-24) Class of Position (21-24)	269	16	285	77,87%	281	16	297	77,34%
<b>Jumlah   Total</b>		<b>330</b>	<b>36</b>	<b>366</b>	<b>100,00%</b>	<b>347</b>	<b>37</b>	<b>384</b>	<b>100,00%</b>

**Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian**
**Number of Employees by Employment Status**

No.	Deskripsi Description	2022				2021			
		Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
1.	Pekerja Tetap Permanent Employee	330	36	366	52,14%	347	37	384	49,54%
2.	Pekerja Tidak Tetap (Kontrak) Contract Employee	2	0	2	0,28%	2	0	2	0,25%
3.	Outsourcing (Tenaga Penunjang) Outsourcing (Supporting) Employee	299	35	334	47,58%	354	35	389	50,01%
<b>Jumlah   Total</b>		<b>631</b>	<b>71</b>	<b>702</b>	<b>100,00%</b>	<b>703</b>	<b>72</b>	<b>775</b>	<b>100,00%</b>

**Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin**
**Number of Employees by Gender**

No.	Deskripsi Description	2022		2021	
		Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
1.	Pria   Male	330	90,16%	703	90,70%
2.	Wanita   Female	36	9,84%	72	9,29%
<b>Jumlah   Total</b>		<b>366</b>	<b>100,00%</b>	<b>366</b>	<b>100,00%</b>



### Jumlah Pekerja Berdasarkan Masa Kerja

### Number of Employees by Years of Service

No.	Deskripsi Description	2022				2021			
		Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Komposisi Composition
1.	<3	0	0	0	0%	18	2	20	5,20%
2.	4-5	284	28	311	84,97%	290	27	317	82,55%
3.	6-10	14	3	17	4,64%	11	3	14	3,64%
4.	11-15	15	4	19	5,19%	14	4	18	4,68%
5.	16-20	5	0	5	1,37%	3	0	3	0,78%
6.	21-25	3	0	3	0,82%	3	0	3	0,78%
7.	26-30	4	1	5	1,37%	2	1	3	0,78%
8.	>30	5	0	5	1,37%	6	0	6	1,56%
<b>Jumlah   Total</b>		<b>330</b>	<b>36</b>	<b>366</b>	<b>100,00%</b>	<b>347</b>	<b>37</b>	<b>384</b>	<b>100,00%</b>

### Rekrutmen dan Seleksi

Perusahaan senantiasa memastikan untuk mendapatkan SDM unggul dan berkualitas. Proses ini diawali dengan rekrutmen dan seleksi dengan menerapkan prinsip *"the right man in the right place at the right time"* secara efektif, tepat, dan akurat. Komitmen ini diperkuat dengan pengelolaan SDM yang mengedepankan kesejahteraan pekerja dan memberikan imbalan sesuai dengan prestasi yang dicapai sesuai kemampuan Perusahaan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Penetapan dan pemenuhan kebutuhan organisasi Perusahaan mengacu pada *manpower planning* (MPP). MPP ditentukan berdasarkan tujuan, strategis bisnis, dan rencana kerja tahunan atau rencana bisnis yang telah disusun Manajemen.

Sampai dengan saat ini, pengisian formasi/jabatan di struktur organisasi Perusahaan dilakukan melalui jalur rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal.

#### 1. Rekrutmen Internal

Rekrutmen internal dilakukan melalui pemilihan dan seleksi talenta internal menggunakan promosi dan suksesi serta Organik Perbantuan dari pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditempatkan di MTI.

#### 2. Rekrutmen Eksternal

Rekrutmen eksternal dilaksanakan melalui mekanisme penjangkaran dan rekomendasi pekerja, lembaga pendidikan, *job fair*, *head hunter*, dan media iklan.

### Recruitment and Selection

The Company has always tried to hire excellent and qualified human resources. This process begins with recruitment and selection using the principle of *"the right man in the right place at the right time"* effectively, precisely, and accurately. This commitment is strengthened by the HR management that prioritizes employee welfare and compensate them according to their performances, the Company's capabilities, and the prevailing labor regulations.

The Company relies on the manpower planning (MPP) to set and fulfill its needs. MPP is determined based on current objectives, business strategy, and annual or business plans that the Management has prepared.

Currently, the formations/positions within the Company's organizational structure is carried out through the internal and external recruitment.

#### 1. Internal Recruitment

Internal recruitment is carried out by electing and selecting internal talents through the provision of promotions and succession plans and Seconded Organic Employees, employees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) who are placed to work at PT MTI.

#### 2. External Recruitment

External recruitment is carried out through a mechanism of screening and recommendation of employees, educational institutions, job fairs, head hunters, and advertising media.

Pada tahun 2022, Perusahaan tidak merekrut pekerja baru. Dengan demikian rincian pekerja yang direkrut dan meninggalkan Perusahaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

In 2022, the Company did not make any recruitments. Therefore, the information regarding new recruits and those who left the Company in 2022 is as follows:

Uraian Description	Jumlah Total
Jumlah Pekerja Awal Tahun Total Employees at the Beginning of the Year	774
Pekerja Baru 2022 New Employees in 2022	0
Pekerja yang Berakhir Hubungan Kerja* pada 2022 Employees whose Employment Ended in 2022	72
<b>Jumlah Pekerja Akhir Tahun 2022</b> <b>Total Employees at the End of 2022</b>	<b>702</b>

Keterangan | Remarks:

\*) Kategori ini termasuk pekerja yang pensiun normal, dimutasi kembali ke Holding, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan pemutusan hubungan kerja karena tindakan indisipliner.

This category covers employees who retire normally, transferred back to the Holding, passed away, resigned, and terminated due to disciplinary action.

### Pengembangan Kompetensi SDM

Pengembangan SDM membantu Perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan bagi karyawan, pengembangan ini membantu mereka mendapatkan kesempatan untuk semakin berkembang dan dipromosikan. Penting bagi Perusahaan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan sejumlah keterampilan dan informasi terkini. Manajemen memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pekerja untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang relevan untuk membantu mereka dalam melakukan pekerjaannya.

Program pengembangan ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan, kursus, seminar, dan *workshop* yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Pada tahun 2022, program pelatihan yang diselenggarakan Perusahaan untuk karyawannya adalah sebagai berikut. Informasi ini berkaitan dengan informasi pelatihan bagi para organ Perusahaan yang telah disampaikan dalam Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal.

### HR Competency Development

HR development helps the Company to achieve business goals and for employees, it helps them with the opportunity to improve and get promoted. It is important to continue developing its human resources with important skills and knowledge. The Management provides equal opportunity for everyone to receive trainings that are relevant to helping them in doing their jobs.

This development program takes many form such as training, courses, seminars, and workshops, which tailored to what the Company needed. In 2022, the training programs that the Company has organized for its employees were as follows. This information is related to the training information for Company organs which has been disclosed in the Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

### Informasi Pelatihan Berdasarkan Kelas Jabatan

### Training Information by Employee Position

No.	Kelas Jabatan Class of Position	Informasi Pelatihan Training Programs	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Costs
1.	Direksi Board of Directors (BOD)	-	-	-
2.	Komisaris Board of Commissioners (BOC)	Workshop "Learning the Technique to Identify, Acquire, Process, and Analyze Electronic Data for an Effective Investigation"	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing	2.000.000
3.	Komite Audit Audit Committee	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webinar "Leveraging The Roles of Audit Committee"</li> <li>Workshop "Learning the Technique to Identify, Acquire, Process, and Analyze Electronic Data for an Effective Investigation"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>YPIA</li> <li>Lembaga Pengembangan Fraud Auditing</li> </ul>	3.061.224 2.000.000

No.	Kelas Jabatan Class of Position	Informasi Pelatihan Training Programs	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Costs
4.	Manajer Senior Senior Manager	• In House Training "Logistic Control Tower (LCT) Batch 1"	• MTI	-
		• In House Training "Logistic Control Tower (LCT) Batch 2"	• MTI	-
		• In House Training "VAT Application"	• MTI	-
		• Certification on Hazardous Waste Management	• Athraya Training Center	18.000.000
		• FLO "Collaborative Corporate Culture Internalization of AKHLAK"	• MTI	-
		• Innovation Challenge Final Validation	• PMLI	-
		• Two Days Customs Seminar	• Pusat Pengkajian Ekspor Impor Nasional	6.000.000
		• Sharing and Learning "World Class Leading Terminal Operator"	• Sub Holding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP)	-
		• Webinar "Measuring Experiential Learning Effectiveness"	• LPPM	8.000.000
		• Webinar "Certified Industrial Relation Manager"	• LPPM	-
		• Webinar "Certified Professional Marketer"	• LPPM	-
		• Webinar "Business Essentials For Managers"	• LPPM	-
		• Customs Expert Training of PPJK	• CBM Institute	26.300.000
		• Webinar "Opportunities & Challenges of Logistics Transportation in Digital Era"	• Supply Chain Indonesia	-
		• Webinar "Impact Of Business Intellegence In Supply Chain And Logistics Industry"	• Asosiasi Logistik Indonesia	-
		• FIATA Certification Diploma in Freight Forwarding	• PMLI	-
		• Workshop I "Preparation of Technical Competency Dictionary of Logistics and Hinterland Development"	• PMLI	-
		• ASEAN Supply Chain Webinar "Strengthening Supply Chain Resilience through Connectivity and Sustainability"	• ASEAN Business Advisory Council	12.000.000
		• Audit Internal Certification of ISO Quality Management 9001:2015	• PT Multi Terminal Indonesia	-
		• Workshop "Logistics Module Development"	• Pelindo Solusi Logistik	-
		• Supply Chain Management Online	• PT Synergistix Indonesia	6.500.000
		• Integrated Service Of Fulfillment Cold Chain	• Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia	2.000.000
		• Workshop II "Preparation of Technical Competency Dictionary of Logistics and Hinterland Development"	• PMLI	-
		• National Seminar "Securing National Vital Object by INKOPPOL 2022"	• INKOPPOL	-
		• Workshop Preparing Step By Step Risk-Based Annual Audit Plan	• Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia	-
		5.	Supervisor Staff	• Ngobras (Ngobrol Santai) "Faster Learning Organization with Supervisor & Coordinator"
• In House Training "Logistic Control Tower (LCT) Batch 1"	• MTI			-
• In House Training "Logistic Control Tower (LCT) Batch 2"	• MTI			-
• In House Training "VAT Application"	• MTI			-
• Certification on Hazardous Waste Management	• Athraya Training Center			27.000.000
• FLO "Collaborative Corporate Culture Internalization of AKHLAK"	• MTI			-
• Webinar "Swiftly Handling Office Conflict"	• PT Dunamis			6.000.000
• Two Days Customs Seminar	• Pusat Pengkajian Ekspor Impor Nasional			-
• Sharing and Learning "World Class Leading Terminal Operator"	• Sub Holding Pelindo terminal Petikemas (SPTP)			-
• Webinar "Measuring Experiential Learning Effectiveness"	• LPPM			-
• Webinar "Certified Industrial Relation Manager"	• LPPM			-
• Webinar "Certified Professional Marketer"	• LPPM			-
• Webinar "Business Essentials for Managers"	• LPPM			-
• Dangerous Goods Training IMDG Code PM16	• Athraya Training Center			18.000.000
• First Batch Hiperkes and KK Training for Officers/Members of P2K3	• Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi UPT. Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja			-



No.	Kelas Jabatan Class of Position	Informasi Pelatihan Training Programs	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Costs
	Supervisor Staff	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop "Reinforcement Change Management for Change Agent"</li> <li>Certification of Government Procurement Expert</li> <li>Webinar "Opportunities &amp; Challenges of Logistics Transportation in Digital Era"</li> <li>Webinar "Impact Of Business Intelligence In Supply Chain And Logistics Industry"</li> <li>FIATA Certification Diploma in Freight Forwarding</li> <li>Workshop I "Preparation of Technical Competency Dictionary of Logistics and Hinterland Development Digital Marketing</li> <li>Audit Internal Certification of ISO Quality Management 900115:2015</li> <li>Workshop "Excellent Service"</li> <li>Workshop "Logistics Module Development"</li> <li>Supply Chain Management Online</li> <li>Integrated Service of Fulfillment Cold Chain</li> <li>Workshop II "Preparation of Technical Competency Dictionary of Logistics and Hinterland Development Digital Marketing</li> <li>Occupational Health and Safety (SMK3) System</li> <li>Online Training and Certification of BNSP Manager of HR Manager</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PELINDO</li> <li>Lembaga Sosialisasi dan Edukasi Indonesia</li> <li>Supply Chain Indonesia</li> <li>Asosiasi Logistik Indonesia</li> <li>PMLI</li> <li>PMLI</li> <li>PT Tuw Global International</li> <li>MTI</li> <li>Pelindo Solusi Logistik</li> <li>Pelindo Solusi Logistik</li> <li>PT Synergistix Indonesia</li> <li>PMLI</li> <li>Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)</li> <li>Fritmandiri Utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>4.750.000</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>39.450.000</li> <li>-</li> <li>10.000.000</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>16.000.000</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>16.800.000</li> </ul>
<b>Total Biaya   Total Cost</b>				<b>223.861.224</b>

### Informasi Pelatihan Berdasarkan Partisipasi Karyawan

### Training Information by Employee Participation

No.	Golongan Pekerja Class of Employee	Jumlah Peserta Number of Participants	Persentase (%) Percentage (%)
1.	BOC	5	63%
2.	BOD	-	0%
3.	BOD-1	12	109%
4.	BOD-2	40	133%
5.	BOD-3	124	258%
6.	BOD-4	189	68%

### Biaya Pengembangan SDM 2022

Berdasarkan informasi program pelatihan yang diikuti para pekerja, tercatat bahwa Perusahaan telah menghabiskan Rp223.861.224 untuk menjalankan semua program tersebut. Jumlah tersebut meningkat 119% dibandingkan jumlah tahun 2021 sebesar Rp188.550.000.

### HR Development Cost in 2022

Based on information on the training programs which all employees have taken, the amount of money the Company spent to organize all programs amounted Rp223,861,224. It was higher by 119% compared to the Rp188,550,000 spent in 2021.

### Kesetaraan Karyawan

Perusahaan membuka kesempatan yang sama bagi karyawan tanpa memandang gender, suku, ras, dan agama dalam mengembangkan karier, kompetensi, hingga mendapatkan kompensasi (paket remunerasi). Perusahaan memiliki standar khusus untuk menilai kualitas para pekerja saat dipromosikan ataupun mendapatkan kenaikan kompensasi. Standar tersebut ditetapkan berdasarkan kualifikasi profesional yang berlaku bagi seluruh pekerja.

### Equal Treatment for All Employees

The Company assures all employees receive equal treatment regardless of their gender, ethnicity, race and religion when it comes to improving their careers, competencies, and when receiving compensation (remuneration package). The Company has set a certain standard to assess the quality of its employees when they are promoted or receive an increase in compensation. This standard is applicable for all employees and has been set based on professional qualifications.

Bila berdasarkan gender, komposisi pekerja pria pada tahun 2022 adalah sebesar 89,89% dan pekerja wanita adalah 10,11% dari keseluruhan pekerja. Memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan bahwa komposisi pekerja pria lebih banyak dibandingkan wanita. Hal ini wajar mengingat bidang usaha kepelabuhan yang sangat mengandalkan fisik, terutama bagi pekerja lapangan.

Walaupun demikian, Perusahaan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja pria dan wanita untuk mendapatkan posisi penting di Perusahaan. Salah satu contoh penerapan kesetaraan gender bagi para karyawan adalah adanya seorang wanita dalam jajaran Direksi Perusahaan. Selain itu, salah satu jajaran pejabat struktural BOD-1 terdapat seorang wanita yang menjabat.

### Penilaian Pekerja

Perusahaan menjaga kualitas para pekerjanya, salah satunya melalui sistem manajemen kinerja yang diselaraskan dengan visi, misi, dan target usaha. Pelaksanaan manajemen kinerja meliputi proses penetapan target kerja, pemantauan (*monitoring*), dan penilaian kinerja. Sistem ini menitikberatkan kepada penilaian kinerja para pekerja secara efektif dan efisien berdasarkan target yang telah ditetapkan. Kinerja setiap karyawan dinilai menggunakan form setiap triwulan.

Hasil penilaian dijadikan sebagai salah satu dasar untuk memberikan rekomendasi peningkatan kompetensi dan perbaikan kinerja individu di masa mendatang. Hasil penilaian juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi untuk memberikan kesempatan pengembangan karier.

Sistem penilaian membantu para pekerja untuk menjalankan tugas mereka secara optimal, menumbuhkan loyalitas, dan mendukung iklim kerja yang positif untuk terus bertumbuh.

Berdasarkan hasil penilaian pekerja yang dilaksanakan tahun 2022, rata-rata kinerja para pekerja mengalami pertumbuhan yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan laba tahun berjalan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya.

### Hubungan Industrial

MTI berkomitmen untuk terus menciptakan suasana kerja yang transparan, positif, dan progresif dalam rangka meningkatkan hubungan industrial yang adil, dinamis, dan harmonis. Pelaksanaan hubungan industrial di lingkungan Perusahaan dibangun atas dasar pemahaman bahwa Perusahaan dan pekerja berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi hak, serta menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Prinsip umum hubungan kepegawaian yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

When talking about gender, the composition of male workers in 2022 was 89.89% and female workers was 10.11% of all workers. Indeed, there is a significant difference in the composition whereas the Company hires more male workers than female workers. This is understandable considering that the port sector relies heavily on physical prowess, especially for workers on the field.

Nevertheless, the Company continues with its commitment to treat both male and female employees equally to occupy important positions at the Company. An example of gender equality for employees is the presence of a female Director within the ranks of the Board of Directors of the Company. In addition, one of the BOD-1 structural officials is also occupied by a female Senior Manager.

### Employee Assessment

The Company maintains the quality of its employees through a performance management system which has been aligned with the Company's vision, mission and business targets. The performance management has been implemented in various aspects especially when determining business targets, monitoring, and evaluating the performance of its employees. This system has been set to focus on performing an effective and efficient assessment system on the performance of its employees. Their performance is assessed based on certain targets using a form and conducted every quarter.

The result of the assessment serves as a basis to determine certain training programs, if needed, for future development. The result of the assessment is also used for the Company to consider the future of the employee's career.

The assessment helps employees to perform optimally, fosters loyalty, and supports a working situation that is positive to grow.

Based on the employee assessment in 2022, the average performance of all employees grew was higher compared to last year, which seen from increase in the Company's revenues and income for the year.

### Industrial Relations

MTI is always committed when it comes to creating a transparent, positive, and progressive working atmosphere in order to maintain a fair, dynamic, and harmonious industrial relations. The industrial relations within the Company is built on the understanding that the Company and employees both are doing their best to fulfill their rights, and meet their obligations and responsibilities. The general principles of employment relations within the Company are as follows:

1. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan mendorong pekerja untuk lebih aktif, terutama melalui organisasi pekerja yang diakui oleh Perusahaan;
2. Menciptakan kegiatan yang dapat meningkatkan *level of engagement* pekerja terhadap Perusahaan sehingga membawa dampak positif bagi kinerja Perusahaan;
3. Menciptakan lingkungan yang aman dan transparan dalam bekerja untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman.

Perusahaan memiliki Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Multi Terminal Indonesia (SPMTI) yang telah dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SPMTI Tanggal 22 Nopember 2016 dan Keputusan Musyawarah Kerja Luar Biasa Serikat Pekerja Multi Terminal Indonesia Nomor: MUSKERLUB-2021/3/6/2/SPMTI tanggal 3 Juni 2021. Sebanyak 344 pekerja (95,8% dari keseluruhan pekerja MTI) tergabung di Serikat Pekerja.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan pekerja telah diatur dan disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB ini senantiasa ditelaah bersama setiap 2 (dua) tahun sekali, guna menentukan kesepakatan-kesepakatan baru yang perlu ditetapkan antara pekerja dan Manajemen. PKB tersebut juga telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nomor: 2232/I/SP/III/2017 tanggal 13 Januari 2017 dengan nomor Perjanjian Kerja Bersama (PKB) nomor: HK.486/30/11/1/MTI-2021 dan PK.117/30/III/SPMTI-2021 tanggal 30 November 2021.

Pada tahun 2022 tidak terdapat permasalahan hubungan industrial yang tergolong material dan dapat menghambat keberlangsungan usaha.

#### **Kesejahteraan Pekerja**

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu target Perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Realisasinya dapat dilakukan melalui berbagai cara meliputi remunerasi dan kompensasi, fasilitas non-finansial, serta pemenuhan kepuasan pekerja. Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam memastikan kesejahteraan pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Walaupun demikian, terdapat manfaat lainnya yang melebihi regulasi dan juga disesuaikan untuk menjaring dan mempertahankan talenta terbaik. Perusahaan memandang hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan usaha dan peningkatan kinerja usaha.

1. Creating harmonious industrial relations by encouraging employees to be more proactive, especially through a union recognized by the Company;
2. Creating activities that may increase the level of employee engagement to help boost the Company's performance;
3. Creating a safe and transparent working environment to create a comfortable working atmosphere.

The Company has a Labor Union called the Union of Multi Terminal Indonesia Employees (SPMTI) which was formed based on the Articles of Association of SPMTI dated November 22, 2016 and the Decree of the Extraordinary Meeting of the Multi Terminal Indonesia Employees Number: MUSKERLUB-2021/3/6/2/SPMTI on June 3, 2021. A total of 344 employees (95.8% of all MTI employees) are members of the Union.

The fulfillment of the rights and obligations between the Company and employees has been mutually regulated and agreed upon in the Collective Labor Agreement (PKB). This PKB is constantly reviewed every once in 2 (two) years to determine if there is a need for new agreements to be made between workers and the Management. The PKB has also been registered with the Manpower Office of North Jakarta City Administration of Manpower, Transmigration and Energy Department under the number: 2232/I/SP/III/2017 dated January 13, 2017 with Collective Agreement (PKB) number: HK.486/30/11/1/MTI-2021 and PK.117/30/III/SPMTI-2021 of November 30, 2021.

In 2022 there was no issue related to industrial relations that could be classified as material that may obstruct the course of business.

#### **Employee Welfare**

Employee welfare is one of the targets that the Company is aiming when managing its human resources. What the Company has done to care for its employees is by providing remuneration and compensation, non-financial facilities, as well as ensuring employee satisfaction. The Company has fulfilled its obligation to care for its employees which the prevailing regulations have forced to. In addition, the Company also prepares other benefits beyond regulations which also tailored to attract and retain the best talents. This is important for the Company to ensure business continuity and improve business performance.

## Remunerasi dan Kompensasi

Perusahaan memberikan sistem remunerasi dan kompensasi yang adil dan kompetitif untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan mendorong mereka memberikan kinerja terbaik. Perusahaan menerapkan sistem remunerasi yang proporsional dan transparan sesuai dengan jenjang karier atau jabatan dengan memperhatikan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Adapun aspek yang diatur dalam skema remunerasi dan kompensasi pekerja meliputi:

1. Gaji Merit
2. Tunjangan
  - Tunjangan Jabatan
  - Tunjangan Transportasi
  - Tunjangan *Shift*
  - Tunjangan Non-Struktural
  - Tunjangan Penugasan Dasar (jika ada)
  - Tunjangan Penugasan Lainnya (jika ada)
3. Manfaat (*Benefit*)
  - Tunjangan Hari Raya (THR)
  - Tunjangan Cuti
  - Gaji ke-13
  - BPJS Kesehatan
  - BPJS Ketenagakerjaan

## Fasilitas Non-Finansial

Selain paket remunerasi dan kompensasi, Perusahaan juga memberikan fasilitas lainnya yang bersifat non-finansial. Fasilitas ini disesuaikan dengan jabatan setiap pekerja. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah bantuan kacamata dan juga telepon genggam (HP) setiap 2 (dua) tahun sekali.

## Pemenuhan Kepuasan Pekerja

Perusahaan berupaya memenuhi kesejahteraan pekerja lebih dari sekedar kewajiban dari peraturan berlaku. Pemenuhan kesejahteraan pekerja menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin kepuasan pekerja telah terpenuhi. Survei kepuasan dilakukan secara berkala yaitu setiap 1 (satu) tahun sekali yang meliputi berbagai kriteria sebagai berikut:

- Pola karir
- Remunerasi
- Kesejahteraan
- Loyalitas
- Lingkungan kerja
- Budaya kerja
- Strategi organisasi

Survei kepuasan pekerja tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 25 Oktober 2022 di Kantor Pusat Logistik Regional 1 dengan skor 3,81.

## Remuneration and Compensation

The Company provides a fair and competitive remuneration and compensation system to care for its employees and encourage them to give their best performance. The Company has set a proportional and transparent remuneration system which adjusted according to the positions of each employee by paying attention to the prevailing labor laws.

Various aspects which regulated in the employee remuneration and compensation system are as follows:

1. Merit Salary
2. Allowances
  - Positional allowance
  - Transportation Allowance
  - Shift Allowance
  - Non-Structural Allowance
  - Basic Assignment Allowance (if any)
  - Other Assignment Allowance (if any)
3. Benefits
  - Religious Holiday Allowance (THR)
  - Leave Allowance
  - 13<sup>th</sup> Salary
  - BPJS of Health
  - BPJS of Employment

## Non-Financial Benefits

In addition to remuneration and compensation packages, the Company also provides other non-financial facilities. These facilities are tailored to the position of each employee. For example, the Company facilitates employees in need of glasses or mobile phones (HP) once every 2 (two) years.

## Ensuring Employee Satisfaction

The Company cares for its employees and believe that it is more than just an obligation to the prevailing regulations when it comes to their welfare. Employee welfare is important to ensure their satisfaction are met. The survey of employee satisfaction is conducted once every year covering the following aspects:

- Career patterns
- Remuneration
- Well-being
- Loyalty
- Work environment
- Work culture
- Organizational strategy

The employee satisfaction survey in 2022 was carried out from 17 to 25 October 2022 at the Logistics Headquarters of Regional 1 resulting in a score of 3.81.



### Rencana Pengembangan SDM 2023

Guna memastikan pengembangan pengelolaan SDM secara berkelanjutan, Perusahaan berkomitmen untuk memperkuat kapabilitas dan kualitas SDM melalui perbaikan pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan tujuan bisnis Perusahaan ke depan. Perusahaan telah menyusun rencana pengembangan organisasi dan SDM untuk tahun 2023 sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Organisasi;
2. Implementasi *Knowledge Mapping*;
3. Pengembangan kompetensi Pekerja;
4. Pengelolaan KPI Terintegrasi;
5. Internalisasi Budaya Perusahaan;
6. Transformasi Kearsipan di MTI.

### HR Development Focus in 2023

The Company is committed to strengthening the capabilities and quality of HR by improving the HR management according to the industry needs and the Company's future business objectives to ensure the HR management is developing continuously. Therefore, the Company has prepared an organizational and HR development plan for 2023 as follows:

1. Organizational Restructuring;
2. Knowledge Mapping;
3. Employee competency development;
4. Integrated KPI Management;
5. Internalization of Company Culture;
6. Archives Transformation at MTI.

## Teknologi Informasi

### Information Technology

Perkembangan industri menuntut MTI untuk mempersiapkan dan meningkatkan infrastruktur teknis, terutama dalam pengembangan teknologi berskala besar. Penggunaan teknologi berfungsi untuk mendukung proses bisnis dan meningkatkan kapasitas Perusahaan. MTI, sebagai bagian dari ekosistem logistik nasional, terus mengembangkan teknologi informasi, menghadirkan operasional berbasis digital yang unggul.

Perkembangan industri menuntut MTI untuk mempersiapkan dan meningkatkan infrastruktur teknis, terutama dalam pengembangan teknologi berskala besar. Penggunaan teknologi berfungsi untuk mendukung proses bisnis dan meningkatkan kapasitas Perusahaan. MTI, sebagai bagian dari ekosistem logistik nasional, terus mengembangkan teknologi informasi, menghadirkan operasional berbasis digital yang unggul.

### Pengembangan Teknologi Informasi 2022

Program-program yang telah dijalankan Perusahaan dalam mendukung pengembangan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Sistem konsolidasi ekspor di CDC Banda;
2. Sistem *e-payment* untuk mendukung kegiatan pelunasan piutang pelanggan;
3. Sistem online order pada kegiatan *behandle Common Area*;
4. Integrasi sistem autogate di *Common Area* untuk mendukung penerapan *single truck identification* (STD) di seluruh terminal Pelabuhan Tanjung Priok;
5. Penyusunan *Business Continuity Plan Common Area*;
6. Persiapan integrasi sistem *forwarding* (3pl) dengan sistem *truck management*;
7. Pelaksanaan review *autogate Common Area*;
8. Implementasi *web application firewall* (WAF) untuk meningkatkan perlindungan dari *cyber attack*;
9. Penerapan elektronik *Seal* (eSeal) untuk kegiatan impor PLB di *Common Area*;
10. Pengembangan *order tracking* dengan sistem *premium customer interface* (PCI) untuk memudahkan pelanggan mengetahui status *order*.

### Information Technology Development in 2022

Several programs that the Company has conducted to support the information technology development were as follows:

1. Consolidated the export system at CDC Banda;
2. Implemented the e-payment system to help with the receivables;
3. Implemented the online order system for the *behandle activities within the Common Area*;
4. Integrated the autogate system within the *Common Area* to support the *single truck identification* (STD) of all Tanjung Priok Port terminals;
5. Prepared the *Business Continuity Plan of the Common Area*;
6. Prepared to integrate the *forwarding system* (3pl) and the *truck management system*;
7. Implemented the *autogate reviews of the Common Area*;
8. Implemented a *web application firewall* (WAF) as protection from *cyber attacks*;
9. Applied the *electronic seals* (eSeal) for the import activities of the PLB within the *Common Area*;
10. Improved the *order tracking* with a *premium customer interface* (PCI) system to make it easier for customers to find out the order status.

### Realisasi Anggaran 2022

Selama tahun 2022, realisasi anggaran teknologi informasi tercatat sebesar Rp3,35 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp4,3 miliar. Realisasi ini digunakan untuk mendukung pengembangan teknologi sepanjang 2022. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp6,95 miliar.

### Budget Realization in 2022

During 2022, the Company spent Rp3.35 billion of the budgeted Rp4.3 billion for the information technology development. The budget was used to support the technology development in 2022. This amount was lower compared to the budget of Rp6.95 billion spent in 2021.

### Rencana Pengembangan Jangka Panjang dan 2023

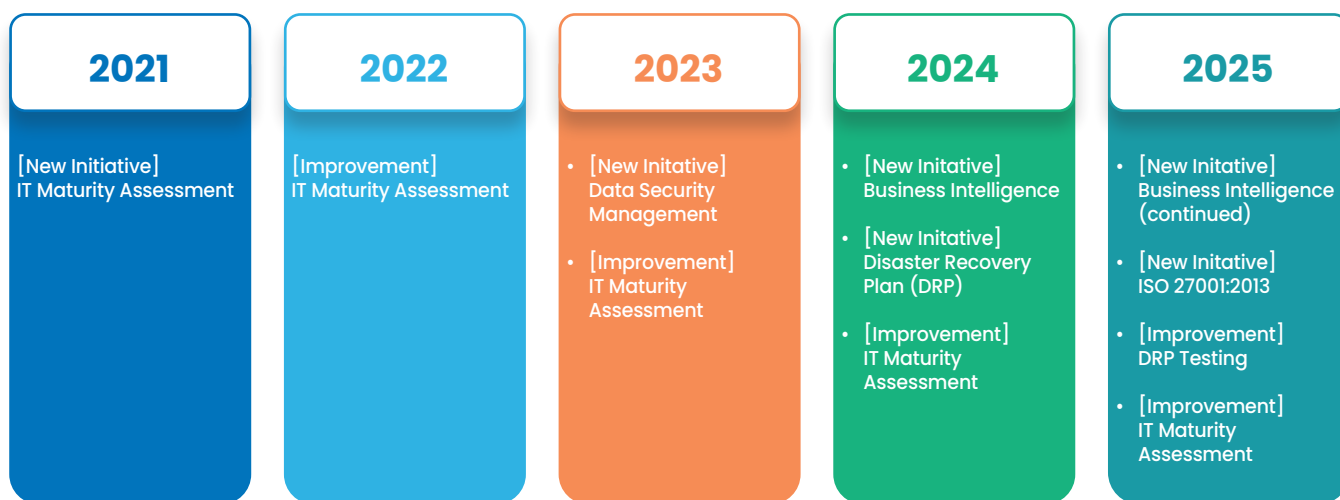
MTI telah menyusun Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dalam jangka panjang sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025. Dari rencana jangka panjang tersebut, Perusahaan telah menetapkan rencana pengembangan untuk tahun 2023.

### Long Term Development Plan and in 2023

MTI has prepared a long term Information Technology Development Plan in accordance with the Company's Long Term Plan (RJPP) of 2021-2025. From this long term plan, the Company has also prepared a development plan for 2023.

### Rencana Jangka Panjang 2021-2025

### Long Term Plan 2021-2025



### Rencana Pengembangan 2023

### Development Plan in 2023



Implementasi *Customer Relationship Management System*  
Implementing the Customer Relationship Management System



Membangun *Data Warehouse System* untuk memenuhi kebutuhan informasi operasi  
Building the Data Warehouse System for information needs regarding the operation



Pengembangan sistem untuk meningkatkan kapabilitas Perusahaan  
System development to grow the Company's capabilities





KOMATSU

20 KOMATSU

PELINDO  
SOLUSI LOGISTIK  
MTI MULTI SCM

Verifone

Verifone

Verifone

Verifone

Verifone

Verifone

Verifone

Verifone

Verifone



# 5

## Analisis & Pembahasan Manajemen

### Management Discussion & Analysis

Pendapatan operasional Perseroan secara keseluruhan mengalami peningkatan terutama dari aktivitas pergudangan, lapangan penumpukan, *freight forwarding*, dan pengelolaan terminal.

The Company earned higher operating revenues from its operation in warehousing, cargo stacking on yards, freight forwarding and terminal operation.





## Tinjauan Umum Ekonomi dan Industri

### General Overview of the Economy and Industry

Awal tahun 2022 banyak negara masih berjuang untuk pulih dari pandemi COVID-19 namun terjadi peristiwa tidak terduga saat Rusia menginvasi Ukraina. Akibatnya pasar komoditas dan rantai pasok mengalami dampaknya, terutama saat harga minyak dunia menyentuh level tertinggi hingga USD105 per barel. Berbeda sangat jauh dari APBN 2022 yang hanya USD63 per barel.

Ekonomi global juga dihadapkan pada tantangan lainnya saat Cina menerapkan kebijakan *zero covid* yang berdampak pada penutupan (*lockdown*) saat kasus COVID-19 di sejumlah kota kembali muncul. Kebijakan ini bukannya tanpa risiko karena keputusan Cina untuk menutup perbatasan dalam negeri juga mempengaruhi ekonomi global, terutama Indonesia, mengingat besarnya pengaruh ekonomi Cina, termasuk bagi pariwisata.

Dana Moneter Internasional (IMF) mencatatkan dalam publikasi *World Economic Outlook Update* pada Januari 2023 bahwa estimasi pertumbuhan ekonomi global 2022 mencapai 3,4%.

Di tengah gejolak pertumbuhan ekonomi global, ekonomi nasional justru tumbuh dengan kuat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan kumulatif sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 sebesar 3,70%.

Semua lapangan usaha tumbuh positif sepanjang tahun, terutama pada sektor-sektor unggulan seperti industri, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan konstruksi. Pertumbuhan tertinggi di sisi produksi berasal dari transportasi & pergudangan, dan akomodasi & makan minum. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh situasi pasca pandemi ketika masyarakat mulai kembali hidup normal, semakin banyak beraktivitas di luar rumah, yang dibarengi dengan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang meningkat di berbagai tempat wisata.

Pulihnya mobilitas menjadi katalis dalam mendorong aktivitas dunia usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Konsumsi rumah tangga meningkat 4,93% secara kumulatif sepanjang tahun dan menyumbang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar untuk tahun 2022 dengan 51,87%. Pendapatan masyarakat yang berangsur pulih mendorong kinerja seluruh kelompok konsumsi, utamanya pada kelompok konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel. Nilai transaksi juga mengalami dampaknya termasuk transaksi uang elektronik, serta kartu debit dan kredit yang tumbuh 5,18% secara kumulatif sepanjang tahun.

In the beginning of 2022, many countries were struggling to recover from the COVID-19 pandemic but an unexpected event occurred when Russia invaded Ukraine. The war affected the commodity markets and supply chains, making the crude oil price skyrocketed to its highest level of up to USD105 per barrel. The actual price was highly different compared to the 2022 State Budget of USD63 per barrel.

The global economy was also shocked by other challenges when China implemented a zero covid policy which resulted in a lockdown when COVID-19 cases re emerged in a number of cities. This policy is not without risks because China's decision to close its domestic borders also affected the global economy, especially Indonesia, considering the large influence of China's economy, such as in tourism.

The International Monetary Fund (IMF) wrote in its *World Economic Outlook Update* of January 2023 that the estimated global economic growth in 2022 was at 3.4%.

In the midst of the global economic shock, the national economy actually grew strongly. The Indonesian Statistics recorded an cumulative growth of 5.31% for Indonesia, higher than the 2021 achievement of 3.70%.

All fields had a positive growth throughout the year, especially in leading sectors such as industry, trade, mining, agriculture, and construction. The highest growth on the production side came from transportation & warehousing, along with accommodation & food service. This growth was mainly driven by the post pandemic situation when people began to live their life normally, doing more activities outside their homes, and this situation was also accompanied by an increase in the number of domestic and foreign tourists.

As community mobility is restored, business activity becomes more aggressive and thus increasing people's income. Household consumption increased 4.93% cumulatively throughout the year and contributed the largest growth to the 2022 Gross Domestic Product (GDP) with 51.87%. People are starting to have better income as they used to and this situation has improved the performance of all consumption groups, especially in the transportation and communications, as well as the restaurants and hotels. In terms of transaction, the value has also increased, especially in the electronic money, as well as debit and credit cards, which grew 5.18% cumulatively throughout the year.

Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2022 mencapai Rp19,588.4 triliun (bertumbuh 5,31% dibanding tahun 2021) dan sektor transportasi & pergudangan mengalami pertumbuhan yang paling pesat dibandingkan sektor lainnya, yakni sebesar 19,87% dan menyumbang sebesar 5,02% dari keseluruhan nilai PDB.

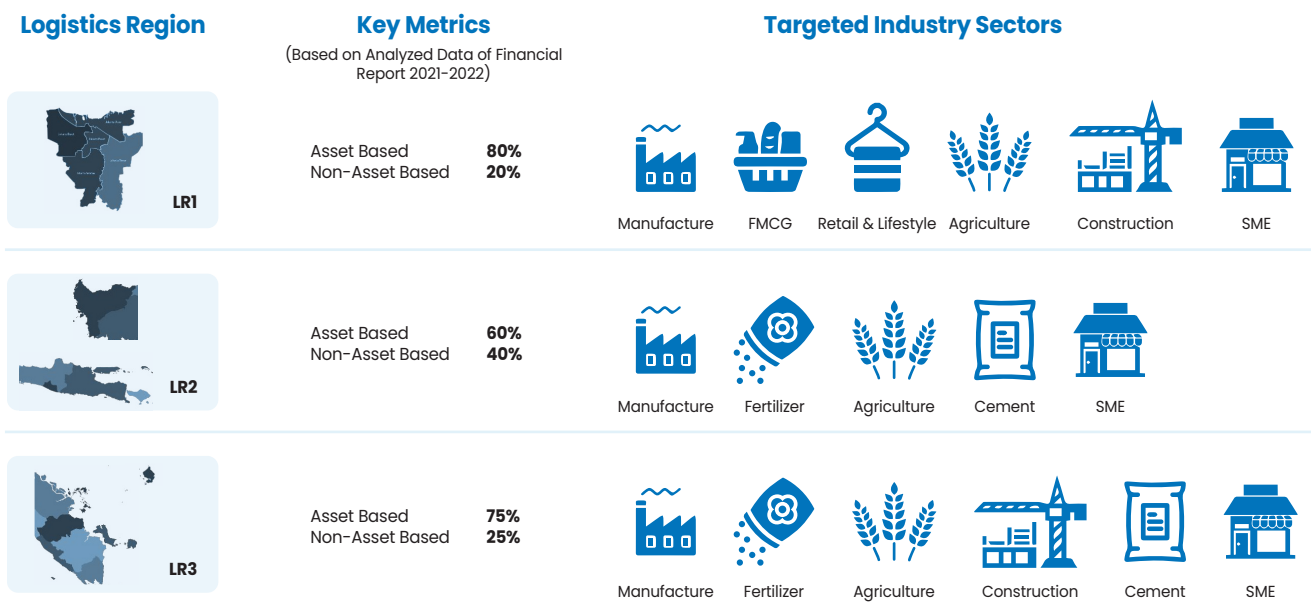
The Gross Domestic Product (GDP) in 2022 reached Rp19,588.4 trillion (grew 5.31% compared to 2021) and the transportation & warehousing sector experienced the fastest growth compared to other sectors, by 19.87% with a 5.02% contribution of the total GDP value.

## Aspek Pemasaran Marketing Aspect

Perseroan membagi segmentasi pasarnya berdasarkan 3 (tiga) wilayah atau Logistik Regional (LR). Segmentasi ini ditetapkan berdasarkan sejumlah sektor industri yang menghasilkan komoditas tertentu. Perseroan juga telah menetapkan *key metrics* yang disusun berdasarkan hasil analisis dari Laporan Keuangan 2021–2022 yang menjelaskan mengenai komposisi *asset-based* dan *non-asset-based* dari setiap Logistik Regional.

The Company divides its market by 3 (three) Logistic Regions (LR). This segmentation is determined based on a number of industrial sectors that produce certain commodities. The Company has also determined the key metrics based on the analysis of the 2021–2022 Financial Report which explains the asset-based and non-asset-based composition of each LR.

### Segmentasi Pasar Market Segmentation



Dalam mengelola setiap Logistik Regional, Perseroan berpegang kepada pengelolaan *Key Account Management*. Setiap pelanggan dikelola sesuai dengan kapasitas mereka sebagai pelanggan kunci (*key customer*) yang ditentukan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Walaupun demikian, secara garis besar, seluruh pelanggan dikelola dengan program pengelolaan pelanggan untuk mendukung dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Sharing Session*  
Pelanggan dan Perseroan saling bertukar informasi dalam sejumlah acara yang bersifat formal dan non-formal seperti *coffee morning*, *casual meeting*, *focus group discussion* (FGD).
2. *Customer Visit*  
Manajemen Perseroan mengunjungi tempat pelanggan *key account* secara regular dan terjadwal.
3. *Customer Gathering*  
Pertemuan para pelanggan setia dalam suatu acara untuk meningkatkan loyalitas mereka.
4. *Customer of the Year*  
Sebuah penghargaan dari Perseroan kepada pelanggan sebagai bentuk apresiasi setiap tahunnya.
5. *Customer Courtesy*  
Kegiatan informal dari Perseroan kepada pelanggan untuk meningkatkan *customer experience* yang dilakukan dalam bentuk pemberian *season's greetings*, surat, email, telepon, atau media komunikasi lainnya saat momen-momen tertentu.
6. *Premium Customer Assistance*  
Perlakuan khusus dalam memprioritaskan penanganan keluhan dari pelanggan.
7. *Other Services*  
Strategi lain untuk mendukung upaya mengelola hubungan dengan pelanggan.

In managing each LR, the Company adheres to the Key Account Management system. Each customer is managed according to their capacity as a key customer which is determined based on internal criteria. However, in general, all customers are managed using a customer management program to support and improve the relationships with customers. These programs are as follows:

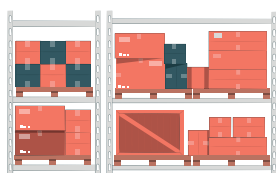
1. *Sharing Sessions*  
Customers and the Company exchange information in normal and non-formal events such as coffee mornings, casual meetings, focus group discussions (FGD).
2. *Customer Visits*  
The Company's Management Team visits the key account on a regular and scheduled basis.
3. *Customer Gathering*  
Meeting loyal customers at a certain event to make them more loyal.
4. *Customer of the Year*  
An annual award from the Company to customers as a form of appreciation.
5. *Customer Courtesy*  
Informal activities from the Company to customers to improve customer experience from sending season's greetings, letters, emails, telephone or other communication channel during certain moments.
6. *Premium Customer Assistance*  
Special treatment in prioritizing which complaints will be handled.
7. *Other Services*  
Another strategy to foster the Company's relationships with customers.



# Tinjauan Kinerja Operasi

## Operational Performance Overview

### Segmen Utama Bisnis MTI Main Segments of MTI's Business



**Warehouse dan Lapangan**  
Warehouse and Fields



**Freight Forwarding**



**Usaha Pengelolaan Terminal**  
Terminal Operation

### Kontribusi Pendapatan Setiap Segmen (Dalam ribu Rupiah)

### Revenue Contribution of Each Segment (In million Rupiah)

PENDAPATAN OPERASIONAL SECARA KESELURUHAN   TOTAL OPERATING REVENUES	2022		2021		Tren Pertumbuhan Growth Trend	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Differences	(%)
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3-1-2)	(3:2)
Warehouse dan Lapangan Warehouse and Fields	274.744	44,86%	268.186	46,91%	6.558	2,45%
Freight Forwarding	187.561	30,63%	189.041	33,07%	(1.480)	(0,78%)
Usaha Pengelolaan Terminal Terminal Operation	150.108	24,51%	114.441	20,02%	35.667	31,17%
<b>Jumlah Pendapatan Total Revenue</b>	<b>612.413</b>		<b>571.668</b>		<b>40.745</b>	<b>7,13%</b>

Besaran kontribusi setiap segmen selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dikatakan masih konsisten. Segmen *warehouse* dan lapangan masih tetap menjadi contributor pendapatan terbesar Perseroan diikuti dengan *freight forwarding* dan pengelolaan terminal.

The contribution rate of each segment for the last 2 (two) years is considered to be consistent. The warehouse and field remains the largest contributors to the Company's revenue, followed by freight forwarding and terminal operation.

### Kinerja Operasional Berdasarkan Target dan Tahun Sebelumnya

### Operational Performance Based on Target and Previous Performance

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi Realization 2021	Realisasi Realization 2022	RKAP 2022	Tren Pertumbuhan Growth Trend 2022:2021	Pencapaian Achievement RKAP 2022
Penerimaan & Pengiriman Receiving & Delivery	Ton/m3	144.617	159.675	228.896	10,41%	69,76%
Penumpukan Stacking	Box	113.297	112.849	163.979	(0,40%)	68,82%
Pelayanan <i>Forwarding</i> Forwarding Service	Box	639.033	610.755	747.825	(4,42%)	81,67%
Pelayanan Pengusahaan Alat Equipment Service	GLC (Ton)	-	642.683	-	-	-
	RTGC (Box)	-	219.434	-	-	-

### Penerimaan & Pengiriman

Kinerja penerimaan & pengiriman belum mencapai target walaupun terjadi peningkatan 10,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun produksi LCL CDC Banda mencapai target karena adanya peningkatan dari PT Indomarsan, produksi gudang *cold storage* HLC masih di bawah target karena penambahan pelanggan baru terjadi pada kuartal keempat tahun 2022. Kegiatan produksi PILP (gudang) tidak terealisasi.

### Penumpukan

Kinerja penumpukan secara keseluruhan juga belum mencapai target. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja penumpukan mengalami sedikit penurunan yaitu 0,40%. Kebijakan Bea Cukai yang mewajibkan YOR Terminal melebihi 65% sebelum melalui PLP dari Terminal Koja, JICT, NPCTI MAL, Terminal 3 mempengaruhi produksi TPS 215X dan TPS HLC. Intensitas kegiatan di CDC Banda belum sesuai target, seperti pada pemeriksaan karantina yang mempengaruhi produksi *Common Area*, dan penurunan volume kontainer LCL yang mempengaruhi produksi *stripping*. Selain itu pada tahun 2022 juga terjadi penurunan kuota produksi dari PT ISL dan penurunan produksi penitipan *reefer* sehingga mempengaruhi produksi Lapangan Domestik HLC. Kegiatan PILP (lapangan) juga tidak terealisasi. Hanya produksi Lapangan Pasoso yang mencapai target karena adanya peningkatan volume produksi dari pelanggan.

### Forwarding

Kinerja *forwarding* belum mencapai target walaupun masih lebih tinggi dari kinerja penerimaan & pengiriman, serta penumpukan. Secara umum, kinerja *forwarding* belum sesuai target karena adanya penurunan volume dan kegiatan termasuk volume petikemas di Terminal Pontianak, volume kedatangan kapal di Pelabuhan Pontianak, volume penjualan yang mempengaruhi produksi *trucking*, dan penurunan kegiatan *clearance* dokumen. Produksi *freight* juga tidak mencapai target karena selain penurunan produksi *sea freight*, pelanggan juga memutuskan untuk melakukan sendiri kegiatan *freight* langsung ke pelayaran.

### Pengusahaan Alat

Kegiatan pengusahaan alat tidak dianggarkan pada tahun 2022 namun Perseroan mendapatkan pengalihan pengelolaan untuk peralatan B/M.

### Receiving & Delivery

The receiving & delivery did not reach the target despite being 10.41% higher than the previous year. Even if the LCL production of the Banda's CDC reached the target from the increase coming from PT Indomarsan, the cold storage warehouse production of HLC still below the target because new customers just came in the fourth quarter of 2022. The PILP (warehouse) production was not realized.

### Stacking

In overall, the Company's stacking performance was off target. When compared with the previous year, the stacking experienced a slight decline by 0.40%. The Customs policy which requires YOR Terminal to exceed 65% before going through the PLP of Terminal Koja, JICT, NPCTI MAL, Terminal 3 affected the production of TPS 215X and TPS HLC. The CDC activities of the Banda also off target which mostly caused by the quarantine inspections which also affected the Common Area production, coupled with a decrease in the LCL of containers which then affected the stripping production. In addition, there was also a decrease in the production quota of PT ISL and reefer storage which affected the production of the HLC Domestic. PILP (field) could not be realized. Only the production of Pasoso Field that was on target because there was an increase in the production volume of the customers.

### Forwarding

The Company also fail to reach the forwarding target despite being higher than the performance of other segments. In general, the forwarding could not met the target because there was a decrease in volume and activities of the containers at Pontianak Terminal, the arrivals of ships at Pontianak Port, the sales volume of trucking production, and document clearance. Freight production also off target because in addition to the decrease in sea freight production, customers had decided to carry out their own freight directly to the shipping line.

### Equipment Service

There was no target when it comes to equipment service, but the Company received a transfer of management for the B/M equipment in 2022.

## Tinjauan Kinerja Keuangan

### Financial Performance Overview

Uraian mengenai tinjauan kinerja keuangan disusun berdasarkan Laporan Keuangan MTI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of EY International*) dan Akuntan Publik Moch. Dadang Syachruna dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan kinerja keuangan Perseroan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The description of financial performance review was prepared based on the Financial Statements of PT MTI for the year ended December 31, 2022, which has been presented in accordance with the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia. The financial statements has been audited by Public Accounting Firm Purwantoro, Sungkoro & Surja (*a member firm of EY International*) and Public Accountant Moch. Dadang Syachruna with the unqualified opinion in all material respects in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

The discussion of the Company's financial performance was presented by taking into account the explanation in the notes to the Financial Statements from the external auditor as an integral part of this Annual Report.

#### Laporan Posisi Keuangan

##### Kinerja Aset

(Dalam ribu Rupiah)

##### Assets Performance

(In thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
<b>ASET</b> ASSETS				
<b>ASET LANCAR</b> CURRENT ASSETS				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	336.451.923	192.776.700	143.675.223	74,53%
Piutang Usaha – Neto Trade Receivables – Net				
Pihak Ketiga Third Parties	38.313.574	59.199.632	(20.886.058)	(35,28%)
Pihak Berelasi Related Parties	51.112.284	47.937.008	3.175.276	6,62%
Piutang Lain-Lain – Neto Other Receivables – Net				
Pihak Ketiga Third Parties	899.892	1.068.142	(168.250)	(15,75%)
Pihak Berelasi Related Parties	184.267.972	147.432.858	36.835.114	74,53%
Persediaan Inventories	707.633	707.633	0	0,00%
Pendapatan Masih Akan Diterima Accrued Revenues				
Pihak Ketiga Third Parties	19.938.729	18.769.374	1.169.355	(15,75%)
Pihak Berelasi Related Parties	16.240.057	30.217.180	(13.977.123)	(46,26%)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Uang Muka Advances	<b>64.225</b>	37.200	27.025	72,65%
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	<b>3.811.793</b>	10.171.320	(6.359.527)	(62,52%)
Beban Dibayar di Muka Prepaid Expenses	<b>16.284.607</b>	21.665.004	(5.380.397)	(24,83%)
<b>Total Aset Lancar Total Current Assets</b>	<b>668.092.689</b>	<b>529.982.051</b>	<b>138.110.638</b>	<b>26,06%</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS</b>				
Investasi Saham Investment in Shares of Stock	<b>3.889.237</b>	3.889.237	0	0,00%
Aset Tetap – Neto Fixed Assets – Net	<b>178.683.804</b>	257.198.875	(78.515.071)	(30,53%)
Aset Hak-Guna – Neto Right-of-Use Assets – Net	-	191.961	(191.961)	(100,00%)
Beban Ditangguhkan – Neto Deferred Charges – Net	<b>51.852.105</b>	57.871.755	(6.019.650)	(10,40%)
Tagihan Restitusi Pajak Estimated Claims for Tax Refund	<b>1.637.132</b>	4.807.739	(3.170.607)	(65,95%)
Aset Tidak Lancar Lain-Lain Other Non-Current Assets	<b>4.111.411</b>	6.839.462	(2.728.051)	(39,89%)
<b>Total Aset Tidak Lancar Other Non-Current Assets</b>	<b>240.173.689</b>	<b>330.799.029</b>	<b>(90.625.340)</b>	<b>(27,40%)</b>
<b>Total Aset Total Assets</b>	<b>908.266.378</b>	<b>860.781.080</b>	<b>47.485.298</b>	<b>5,52%</b>

Total aset Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp908,27 miliar. Terjadi sedikit peningkatan sebesar 5,52% dibandingkan pencapaian tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset lancar pada pos kas dan bank, serta piutang afiliasi. Peningkatan pada kedua pos tersebut sejalan dengan pelunasan piutang serta peningkatan piutang afiliasi atas penjualan 4 (empat) unit GLC ke PT PTP.

The Company's total assets in 2022 were amounted to Rp908.27 billion. There was a slight increase of 5.52% compared to the achievement in 2021. This increase was caused by an increase in current assets of cash and bank, and receivables from affiliates. The increase in these two posts is in line with the settlement of receivables and the increase in receivables from affiliates for the sale of 4 (four) GLCs to PT PTP.



## Kinerja Liabilitas dan Ekuitas

(Dalam ribu Rupiah)

## Liabilities and Equity Performance

In thousand Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS   LIABILITIES AND EQUITY</b>				
<b>LIABILITAS   LIABILITIES</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK   CURRENT LIABILITIES</b>				
Utang Usaha Trade Payables				
Pihak Ketiga Third Parties	<b>3.591.146</b>	1.579.668	2.011.478	127,34%
Pihak Berelasi Related Parties	<b>160.475.380</b>	168.648.856	(8.173.476)	(4,85%)
Utang Lain-Lain Other Payables	<b>1.409.891</b>	1.529.562	(119.671)	(7,82%)
Utang Dividen Dividend Payables	<b>100.000.000</b>	-	100.000.000	100%
Utang Pajak Taxes Payable	<b>2.016.283</b>	2.240.962	(224.679)	(10,03%)
Beban Akrua Accrued Expenses	<b>92.081.976</b>	70.863.056	21.218.920	29,94%
Uang Titipan Customer Deposits	<b>5.251.035</b>	5.521.367	(270.332)	(4,90%)
Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Current Maturities of Long-Term Lease Liabilities	-	105.857	(105.857)	(100,00%)
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>	<b>364.825.711</b>	<b>250.489.328</b>	<b>114.336.383</b>	<b>45,65%</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG   NON-CURRENT LIABILITIES</b>				
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	<b>34.913.038</b>	31.998.613	2.914.425	9,11%
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	<b>7.630.955</b>	13.196.017	(5.565.062)	(42,17%)
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>	<b>42.543.933</b>	<b>45.194.630</b>	<b>(2.650.697)</b>	<b>(5,87%)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES</b>	<b>407.369.704</b>	<b>295.683.958</b>	<b>111.685.746</b>	<b>37,77%</b>
<b>EKUITAS   EQUITY</b>				
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity</b>				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital	<b>17.314.720</b>	17.314.720	0	0,00%
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	<b>376.713.890</b>	526.713.890	(150.000.000)	(28,48%)
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	<b>106.868.064</b>	21.068.512	85.799.552	407,24%
<b>Ekuitas – Neto Equity – Net</b>	<b>500.896.674</b>	<b>565.097.122</b>	<b>(64.200.448)</b>	<b>(11,36%)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>908.266.378</b>	<b>860.781.080</b>	<b>47.485.298</b>	<b>5,52%</b>

Total liabilitas Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp407,37 miliar. Terjadi peningkatan 37,77% dibandingkan pencapaian tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi utamanya karena adanya utang dividen yang belum dibayarkan masing-masing sebesar Rp99.000.000 dan Rp1.000.000 kepada PT Pelindo Solusi Logistik dan Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok.

Sedangkan ekuitas Perseroan pada tahun 2022 tercatat Rp500,90 miliar. Terjadi penurunan 11,36% bila dibandingkan ekuitas tahun 2021 sebesar Rp565,10 miliar. Penurunan tersebut terjadi utamanya karena ada perubahan pada saldo laba akibat penggunaan dana cadangan Perseroan untuk pembagian dividen sebesar Rp150.000.000.

Dengan demikian total liabilitas dan ekuitas Perseroan pada tahun 2022 mencapai Rp908,27 miliar.

The Company's total liabilities in 2022 were amounted to Rp407.37 billion. There was an increase of 37.77% compared to the achievement in 2021. This increase was affected mostly by dividend which has not been paid yet amounting to Rp99,000,000 and Rp1,000,000 to PT Pelindo Solusi Logistik and Koperasi Pegawai Maritim, respectively.

In addition, the Company's equity in 2022 was Rp500.90 billion. There was a decrease of 11.36% when compared to equity in 2021 of Rp565.10 billion. This decrease occurred mainly because of a change in the Company's reserve funds for the distribution of dividends amounting to Rp150,000,000.

Therefore the total amount of liabilities and equity in 2022 reached Rp908.27 billion.

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Dalam ribu Rupiah)

### Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(In thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Pendapatan Operasi Operating Revenues	612.413.190	571.668.330	40.744.860	7,13%
Beban Operasi Operating Expenses	(537.433.940)	(541.129.353)	3.695.413	(0,68%)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	16.920.487	891.886	16.028.601	1797,16%
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	(2.760.889)	(12.039.747)	9.278.858	(77,07%)
<b>LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS</b>	<b>89.138.848</b>	<b>19.391.116</b>	<b>69.747.732</b>	<b>359,69%</b>
Pendapatan Keuangan Finance Income	5.780.785	3.934.472	1.846.313	46,93%
Beban Keuangan Finance Cost	(834.989)	(736.991)	(97.998)	13,30%
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>94.084.644</b>	<b>22.588.597</b>	<b>71.496.047</b>	<b>316,51%</b>
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(16.352.451)	(11.489.597)	(4.862.854)	42,32%
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>77.732.193</b>	<b>11.099.000</b>	<b>66.633.193</b>	<b>600,35%</b>

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
<b>PAJAK PENGHASILAN BADAN CORPORATE INCOME TAX</b>				
Kini Current	-	-	-	-
Tanggungan Deferred	<b>6.115.567</b>	(1.035.417)	7.150.984	(690,64%)
<b>LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR</b>	<b>83.847.760</b>	<b>10.063.583</b>	<b>73.784.177</b>	<b>733,18%</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF INCOME TAX</b>				
<b>Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Items That Will Not be Reclassified to Profit or Loss</b>				
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Remeasurements of Defined Benefit Plans	<b>2.502.298</b>	1.304.457	1.197.841	91,83%
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	<b>(550.506)</b>	(286.981)	(263.525)	91,83%
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF INCOME TAX</b>	<b>1.951.792</b>	<b>1.017.476</b>	<b>934.316</b>	<b>91,83%</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>	<b>85.799.552</b>	<b>11.081.059</b>	<b>74.718.493</b>	<b>674,29%</b>

### Kinerja Pendapatan Operasi (Dalam ribu Rupiah)

### Operating Revenues Performance (In thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Warehouse dan Lapangan Warehouse and Fields	<b>274.744.242</b>	268.185.831	6.558.411	2,45%
Freight Forwarding	<b>187.561.137</b>	189.041.111	(1.479.974)	(0,78%)
Usaha Pengelolaan Terminal Terminal Operation	<b>150.107.811</b>	114.441.388	35.666.423	31,17%
<b>TOTAL</b>	<b>612.413.190</b>	<b>571.668.330</b>	<b>40.744.860</b>	<b>7,13%</b>

Total pendapatan operasi Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp612,41 miliar. Terjadi peningkatan sebesar 7,13% bila dibandingkan pendapatan Rp571,67 miliar pada tahun 2021.

The Company's operating revenues in 2022 amounted to Rp612.41 billion. There was an increase of 7.13% when compared to revenue of Rp571.67 billion in 2021.

Pendapatan gudang meningkat kecuali gudang *cold storage*. Pendapatan lapangan di beberapa area mengalami peningkatan volume pada kegiatan *overbremen* (PLP), begitu juga dengan kegiatan *behandle* di *common area*.

Warehouse income increased except for cold storage. Field income in several areas also increased in volume due to convey (PLP) activities, and behandle activities in the common area.

Pendapatan *freight forwarding* di beberapa area mengalami peningkatan volume produksi yaitu di Jakarta, Lampung, Natuna, dan Pontianak. Walaupun demikian, pendapatan di Surabaya dan Semarang mengalami penurunan akibat volume kegiatan *trucking* dan *customs clearance* yang menurun.

Freight forwarding in several areas experienced an increase in terms of production volume such as in Jakarta, Lampung, Natuna, and Pontianak. However, the income in Surabaya and Semarang declined because the volume of trucking and customs clearance declined.

Pendapatan dari pengelolaan terminal meningkat karena adanya kelebihan *throughput* produksi dari kegiatan Terminal 300.

Income from terminal operation increased due to excess production of throughput from Terminal 300.

### Kinerja Beban Operasi

(Dalam ribu Rupiah)

### Operating Expenses Performance

(In thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Beban Kerjasama Mitra Usaha Partnership Expenses	302.723.335	318.538.841	(15.815.506)	(4,97%)
Beban Pegawai Employee Expenses	71.760.187	64.944.140	6.816.047	10,50%
Beban Umum General Expenses	45.200.998	60.679.103	(15.478.105)	(25,51%)
Beban Bahan Material Expenses	37.956.604	23.525.181	14.431.423	61,34%
Beban Pemeliharaan Maintenance Expenses	37.860.416	26.901.417	10.958.999	40,74%
Beban Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization Expenses	35.763.162	38.943.992	(3.180.830)	(8,17%)
Beban Administrasi Kantor Offices Administration Expenses	3.500.124	3.236.893	263.231	8,13%
Beban Asuransi Insurance Expenses	2.669.114	4.359.786	(1.690.672)	(38,78%)
<b>Total</b>	<b>537.433.940</b>	<b>541.129.353</b>	<b>(3.695.413)</b>	<b>(0,68%)</b>

Total beban operasi Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp537,43 miliar. Tidak jauh berbeda dengan beban sebesar Rp541,13 miliar pada tahun 2021.

The Company's operating expenses in 2022 amounted to Rp537.43 billion. Not that different from the Rp541.13 billion operating expenses in 2021.

Beban pegawai mengalami peningkatan karena ada peningkatan biaya bonus pekerja sejalan dengan peningkatan EBITDA.

Employee expenses increased due to an increase in employee bonus which followed the increase in EBITDA.

Beban bahan meningkat karena adanya peningkatan biaya BBM atas pengelolaan alat bongkar muat dan peningkatan harga solar industri yang signifikan.

Material expenses increased due to an increase in fuel for the stevedoring activity, coupled with a significant increase of the industrial diesel price.

Beban pemeliharaan juga meningkat karena adanya perbaikan alat bongkar muat dan pemeliharaan lainnya seperti penggantian ban, pembuatan *pregate*, pemasangan CCTV dan *fiber optic* di *common area*, serta pembuatan *control tower* di CDC Banda.

Maintenance expenses have also increased because the Company needed to repair the stevedoring equipment and performed other maintenance such as changing tires, making *pregates*, installing CCTV and fiber optics in common areas, and building control towers at CDC Banda.

Beban penyusutan dan asuransi menurun karena sejumlah alat bongkar muat telah dialihkan ke PT PTP.

Depreciation and insurance expenses decreased because a number of stevedoring equipment had been transferred to PT PTP.



Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) menurun karena tidak tercapainya kegiatan *project cargo* dan pengurangan tarif *revenue sharing* ke PSL.

Beban administrasi kantor meningkat karena adanya kegiatan Rapat Dinas.

Beban umum mengalami penurunan karena adanya upaya efisiensi dari Perseroan meskipun upaya ekspansi pasar semakin agresif.

Partnership Expenses (KSMU) decreased due to the failure in achieving project cargo targets and a reduction in revenue sharing rates to PSL.

Office administration expenses increased due to frequent meeting.

General expenses decreased because the Company became more efficient despite being more aggressive in expanding market.

### Kinerja Pendapatan Operasi Lainnya

(Dalam ribu Rupiah)

### Other Operating Income Performance

(In thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Laba Penjualan Aset Gain on Sale of Assets	13.513.688	-	13.513.688	100%
Laba Selisih Kurs Gain on Foreign Exchange	2.756.008	655.010	2.100.998	320,76%
Pendapatan Dividen Dividend Income	587.729	78.938	508.791	644,55%
Lain-Lain Others	63.062	157.938	(94.876)	(60,07%)
<b>Total</b>	<b>16.920.487</b>	<b>891.886</b>	<b>16.028.601</b>	<b>1.797,16%</b>

Total pendapatan operasi lainnya Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp16,92 miliar. Terjadi peningkatan sangat signifikan yaitu sebesar 1.797,16% dibandingkan pencapaian tahun 2021 sebesar Rp891,89 miliar. Peningkatan tersebut utamanya terjadi karena adanya penjualan GLC ke PT PTP yang menghasilkan laba sebesar Rp13,51 miliar pada tahun 2022.

The Company's other operating income in 2022 amounted to Rp16.92 billion. There was a highly significant increase of 1,797.16% compared to Rp891.89 billion in 2021. This increase was mainly due to the sale of GLCs to PT PTP which resulted in a gain of Rp13.51 billion in 2022.

### Kinerja Beban Operasi Lainnya

(Dalam ribu Rupiah)

### Other Operating Expenses Performance

(In thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Pajak yang Tidak Dapat Diklaim Unclaimable Tax	1.345.781	10.484.969	(9.139.188)	779,10%
Rugi Selisih Kurs Loss on Foreign Exchange	273.712	789.841	(516.129)	(65,35%)
Pajak Final Giro dan Deposito Final Tax on Current Account and Deposits	1.141.396	764.937	376.459	49,21%
<b>Total</b>	<b>2.760.889</b>	<b>12.039.747</b>	<b>(9.278.858)</b>	<b>(77,07%)</b>

Total beban operasi lainnya Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,76 miliar. Terjadi penurunan signifikan yaitu sebesar 77,07% dibandingkan pencapaian tahun 2021 sebesar Rp12,04 miliar. Penurunan tersebut utamanya terjadi karena terdapat penurunan pajak yang tidak dapat diklaim sebesar Rp9,14 miliar.

The Company's other operating expenses in 2022 were totalled to Rp2.76 billion. There was a significant decrease of 77.07% compared to Rp12.04 billion. The decrease occurred mainly because of a decrease of unclaimable tax of Rp9.14 billion.

### Kinerja Pendapatan Keuangan

(Dalam ribu Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Pendapatan Bunga Interest Income	4.121.130	3.275.601	845.529	79,48%
Pendapatan Jasa Giro Interest Income on Current Account	1.659.655	658.871	1.000.784	39,70%
<b>Total</b>	<b>5.780.785</b>	<b>3.934.472</b>	<b>1.846.313</b>	<b>68,06%</b>

### Finance Income Performance

(In thousand Rupiah)

Total pendapatan keuangan Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp5,78 miliar. Terjadi peningkatan sebesar 68,06% dibandingkan pencapaian tahun 2021 sebesar Rp3,93 miliar. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pendapatan bunga yang cukup signifikan.

The Company's finance income in 2022 amounted to Rp5.78 billion. There was an increase of 68.06% compared to the Rp3.93 billion finance income in 2021. This increase occurred because of a significant interest income.

### Kinerja Beban Keuangan

(Dalam ribu Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Beban Administrasi Bank Bank Administrative Expenses	834.989	683.076	151.913	22,24%
Beban Bunga Sewa Lease Interest Expenses	-	53.915	(53.915)	(100%)
<b>Total</b>	<b>834.989</b>	<b>736.991</b>	<b>97.998</b>	<b>13,03%</b>

### Finance Costs Performance

(In thousand Rupiah)

Total beban keuangan Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp834,99 miliar. Terjadi penurunan sebesar 13,03% dibandingkan pencapaian tahun 2021 sebesar Rp736,99 miliar. Penurunan tersebut utamanya terjadi karena pada tahun 2022 Perseroan tidak lagi mencatat beban bunga sewa.

The Company's finance costs in 2022 amounted to Rp834.99 billion. There was a 13.03% decrease compared to the Rp736.99 billion finance costs in 2021. This decrease occurred mainly because in 2022 the Company no longer recorded the lease interest expenses.

### Kinerja Laba

Berdasarkan uraian mengenai pendapatan dan beban sebelumnya, maka tercatat bahwa laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp83,85 miliar atau naik signifikan 7 (tujuh) kali lipat dibandingkan tahun 2021. Hasil ini membawa Perseroan mencapai laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp85,80 miliar.

### Income Performance

Based on the previous explanation regarding the Company's revenues and expenses, the Company's income for the year of 2022 amounted to Rp83.85 billion, which was 7 (seven) times higher compared to 2021. This made the Company to achieve a comprehensive income of Rp85.80 billion for the year of 2022.

## Laporan Arus Kas

(Dalam ribu Rupiah)

## Statement of Cash Flows

(In thousand Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi Cash Flows Provided by Operating Activities	<b>150.819.487</b>	37.556.219	113.263.268	301,58%
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows Used in Investing Activities	<b>31.131.506</b>	(2.304.166)	33.435.672	(1451,10%)
Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Cash Flows Used in Financing Activities	<b>(50.105.857)</b>	(1.005.872)	(49.099.985)	4.881,34%
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	<b>11.830.088</b>	14.560.828	(2.730.740)	(18,75%)
Kenaikan Kas dan Setara Kas Increase in Cash and Cash Equivalents	<b>131.845.135</b>	48.807.009	83.038.126	170,14%
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	<b>192.776.700</b>	143.969.691	48.807.009	33,90%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	<b>336.451.923</b>	192.776.700	143.675.223	74,53%

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tercatat sebesar Rp150,82 miliar pada tahun 2022. Terjadi peningkatan 301,58%. Pada tahun 2022, Perseroan mencatatkan perolehan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp31,13 miliar dibandingkan penggunaan kas untuk investasi pada tahun 2021 sebesar Rp2,30 miliar. Dari sisi pendanaan, Perseroan mengeluarkan kas sebesar Rp50,11 miliar pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang hanya mengeluarkan Rp1 miliar.

Dengan demikian kenaikan kas dan setara kas Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp131,84 miliar yang meningkat 170,14% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan kas tersebut membawa Perseroan mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp336,45 miliar pada akhir tahun 2022 yang lebih tinggi 74,53% dibandingkan tahun 2021. Secara keseluruhan peningkatan arus kas terjadi utamanya karena peningkatan tarif PT MAL, pelunasan piutang dari pelanggan, dan penurunan pembayaran kepada *vendor* dari Pelindo Group. Selain itu adanya penerimaan dari pengalihan GLC ke PT PTP.

Cash flow from operating activities was Rp150.82 billion in 2022. There was an increase of 301.58% compared to 2021. In 2022, the Company gained Rp31.13 billion from its investing activities compared to 2021 when the Company spent Rp2.30 billion for several investment. In terms of financing, the Company spent Rp50.11 billion in cash in 2022 compared to the Rp1 billion spent in financing in 2021.

Hence there was an increase of Rp131.84 billion in the Company's cash and cash equivalents in 2022 or 170.14% when compared to 2021. This increase in cash led the Company to record cash and cash equivalents of Rp336.45 billion by the end of 2022 and it was 74.53% higher compared to 2021. Overall, higher cash flow occurred mainly because of an increase in the tariff from PT MAL, settlement of receivables from customers, and a decrease in payments to vendors from the Pelindo Group. In addition, the transfer of GLC to PT PTP generated income for the Company.

## Rasio Keuangan

## Financial Ratios

### Rasio Profitabilitas

Dalam kali

### Profitability Ratios

(In times)

Uraian Description	2022	2021
Operating Ratio	<b>87,74</b>	94,66
EBITDA Margin	<b>18,51</b>	12,13

Uraian Description	2022	2021
Net Profit Ratio	13,69	1,76
Asset Turnover	0,69	0,65
Return On Asset	8,54	3,53
Return On Equity	484,26	58,12
Return On Invested Capital	47,24	4,31

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas Perseroan meningkat pada tahun 2022 bila dibandingkan tahun 2021.

EBITDA Margin mengalami peningkatan menjadi 18,51 dibandingkan 12,13 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas Perseroan meningkat dan tergolong baik karena berada di atas 10% dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Return On Asset, Equity, Invested Capital juga mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

The Company is able to improve its level of profitability in 2022 compared to 2021.

EBITDA Margin has increased to 18.51 compared to the 12.13 in 2021. This shows that the Company's profitability has increased and can be considered as excellent as it has reached above 10% in the last 2 (two) years.

Return On Assets, Equity, Invested Capital also significantly higher in 2022 compared to 2021.

### Kemampuan Membayar Utang

### Solvency

#### Rasio Likuiditas

Dalam kali

#### Liquidity Ratio

In times

Uraian Description	2022	2021
Rasio Kas Cash Ratio	0,92	0,77
Rasio Lancar Current Ratio	1,83	2,12

Rasio kas tahun 2022 tercatat sebesar 0,92 dan angka ini lebih tinggi dari catatan tahun 2021 sebesar 0,77. Rasio lancar tahun 2022 tercatat sebesar 1,83 dan angka ini lebih rendah dari catatan tahun 2021 sebesar 2,12. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan masih mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek seiring peningkatan kas dan setara kas walaupun terdapat peningkatan utang. Hal ini wajar karena Perseroan sedang berupaya untuk memperluas jangkauan usahanya melalui sejumlah proyek kerja sama.

The cash ratio in 2022 was 0.92 and it was higher than the recorded 0.77 in 2021. The current ratio in 2022 was 1.83 and it was lower than the recorded 2.12 in 2021. This shows that the Company is able to pay its short-term obligations since its cash and cash equivalents increased even when debt also increased. This is natural because the Company is trying to expand its business through several projects of collaboration

#### Rasio Solvabilitas

Dalam kali

#### Solvency Ratio

In times

Uraian Description	2022	2021
Financing Debt to EBITDA	3,22	3,61
Financing Debt to Equity	0,73	0,44
Financing Debt to Asset	0,55	0,66



Dapat dilihat bahwa di antara ketiga rasio solvabilitas di atas, nilai *Financing Debt to EBITDA* merupakan yang paling tinggi walaupun terjadi penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Perseroan perlu memperhatikan tingkat pencapaian laba agar dapat membayar seluruh utangnya. Walaupun demikian, Perseroan memiliki ekuitas dan aset yang cukup baik untuk melunasi kewajibannya.

Among the three solvency ratios, the Financing Debt to EBITDA has the highest value even when there was a decline from 2021 to 2022. The Company needs to pay more attention to the level of profit to pay all of its debts. Nonetheless, the Company has sufficient equity and assets to pay off its obligations..

## Kolektibilitas Piutang

## Collectability

### Rasio Aktivitas

Dalam hari

### Activity Ratio

In days

Uraian Description	2022	2021
Average Payment Period	237,88	213,92
Average Collection Period	39,11	70,54
Collection Period	39,11	70,54

Secara garis besar, tingkat collection period Perseroan mengalami peningkatan dari 70,54 hari pada tahun 2021 menjadi 39,11 hari pada tahun 2022.

In general, the Company's collection period is better in 2022 compared to 2021, from 70.54 days to 39.11 days.

### Analisis Umur Piutang Usaha

(Dalam ribu Rupiah)

### Aging Analysis of Trade Receivables

In thousand Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Belum Jatuh Tempo Not Yet Overdue	2.515.666	4.996.751	(2.481.085)	(49,65%)
<b>Lewat Jatuh Tempo Overdue</b>				
1-30 Hari   Days	19.998.414	10.590.744	9.407.670	88,83%
31-60 Hari   Days	7.959.045	13.013.822	(5.054.777)	(38,84%)
61-150 Hari   Days	65.267.133	7.992.382	57.274.751	716,62%
Lebih Dari 150 Hari Over 150 Days	86.998.919	154.279.252	(67.280.333)	(43,61%)
<b>Saldo Awal Beginning Balance</b>	182.739.177	190.872.951	(8.133.774)	(4,26%)
Penyisihan Penurunan Nilai Allowance For Impairment	(93.313.319)	(83.736.311)	(9.577.008)	11,44%
<b>Neto Net</b>	89.425.858	107.136.640	(2.481.085)	(2,32%)

Berdasarkan evaluasi Manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Based on the Management's evaluation of the collectability of the individual trade receivable accounts as of December 31, 2022 and 2021, the Management believes that the allowance for impairments is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

### Struktur Modal

(Dalam ribu Rupiah)

### Capital Structure

In thousand Rupiah

Uraian Description	2022		2021		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Komposisi Composition %	Jumlah Total	Komposisi Composition %	Selisih Differences	Persentase Percentage %
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	<b>364.825.711</b>	<b>40,17%</b>	250.489.328	29,10%	114.336.383	45,65%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	<b>42.543.933</b>	<b>4,68%</b>	45.194.630	5,25%	(2.650.697)	(5,87%)
Total Liabilitas Total Liabilities	<b>407.369.704</b>	<b>44,85%</b>	295.683.958	34,35%	111.685.746	37,77%
Total Ekuitas Total Equity	<b>500.896.674</b>	<b>55,15%</b>	565.097.122	65,65%	(64.200.448)	(11,36%)
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	<b>908.266.378</b>		860.781.080		47.485.298	5,52%

Proporsi ekuitas MTI terhadap struktur modal tahun 2022 tercatat sebesar 55,15% yang berarti lebih tinggi dari proporsi liabilitas terhadap struktur modal yang tercatat sebesar 44,85%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, komposisi ekuitas dalam struktur modal Perseroan pada tahun 2022 menurun dari 65,65% menjadi 55,15% dan komposisi liabilitas meningkat dari 34,35% menjadi 44,85%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 169 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 1, perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar 4:1. Manajemen menilai bahwa struktur modal Perseroan pada tahun 2022 masih berada dalam kategori baik karena komposisi ekuitas terhadap struktur modal masih lebih besar dari komposisi liabilitas.

#### Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal dan Dasar Kebijakannya

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan rasio modal yang sehat tetap terjaga untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. MTI mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, sesuai kondisi ekonomi terkini. Dalam memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pengelolaan struktur modal selama tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022.

The proportion of equity to the capital structure of MTI in 2022 was 55.15% and it was higher than the proportion of liabilities to the capital structure of 44.85%. Compared to 2021, the composition of the Company's equity to the capital structure in 2022 was lower from 65.65% to 55.15% but the composition of the liability went higher from 34.35% to 44.85%.

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 169 of 2015 Article 2 Paragraph 1, the highest ratio between debt and capital shall be 4:1. The Management considers that the Company's capital structure in 2022 is adequate because the composition of equity to capital structure remained greater than the composition of liabilities.

#### Management Policy and the Basis of Policy of Capital Structure

The main objective of the Company's capital management is to ensure the Company has a sound capital ratio to support the business and maximize the shareholders' returns. MTI manages the capital structure and makes adjustments, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, MTI may issue new shares or seek funding through loans. There were no changes to the goals, policies and processes throughout the years ended on December 31, 2021 and 2022.

## Investasi Barang Modal Capital Expenditure

Perseroan melakukan investasi atas barang modal untuk mendukung aktivitas operasional di sektor pelayanan jasa logistik.

Pada tahun 2022 nilai investasi yang direalisasikan untuk barang modal tercatat sebesar Rp4,74 miliar, mengalami penurunan sebesar 31,80% atau Rp2,21 miliar dari tahun 2021 sebesar Rp6,95 miliar, dengan uraian sebagai berikut:

The Company made several investment to support the service operation in the logistics sector.

In 2022, the investment for capital expenditure amounted Rp4.74 billion and it was lower by 31.80% or Rp2.21 billion from the Rp6.95 billion investment in 2021, with the following description:

(Dalam ribu Rupiah)

In thousand Rupiah

Uraian Description	2022	2021	Tren Pertumbuhan Growth Trend	
			Selisih Differences	(%)
Bangunan Fasilitas Pelabuhan Building of Port Facilities	1,38	-	1,38	100%
Peralatan Tools	3,36	6,95	(3,59)	(51,65%)
Total Nilai Investasi Total Investment Value	4,74	6,95	(2,21)	(31,80%)

### Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Investasi barang modal Perseroan sejumlah Rp4,74 miliar diadakan melalui sejumlah perikatan material dengan pihak berelasi dan pihak ketiga. Tidak terdapat ikatan yang dapat dikategorikan sebagai ikatan material dalam memenuhi investasi barang modal tersebut karena investasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kegiatan usaha dan merupakan investasi yang tergolong normal.

### Material Commitment for Capital Goods Investment

The Company made the Rp4.74 billion investment through material agreements with both related parties and third parties. There were no material commitment that was made when the Company made the investment because it was all made as part of daily business activities and can be considered as normal investment.

### Perlindungan Terhadap Risiko Mata Uang Asing

MTI menghadapi risiko terhadap nilai tukar mata uang asing saat melakukan investasi barang modal. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mempengaruhi nilai laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

### Protection Against the Risk of Foreign Currency

MTI is faced with risks of foreign exchange rates when investing in capital goods. The exchange rate of Rupiah against the US Dollar affected the income before tax for the year ended December 31, 2022. Assets and liabilities denominated in foreign currencies were adjusted according to the exchange rates on that date and every gain or loss is credited or charged to the income statement for the year.

Perseroan telah mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi diri dari risiko mata uang asing. Perseroan telah menerapkan manajemen risiko atas risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko nilai tukar dan menetapkan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat.

The Company applied appropriate measures to protect itself from foreign currency risk. The Company has applied the risk management for this risk by evaluating any risk related to exchange rate and establishing an appropriate framework of financial risk management.

# Pencapaian Target 2022, Prospek Usaha dan Proyeksi 2023

## Achievement of 2022 Targets, Business Prospects and Projections for 2023

Target 2022 telah ditetapkan dalam RKAP 2022 yang telah disahkan oleh pemegang saham. Pencapaian target 2022 tentunya tidak dapat dipisahkan dari informasi analisa kinerja Perseroan yang telah diungkapkan pada pembahasan mengenai kinerja operasional dan keuangan sebelumnya.

Pembahasan target juga menyinggung seputar prospek usaha dan proyeksi untuk tahun 2023 sebagai satu kesatuan tak terpisahkan mengenai kinerja Perseroan pada tahun berjalan yang mempengaruhi penetapan target untuk ke depannya.

IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global diprediksi menurun dari estimasi pertumbuhan 3,4% pada 2022 menjadi 2,95% pada 2023. Peningkatan suku bunga bank sentral untuk menekan inflasi dan perang antara Ukraina dan Rusia akan terus mempengaruhi aktivitas ekonomi. Inflasi global diperkirakan akan menurun dari 8,8% pada 2022 menjadi 6,6% pada 2023. IMF juga memperkirakan bahwa harga minyak dunia akan menurun sekitar 16% dan harga komoditas non-minyak secara rata-rata akan menurun 6,3%.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 sebesar 4,9%-5,3%, sedangkan angka inflasi berada di kisaran 3,25%-3,75%. Di satu sisi nilai tukar Rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran Rp15.676-Rp15.877/USD. Prakiraan peningkatan ekonomi tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

The target for 2022 has been set in the 2022 RKAP that the shareholders have approved. The achievement of the target certainly cannot be separated from the disclosure of the Company's analysis regarding its operational and financial performance in 2022 in the earlier discussion.

We also discussed the prospects and projections for 2023 so that readers will be able to come into conclusion regarding the Company's performance in the current year as the basis for the next target.

According to IMF, global economic growth is predicted to decline from the estimated growth of 3.4% in 2022 to 2.95% in 2023. The interest rates of the Central bank to keep the inflation low and the war between Ukraine and Russia will continue to influence the global economy. Global inflation is expected to decline from 8.8% in 2022 to 6.6% in 2023. The IMF also estimates that crude oil price will decline by around 16% and non-oil commodity price will decline by 6.3% on average.

Bank Indonesia estimates that Indonesia's economic growth in 2023 will be around 4.9%-5.3% with an inflation rate of 3.25%-3.75%. On the other hand, the exchange rate of Rupiah against USD is estimated to be around Rp15,676-Rp15,877/USD. The projection is in line with higher rate of mobility of the community following the eradication of the Community Activity Restrictions (PPKM) policy, improvement of business prospects, higher inflows of Foreign Investment (PMA), and the National Strategic Projects (PSN) that are currently ongoing to be finished.



## Kinerja Keuangan

(Dalam ribu Rupiah)

## Financial Performance

In thousand Rupiah

Uraian Description	Realisasi Realization 2022	RKAP 2022	Pencapaian Achievement %
<b>Labanya (Rugi) Income Statement</b>			
Pendapatan Operasi Operating Revenues	612.413	796.728	76,87%
Beban Operasi Operating Expenses	537.357	699.865	76,78%
Labanya (Rugi) Usaha Income (Loss) from Operation	75.056	96.863	77,49%
Pendapatan (Beban) di Luar Operasi Non-Operating Income (Expense)	19.029	(17.531)	(108,54%)
<b>Labanya (Rugi) Sebelum Pajak Income (Loss) Before Tax</b>	<b>94.085</b>	<b>79.332</b>	<b>(118,60%)</b>
<b>Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Final Corporate Income Tax and Final Tax</b>	<b>10.237</b>	<b>28.072</b>	<b>36,47%</b>
<b>Total Labanya Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year</b>	<b>85.780</b>	<b>51.260</b>	<b>167,38%</b>
<b>Posisi Keuangan Financial Position</b>			
Aset Lancar Current Assets	515.471	668.093	129,61%
Aset Tetap Non-Current Assets	234.391	177.485	75,72%
Aset Lainnya Other Assets	88.183	62.689	71,09%
<b>Total Aset Total Assets</b>	<b>838.045</b>	<b>908.266</b>	<b>108,38%</b>
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	364.826	189.117	192,91
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	42.544	43.651	97,46
<b>Total Liabilitas Total Liabilities</b>	<b>407.370</b>	<b>232.769</b>	<b>175,01</b>
<b>Ekuitas Equity</b>	<b>500.897</b>	<b>605.276</b>	<b>82,76</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>908.266</b>	<b>838.045</b>	<b>108,38</b>

## Indikator Utama

## Key Performance Indicators

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2022	Capaian KPI 2022 Achievement of KPI 2022			
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Final	Skor Score
1.	Cash from Operation	Rp	10,00	39.913.313.856	164.504.388.906	412%	412%	11,00
2.	EBITDA Margin	%	10,00	15,93	18,51	116%	116%	11,00
3.	Ontime Delivery	%	10,00	90	99,95	111%	111%	11,00
4.	Customs Clearance Process	Day	10,00	1	0,79	127%	127%	11,00
5.	In Out Warehouse/Field	Hours	10,00	1	0,82	122%	122%	11,00
6.	CSR Program	%	3,00	100	100	100%	100%	3,00
7.	Operation Revenue Improvement Programs	%	10,00	100	55,27	55%	55%	5,53
8.	Strategic Partnership for Competitive Advantage	%	7,00	100	100	100%	100%	7,00
9.	Cargo Tracking System Development for Digital Logistic Services	%	10,00	100	100	100%	100%	10,00
10.	IT Infrastructure and System to Support Logistic Activities	%	10,00	80	80	100%	100%	10,00
11.	Employee Productivity	Rp/person	5,00	125.960.250	92.482.385	73%	73%	3,65
12.	HR and Organization Capability Development	%	5,00	100	100	100%	100%	5,00
<b>Jumlah Total</b>			<b>100</b>					<b>99,18</b>

## Tingkat Kesehatan

## Soundness Level

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
<b>A. Aspek Keuangan Financial Aspect</b>				
1.	Imbalan kepada pemegang saham Return on equity (ROE)	15,00	21,17%	15,00
2.	Imbalan investasi Return on investment (ROI)	10,00	12,49%	8,00
3.	Rasio kas Cash ratio	3,00	92,22%	3,00
4.	Rasio lancar Current ratio	4,00	183,13%	3,00
5.	Collection periods (day)	4,00	33,84	4,00
6.	Perputaran persediaan (hari) Inventory turnover (days)	4,00	0,42	0,00
7.	Perputaran total aset Total asset turnover	4,00	70,02%	2,00
8.	Rasio modal sendiri terhadap total aset Ratio of owner's equity to total assets	6,00	44,63%	5,50
<b>Total</b>		<b>50,00</b>		<b>40,50</b>

No.	Indikator Indicator	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
<b>II. Aspek Operasional Operational Aspect</b>				
1.	Custom clearance handling	12,00	0,79	12,00
2.	On time delivery	11,00	99,95	11,00
3.	In out warehouse/field	12,00	0,82	12,00
<b>Total</b>		<b>35,00</b>		<b>35,00</b>
<b>C. Aspek Administrasi Administration Aspect</b>				
1.	Laporan perhitungan tahunan Annual accounting report	5,00	< bulan ke-4 < 4th months	5,00
2.	Rancangan RKAP RKAP Draft	5,00	< 2 bulan < 2 months	5,00
3.	Laporan periodic Periodic report	5,00	0 < x < 30 hari 0 < x < 30 days	5,00
<b>Total</b>		<b>15,00</b>		<b>15,00</b>
<b>Total A + B + C</b>				<b>90,50</b>
				<b>SEHAT (AA) SOUND (AA)</b>

### Target 2023

### 2023 Target

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target 2023
1.	Cash from Operation	Rp	10,00	65.900.538.376
2.	EBITDA Margin	%	10,00	14.88
3.	On time Delivery	%	8,00	90
4.	Customs Clearance Process	Day	8,00	1
5.	In Out Warehouse/Field	Hours	8,00	1
6.	CSR Program	%	6,00	100
7.	Supply Chain Management Improvement	%	10,00	100
8.	Customer Relationship Management Implementation	%	10,00	100
9.	Test of Control Preparation for Logistic Control Tower	%	10,00	100
10.	Additional Stevedoring Capacity	%	8,00	100
11.	Employee Productivity	Rp/person	6,00	94.027.446
12.	Improvement of Organization and HR Capabilities	%	6,00	100
<b>Jumlah Total</b>			<b>100</b>	

### Rencana Kerja Manajemen 2023

Berikut ini merupakan Rencana Kerja Manajemen (RKM) strategis Perseroan tahun 2023 yang disusun dengan berdasarkan kinerja pada tahun 2022 dan target 2023 yang telah dibahas sebelumnya:

1. Meningkatkan layanan *Supply Chain Management (SCM)* melalui penguatan kerja sama strategis dengan mitra potensial baik nasional/internasional LSP;
2. Telaah potensi aset lapangan dan gudang di lingkungan Pelindo Group;
3. Peningkatan kerja sama pengelolaan VGM dan Pass truk;
4. Peningkatan pangsa pasar di masing-masing Logistik Regional melalui sentralisasi pengelolaan penjualan;
5. Implementasi *Customer Relationship Management*;
6. Standarisasi proses pelayanan jasa armada;
7. Meningkatkan ketersediaan Alat Bongkar Muat untuk kebutuhan operasional dengan memanfaatkan aset saat ini dan usulan kebutuhan baru;
8. Membangun sistem *data warehouse* untuk memenuhi kebutuhan Informasi operasi;
9. Mempersiapkan sistem *Test of Control* untuk kebutuhan *Logistic Control Tower* sebagai sarana pengendalian operasi di Unit Bisnis Regional;
10. Sentralisasi pengendalian penerbitan nota kegiatan *Non Asset Based (Freight Forwarding)*;
11. Penanganan piutang dengan fokus pada piutang berumur >90 hari dan/atau berpotensi menjadi piutang macet;
12. Pengelolaan kompetensi dan produktivitas pekerja yang sejalan dengan tuntutan transformasi bisnis Perseroan;
13. Terselenggaranya fungsi Sekretaris Perusahaan untuk mendukung program BUMN, *branding* Perusahaan, dan aspek legalitas usaha.

### Management Work Plan 2023

The following is the Company's strategic Management Work Plan (RKM) for 2023 which was prepared based on the performance in 2022 and the targets for 2023 that we have discussed earlier:

1. Improve the Supply Chain Management (SCM) through stronger strategic collaboration with potential national/international LSPs;
2. Assess the potential of field and warehouse assets within the Pelindo Group;
3. Increase the cooperation in managing VGM and truck passes;
4. Increase market share of Regional Logistics through centralized sales management;
5. Implementation of Customer Relationship Management;
6. Standardization of fleet service processes;
7. Increase the availability of Stevedoring Equipment through utilization of current assets and proposal of new needs;
8. Build a data warehouse system for the operation;
9. Prepare a Test of Control system for Logistic Control Tower for the operations of Regional Business Units;
10. Centralization of control over the issuance of Non-Asset Based (Freight Forwarding) activities;
11. Focus on handling receivables beyond 90 days and/or others that have the potential to become bad debts;
12. Management of employee competency and productivity according to the Company's business transformation;
13. Implementation of the Corporate Secretary function to support SOEs programs, Company branding, and business legal.

## Informasi Kelangsungan Usaha

### Going Concern

Perseroan telah menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2021-2025 yang memuat informasi mengenai keberlangsungan usaha Perseroan. Informasi ini merupakan sebuah bentuk realisasi dari kelangsungan usaha untuk jangka panjang yang telah ditetapkan dalam analisa SWOT berikut ini.

The Company has prepared a Long Term Company Plan (RJPP) 2021-2025 which contains the information regarding the Company's business going forward. This information becomes a plan for the Company to advance its business in the long run in the form of the following SWOT analysis.



### Analisa SWOT Strengths (S)

1. Member of Subholding Pelindo Solusi Logistik (Pelindo Group)
2. Kekuatan finansial yang cukup baik untuk pengembangan bisnis logistik
3. Berpengalaman dalam penanganan berbagai portofolio jasa logistik
4. *Privilege* atas pengelolaan *Port Asset Based* untuk bisnis logistik
5. Good Corporate image dan stakeholder relation logistik

### Weaknesses (W)

1. Pemerataan peningkatan kemampuan SDM untuk pengelolaan bisnis logistik masih belum optimal
2. Strategi dan komersialisasi bisnis *halal logistics & cold storage* masih belum optimal
3. Masih belum optimalnya strategi *sales dan marketing* dalam penetrasi pasar
4. Strategi dan pengelolaan *Vendor Management System* belum optimal
5. *Costing and Pricing Strategy* yang belum standar dan terstruktur

### Opportunity (O)

1. Pengembangan dan pembangunan fasilitas Kepelabuhanan di Pelindo Group
2. Pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai membaik
3. Kebutuhan logistik yang besar di Pelindo Group
4. Perluasan wilayah kerja Pelindo pasca *merger*
5. *Digital Logistics Platform* yang mendukung *Port Based Logistics Ecosystem*

### Threats (T)

1. Geopolitik yang tidak stabil yang dapat berimplikasi pada tren perdagangan global
2. Tingkat kompetisi bisnis logistik yang tinggi dengan perusahaan *shipping line and cargo owner – logistics based*
3. Ancaman gelombang pandemi yang masih dapat terjadi
4. Potensi adanya resesi keuangan global
5. Kemungkinan adanya kehilangan pendapatan dari pengelolaan Terminal 300 sebagai dampak adanya pemurnian bisnis

### SWOT Analysis Strengths (S)

1. Member of Subholding of Pelindo Solusi Logistik (Pelindo Group)
2. Sound financial performance for logistics development
3. Experienced entity with rich portfolios in logistics service
4. Privilege in managing the Port Asset-Based for logistics operation
5. Good corporate image and good relations with stakeholders of logistics

### Weaknesses (W)

1. Improvement of human resource capabilities for logistics operation is below standard
2. Business strategy and commercialization of the *halal logistics & cold storage* are below standard
3. Sales and marketing strategies of market penetration are below standard
4. The Vendor Management System strategy and management are below standard
5. Costing and Pricing Strategy are not standardized and unstructured

### Opportunity (O)

1. Improvement and construction of port facilities within the Pelindo Group
2. National economy is starting to improve
3. Massive logistics demand of Pelindo Group
4. Expansion supporting the Port-Based Logistics Ecosystem
5. Digital Logistics Platform supporting the Port-Based Logistics Ecosystem

### Threats (T)

1. Unstable geopolitics with implications on global trade
2. High level of competition for companies with shipping line and cargo owner – logistics based
3. Pandemic threat might still occur
4. Global recession threat
5. Possible loss of income from the management of the Terminal 300 as a result of business refining

**“Dengan mengoptimalkan kekuatan yang ada, Perseroan akan dapat menangkap setiap peluang untuk terus bertumbuh”**

*The Company will thrive when succeeds in grasping every available opportunity”*

# Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

## Material Information and Facts Subsequent to the Accountant Report Date

Berikut disampaikan informasi dan fakta material setelah pelaporan akuntan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022.

The following is the material information and facts subsequent to the accountant's report date for the financial year of 2022 which ended on December 31, 2022.

### Aksi Korporasi Pengalihan Bisnis PT Nusantara Terminal Services kepada Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perseroan No.SK.03/16/12/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 tanggal 16 Desember 2022 tentang Aksi Korporasi Pengalihan Bisnis PT Nusantara Terminal Services Kepada Perusahaan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui keputusan pengalihan bisnis PT Nusantara Terminal Services kepada Perseroan. Pelaksanaan pengalihan bisnis akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023.

### Corporate Action of Transferring Business of PT Nusantara Terminal Services to the Company

Based on the Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS Decision) of the Company No. SK.03/16/12/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dated December 16, 2022, regarding Corporate Actions to Transfer the Business of PT Nusantara Terminal Services to the Company, the shareholders of the Company agreed on the decision to transfer the business of PT Nusantara Terminal Services to the Company. The implementation of the business transfer will be effective on January 1, 2023.

### Perubahan susunan Direksi

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham tentang perubahan susunan Direksi Perseroan, yang dinyatakan dalam Akta Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., No.09 tanggal 11 April 2023 yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0111925 tanggal 12 April 2023, komposisi Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

### Changes of the Board of Directors

Based on the shareholders' resolution on the changes of the Board of Directors of the Company, as stated in Notarial Deed Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn No.09 dated April 11, 2023 which has been notified and received by the Ministry of Law and Human Rights by letter No. AHU-AH.01.09-0111925 dated April 12, 2023, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

Jabatan Position	Nama Name
Direktur Utama President Director	Ruri Indrasari Rachmaputri
Direktur Operasi Operation Director	Yandri Trisaputra
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Acting Commercial and Business Director	Ruri Indrasari Rachmaputri
Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Budi Azmi

## Pembagian Dividen

### Dividend Payment

Perseroan menetapkan dividen kepada pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan kinerja dan kecukupan modal Perseroan. Pembagian dividen Perusahaan untuk tahun buku 2020 dan 2021 telah memenuhi peraturan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

The Company determines the dividend for shareholders during the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The amount and payment is carried out by considering several factors including the Company's performance and capital. The dividend payment for the financial year of 2020 and 2021 has been done according to the applicable regulations, with the following description:

(Dalam ribu Rupiah)

In thousand Rupiah

Uraian Description	Tahun Buku Financial Year 2021	Tahun Buku Financial Year 2020
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	85.799.552	10.063.583
Jumlah Dividen Tunai yang Dibagikan Total Cash Dividend Paid	50.308.655	-
<i>Payout Ratio (%)</i>	58,63%	-
Tanggal Pembayaran Payment Date	23 Desember 2022 dan 17 Januari 2023 December 23, 2022 and January 17, 2023	-

#### Pembagian Dividen Tahun Buku 2021

Berdasarkan Berita Acara Risalah Rapat No. SK.03/22/6/4/PAPR/DSPB/PLSL-23 dan HK.566/02/04/KPM.TPK-23 tanggal 22 Juni 2023, pemegang saham menyetujui laba tahun berjalan tahun 2022 sebesar Rp85,799 miliar sebagian digunakan untuk pembayaran dividen.

#### Dividend Payout for the Financial Year of 2021

Based on Minutes of Meeting No. SK.03/22/6/4/PAPR/DSPB/PLSL-23 and HK.566/02/04/KPM.TPK-23 dated June 22, 2023, the shareholders approved the appropriation of part of the Company's income of Rp85.799 billion for dividend payment.

#### Pembagian Dividen Tahun Buku 2020

Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 31 Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., tanggal 4 Juni 2021, pemegang saham mengakui adanya rugi tahun berjalan tahun 2020 sebesar Rp10,01 miliar dan tidak ada dividen yang didistribusikan kepada pemegang saham untuk tahun buku 2020.

#### Dividend Payout for the Financial Year of 2020

Based on Minutes of Meeting No. 31, made before Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., dated June 4, 2021, the shareholders acknowledged the Company's loss of Rp10.01 billion, and no dividends were paid out for the financial year of 2020.

## Pembayaran Pajak

### Tax Payment

Pemenuhan kewajiban kepada Negara tahun 2022 adalah sebesar Rp32,78 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

The Company fulfilled its obligations to the State in 2022 was realized amounted to Rp43,27 billion, with details as follows:

(Dalam ribu Rupiah)

In thousand Rupiah

No.	Jenis Pajak Type of Tax	Nilai Pajak Tax Value
1.	PPH Pasal 4 Ayat 2 PPH Article 4 Verse 2	2,01
2.	PPH Pasal 21 PPH Article 21	4,86
3.	PPH Pasal 23 PPH Article 23	4,33
4.	PPN VAT	32,03
5.	Pajak Lainnya (termasuk PBB) Other Taxes (including Land & Building Tax)	7,69
<b>Total</b>		<b>32,79</b>

## Informasi Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

### Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Selama tahun 2022, MTI tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang dan/atau modal, sehingga informasi mengenai tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana yang digunakan, dan hasil kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, maupun restrukturisasi utang dan/atau modal tidak relevan untuk disajikan.

In 2022, MTI did not conduct any investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, or debt and/or capital restructuring, so that information regarding the purpose, value or number transactions, sources of funds used, and the results of investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, or debt and/or capital restructuring were irrelevant to be presented.



# Informasi Transaksi Material Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

## Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

Dalam kegiatan usaha normal, MTI melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak dan mungkin tidak sama dengan transaksi lain dengan pihak-pihak tidak berelasi.

In normal business activities, MTI conducts transactions with related parties, which are carried out at prices and terms agreed by all and may not be the same as other transactions with unrelated parties.

### Sifat Relasi dan Jenis Transaksi dengan Pihak Berelasi

### Nature of Relationship and Type of Transaction with Related Parties

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Name of Related Party	Jenis Transaksi Nature of Transaction
Pemegang saham Shareholders	Pelindo	Pendapatan operasi, imbalan kerja, dan dividen Operating revenue, employee benefit, and dividend
	PT Pelindo Solusi Logistik	Pendapatan operasi dan dividen Operating revenue and dividend
	Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok	Dividen Dividend
Entitas sepengendalian Pelindo Entities under common control of Pelindo	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Pendapatan operasi dan investasi Operating revenue and investment
	Kerjasama Operasi Terminal Petikemas ("TPK Koja")	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT IPC Terminal Petikemas	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Electronic Data Interchange Indonesia	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Investasi Investment
PT Pelabuhan Indonesia Investama	Penjualan saham dan investasi Sales of shares and investment	

Sifat Relasi Nature of Relationship	Nama Pihak Berelasi Name of Related Party	Jenis Transaksi Nature of Transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah Government related entities	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT PP Presisi Tbk	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Pertamina (Persero)	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Industri Kereta Api (Persero)	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Jasa kesehatan Health service
	PT Krakatau Posco	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT New Priok Container Terminal 1	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Berdikari (Persero)	Pendapatan operasi Operating revenue
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Pendapatan operasi Operating revenue
PT Jasa Prima Logistik Bulog	Pendapatan operasi Operating revenue	

#### Kewajaran Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*arm's length transaction*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

#### Fairness of Transaction with Related Parties

Transactions with related parties were conducted fairly based on the interests of the Company (*arm's length transaction*) in accordance with laws and regulations, and free from conflicts of interests.

#### Alasan Pelaksanaan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan atas dasar pemenuhan kebutuhan usaha serta untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

#### Reason for Transaction with Related Parties

All transactions with related parties were carried out for business interest and to improve the performance of the Company.

## Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi

## Realization of Balances and Transactions with Related Parties

Uraian Description	2022	2021
Piutang Usaha Trade Receivables	51.112.284	47.937.008
Persentase dari total aset Percentage from total assets	5,63%	5,57%
Piutang Lain-Lain Other Receivables	184.267.972	147.432.858
Persentase dari total aset Percentage from total assets	20,29%	17,13%
Pendapatan Masih Akan Diterima Accrued Revenues	16.240.057	30.217.180
Persentase dari Total Aset Percentage from Total Assets	1,79%	3,51%
Utang Usaha Trade Payables	58.926.548	60.753.298
Persentase dari Total Liabilitas Percentage from Total Liabilities	14,46%	20,55%
Beban Akrua Accrued Expenses	37.324.798	18.583.539
Persentase dari Total Liabilitas Percentage from Total Liabilities	9,16%	6,28%

### Perjanjian dengan Pihak Berelasi

Perseroan telah mengadakan sejumlah perjanjian dengan para pihak berelasi. Informasi singkat mengenai perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Perjanjian serah terima operasi dengan PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL");
- Perjanjian pengoperasian *Gantry Luffing Crane* (GLC) di Pelabuhan Banten dan sewa menyewa 2 (dua) GLC di Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP") yang berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Alat Berat GLC kepada PTP untuk kedua pelabuhan tersebut;
- Perjanjian kerja sama penanganan petikemas *Full Container Load* (FCL) untuk kegiatan pindah lokasi penimbunan dengan PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK") yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
- Perjanjian sewa menyewa aset dan fasilitas *Common Area* di Pelabuhan Tanjung Priok yang telah diperbaharui dengan perjanjian antara Perseroan dengan SPSL;
- Perjanjian kerja sama pengelolaan peralatan dengan JPPI yang telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2022;
- Perjanjian kerja sama penggunaan 6 (enam) unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) oleh PT IPC TPK di Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan 31 Agustus 2024;

### Related Parties Agreement

The Company has made several agreements with related parties. In short, these agreements are as follows:

- Operational handover agreement with PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL");
- Gantry Luffing Crane (GLC) operating agreement at Banten Port and lease of 2 (two) GLC units at Tanjung Priok Port with PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP") which ended with the signing of the Sale and Purchase Agreement of GLC to PTP for both ports;
- Agreement on cooperation in handling Full Container Load (FCL) containers for landfill relocation activities with PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK") which extended until January 1, 2024;
- Agreement of Common Area assets and facilities rent in Tanjung Priok Port which has been renewed with the agreement between the Company and SPSL;
- Agreement of equipment management cooperation with JPPI which has ended on January 31, 2022;
- Agreement of cooperation in the use of 6 (six) units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) by PT IPC TPK in Tanjung Priok Port until August 31, 2024;

- g. Perjanjian kerja sama penggunaan 6 (enam) unit RTGC oleh PT PTP di Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan 31 Agustus 2024;
- h. Kerja sama operasi Lini II petikemas di Cabang Pelabuhan Pontianak dengan SPSL;
- i. Perjanjian kerja sama Penanganan Petikemas Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) dengan Terminal Petikemas Koja sampai dengan 1 Januari 2023;
- j. Remunerasi personil manajemen kunci.

#### Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme rewi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang di rewi oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

- g. Agreement of cooperation in the use of 6 (six) units of RTGC by PT PTP in Tanjung Priok Port until August 31, 2024;
- h. Cooperation of Line II containers operation at Pontianak Branch Port with SPSL;
- i. Agreement of cooperation in the Handling of Containers for Moving Storage Locations (PLP) with Koja Container Terminal until January 1, 2023;
- j. Key management personnel remuneration.

#### Statement from the Board of Directors and the Board of Commissioners

Every transaction with a related party is subject to a review mechanism as determined by the Company. All significant transactions and balances with related parties are carried out on normal and fair terms.

Transactions with related parties are carried out based on terms agreed by both parties, where these terms may not be the same as transactions made with unrelated parties.

The terms and conditions of transactions with related parties are generally carried out in the same manner as transactions with third parties that are reviewed by the Audit Committee and must obtain approval from the Board of Commissioners.

## Pengaruh Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perseroan

### Impact of Changes in Laws and Regulations on the Company

Pada tahun 2022 tidak terdapat adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi Perseroan secara material.

In 2022 there were no changes to laws and regulations that could materially affect the Company.

## Perubahan Kebijakan Akuntansi

### Amendments to Accounting Policy

Perseroan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perseroan:

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2022, including the following revised standards that have affected the financial statements of the Company:



### Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71: Instrumen Keuangan

Amandemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Amandemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perseroan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

### Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 73: Sewa

Amandemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun amandemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perseroan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

### 2020 Annual Improvements – PSAK 71: Financial Instruments

The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first time adoption.

### 2020 Annual Improvements – PSAK 73: Leases

The amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022, with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first time adoption.

## Informasi Lainnya Other Information

### Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perseroan tidak menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) sehingga tidak terdapat informasi mengenai realisasi program mencakup jumlah saham, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga *exercise*.

### Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum

MTI tidak melakukan penawaran umum saham kepada publik sehingga tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

### Employee and/or Management Share Ownership Program

As of December 31, 2022, the Company did not have any employee and/or management share ownership program (ESOP/MSOP) and therefore there is no information to be disclosed regarding the realization of the program that includes the number of shares, program period, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price.

### Usage of Proceeds From Public Offering

MTI did not conduct any public offering and therefore there is no information regarding the proceed that includes the usage, the balance, and the approval date of GMS on any amendment in the usage of proceeds.





# 6

## Tata Kelola Perusahaan

### Corporate Governance

Perseroan telah memperkuat komitmen penerapan GCG sebagai upaya perkembangan yang mencakup revisi pedoman, sosialisasi kebijakan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

The Company has strengthened its commitment to improve GCG practice by updating the internal guidelines, disseminating policies, and following the prevailing regulations.



## Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

### Commitment to Good Corporate Governance

Sebagai bagian dari Pelindo Group, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), MTI juga mengikuti sejumlah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai sebuah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.

As part of the Pelindo Group, a State-Owned Enterprise (SOE), MTI also follows a number of regulations set by the Minister of SOE. One of those regulations is the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprise (SOE) No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the State Minister of SOE Number PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in SOE. Good Corporate Governance (GCG) is defined as a principle that underlies a company management process and mechanism based on laws and regulations and business ethics.



Secara khusus, tujuan penerapan GCG bagi Perseroan adalah:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, pekerja, mitra usaha, kreditur/investor, serta masyarakat dan lingkungan;
2. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko secara lebih hati-hati (*prudent*), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
3. Memaksimalkan nilai agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
4. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing organ Perseroan;
5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien demi tercapainya visi dan misi usaha;
6. Mendorong pengelola Perseroan membuat keputusan dan menjalankan tindakan berlandaskan nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sadar akan adanya tanggung jawab sosial;

Particularly, the Company implements GCG to achieve the following objectives:

1. Controlling and directing the relationship between shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, employees, business partners, creditors/investors, and the community and the environment;
2. Encouraging and supporting the Company's risk development and management in a more prudent, accountable, and responsible manner in line with GCG principles;
3. Maximizing value for MTI to have a strong national and international competitiveness;
4. Empowering the function and independence of the Company's organ;
5. Encouraging the Company's management professionally, effectively, and efficiently to achieve the Company's vision and mission;
6. Encouraging the Company's management in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations, as well as awareness on social responsibility;



7. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*;
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
9. Memperbaiki budaya kerja Perseroan;
10. Meningkatkan citra Perseroan;
11. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

Selain mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN, Perseroan juga menjalankan prinsip-prinsip GCG berdasarkan sejumlah peraturan lainnya. Secara garis besar, peraturan-peraturan tersebut mencakup:

1. Undang-Undang Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri BUMN;
4. Keputusan Menteri BUMN;
5. Anggaran Dasar MTI dan perubahannya, serta RUPS;
6. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
7. Standar yang berlaku internasional (ISO).

#### Perkembangan Penerapan GCG Tahun 2022

Pada tahun 2022, Perseroan telah melakukan sejumlah langkah terkait komitmen penerapan GCG. Langkah-langkah ini dapat dikategorikan sebagai upaya perkembangan penerapan GCG di lingkungan Perseroan yang mencakup revisi pedoman, sosialisasi kebijakan, dan lain sebagainya. Tentunya langkah-langkah yang disampaikan di sini merupakan bagian dari langkah-langkah lainnya yang secara konsisten dilakukan Perseroan setiap tahun.

1. Merevisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Revisi 5 Tahun 2022) yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 26 Desember 2022;
2. Merevisi Pedoman Etika dan Perilaku (Revisi 5 Tahun 2022) yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Desember 2022;
3. Merevisi Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris (Revisi 6 Tahun 2022) yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 26 Desember 2022;
4. Mengesahkan program kerja Direksi yang baru untuk tahun 2022;
5. Penandatanganan tunduk pada Pakta Integritas (tanpa fraud, korupsi, kolusi, nepotisme), serta menerapkan GCG oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan;
6. Melaksanakan survei untuk mengukur pemahaman Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan terhadap COC dan anti gratifikasi;
7. Melakukan sosialisasi GCG;
8. Sosialisasi kewajiban memenuhi ketentuan LHKPN di lingkungan Pelindo Group yang dilaksanakan pada 7 Februari 2022;
9. Sosialisasi anti gratifikasi dan pungutan liar (pungli) menjelang hari raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

7. Increasing accountability to stakeholders;
8. Preventing any irregularities in managing the Company;
9. Improving the Company's work culture;
10. Improving the Company's image;
11. Increasing the Company's contribution to the national economy.

In addition to the SOE Minister Regulation, the Company also applies the GCG principles based on other regulations. Broadly speaking, these regulations are:

1. Laws of the Republic of Indonesia;
2. Government Regulations;
3. Circular Letter of the SOE Minister;
4. Decree of the SOE Minister;
5. The Articles of Association of MTI and its amendments, and the GMS;
6. Indonesian Corporate Governance Roadmap issued by the Financial Services Authority (OJK);
7. International standards (ISO).

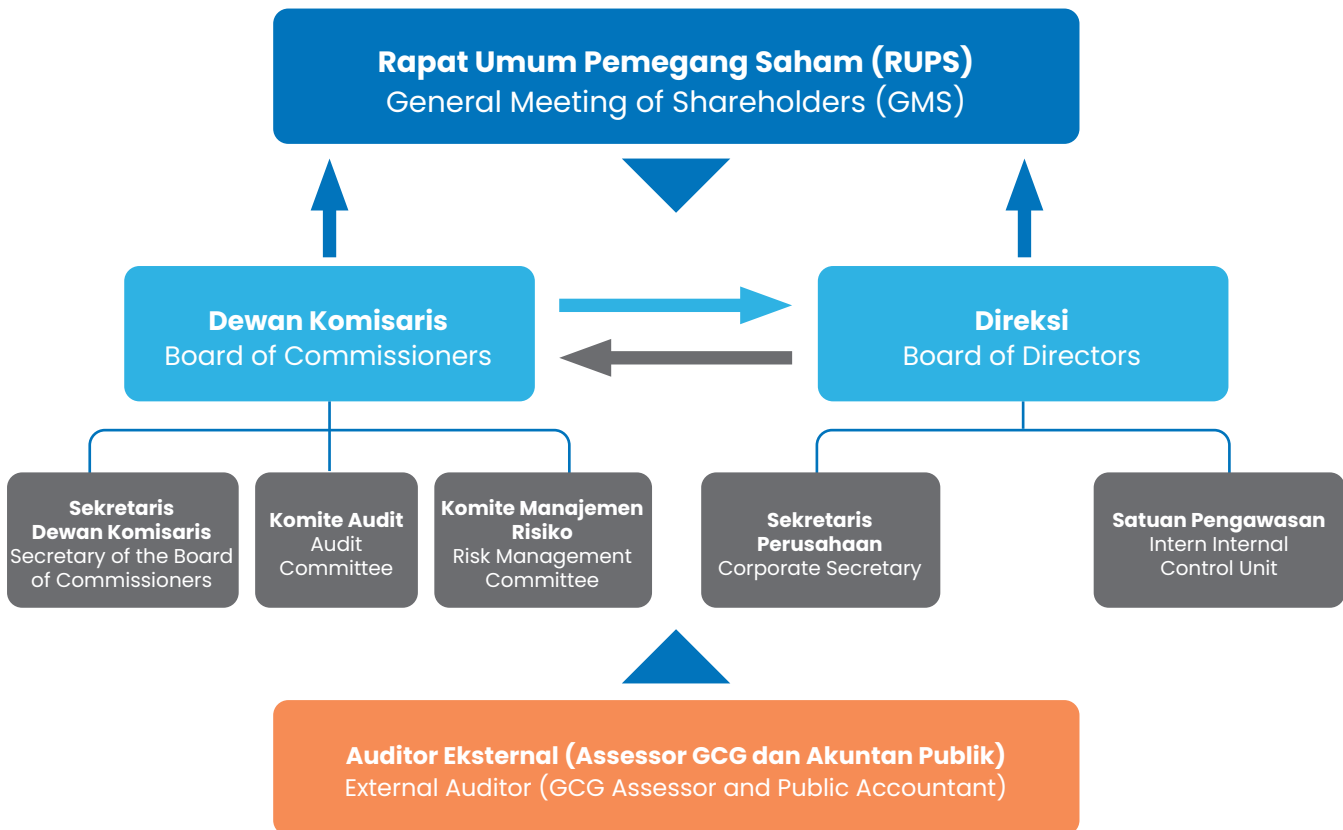
#### Improvement of GCG Implementation in 2022

In 2022, the Company has performed some actions related to its GCG commitment. These are part of the Company's effort towards GCG implementation which includes revision of guidelines, socialization of policies, and many others. The actions presented here are part of other actions that the Company consistently performs every year.

1. Revised the Corporate Governance Guidelines (Revision 5 of 2022), signed by the Board of Commissioners and Directors on December 26, 2022;
2. Revised the Ethics and Behavior Guidelines (Revision 5 of 2022), signed by the Board of Commissioners and Directors in December 2022;
3. Revised the Board Manual for the Board of Directors and Commissioners (Revision 6 of 2022), signed by the Board of Commissioners and Directors on December 26, 2022;
4. Ratified the new annual program of the Board of Directors for 2022;
5. Signed the commitment to follow the Integrity Pact (no fraud, corruption, collusion, nepotism) and implementation of GCG by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees;
6. Conducted surveys to assess the understanding of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees regarding COC and anti-gratification;
7. Disseminated information regarding GCG implementation;
8. Disseminated the obligation to submit LHKPN within the Pelindo Group, and the dissemination was conducted on February 7, 2022;
9. Disseminated information of anti-gratifications and extortion ahead of Christmas 2022 and New Year 2023.

## Struktur GCG

## GCG Structure



Struktur GCG Perseroan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi.

The Company's GCG structure refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 dated August 16, 2007, concerning Limited Liability Companies. There are 3 (three) main organs in general including the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam melaksanakan proses *check and balances* agar pengelolaan dan pengawasan usaha dapat berjalan seimbang dan tercukupi dengan baik.

The management system of the Limited Liability Company adheres to a 2 (two) tier system model, namely the Board of Commissioners and Board of Directors, with clear authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated by laws and regulations and the Articles of Association. All of those main organs play a role in carrying out the process of checks and balances so that the business management and supervision can run in a balanced and fulfilled manner.

Struktur GCG Perseroan juga didukung oleh *soft structure* yang merupakan dokumen internal mengatur mengenai penerapan GCG. Dokumen-dokumen tersebut antara lain sebagai berikut:

The Company's GCG structure is also supported by the *soft structure*, a set of internal document governing the implementation of GCG. These documents are:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Revisi 4 Tahun 2020;
2. Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris Revisi 5 Tahun 2020;
3. Pedoman Etika dan Perilaku Revisi 4 Tahun 2020;
4. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor HK.48/6/9/1/MTI-2020 tanggal 6 Agustus 2020;

1. Code of Corporate Governance, the 4th Revision of 2020;
2. Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the 5th Revision of 2020;
3. Code of Conduct, the 4th Revision of 2020;
4. Gratification Control Policy established based on the Decree of the Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia Number HK.48/6/9/1/MTI-2020 dated August 6, 2020;

5. Kebijakan *Whistleblowing System* yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor HK.48/2/11/1/MTI-2021 tanggal 2 November 2021;
6. Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor HK.48/12/8/1/MTI-2021 tanggal 12 Agustus 2021;
7. Pedoman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor PM.HO/PRM tanggal 27 Juni 2019;
8. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor HK.48/20/1/1/MTI-2021 tanggal 20 Januari 2021.

### Sosialisasi dan Internalisasi GCG

Perseroan melakukan sosialisasi GCG secara menyeluruh kepada seluruh level jabatan dalam struktur organisasi. Upaya sosialisasi dilakukan secara berkala melibatkan seluruh divisi terkait sebagai Tim Pemantau Pelaksanaan GCG. Tim ini bertanggungjawab langsung atas penerapan GCG khususnya pada unit bisnis masing-masing.

Sosialisasi GCG secara berkala yang dilakukan Perseroan mencakup internalisasi *soft structure* yang mencakup Anggaran Dasar, *Board Manual*, Pedoman Tata Kelola. Selain *soft structure* Perseroan, internalisasi juga mencakup pengenalan dan *update* akan peraturan terkini seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta Peraturan Menteri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sosialisasi dan internalisasi GCG menjadi satu kesatuan dengan perkembangan penerapan GCG tahun 2022.

### Penilaian Penerapan GCG

Kriteria dan prosedur pelaksanaan *assessment* GCG di MTI mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Adapun kriteria yang dipertimbangkan dalam proses *assessment* GCG terdiri dari:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lainnya.

### GCG Socialization and Internalization

The Company disseminates (socialization) the information about the GCG through all levels of positions in the organization. The dissemination is conducted periodically involving all relevant divisions as the GCG Implementation Monitoring Team. This team is responsible for the implementation of GCG at each business unit.

Periodic socialization of GCG covers the internalization of the soft structure which includes the Articles of Association, Board Manual, Governance Guidelines. In addition to the Company's soft structure, the internalization also covers the latest information of Laws, Government Regulations, Ministry Decrees and Regulations.

The socialization and internalization of GCG are part of the GCG development in 2022.

### Assessment of the Implementation of GCG

The criteria and procedures for implementing the GCG assessment at PT MTI refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The criteria considered in the GCG assessment process consist of:

1. Commitment to implementing sustainable governance;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency;
6. Other Aspects.

Pada tahun 2022, penilaian (*assessment*) GCG dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yaitu PT Pratama Indokonsultan. Hasil penilaian GCG pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The GCG assessment in 2022 was conducted by PT Pratama Indokonsultan, an independent third-party consultant. The results of GCG assessment in 2022 are as follows:

No.	Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Value	Tahun Buku 2022 Financial Year 2022		Tahun Buku 2021 Financial Year 2021	
			Tingkat Pemenuhan Achievement	%	Tingkat Pemenuhan Achievement	%
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	7,00	100,00%	7,00	100,00%
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	8,24	91,51 %	8,02	89,10%
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	32,79	93,68 %	32,62	93,21%
4.	Direksi Board of Directors	35,00	32,32	92,35 %	31,96	91,33%
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	8,06	89,59 %	7,55	83,87%
6.	Aspek Lainnya Other aspects	5,00	3,75	75,00 %	3,75	75,00%
<b>Skor Keseluruhan Overall Score</b>		<b>100,00</b>	<b>92,16</b>		<b>90,90</b>	
<b>Peringkat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Score</b>			<b>Sangat Baik Very Good</b>		<b>Sangat Baik Very Good</b>	

Keterangan:  
 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik  
 Information:  
 0-50 : Bad | 50-60 : Not Good | 60-75 : Fairly Good | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

### Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Penilaian GCG tahun 2022 menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

### Recommendation and Follow-Ups

The GCG assessment in 2022 generated a number of recommendations as follows:

No.	Aspek Pengujian Assessment Aspect	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	
		2022	2021
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	-	-
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik modal Shareholders and GMS/Capital Owners	6	7
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	6	6
4.	Direksi Board of Directors	12	2
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	4	-
6.	Aspek Lainnya Other aspects	1	2
<b>Rekomendasi Keseluruhan Overall Recommendation</b>		<b>29</b>	<b>17</b>



Dalam mendukung peningkatan implementasi GCG di MTI, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang muncul dari *assessment* GCG. Rekomendasi yang dihasilkan dari *assessment* GCG merupakan *Area of Improvement* (Aoi) bagi Perseroan guna memperbaiki penerapan GCG.

In supporting the improvement of GCG implementation at PT MTI, one of the efforts made is to follow up on the recommendations that arise from the GCG assessment. The recommendations resulting from the GCG assessment are an Area of Improvement (Aoi) for the Company to improve the GCG implementation.

Dari hasil *assessment* GCG tahun buku 2021, MTI memperoleh 17 rekomendasi yang dapat dijadikan *Area of Improvement* dalam rangka meningkatkan implementasi GCG pada tahun berikutnya. Informasinya adalah sebagai berikut:

From the results of the 2021 GCG assessment, MTI obtained 18 recommendations that could be used as Areas of Improvement to improve the GCG implementation in the following year. The following is the information:

No.	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up	Keterangan Remarks
I.	<b>Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan</b> Commitment to Sustainable Governance Implementation		
-		-	-
II.	<b>Aspek Pemegang Saham dan RUPS</b> Shareholders and GMS		
1.	Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS agar dilakukan tepat waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. The appointment of members of the Board of Directors by the GMS shall be carried out no more than 30 (thirty) days after the term of office ended.	Selesai Done	Telah dilaksanakan tepat waktu pada saat pengangkatan Direksi pada tahun 2022. Has been conducted timely during the appointment of new Directors in 2022.
2.	RUPS dalam hal memberhentikan anggota Direksi agar memuat alasan pemberhentian. When dismissing any member of the Board of Directors at the GMS shall also disclose the reasons for the dismissal.	Selesai Done	Keputusan RUPS pada saat pengangkatan Direksi pada tahun 2022 telah memuat alasan pemberhentian. The GMS resolution of the appointment of new Directors in 2022 has also stated about the reasons behind the dismissal.
3.	RUPS dalam hal pemberhentian sementara Direksi agar memberikan kesempatan kepada Direktur yang bersangkutan untuk membela diri. When dismissing any member of the Board of Directors at the GMS shall also give him the opportunity to defend himself.	Selesai Done	Dalam RUPS pada tahun 2022, anggota Direksi yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri. At the 2022 GMS, the Director in question has been given the opportunity to defend himself.
4.	RUPS agar menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. The GMS shall appoint an Independent Commissioner that covers at least 20% of the entire members of the Board of Commissioners.	Selesai Done	Dalam RUPS pada tahun 2022, telah ditetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris. At the 2022 GMS, an Independent Commissioner has been appointed and make up for 20% of the entire members of the Board of Commissioners.
5.	RUPS agar mengesahkan RJPP tepat waktu yang berdasarkan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP berjalan. The GMS shall ratify the RJPP timely, following the provisions, less than 60 (sixty) days upon receipt or before the current year of RJPP takes place.	Selesai Done	Telah dilaksanakan tepat waktu pada saat pengesahan RJPP pada tahun 2022. Has been conducted timely during the ratification of RJPP in 2022.
6.	RUPS agar mengesahkan rancangan RKAP tepat waktu sesuai ketentuan yakni dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan. The GMS shall approve the RKAP timely, following the provisions of at least by the end of the year before the current financial year takes place.	-	Masih dalam proses. On progress.
7.	RUPS agar memberikan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu sesuai ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. The GMS shall ratify the Annual Financial Report timely, following the provisions, less than 6 (six) months after the financial year ended.	Selesai Done	Telah dilaksanakan tepat waktu pada saat pengesahan Laporan Keuangan Tahunan pada tahun 2022. Has been conducted timely during the ratification of Annual Financial Report in 2022.

No.	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up	Keterangan Remarks
<b>III. Aspek Dewan Komisaris Board of Commissioners</b>			
1.	<p>Substansi kebijakan/pedoman Dewan Komisaris tentang informasi agar memuat bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidental, standar waktu penyampaiannya, dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.</p> <p>The substance of the policies/guidelines of the Board of Commissioners shall cover the following information for the Board of Directors including the form of periodic or incidental information, the standard time for delivery, and the mechanism for delivering the information.</p>	-	Masih dalam proses. On progress.
2.	<p>Dewan Komisaris agar menyampaikan tanggapan rancangan RJPP 2020-2024 tepat waktu sesuai ketentuan/kebijakan dalam <i>Board Manual</i> Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan RJPP diterima Dewan Komisaris dari Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners shall respond to the RJPP 2020-2024 timely following the provisions/policies of the Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners, 30 (thirty) days after the draft is received by the Board of Commissioners from the Board of Directors.</p>	-	Masih dalam proses. On progress.
3.	<p>Dewan Komisaris agar membuat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>The Board of Commissioners shall prepare and implement the supervising and advising policy of subsidiary/joint company.</p>	-	N/A ( <i>Not Applicable</i> ) karena hingga akhir tahun 2022 Perusahaan tidak memiliki anak perusahaan. N/A (Not Applicable) because by the end of 2022 the Company did not have any subsidiaries.
4.	<p>Dewan Komisaris agar membuat kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.</p> <p>The Board of Commissioners shall prepare and implement the role of the Board of Commissioners policy in appointing Directors and Commissioners of subsidiaries/joint companies.</p>	-	N/A ( <i>Not Applicable</i> ) karena hingga akhir tahun 2022 Perusahaan tidak memiliki anak perusahaan. N/A (Not Applicable) because by the end of 2022 the Company did not have any subsidiaries.
5.	<p>Dewan Komisaris agar mengusulkan calon anggota Direksi kepada pemegang saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.</p> <p>The Board of Commissioners needed to propose candidates for members of the Board of Directors to shareholders according to the selection criteria and policies.</p>	-	Masih dalam proses. On progress.
6.	<p>Dewan Komisaris agar melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi dengan realisasi pencapaian masing-masing.</p> <p>The Board of Commissioners must assess the performance of the Directors individually based on a review of the criteria, targets and main performance indicators included in the Directors' Management Contract with the realization of their respective achievements.</p>	-	Masih dalam proses. On progress.
<b>IV. Aspek Direksi Board of Directors</b>			
1.	<p>Perusahaan agar mendokumentasikan rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi yang dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.</p> <p>The Company shall document the intensive discussion of promotion and transfer plans of officers below the Board of Directors at the Board of Directors Meeting and submitted the outcome to the Board of Commissioners for the opportunity of responding to the plan.</p>	Selesai Done	Rencana Mutasi & Promosi telah dituangkan ke dalam Notulen Rapat Direksi. The Mutation & Promotion Plan has been drafted into the Minutes of the Board of Directors Meeting.
2.	<p>Sistem pengukuran kinerja agar didukung dengan aplikasi komputer.</p> <p>Performance assessment shall have the support of computer app.</p>	Selesai Done	Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis Operation Director & Act. Commercial & Business Development Director

No.	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up	Keterangan Remarks
<b>V. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency</b>			
1.	Perusahaan berupaya agar semakin banyak bidang/area di Perusahaan, antara produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi yang menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain. The Company strives to make more fields/areas within the Company, such as products, processes, support functions, organizational performance, or strategies, become best practices or benchmark for other companies.	Selesai Done	Telah dilakukan sejumlah Benchmarking oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Ilembaga Pemerintah Indonesia) terkait Logistik Halal. Has coordinated with the National Committee of Sharia Economic and Finance (Indonesian Government institution) on the Benchmarking of a Halal Logistic.
2.	Perusahaan agar berupaya mendapatkan lebih banyak penghargaan pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya. The Company shall strive to obtain more awards, having the best performance among SOEs in the same field or in within the same industry.	Selesai Done	Telah mendapatkan sejumlah penghargaan pada tahun 2022 dan akan terus berproses. Has obtained a number of awards in 2022 and will continue to progress.

## Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola yang memegang kekuasaan tertinggi di MTI dan menjadi wadah atau forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang RUPS lainnya adalah sebagai berikut:

- Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Menetapkan perhitungan alokasi laba Perseroan untuk:
  - Laba yang ditahan dan cadangan;
  - Dividen kepada Pemegang Saham;
  - Bonus Direksi, Dewan Komisaris, dan Pekerja.
- Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris;
- Melakukan penilaian kinerja secara kolektif (Kolegial) maupun masing-masing (Individu) Direksi dan Komisaris;
- Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan;
- Menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi;
- Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Komisaris;

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate governance organ with the highest power in MTI and it becomes a forum for Shareholders to make important decisions whose authority is not given to the Board of Directors and Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The other authorities that belong to the GMS are:

- Approve or reject the Company's Long Term Plan (RJPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
- Determine the calculation of the Company's profit allocation for:
  - Retained earnings and reserves;
  - Dividends to Shareholders;
  - Bonuses for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees.
- Appoint and dismiss the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Set performance targets for each Board of Directors and Board of Commissioners;
- Conduct performance appraisals collectively (collegially) and individually of the Board of Directors and Board of Commissioners;
- Appoint an external auditor to conduct a financial audit of the financial statements;
- Determine the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors;
- Establish policies regarding the possibility of conflicts of interest related to the Board of Commissioners;

9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris;
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.

9. Determine the maximum number of positions a Commissioner may hold concurrently;
10. Determine the maximum number of Commissioner positions that may be held concurrently by the Board of Directors in Subsidiaries.

RUPS terdiri dari:

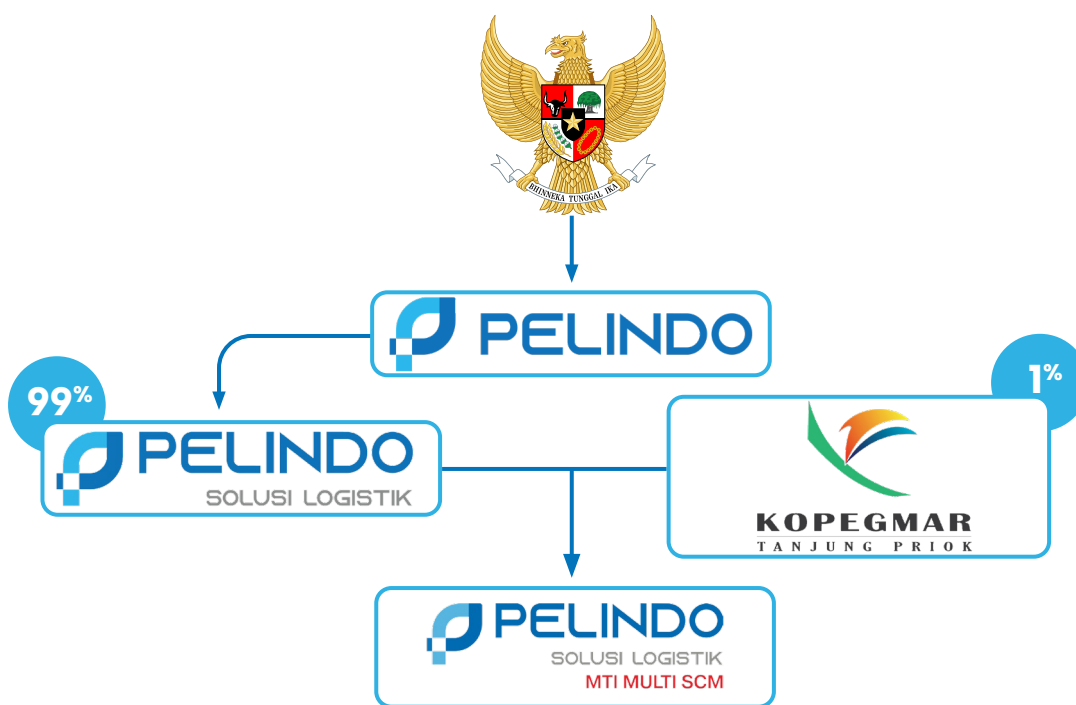
1. RUPS Tahunan (RUPST) untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah periode akuntansi yang baru dimulai;
2. RUPST untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
3. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

The GMS consists of:

1. The Annual GMS (AGMS) to ratify the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) is held no later than 30 (thirty) days after the new accounting period begins;
2. The AGMS to ratify the Annual Report and Annual Calculations is held no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
3. Extraordinary GMS (EGMS) can be held at any time if Shareholders request or at the suggestion of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.

**Pemegang Saham MTI**

**Shareholders of MTI**



**Hak Pemegang Saham**

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS;
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perseroan secara lengkap, tepat waktu, dan teratur;
3. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG;
4. Memperoleh pembagian laba Perseroan (dividen);
5. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila Perseroan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan.

**Rights of Shareholders**

1. Attending the GMS and voting at the GMS;
2. Obtaining material information (including the right to ask questions) from both the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding finances or other matters concerning the Company in a complete, timely, and orderly manner;
3. Obtaining an explanation of the GCG implementation;
4. Obtaining the Company's profit sharing (dividends);
5. Holding a GMS if the Board of Directors and/or Board of Commissioners are negligent in holding the Annual GMS and, from time to time, request the holding of an Extraordinary GMS if deemed necessary, for example, if the Company faces a significant decline in performance.



## Penyelenggaraan RUPS Tahun 2022

## Implementation of GMS in 2022

<b>RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 – Persiapan dan Kehadiran</b> Annual GMS for the Financial Year of 2021 – Preparation and Presence	
Pemanggilan RUPS GMS Invitation	Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2021 kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Koperasi Pegawai Maritim selaku pemegang saham Perseroan disampaikan melalui Surat Undangan Direksi MTI Nomor: UM.261/2/6/1/MTI-2022 tanggal 2 Juni 2022 menyusul Surat Undangan Nomor: UM.261/17/5/1/MTI-2022 tanggal 17 Mei 2022. The summons for the 2021 Annual GMS to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Maritime Employees Cooperative as shareholders of the Company were submitted through Invitation Letter of Board of Directors of MTI Number: UM.261/2/6/1/MTI-2022 dated June 2, 2022, following the Invitation Number: UM.261/17/5/1/MTI-2022 dated May 17, 2022.
Waktu Pelaksanaan Date of Implementation	Selasa, 7 Juni 2022 Tuesday, June 7, 2022
Tempat Pelaksanaan Venue	Ruang Rapat Amanah, Pelindo Tower Lantai 15 Jl. Yos Sudarso No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara Amanah Meeting Room, Pelindo Tower 15th Floor Jl. Yos Sudarso No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta
Kehadiran Pemegang Saham Shareholders Attendance	<p><b>1. PT Pelindo Solusi Logistik</b> Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Strategic and Business Development Director Retno Soelistianti</p> <p>Direktur Komersial dan Teknik Commercial and Engineering Director Kokok Susanto</p> <p><b>2. Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok</b> Ketua Koperasi Cooperative Head Djusman Hi Umar</p>
Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Presence	<p>Komisaris Utama President Commissioner Roy Leonard</p> <p>Komisaris Commissioner Buyung Lalana</p> <p>Komisaris Commissioner Edison Simanjuntak</p> <p>Komisaris Independen Independent Commissioner Sahat Martin Philip Sinurat</p>
Kehadiran Direksi Board of Directors Presence	<p>Direktur Utama President Director Gunta Prabawa</p> <p>Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director Budi Azmi</p> <p>Direktur Operasi Operational Director Ruri Indrasari Racmaputri</p>
Pimpinan RUPS Chairman of the GMS	Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Strategic and Business Development Director Retno Soelistianti
Risalah Minutes of Meeting	Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 telah disampaikan melalui surat No: HM.03.03/30/6/2/PAPR/DSPB/PLSL-22 tanggal 30 Juni 2022 Minutes of the 2021 Annual GMS were submitted through letter No: HM.03.03/30/6/2/PAPR/DSPB/PLSL-22 dated June 30, 2022

**RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 – Keputusan**  
 Annual GMS for the Financial Year of 2021 – Resolutions

**Mata Acara Pertama | First Agenda**

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021  
 Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Report for the Financial Year of 2021

Keputusan Mata Acara Pertama  
 Resolutions of the First Agenda

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP): Purwanto, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya nomor: 00947/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dengan opini "Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal yang Material", sekaligus memberikan pembebasan sepenuhnya (*volleidig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Approved the Annual Report for the Financial Year of 2021 and ratified the Financial Report for the financial year ended on December 31, 2021 which was audited by the Public Accounting Firm (KAP): Purwanto, Sungkoro and Surja according to report number: 00947/2.1032/AU.1/06/0697-2/1/IV/2022 dated April 26, 2022 with the opinion "Presented Fairly, in All Material Matters", and granted complete release (*volleidig acquit et decharge*) to the Company's Board of Directors and Commissioners for the management and supervision during the financial year of 2021, as long as it was not a criminal act, does not violate the prevailing legal provisions and procedures, and is reflected in the Company's Annual Report and Financial Report.

Tindak Lanjut Manajemen  
 Follow-up by the Management

Terealisasi  
 Realized

**Mata Acara Kedua | Second Agenda**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021  
 Appropriation of the Company's Net Income for the Financial Year of 2021

Keputusan Mata Acara Kedua  
 Resolutions of the Second Agenda

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2021 sebesar Rp10.063.584.754 sebagai berikut:

Dividen 0% = Rp0

Laba ditahan 100% = Rp10.063.584.754

Approved the appropriation of profit for the current year attributable to the owner of the parent entity for the financial year of 2021 amounting to Rp10,063,584,754 as follows:

0% for dividend = Rp0

100% for retained earnings = Rp10,063,584,754

Tindak Lanjut Manajemen  
 Follow-up by the Management

Terealisasi  
 Realized

**Mata Acara Ketiga | Third Agenda**

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris beserta Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun Buku 2022

Tantiem for the Financial Year of 2021, Salaries for the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for the Financial Year of 2022

Keputusan Mata Acara Ketiga  
 Resolutions of the Third Agenda

Keputusannya akan ditetapkan dalam RUPS tersendiri.  
 The resolution is going to be determined in a separate GMS.

Tindak Lanjut Manajemen  
 Follow-up by the Management

Terealisasi  
 Realized

**Mata Acara Keempat | Fourth Agenda**

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2022  
 Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Statements for 2022

Keputusan Mata Acara Keempat  
 Resolutions of the Fourth Agenda

Menyetujui penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (member of Ernst & Young Global) untuk melakukan audit laporan keuangan, audit kinerja & KPI, audit kepatuhan internal serta audit kepatuhan perundang-undangan tahun buku 2022.

Approved the appointment of KAP Purwantono, Sungkoro and Surja (member of Ernst & Young Global) to audit the financial report, performance & KPI, internal compliance and statutory compliance for the financial year of 2022.

Tindak Lanjut Manajemen  
 Follow-up by the Management

Terealisasi  
 Realized

<b>Keputusan Sirkuler di Luar RUPS</b> Circular Resolutions Outside the GMS	
<b>Nomor Keputusan Resolution Numbers</b>	Keputusan Para Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perseroan Nomor: SK.03/12/8/3/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.566/04/13/KPM.TPK-22 Resolutions of Shareholders (Circular GMS Resolution) of the Company Number: SK.03/12/8/3/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.566/04/13/KPM.TPK-22
<b>Perihal   Subject</b>	Penetapan Pedoman Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Guideline of Remuneration for the Board of Directors and Commissioners of the Company
<b>Nomor Keputusan Resolution Numbers</b>	Keputusan Para Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perseroan Nomor: SK.03/5/10/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.566/05/01/KPM.TPK-22 Resolutions of Shareholders (Circular GMS Resolution) of the Company Number: SK.03/5/10/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.566/05/01/KPM.TPK-22
<b>Perihal   Subject</b>	Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Kinerja Tahun Buku 2021 Tantiem for the Board of Directors and Commissioners of the Company for the Performance of Financial Year of 2021
<b>Nomor Keputusan Resolution Numbers</b>	Keputusan Para Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perseroan Nomor: SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.566/03/12/KP.TPK-22 Resolutions of Shareholders (Circular GMS Resolution) of the Company Number: SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.566/03/12/KP.TPK-22
<b>Perihal   Subject</b>	Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perseroan Dismissal and Appointment of the Company's Board of Directors
<b>Nomor Keputusan Resolution Numbers</b>	Keputusan Para Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perseroan Nomor: KU.01.04/31/1/9/PBAP/UTMA/PLND-22 dan Nomor: HK.566/01/05/KPM.TPK-22 Resolutions of Shareholders (Circular GMS Resolution) of the Company Number: KU.01.04/31/1/9/PBAP/UTMA/PLND-22 and Number: HK.566/01/05/KPM.TPK-22
<b>Perihal   Subject</b>	Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 Perseroan Corporate Budget and Plan (RKAP) of the Financial Year of 2022

## Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS yang Diselenggarakan Tahun 2021

## Implementation and Follow-Up of the Resolutions of the GMS Conducted in 2021

<b>Keputusan RUPST Tahun Buku 2020 Tanggal 4 Juni 2021</b> Resolution of the AGMS for the Financial Year 2020 on June 4, 2021	<b>Realisasi</b> Realization
<p><b>Mata Acara Rapat Pertama</b> Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).</p> <p><b>First Meeting Agenda</b> Approval of the Company's Annual Report for the 2020 (two thousand and twenty) Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2020 (two thousand and twenty) Fiscal Year. Besides, Ratification of the Company's Financial Statements for the 2020 (two thousand and twenty) Fiscal Year, as well as granted full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Company's management and supervisory actions, carried out in 2020 (two thousand and twenty) Fiscal Year.</p>	Keputusan sudah terealisasi The resolution has been realized
<p><b>Mata Acara Rapat Kedua</b> Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).</p> <p><b>Second Meeting Agenda</b> Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2020 (two thousand and twenty) Fiscal Year.</p>	Tidak ada keputusan yang direalisasikan No resolution to be realized
<p><b>Mata Acara Rapat Ketiga</b> Penetapan tantiem Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), Gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p><b>Third Meeting Agenda</b> Determination of bonuses for the 2020 (two thousand and twenty) Fiscal Year, Salary for the Board of Directors, and honorarium for the Board of Commissioners along with other facilities and allowances for 2021 (two thousand and twenty-one).</p>	Keputusan sudah terealisasi The resolution has been realized
<p><b>Mata Acara Rapat Keempat</b> Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p><b>Fourth Meeting Agenda</b> Approval for the Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") to audit the Company's Financial Statements for the 2021 (two thousand and twenty-one) Fiscal Year</p>	Keputusan sudah terealisasi The resolution has been realized

## Dewan Komisaris

### Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan MTI, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

#### Masa Jabatan Anggota

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya. Pengaturan masa jabatan ini tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Mengundurkan diri;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Meninggal dunia.

RUPS dapat mengangkat seorang sebagai Anggota Dewan Komisaris untuk mengisi jabatan seorang Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang digantikan.

#### Komposisi Anggota

Selama tahun 2022, komposisi Dewan Komisaris MTI mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

#### Kronologi Perubahan Susunan Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2022

Periode 1 Januari–14 Maret 2022 From January 1 until March 4, 2022	Periode 14 Maret–26 April 2022 From March 14 until April 26, 2022	Periode 26 April–31 Desember 2022 From April 26 until December 31, 2022
<b>Ogi Rulino</b> Komisaris Utama President Commissioner	<b>Ogi Rulino</b> Komisaris Utama President Commissioner	<b>Roy Leonard</b> Komisaris Utama President Commissioner
<b>Edison Simanjuntak</b> Komisaris Commissioner	<b>Edison Simanjuntak</b> Komisaris Commissioner	<b>Edison Simanjuntak</b> Komisaris Commissioner
<b>Buyung Lalana</b> Komisaris Commissioner	<b>Buyung Lalana</b> Komisaris Commissioner	<b>Buyung Lalana</b> Komisaris Commissioner
<b>Solikhin</b> Komisaris Commissioner	<b>Sahat Martin Philip Sinurat</b> Komisaris Independen Independent Commissioner	<b>Sahat Martin Philip Sinurat</b> Komisaris Independen Independent Commissioner

The Board of Commissioners is an organ of the Company in charge of supervising management policies, the course of management in general, as well as providing advice to the Board of Directors for the interest of MTI, according to the Company's purposes and objectives.

#### Term of Office of Members

Members of the Board of Commissioners are appointed starting from the date of the GMS that appointed them. This term of office arrangement does not reduce the right of the GMS to dismiss them at any time before their term of office ends by stating the reasons. The term of office of members of the Board of Commissioners ends if:

1. His/her term of office ends;
2. Resign;
3. No longer meets statutory requirements;
4. Dismissed based on the GMS resolution;
5. Passed away.

The GMS may appoint a member of the Board of Commissioners to fill the position of a member of the Board of Commissioners who is dismissed from his/her position or to fill a vacancy. The term of office of a person who is appointed to replace the dismissed member of the Board of Commissioners or to fill the vacancy is the remaining term of office of the replaced member of the Board of Commissioners.

#### Composition of Members

During 2022, the composition of the Board of Commissioners of MTI has changed with the following details:

#### Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners throughout 2022



## Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022

## Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022

Nama   Name	Posisi   Position	Dasar Pengangkatan   Basis of Appointment
<b>Roy Leonard</b>	Komisaris Utama President Commissioner	<p>Diangkat menjadi Komisaris Utama MTI berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/01/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia tanggal 26 April 2022.</p> <p>He was appointed as the President Commissioner of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number HM.03.03/26/4/4/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/03/01/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia dated April 26, 2022.</p>
<b>Edison Simanjuntak</b>	Komisaris Commissioner	<p>Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa melalui RUPS Nomor KP.03/14/7/7/MTA/UT/PLI.II-2020 dan No. HK. 566/01/19/KPM.TPK-20 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 14 Juli 2020.</p> <p>He was appointed as a Commissioner of MTI based on Resolutions of the General Meeting of Shareholders Outside the GMS (Circular GMS) Number KP.03/14/7/7/MTA/UT/PLI.II-2020 and No. HK. 566/01/19/KPM.TPK-20 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners dated July 14, 2020.</p>
<b>Buyung Lalana</b>	Komisaris Commissioner	<p>Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di luar RUPS No. SK.03/27/12/2/PBI/UT/P/PLI.II-17 dan No. HK.566/03/15/KPM.Tpk.17 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 27 Desember 2017.</p> <p>He was appointed as a Commissioner of MTI based on the Resolutions of General Meeting of Shareholders Outside the GMS (Circular GMS) No. SK.03/27/12/2/PBI/UT/P/PLI.II-17 and No. HK.566/03/15/KPM.Tpk.17 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners dated December 27, 2017.</p>
<b>Sahat Martin Philip Sinurat</b>	Komisaris Independen Independent Commissioner	<p>Diangkat menjadi Komisaris MTI berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia Nomor SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/02/02/KPM.TPK-22 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia tanggal 14 Maret 2022.</p> <p>He was appointed as a Commissioner of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia Number SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/02/02/KPM.TPK-22 concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia dated March 14, 2022.</p>

### Fungsi

Dewan Komisaris memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perseroan;
2. Memastikan efektivitas praktik GCG yang diterapkan oleh Perseroan.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris terwujud dalam 2 (dua) tingkatan:

1. Level Performance, yaitu fungsi pengawasan di mana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Level Conformance, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

### Function

The Board of Commissioners has the following functions:

1. Supervise the Company's management by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors on the Company's interests and objectives;
2. Ensure the effectiveness of GCG practices implemented by the Company.

The supervisory function of the Board of Commissioners is realized on 2 (two) levels:

1. Performance Level, which is a supervisory function in which the Board of Commissioners provides directions and guidance to the Board of Directors and provides inputs to the General Meeting of Shareholders (GMS);
2. Conformance level, which is in the form of implementing supervisory activities at a later stage to ensure the advice has been carried out and provisions of the prevailing laws and regulations and the Articles of Association have been complied with.

### Pedoman Kerja

Sebagai bentuk komitmen MTI dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepakat untuk mengesahkan Pedoman Kerja (*Board Manual*) sebagai pedoman dalam berhubungan kerja sehingga tercipta sinergi dan kerja sama yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

*Board Manual* merupakan penjelasan tata laksana kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi agar tercipta pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, efektif, dan efisien untuk mencapai visi dan misi Perseroan. *Board Manual* yang berlaku saat ini merupakan revisi ke-5 setelah penyusunan awal pada tahun 2020. Beberapa hal yang mendasari penyesuaian

Isi dari *Board Manual* Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam Bab II, yang meliputi:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Prinsip Dasar dan Kebijakan Umum Dewan Komisaris;
3. Wewenang Dewan Komisaris;
4. Pembagian Kerja Dewan Komisaris;
5. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
6. Tugas Dewan Komisaris dalam Lingkup Beberapa Bidang;
7. Persyaratan Dewan Komisaris;
8. Keanggotaan Dewan Komisaris;
9. Rangkap Jabatan;
10. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
11. Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris;
12. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris;
13. Pengisian Jabatan Lowong Anggota Dewan Komisaris;
14. Keadaan Seluruh Anggota Dewan Komisaris Lowong;
15. Komisaris Independen;
16. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris;
17. Waktu Kerja Dewan Komisaris;
18. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
19. Rapat Dewan Komisaris;
20. Organ Pendukung Dewan Komisaris;
21. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris;
22. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.

### Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab Kolegial

Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan cara:

1. Memantau efektivitas praktik GCG yang di terapkan perusahaan;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya bersama dengan penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berikutnya;

### Board Manual

As a form of MTI's commitment to implementing the GCG principles, the Board of Commissioners and the Board of Directors agreed to ratify Board Manual as a guideline in working relationships. It creates good synergy and cooperation according to the GCG principles and upholds integrity and honesty in carrying out the Company's business activities.

The Board Manual explains the work procedures between the Board of Commissioners and Board of Directors to create a professional, transparent, effective and efficient company management to achieve the Company's vision and mission. The current Board Manual is the 5<sup>th</sup> revision after it was compiled firstly in 2020.

The content of the Board Manual of the Board of Commissioners are specifically explained in Chapter II, which include:

1. Functions of the Board of Commissioners;
2. Basic Principles and General Policies of the Board of Commissioners;
3. Authorities of the Board of Commissioners;
4. Division of Works of the Board of Commissioners;
5. Supervisory Duties of the Board of Commissioners;
6. Duties of the Board of Commissioners in the Scope of Several Fields;
7. Requirements for the Board of Commissioners;
8. Membership of the Board of Commissioners;
9. Concurrent Positions;
10. Term of Office of the Board of Commissioners;
11. Dismissal of Members of the Board of Commissioners;
12. Resignation of Members of the Board of Commissioners;
13. Filling of vacant positions of members of the Board of Commissioners;
14. The condition of all Board of Commissioners members positions is vacant;
15. Independent Commissioner;
16. Introduction and Capacity Building Program for the Board of Commissioners;
17. Working Hours of the Board of Commissioners;
18. Ethics of the Board of Commissioners;
19. Meetings of the Board of Commissioners;
20. Supporting Organs of the Board of Commissioners;
21. Performance evaluation of the Board of Commissioners;
22. Accountability of the Board of Commissioners.

### Collegial Duties, Authorities, and Responsibilities

The supervisory duties of the Board of Commissioners are carried out by:

1. Monitor the effectiveness of GCG practices implemented by the Company;
2. Prepare the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners together with the preparation of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for the following year;

3. Dalam hal Dewan Komisaris memberikan persetujuan atau penolakan atau rekomendasi kepada pemegang saham atas usulan Direksi maka hal tersebut harus disertai dengan penjelasan yang transparan
4. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris yang khusus dihadiri oleh Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
5. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan dan perusahaan lain;
6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
7. Menetapkan Batasan-batasan nilai perbuatan hukum Direksi, yang memerlukan persetujuan tertulis;
8. Memberikan putusan terhadap usulan perbuatan hukum direksi yang memerlukan persetujuan tertulis;
9. Memberikan tanggapan tertulis, untuk memberikan pendapat dan saran kepada RUPS atau usulan perbuatan hukum yang akan dilaksanakan oleh Direksi yang diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan;
10. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi;
11. Mengusulkan penunjukan akuntan untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
12. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain (bila ada), termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan, menandatangani laporan tahunan serta memastikan efektifitas sistem pengendalian internal;
13. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan dilaporkan kepada RUPS;
14. Memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan tentang:
  - a. Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya;
  - b. Rencana mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan;
  - c. Melakukan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh direksi;
  - d. Menyampaikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.

15. Memberikan arahan antara lain tentang:
    - a. Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan, secara tepat waktu dan relevan;
    - b. Sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya;
    - c. Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;
    - d. Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia;
    - e. Kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya;
    - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan;
    - g. Pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan/cabang/unit;
    - h. Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan SDM, khususnya tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi, dan demosi di perusahaan dan pelaksanaan kebijakan tersebut;
    - i. Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut;
    - j. Pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
  16. Melakukan evaluasi tindak lanjut rapat sebelumnya (jika ada);
  17. Setiap akhir tahun buku melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  18. Mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS/Pemilik modal;
  19. Merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikan kepada direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan;
  20. Pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya;
  21. Pengawas tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
  22. Melaporkan dengan segera kepada RUPS/Pemilik Modal apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. Faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya:
    - a. Pelaporan kepada RUPS/Pemilik Modal jika terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan;
    - b. Mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan tersebut;
    - c. Mekanisme untuk segera membahas gejala menurunnya kinerja perusahaan;
15. Provide directions, among other things:
    - a. Important matters regarding changes in the business environment that are expected to have a major impact on the Company's business and performance in a timely and relevant manner;
    - b. Information technology systems and their implementation;
    - c. Career development policy and implementation;
    - d. Accounting policy and preparation of financial statements are according to generally accepted accounting standards in Indonesia;
    - e. Goods and services procurement policy and its implementation;
    - f. Supervision of policy implementation;
    - g. Management of subsidiaries/joint ventures/branches/units;
    - h. Supervision and provision of advice on HR management policy, especially regarding career management in the Company, systems, and procedures for promotion, transfer, and demotion in the Company, and the policy implementation;
    - i. Quality and service policy and the policy implementation;
    - j. Supervision of the Board of Directors in carrying out the applicable laws and regulations and agreements with third parties;
  16. Conduct evaluations of previous meetings follow ups (if any);
  17. At the end of each fiscal year, evaluate the performance of the committees that assist the Board of Commissioners' duties and responsibilities implementation;
  18. Regarding the process of appointing external auditor candidates and/or reappointing an external auditor and submitting proposals for external auditor candidates to the GMS/capital owners;
  19. Respond/follow up on suggestions, problems, or complaints from stakeholders and submit to the Board of Directors the required resolution suggestions;
  20. Supervision and advice provision on internal control system policy/design and its implementation;
  21. Supervisors regarding the supervision of the effectiveness of external and internal audits implementation, as well as review implementation of complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners/Supervisory Board;
  22. Report immediately to the GMS/ Capital Owners if there were symptoms of declining company performance and suggestions submitted to the Board of Directors to improve the problems faced. Factors tested for suitability of its application:
    - a. Reporting to the GMS/Capital Owners if there were symptoms of declining company performance;
    - b. The mechanism for providing immediate advice to the Board of Directors to correct problems that impact the decline in the Company's performance;
    - c. Mechanisms to immediately discuss the symptoms of declining company performance;



23. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi;
24. Memastikan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
25. Mekanisme pemberian persetujuan/otoritas/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
3. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak bisa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta peraturan lainnya atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada dalam hal Direksi sakit dan tidak dapat menjalankan tugas. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari

23. Propose the remuneration of the board of directors according to applicable regulations and the performance appraisal of the board of directors;
24. Ensure that the good corporate governance principles have been implemented effectively and sustainably;
25. The mechanism for granting approval/authority/recommendation to the Board of Commissioners for the actions of the Board of Directors that requires recommendation/approval of the Board of Commissioners according to applicable provisions and/or the Articles of Association.

The Board of Commissioners is responsible for the Company's supervision. It refers to Article 108 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), namely in terms of supervising management policies and the course of management in general, both regarding the Company and its business, and provides advice to the Board of Directors.

Each member of the Board of Commissioners must act in good faith and prudence and be responsible for carrying out their supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the interest of the Company and according to the Company's purposes and objectives. Then each member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Company's loss if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. If the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners or more, the responsibilities as referred to above apply jointly and severally to each member of the Board of Commissioners (Article 114 paragraph (3) of the Company Law). However, the Board of Commissioners cannot be held responsible for the losses as referred to in Article 114 paragraph (3) of the Company Law if it can prove:

1. Have carried out supervision in good faith and prudence for the interest of the Company and according to the Company's purposes and objectives;
2. Does not have a personal interest, either directly or indirectly, in the management actions of the Board of Directors that result in losses;
3. Has advised the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses.

The Board of Commissioners has the authorities to:

1. The Board of Commissioners, with a majority of votes, may at any time be entitled to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if he/she (they) acts contrary to the Articles of Association and other regulations or neglects his/her obligations or there are urgent reasons for the Company, including but not limited to: in the event that the Board of Directors is sick and unable to carry out their duties. The said temporary dismissal must be notified to the person concerned and the reasons for the action. Within 45 (forty-five) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners is

setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan menjelaskan kepada RUPS, selanjutnya RUPS akan memutuskan apakah Direktur yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya, sementara anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir membela diri. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir dalam Rapat atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat;

2. Dalam hal jabatan salah seorang anggota Direksi lowong baik mengundurkan diri maupun diberhentikan dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka Dewan Komisaris berwenang menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dan Direktur tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta menunjuk pihak lain untuk mewakili perusahaan;
3. Menetapkan komposisi Direksi dari Anak Perusahaan terkait dengan kondisi Anak Perusahaan;
4. Mendapatkan informasi dari Direksi Anak Perusahaan terkait dengan kondisi anak perusahaan;
5. Berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap rencana Direksi:
  - a. Membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan, atau menjaminkan aktiva tetap atau aktiva lain milik Perseroan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - b. Menghapuskan piutang dari pembukuan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - d. Menerima atau memberikan pinjaman jangka waktu menengah/panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - e. Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya, termasuk mengambil atau melepaskan partisipasi (working interest melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris);
  - f. Mendirikan Anak /Cabang/Unit;
  - g. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - h. Mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing, transaksi pinjam meminjam dari produk terstruktur lainnya serta turunan dari transaksi komoditas;
  - i. Membuat, mengubah, mengakhiri, atau membatalkan perjanjian lisensi (license agreement).

required to explain to the GMS. Then the GMS will decide whether the Director concerned will be permanently dismissed or returned to his/her position. At the same time, the temporarily dismissed members of the Board of Directors are allowed to attend to defend him/herself. The President Commissioner chairs this meeting, and if the President Commissioner is not present at the meeting or is unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is present at the meeting;

2. If the position of a member of the Board of Directors is vacant, either resigns or is dismissed, and a replacement is not available or has not assumed his position, the Board of Commissioners has the authority to appoint one of the other members of the Board of Directors to carry out the work of the vacant member of the Board of Directors with the same power and authority, and the Director concerned may act for and on behalf of the Board of Directors and appoint other parties to represent the Company;
3. Determine the composition of the Board of Directors of a subsidiary in relation to the condition of the subsidiary;
4. Obtain information from the Board of Directors of the Subsidiary regarding the condition of the subsidiary;
5. Authorized to give written approval or rejection of the plan of the Board of Directors:
  - a. Buy, release, sell, pledge, or pledge fixed assets or other assets of the Company with a certain value determined by the Board of Commissioners;
  - b. Write off receivables from the books with a certain value determined by the Board of Commissioners;
  - c. Bind the Company as guarantor (borg or avalist) with a certain value determined by the Board of Commissioners;
  - d. Receive or provide medium/long term loans and receive or provide short term loans that are not operational in nature with a certain value determined by the Board of Commissioners;
  - e. Conduct equity participation or divestment of the Company's capital participation in other business entities, including taking or releasing participation (working interest exceeding a certain amount determined by the Board of Commissioners);
  - f. Establish a Subsidiary/Branch/Unit;
  - g. Merging, consolidating, taking over, or spinning off each as defined in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
  - h. Conduct derivative transactions, which are derivatives of foreign exchange buying and selling transactions, lending and borrowing transactions of other structured products, and derivatives of commodity transactions;
  - i. Create, modify, terminate, or cancel a license agreement.

### Tugas Pengawasan Setiap Anggota

Guna mengaktifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun perorangan. Komisaris Utama menetapkan kebijakan yang mengatur tentang kewajiban setiap anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya, dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban MTI.

Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris PT MTI yang menjabat pada akhir tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Nama   Name	Jabatan   Position	Tugas Pengawasan   Supervision
Ogi Rulino	Komisaris Utama President Commissioner	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Efektivitas Praktik GCG Coordinator of Management and Supervision of GCG Practice
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	Pembinaan Pengurusan & Pengawasan Efektivitas Praktik GCG di Bidang Keuangan & SDM, dan berperan sebagai Ketua Komite Audit Management and Supervision of GCG Practice in terms of Finance & HR, currently as Chairman of the Audit Committee
Buyung Lalana	Komisaris Commissioner	Pembinaan Pengurusan & Pengawasan Efektivitas Praktik GCG di Bidang Operasi, dan berperan sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Management and Supervision of GCG Practice in terms of Operation, currently as Chairman of the Risk Management Committee
Sahat Martin Philip Sinurat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pembinaan Pengurusan & Pengawasan Efektivitas Praktik GCG di Bidang Komersial & Pengembangan Usaha Management and Supervision of GCG Practice in terms of Commercial & Business Development

### Prosedur Pengangkatan Anggota

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Dewan Komisaris. Persyaratan tersebut adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Orang perseorangan;
2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
3. Mampu melaksanakan ketaatan terhadap hukum yang berlaku;
4. Memahami Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tugasnya;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
6. Mampu bekerja sama sebagai anggota Dewan Komisaris;

### Segregation of Supervision by Each Member

A segregation of duties is carried out among the Board of Commissioners members to activate the role of the Board of Commissioners, taking into account the division of duties of the Board of Directors. The segregation of duties among the Board of Commissioners members is intended so that the duties implementation of each member of the Board of Commissioners technically in the aspects they are engaged in can run smoothly, effectively, and efficiently, according to their respective responsibilities and authorities. Therefore there is clarity on the roles of members of the Board of Commissioners, both collectively and individually. The President Commissioner determines the policy governing the obligations of each member of the Board of Commissioners to be regulated by themselves. For the smooth running of their duties, the Board of Commissioners is assisted by the Board of Commissioners' Secretary, who is appointed and dismissed by the Board of Commissioners at MTI's expenses.

The segregation of duties of the Board of Commissioners members by the of 2022 is:

### Procedures to Appoint Members

There are 2 (two) types of requirements that must be met by a candidate for a member of the Board of Commissioners. These requirements are the general and special requirements.

General requirements are the basic requirements stipulated by the applicable laws and regulations, including:

1. Individuals;
2. Have good character, morals, and integrity;
3. Able to carry out compliance with applicable laws;
4. Understand the Articles of Association and the laws and regulations related to its duties;
5. Never been declared bankrupt by the Court within 5 (five) years prior to the nomination;
6. Able to work together as a member of the Board of Commissioners;

- |   |   |
|---|---|
| <p>7. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;</p> <p>8. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;</p> <p>9. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>10. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai;</p> <p>11. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>12. Memiliki integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati di tempat yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja sebelum pencalonan:</p> <p>a. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi dan pegawai tempat yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja sebelum pencalonan;</p> <p>b. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan yang sehat.</p> <p>13. Memiliki keahlian dan kompetensi untuk mempertimbangkan dan menganalisis suatu masalah secara memadai dan independen;</p> <p>14. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>15. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif/kepala daerah;</p> <p>16. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>7. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination;</p> <p>8. Never been convicted for committing an unlawful act and a crime that harms the state's finances within 5 (five) years prior to the nomination;</p> <p>9. There must be no familial blood relationship to the third degree, either in a straight line or a sideways line or marital relationship (son in law or brother in law) with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;</p> <p>10. Commit to providing adequate time;</p> <p>11. Must not hold concurrent positions that may cause a direct or indirect conflict of interest with the Company and or conflict with applicable provisions of laws and regulations;</p> <p>12. Have integrity and morals that the person concerned has never been involved in the act of default which can be categorized as not fulfilling the agreed commitments at the place where the person concerned works or has worked before the nomination:</p> <p>a. Acts categorized as being able to provide personal benefits to prospective members of the Board of Directors and employees where the person concerned works or has worked before nomination;</p> <p>b. Acts categorized as a violation of the provisions relating to the management of a sound company.</p> <p>13. Have the expertise and competence to consider and analyze a problem adequately and independently;</p> <p>14. Commit to comply with the applicable laws and regulations;</p> <p>15. Not an administrator of a political party and/or candidate/member of the legislature/regional head;</p> <p>16. Currently not holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the Company or willing to resign if elected as a member of the Board of Commissioners.</p> |
|---|---|

Persyaratan khusus merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan yang bergerak di jasa logistik. Selain anggota Dewan Komisaris harus memiliki kompetensi teknis/keahlian terkait hal tersebut, yang bersangkutan juga harus:

1. Memiliki pengalaman menangani korporasi sebagai senior management dan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang diperlukan;
2. Berani dan cepat (*less bureaucracy*) di dalam pengambilan keputusan;
3. Mempunyai rekam jejak yang bersih dari aspek integritas;
4. Memiliki *leadership, sense of entrepreneurship* dan pengalaman;

Special requirements are requirements that are tailored to the needs and nature of the Company's business engaged in logistics services. In addition to members of the Board of Commissioners must have technical competence/skills related to this matter, the person concerned must also:

1. Has experience in handling corporations as senior management and can provide recommendations and solutions needed;
2. Courageous and fast (*less bureaucracy*) in decision making;
3. Have a clean track record in terms of integrity;
4. Have leadership, a sense of entrepreneurship, and experience;



5. Memiliki jaringan yang memadai dan interpersonal skill;
6. Menjadi jembatan komunikasi yang baik dengan pemegang saham.

Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (atau komite lain yang ditunjuk Dewan Komisaris untuk melakukan tugas ini) untuk diajukan kepada RUPS agar disahkan. Pengembangan persyaratan khusus dimaksudkan untuk memperoleh calon anggota Dewan Komisaris yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan yang akan dijabarkan dalam bentuk kriteria-kriteria mendasar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *Board Manual* yang ada.

#### Prosedur Pemberhentian Anggota

1. RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
  - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Mengundurkan diri.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;
3. Proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris oleh RUPS akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Kecuali pemberhentian dimaksud disebabkan oleh keputusan Pengadilan yang memiliki hukum tetap dan atau mengundurkan diri, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri;
4. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS;
5. Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan tanggal efektif pemberhentiannya, sepanjang tindakan Dewan Komisaris tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan;
6. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari kerja mengenai:
  - a. Keputusan pemberhentian sementara;
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas.

5. Have adequate network and interpersonal skills;
6. Become a good communication bridge with Shareholders.

Specific requirements are one of the substances of the nomination and selection system and procedures developed by the Nomination and Remuneration Committee (or other committees appointed by the Board of Commissioners to carry out this duty) to be submitted to the GMS for approval. The development of special requirements is intended to obtain candidates for members of the Board of Commissioners who are according to the Company's needs which will be described in the form of basic criteria, which are an integral part of the existing Board Manual.

#### Procedures to Dismiss Members

1. The GMS may dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends by stating the reasons, among others:
  - a. Unable to carry out their duties properly;
  - b. Not implement or violate the provisions of laws and regulations and/or the provisions of this Articles of Association;
  - c. Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
  - d. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
  - e. Resign.
2. The GMS may dismiss members of the Board of Commissioners based on the other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company;
3. The process of dismissing members of the Board of Commissioners by the GMS will be carried out according to the provisions of the legislation. Unless the dismissal is caused by a court decision, which has permanent law and or resigns, the member of the Board of Commissioners concerned is allowed to attend the GMS to defend him/herself;
4. Such dismissal shall be effective as of the closing of the GMS which decided the dismissal unless otherwise determined by the GMS;
5. The dismissed Board of Commissioners is still held accountable from the beginning of the fiscal year until the effective date of his/her dismissal, as long as the actions of the Board of Commissioners are reflected in the Annual Report of the fiscal year concerned;
6. The Company is required to disclose information to the public and submit it to Shareholders no later than 2 (two) working days regarding:
  - a. Temporary dismissal decision;
  - b. The results of the GMS as referred to above.

### Pengunduran Diri Anggota

1. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut kepada Perseroan, dengan tembusan ke Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri dan yang bersangkutan tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan Anggota Dewan Komisaris tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun yang bersangkutan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris;
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas;
3. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
4. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah Anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang dipersyaratkan, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila ditetapkan di RUPS dan telah diangkat Anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris;
5. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri tersebut di atas dalam RUPS berikutnya;
7. Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan Dewan Komisaris tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan.

### Members Resignation

1. If a member of the Board of Commissioners resigns, a resigned Member of the Board of Commissioners must submit written notification to the Company, with a copy to the Board of Commissioners at least 30 (thirty) days prior to the resignation date, and the person concerned is still being held accountable from the beginning of the fiscal year until his/her resignation effective date, as long as the actions of the member of the Board of Commissioners are reflected in the Annual Report of the year concerned. The Company is obliged to hold a GMS to decide on the resignation of the Board of Commissioners member within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter;
2. The Company is required to disclose information to the public and submit it to the Shareholders no later than 2 (two) working days after:
  - a. Receipt of the request for resignation of the Board of Commissioners;
  - b. The results of the GMS as referred to above.
3. If the Company does not hold a GMS within that period, then with the past of that period, the resignation of the member of the Board of Commissioners becomes valid without requiring the approval of the GMS;
4. If a Member of the Board of Commissioners resigns, resulting in the number of Members of the Board of Commissioners being less than the required number, then the resignation is valid if it is determined at the GMS and a new member of the Board of Commissioners has been appointed to meet the minimum requirements for the number of members of the Board of Commissioners;
5. Before the resignation becomes effective, the concerned member of the Board of Commissioners shall remain responsible for his/her duties and responsibilities implementation according to the Articles of Association and the Laws and Regulations;
6. The Company must report the resignation mentioned above in the next GMS;
7. The Board of Commissioners who resign are still held accountable from the beginning of the year until the resignation effective date, as long as the Board of Commissioners' actions are reflected in the Annual Report of the fiscal year concerned.

### Jabatan Lowong Anggota

Dalam hal terdapat posisi lowong dalam keanggotaan Dewan Komisaris maka:

1. Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, selain karena pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris, sehingga jumlah Anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah minimum Anggota Dewan Komisaris yang disyaratkan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah terjadinya lowongan itu;
2. Selama jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Anggota Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Anggota Dewan Komisaris itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan Anggota Dewan Komisaris lain tidak boleh melebihi sisa masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang digantikan tersebut.

Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris lowong, maka:

1. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu;
2. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka RUPS menunjuk pihak lain untuk melaksanakan tugas Dewan Komisaris sampai dengan ditetapkannya anggota-anggota Dewan Komisaris yang definitif;
3. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisaris yang definitif;
4. Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagaimana anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.

### Rangkap Jabatan Anggota

Berdasarkan Board Manual, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain;
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan lain;

### Filling of Vacancies for Members

If there is a vacant position within the Board of Commissioners then:

1. If for any reason the position of a Member of the Board of Commissioners is vacant, other than due to the resignation of a Member of the Board of Commissioners, so the number of Members of the Board of Commissioners becomes less than the minimum number of Members of the Board of Commissioners required, a GMS must be held to fill the vacancy within a period of 45 (forty five) days after the occurrence of the vacancy;
2. As long as the position is vacant and there is no yet successor or has not held the position, then one of the members of the Board of Commissioners shall carry out the work of the concerned member of the Board of Commissioners with the same power and authority;
3. The term of office of a member of the Board of Commissioners who concurrently serves as another member of the Board of Commissioners may not exceed the remaining term of office of the replaced member of the Board of Commissioners.

If there are no members within the Board of Commissioners, then:

1. Within 30 (thirty) days after the vacancies occur, a GMS must be held to fill the vacancies;
2. As long as the positions of the Board of Commissioners are vacant other than due to the end of the term of office, the GMS appoints other parties to carry out the duties of the Board of Commissioners until the determination of the definitive members of the Board of Commissioners;
3. If the vacancies are caused by the end of the term of office, the members of the Board of Commissioners whose term of office have ended may be determined by the GMS to continue carrying out their duties as members of the Board of Commissioners with the same duties, authorities, and obligations until the appointment of definitive members of the Board of Commissioners;
4. Acting members of the Board of Commissioners are given honorarium and allowances/facilities as members of the Board of Commissioners, except for post employment benefits.

### Concurrent Position of Members

Based on the Board Manual, members of the Board of Commissioners can hold concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors in a maximum of 2 (two) other companies;
2. Members of the Board of Commissioners in a maximum of 2 (two) Issuers or other companies;
3. If a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, then the member of the Board of Commissioners may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners for a maximum of 4 (four) other companies;

4. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Informasi mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris telah diuraikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

#### Kepemilikan Saham Anggota

Sampai dengan akhir tahun 2022, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham di MTI.

#### Hubungan Afiliasi Anggota

Berikut ini merupakan informasi hubungan afiliasi seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada akhir tahun 2022, baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with		
		Sesama Dewan Komisaris Fellow Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Sesama Dewan Komisaris Fellow Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Roy Leonard	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Buyung Lalana	Komisaris Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Sahat Martin Philip Sinurat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

#### Komisaris Independen

Pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Multi Terminal Indonesia Nomor SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/02/02/KPM.TPK-22 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia, Perseroan memutuskan memberhentikan Sdr. Solikhin sebagai Komisaris dan mengangkat Sdr. Sahat Martin Philip Sinurat sebagai Komisaris Independen.

#### Kriteria

Dalam komposisi Dewan Komisaris perlu ditempatkan Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan tidak memiliki benturan kepentingan sehingga tidak berpotensi mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap

4. Members of the Committees in a maximum of 5 (five) committees in other companies where the person concerned also serves as the Board of Directors member or Board of Commissioners member.

Information regarding the concurrent positions of the Board of Commissioners has been described in this Annual Report's Profile of the Board of Commissioners section.

#### Share Ownership of Members

As of the end of 2022, all members of the Board of Commissioners did own MTI' shares.

#### Affiliate Relationship of Members

The following is information on the affiliate relationship of all members of the Board of Commissioners who served by the end of 2022, both financial and familial relationships to the third degree, either in a straight line or sideways line.

#### Independent Commissioner

In 2022, based on Shareholders' Circular Resolution outside the General Meeting of Shareholders of PT Multi Terminal Indonesia Number SK.03/14/3/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566/02/02/KPM.TPK-22 dated March 14, 2022, concerning Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia, the Company dismissed Mr. Solikhin as a Commissioner, and appointed Mr. Sahat Martin Philip Sinurat as Independent Commissioner.

#### Criteria

In the composition of the Board of Commissioners, it is necessary to place an Independent Commissioner. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who come from outside the Company and does not have a conflict of interest so that he/she does not have the potential to interfere with his/her ability to carry out his/her duties independently and critically, both



Direksi. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan Komisaris Independen yang telah menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Jumlah Komisaris Independen adalah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris, komposisi tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen, calon yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan Kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan;
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris lainnya atau Pemegang Saham utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota direksi;
6. Dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional perusahaan akan bertindak secara independen terutama dalam hal proses pengambilan keputusan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang tertulis di atas;
7. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS;
8. Jika Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komisaris Audit berikutnya;
9. Pernyataan Independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;
10. Ditetapkan sebagai Komisaris Independen dalam Keputusan RUPS pengangkatannya.

### **Pernyataan Independensi**

Sebelum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komisaris Independen menyatakan sikap melalui pernyataan akan bertindak independen dalam melaksanakan tugas pengawasan operasional di lingkungan MTI. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Independensi dari seorang Komisaris Independen. Surat pernyataan ini telah ditandatangani oleh Sdr. Sahat Martin Philip Sinurat, Komisaris Independen yang saat ini menjabat pada surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan dan rangkap jabatan yang dilarang.

in relation to each other and the relationship with the Board of Directors. An Independent Commissioner is needed to achieve this objective, which has become necessary for the Company. The number of Independent Commissioners is at least 30% (thirty percent) of the members of the Board of Commissioners. The composition may change according to the provisions of the applicable regulations. To be appointed as Independent Commissioner, the candidate must meet the following criteria:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner in the following period;
2. Does not own shares either directly or indirectly in the Company;
3. Has no affiliation with Members of the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners or the Company's major shareholders;
4. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities;
5. Does not have a familial blood relationship up to the 3rd (third) degree, either in a straight line or a sideways line or a relationship arising out of marriage with other members of the Board of Commissioners or with members of the Board of Directors;
6. In carrying out supervisory function activities of the Company's operation, will act independently, especially in terms of the decision making process, including but not limited to the things written above;
7. Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of office may be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declares him/herself to be independent at the GMS;
8. If the Independent Commissioner serves on the Audit Committee, the relevant Independent Commissioner can only be reappointed to the Audit Committee for the next 1 (one) term of office of the Audit Commissioner;
9. Statement of Independence of Independent Commissioners must be disclosed in the annual report;
10. Determined as Independent Commissioner in the GMS resolution for his/her appointment.

### **Statement of Independence**

Before carrying out his duties and responsibilities, the Independent Commissioner declares his attitude through a statement that he will act independently in carrying out the duties of operational supervision within MTI. This statement is stated in the Statement of Independence of the Independent Commissioner. Mr. Sahat Martin Philip Sinurat, the current Independent Commissioner, has signed the statement of free from conflicts of interest or any other positions that are prohibited.

### Program Pengenalan Bagi Anggota Baru

Program pengenalan bagi anggota baru bertujuan agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin Kerjasama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, dan efektif. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota baru. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan GCG;
2. Gambaran mengenai perseroan berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategi lainnya;
3. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Untuk itu Dewan Komisaris menyampaikan surat kepada Direksi untuk diadakannya program pengenalan bagi anggota dewan komisaris yang baru diangkat. Penyelenggaraan program pengenalan ini wajib terdokumentasi dengan baik termasuk pencatatan tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris tersebut dalam mengikuti program tersebut.

Dengan adanya perubahan komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2022, Perseroan menggelar program pengenalan bagi Komisaris baru pada tanggal 18 Maret 2023 pada saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

### Program Peningkatan Kapabilitas

Guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan Dewan Komisaris dan sejalan dengan program pengembangan Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar, conference, ataupun dalam bentuk kunjungan kerja serta banding kaji (*benchmark*).

Informasi mengenai realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 telah diuraikan pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dalam Laporan Tahunan ini.

### Penyelenggaraan Rapat

Berdasarkan *Board Manual*, rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dan Komite, dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi. Untuk rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dan Komite wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, sedangkan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

### Induction Program for New Member

The introduction (induction) program for new member has a purpose to allow members of the Board of Commissioners to know each other and establish cooperation as a solid, comprehensive, and effective team. This program shall be carried out not more than 3 (three) months after the appointment of new members. Provisions regarding the induction program are:

1. Implementation of GCG;
2. An overview of the Company related to the vision, mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long term business plans, competitive position, risks, and various other strategic issues;
3. Corporate Secretary or anyone who performs the Corporate Secretary function has responsibility for conducting the introduction program. For this reason, the Board of Commissioners submits a letter to the Board of Directors for an introduction program for newly appointed members of the board of commissioners. The implementation of this introduction program must be well documented, including recording the attendance/activity rate of members of the board of commissioners in participating in the program.

With the amendment in the composition of the Board of Commissioners in 2022, the Company held an induction program for new Commissioner on March 18, 2023, during the joint meeting between the Board of Commissioners and Directors.

### Capability Development

To improve the competence and knowledge of the Board of Commissioners and in line with the development program of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners must constantly increase and update their knowledge through training, workshops, seminars, conferences activities, or in the form of working visits and benchmarks.

Information regarding the realization of the Capability Enhancement program followed by the Board of Commissioners throughout 2022 has been disclosed in the Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit in this Annual Report.

### Board Meetings

Based on the Board Manual, the Board of Commissioners meetings consist of the Board of Commissioners internal meeting, the Board of Commissioners meeting with Committees, and the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors. The Board of Commissioners internal meeting, the Board of Commissioners meeting with the Committees, must be held at least once in 2 (two) months. In contrast, the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors must be held periodically, at least once a month.

Guna membentuk perencanaan yang disiplin, pada awal tahun 2022 telah disusun rencana awal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang tertuang dalam Jadwal Tahunan Perseroan (*calendar event*). Informasi rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti SPI dan divisi-divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dilakukan dengan selektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Dewan Komisaris) didokumentasikan baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris MTI menyelenggarakan rapat internal yang hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris sebanyak 14 kali. Rapat internal Dewan Komisaris selalu dipenuhi oleh beberapa poin pembahasan seperti diskusi, laporan kinerja Perseroan, dan agenda lainnya. Agenda rapat yang disampaikan pada tabel risalah adalah summary dari agenda-agenda lainnya yang telah dibahas sepanjang tahun 2022.

Selain itu Dewan Komisaris juga telah mengadakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 12 kali. Rapat gabungan selalu dipenuhi oleh beberapa poin pembahasan seperti tindak lanjut agenda rapat sebelumnya, laporan kinerja Perseroan, laporan Direktur per bidang, dan agenda lainnya. Agenda rapat yang disampaikan pada tabel risalah adalah summary dari agenda-agenda lainnya yang telah dibahas sepanjang tahun 2022.

In order to form a disciplined plan, in early 2022, MTI has prepared an initial plan for the Board of Commissioners meeting implementation, which is contained in the Company's Annual Schedule (*calendar event*). In addition, information on meeting plans has also been widely distributed to related parties such as the Secretary to the Board of Commissioners, Corporate Secretary, and other organs such as SPI and existing divisions. If there is an incidental meeting proposal, the publication is carried out as selectively and efficiently as possible but still follows the applicable documentation procedures (making minutes).

In ensuring the implementation of the principles of transparency and accountability, the meeting minutes (in this case, the Board of Commissioners meeting) are well documented, including discussions on the meeting agenda, dissenting opinions, and decisions made. The meeting documentation is then signed by the leadership and all present meeting participants and distributed according to their designation.

In 2022, the Board of Commissioners of PT MTI held 14 internal meetings which were only attended by members of the Board of Commissioners. The internal meetings of the Board of Commissioners are always filled with several discussion points on corporate performance and other agendas. The meeting agenda in the minutes table is a summary of other matters that have been discussed throughout 2022.

In addition, the Board of Commissioners has also conducted joint Meetings with the Board of Directors as much as 12 times. The joint meetings between the Board of Commissioners and Directors are always filled with several discussion points such as follow up of previous meetings, corporate performance, report of each Director, and other agendas. The meeting agenda in the minutes table is a summary of other matters that have been discussed throughout 2022.

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Tahun 2022

### Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Internal Meetings in 2022

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Roy Leonard	Komisaris Utama President Commissioner	10	10	100%
Ogi Rulino*	Komisaris Utama President Commissioner	3	3	100%
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	14	14	100%
Buyung Lalana	Komisaris Commissioner	14	14	100%
Sahat Martin Philip Sinurat	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	11	100%
Solikhin**	Komisaris Commissioner	2	2	100%

Keterangan | Remarks :

\* Beliau tidak lagi menjabat per 26 April 2022 dan digantikan oleh Sdr. Roy Leonard. | He is no longer in position as of April 26, 2022 and was replaced by Mr. Roy Leonard.

\*\* Beliau tidak lagi menjabat per 14 Maret 2022. | He is no longer in position as of April 26, 2022 and was replaced by Mr. Solikhin.

## Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2022

## Minutes of Internal Meeting in 2022

### Agenda Rapat | Meeting Agenda

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Update progres pengalihan alat, Laporan Kinerja LR 2 Surabaya dan Semarang, laporan realisasi peningkatan pendapatan dan efektivitas biaya.</li> <li>Progres pengembangan area <i>Common Gate</i> terkait infrastruktur telekomunikasi dan fasilitas area.</li> <li>Program kerja internal audit tahunan, laporan kunjungan Dewan Komisaris dan Komite ke Lampung dan Palembang.</li> <li>Evaluasi monitoring mitigasi risiko yang signifikan bagi keberlangsungan usaha Perseroan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Equipment transfer updates, Performance Reports of LR 2 Surabaya and Semarang, realization of income improvement and cost effectiveness.</li> <li>The Common Gate improvement in terms of telecommunications infrastructure and facilities of the entire area.</li> <li>Annual internal audit program, report on visits of the Board of Commissioners and Committees to Lampung and Palembang.</li> <li>Assessment of mitigation progress on significant risk for the Company's business continuity.</li> </ol> |
|---|--|

## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Tahun 2022

## Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Joint Meetings in 2022

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Roy Leonard	Komisaris Utama President Commissioner	9	9	100%
Ogi Rulino*	Komisaris Utama President Commissioner	3	3	100%
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Buyung Lalana	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Sahat Martin Philip Sinurat	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	9	100%
Solikhin**	Komisaris Commissioner	3	3	100%
Gunta Prabawa	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Ruri Indrasari Rachmaputri	Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director	12	12	100%
Budi Azmi	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	6	6	100%
Budi Priyanto***	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	6	6	6%

#### Keterangan | Remarks :

\* Beliau tidak lagi menjabat per 26 April 2022 dan digantikan oleh Sdr. Roy Leonard. | He is no longer in position as of April 26, 2022 and was replaced by Mr. Roy Leonard.

\*\* Beliau tidak lagi menjabat per 14 Maret 2022. | He is no longer in position as of April 26, 2022 and was replaced by Mr. Solikhin.

\*\*\* Beliau tidak lagi menjabat per 1 Juni 2022 dan digantikan oleh Sdr. Budi Azmi. | He is no longer in position as of June 1, 2022 and was replaced by Mr. Budi Azmi.

## Risalah Rapat Gabungan Tahun 2022

## Minutes of Joint Meeting in 2022

### Agenda Rapat | Meeting Agenda

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan audit KAP periode tahun buku 2021, pembahasan usulan RKAP;</li> <li>Perpisahan dan perkenalan anggota Dewan Komisaris, program kerja tahunan audit internal, evaluasi kontrak kerjasama, hasil evaluasi kinerja LR 2 Surabaya;</li> <li>Penanganan piutang usaha;</li> <li>Pengalihan alat, restrukturisasi organisasi, program efisiensi;</li> <li>Rencana bisnis terkait aset dan investasi, telaah infrastruktur dan pengembangan teknologi informasi, peluang bisnis di <i>Common Area</i>;</li> <li>Rekomendasi mengenai bisnis pengelolaan BBM, penyesuaian Anggaran Dasar;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>KAP audit for the financial year of 2021, proposed RKAP;</li> <li>Farewell and induction of members of the Board of Commissioners, annual internal audit program, cooperation contracts assessment, performance assessment of LR 2 Surabaya;</li> <li>Trade receivables status;</li> <li>Equipment transfer, organizational restructuring, efficiency programs;</li> <li>Business plans regarding assets and investments, infrastructure and information technology development, business opportunities in the Common Area;</li> <li>Recommendations on fuel management opportunities, adjustments to the Articles of Association;</li> </ol> |
|--|--|



## Evaluasi/Arahan/Tanggapan/Persetujuan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi usulan dari Direksi dan memberikan tanggapan dan persetujuan sesuai dengan batas kewenangannya, dalam jangka waktu yang dipersyaratkan yaitu paling lama 14 hari sejak usulan diterima. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan perusahaan baik dalam forum rapat maupun melalui surat. Adapun evaluasi/arahan/tanggapan/persetujuan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris PT MTI secara garis besar selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Rincian asumsi pencapaian target RKAP 2022 agar kinerja tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021;
2. Mempersiapkan program-program strategis komersial untuk membantu performa cabang;
3. Optimalisasi produksi dan pendapatan, percepatan transformasi bisnis, upaya program efisiensi, perbaikan pelayanan di Common Area, mengkaji jumlah pekerja yang ideal, upaya konkrit dalam menurunkan jumlah piutang;
4. Meningkatkan upaya menggali potensi bisnis lainnya; meningkatkan utilisasi alat untuk meningkatkan kinerja, perbaikan praktik GCG untuk mengelola piutang;
5. Perhitungan yang matang terkait pembelian aset, telaah pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
6. Percepatan dalam mengupayakan tambahan potensi pendapatan, mempersiapkan perhitungan utilisasi aset, perhitungan biaya dan pendapatan yang lebih cermat;
7. Mengarahkan Direksi untuk berkoordinasi dengan tim SPSL untuk penyelesaian isu operasional di Pontianak, memperbaiki SWOT dan *key enablers* yang relevan dengan rencana bisnis MTI ke depannya;
8. Telaah pemetaan tarif dan diskon, pengelolaan alat dan truk, memastikan tidak adanya ketimpangan dalam laporan keuangan, upaya pemenangan tender, identifikasi dan mitigasi risiko.

## Laporan Singkat Pekerjaan Anggota Secara Kolektif

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja dalam rangka mendapatkan informasi terkait pengembangan usaha perseroan maupun dalam rangka studi banding/*benchmarking*.

Selain itu Dewan Komisaris juga telah menyampaikan sejumlah laporan kepada pemegang saham terkait laporan pengawasan dan tanggapan terhadap RJPP dan RKAP kepada RUPS.

## Penilaian Kinerja Anggota Secara Kolektif

Kinerja Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham melalui RUPS. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya. Penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2022 dilakukan secara kolektif.

## Evaluation/Directions/Responses/Approval from the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has evaluated the proposal from the Board of Directors and provided responses and approvals according to the limits of their authority within the required period of 14 days at the latest since the proposal is received. In addition, the Board of Commissioners also provides directions and advice to the Board of Directors in managing the Company, both in meeting forums and through letters. The general information regarding the evaluation/directions/responses/approvals submitted by the Board of Commissioners during 2022 were as follows:

1. Details of assumptions for achieving the RKAP target of 2022, making the performance in 2022 better than 2021;
2. Prepare the commercial strategic programs to help branch;
3. Optimizing production and income, accelerating business transformation, efficiency program, improving the services in the Common Area, reviewing the ideal number of employees, concrete efforts to reduce the amount of receivables;
4. Exploring other business potential; increasing equipment utilization to improve performance, improving GCG practices for managing receivables;
5. Careful calculations regarding asset investment, reviewing the information technology infrastructure development;
6. Acceleration in seeking additional potential, preparing precise calculations of asset utilization, as well as cost and income;
7. Instructed the Board of Directors to coordinate with the SPSL team to resolve operational issues in Pontianak, improving SWOT and key enablers to be more relevant to MTI's future plans;
8. Reviewing the mapping of tariffs and discounts, integrated management of equipment and trucks, ensuring there are no discrepancies in financial reports, instruction to win tenders, identifying and mitigating risks.

## Brief Report of the Collective Work of Members

In 2022, the Board of Commissioners made working visits to obtain information related to the Company's business development and comparative studies/*benchmarking*.

In addition, the Board of Commissioners has also submitted several reports to shareholders in terms of monitoring reports and responses to RJPP and RKAP to the GMS.

## Collective Assessment of Members

The Shareholders will evaluate the performance of the Board of Commissioners in the GMS. Generally, the Board of Commissioners' performance is determined based on the duties and obligations stated in the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Shareholders' mandate through the GMS. Formal evaluation criteria are submitted openly to the Board of Commissioners from the date of their appointment. The assessment of the Board of Commissioners in 2022 was carried out collegially.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Kriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Adapun kriteria evaluasi kinerja bagi Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite yang ada;
2. Kontribusi dalam proses pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Jajaran Manajemen;
3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu serta penyelesaian permasalahan Perseroan;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan;
5. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perseroan.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris Perseroan secara kolegal tercermin dari hasil KPI Dewan Komisaris Tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut:

The evaluation results of the Board of Commissioners' performance are an integral part of the compensation and incentives provision scheme for the Board of Commissioners. The performance evaluation results of each Board of Commissioners are one of the basic considerations for shareholders to dismiss and/or reappoint the relevant Board of Commissioners. The performance evaluation result is a means of assessing and increasing the effectiveness of the Board of Commissioners.

The criteria for evaluating the Board of Commissioners' performance are determined in the GMS. The performance evaluation criteria for members of the Board of Commissioners are as follows:

1. Attendance rate at the Board of Commissioners' Meetings and meetings with existing committees;
2. Contribution to the process of supervising and providing advice to the Management;
3. Involvement in certain assignments and the settlement of Company problems;
4. Compliance with applicable laws and regulations and Company policies;
5. Commitment to advancing the interests of the Company.

The results of the collegial performance assessment of the Company's Board of Commissioners were reflected in the results of the 2022 Board of Commissioners' KPIs, with the following description:

No	Indikator Pencapaian Kinerja Indicator of Achievement	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target
1	<b>Kontribusi terhadap capaian kinerja Perusahaan</b> Contribution to the Company's performance				
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the Board of Directors' KPI	%	Positif Positive	7	100
2	<b>Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris</b> The timeliness of submitting Opinions and Suggestions as an obligation of the Board of Commissioners				
a.	Pendapat dan Saran atas RKAP Opinions and Suggestions on RKAP	Hari Day	Negatif Negative	7	14
b.	Pendapat dan Saran atas Laporan Berkala Opinions and Suggestions on Periodic Reports	Hari Day	Negatif Negative	7	14
c.	Pendapat dan Saran atas Laporan Tahunan Opinions and Suggestions on the Annual Report	Hari Day	Negatif Negative	7	14
d.	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to the Board of Directors' actions that must be approved by the Board of Commissioners	Hari Day	Negatif Negative	7	14
3	<b>Kontribusi terhadap penerapan GCG</b> Contribution to the implementation of GCG				
a.	Kontribusi kualitas penerapan GCG - Aspek Dekom Contribution to the quality of GCG implementation - BOC	Poin GCG GCG Pont	Positif Positive	7	30
b.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Assessment GCG - Aspek Dekom Follow-up to Recommendations on GCG Assessment - BOC	%	Positif Positive	7	100

No	Indikator Pencapaian Kinerja Indicator of Achievement	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Target
4	<b>Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris</b> Attendance Level of Members of the Board of Commissioners				
a.	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners	Kehadiran Attendance	Positif Positive	9	12
b.	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors	Kehadiran Attendance	Positif Positive	9	12
c.	RUPS RKAP GMS RKAP	Kehadiran Attendance	Positif Positive	9	1
d.	RUPS Laporan Tahunan GMS Annual Report	Kehadiran Attendance	Positif Positive	9	1
5	<b>Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris</b> Effectiveness of Supporting Activities of the Board of Commissioners				
	Peningkatan Kompetensi Dekom Increasing Competency of Board of Commissioners				
a.	Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Development of the Board of Commissioners	Kepesertaan Participation	Positif Positive	8	2
b.	Laporan Kunjungan Kerja Work Visit Report	Laporan Report	Positif Positive	7	2
<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>				<b>100</b>	

## Penilaian Kinerja Komite dan Organ Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

### Assessment of the Committees and Supporting Organs Under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko. Kriteria umum penilaian masing-masing organ mencakup realisasi program dan kehadiran pada saat rapat. Pada tahun 2022 Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja para organ pendukung adalah baik karena secara positif telah mencapai target (skor sempurna) dalam hal tingkat kehadiran, peningkatan kompetensi, serta pelaksanaan penugasan.

The Board of Commissioners perform its duties with the assistance from the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Risk Management Committee. The general assessment criteria for each organ are the realization of their program and their attendance during meeting. In 2022 the Board of Commissioners considers that the performance of the supporting organs is excellent because all committees have achieved the target (perfect score) in terms of attendance levels, competency improvement, and assignments completion.

## Direksi

### Board of Directors

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Masa Jabatan Anggota

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dengan masa jabatan masing-masing Direksi terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengaturan masa jabatan ini tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
4. Meninggal dunia.

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan atau yang lowong.

#### Komposisi Anggota

Selama tahun 2022, komposisi Direksi MTI mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

#### Kronologi Perubahan Susunan Direksi Sepanjang Tahun 2022

Periode 1 Januari–1 Juni 2022 From January 1 until June 1, 2022	Periode 1 Juni–31 Desember 2022 From June 1 until December 31, 2022
<b>Gunta Prabawa</b> Direktur Utama President Director	<b>Gunta Prabawa</b> Direktur Utama President Director
<b>Ruri Indrasari Rachmaputri</b> Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director	<b>Ruri Indrasari Rachmaputri</b> Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director
<b>Budi Priyanto</b> Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	<b>Budi Azmi</b> Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director

The Board of Directors is a company organ that is fully responsible for the management of the Company for the interests and objectives of the Company and represents the Company both inside and outside the court according to the provisions of the Company's Articles of Association.

#### Term of Office of Members

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. The term of office of each Board of Directors starts from the date of the GMS that appoints him and ends at the closing of the 4th (fourth) Annual GMS after the date of his appointment. Members of the Board of Directors may be reappointed for 1 (one) more term. This term of office arrangement does not reduce the right of GMS to dismiss him at any time before his term of office ends by stating the reasons. The term of office of members of the Board of Directors ends if:

1. His/her term of office ends;
2. No longer fulfills the statutory requirements;
3. Dismissed based on the GMS resolution;
4. Passes away.

The GMS may appoint another person to fill the position of a member of the Board of Directors who is dismissed from his/her position or to fill a vacancy. The term of office of a person who is appointed to replace the dismissed member of the Board of Directors or to fill the vacancy is the remaining term of office of the dismissed or vacant member of the Board of Directors.

#### Composition of Members

During 2022, the composition of the Board of Directors of MTI has changed with the following details:

#### Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors throughout 2022



## Susunan Direksi per 31 Desember 2022

## Composition of the Board of Directors as of December 31, 2022

Nama Name	Posisi Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Gunta Prabawa	Direktur Utama President Director	<p>Diangkat menjadi Direktur Utama Sementara Waktu Sampai Dengan Adanya Penetapan Direktur Utama Definitif di MTI berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MTI No. KP.03/19/2/1/MTA/UT/PI.II-21 dan No. HK.566/01/12/KPM.TPK-21 tanggal 19 Februari 2021.</p> <p>He was appointed as the Ad Interim President Director until the Definitive President Director was determined at MTI based on Shareholders' Resolution Letter through the Circular General Meeting of Shareholders of PT MTI No. KP.03/19/2/1/MTA/UT/PI.II-21 and No. HK.566/01/12/KPM.TPK-21 dated February 19, 2021.</p>
Ruri Indrasari Rachmaputri	Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director	<p>Diangkat menjadi Direktur Operasi MTI berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT MTI No. KP.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 dan No. HK.566/03/01/KPM.TPK20 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia tanggal 3 November 2020.</p> <p>She was appointed as the Operation Director of MTI based on Shareholders' Resolutions through the Circular General Meeting of Shareholders of PT MTI No. KP.03/3/11/1/MTA/UT/PI.II-2020 and No. HK.566/03/01/KPM.TPK20 concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia dated November 3, 2020.</p>
Budi Azmi	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	<p>Diangkat menjadi Direktur Keuangan dan SDM MTI berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum PT Multi Terminal Indonesia (Keputusan RUPS Sirkuler) Nomor SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor HK.566/03/12/KP.TPK-22 tanggal 01 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT Multi Terminal Indonesia.</p> <p>He was appointed as the Finance and HR Director of MTI based on Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS) of PT Multi Terminal Indonesia (Circular GMS Resolutions) Number SK.03/31/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number HK.566 /03/12/KP.TPK-22 dated June 1, 2022, concerning Dismissal and Appointment of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia.</p>

Pada pembahasan terkait Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan pada Laporan Tahunan ini telah disampaikan adanya perubahan susunan Direksi setelah akhir periode pelaporan 2022 yaitu pada tanggal 11 April 2023. Perseroan tidak membahas lagi mengenai informasi tersebut dalam bab GCG ini dan hanya menyampaikan informasi terkait anggota Direksi yang menjabat hingga akhir periode pelaporan 2022.

In the section regarding the Material Information and Facts After the Accountant's Report Date of this Annual Report, we have informed you that there has been a change in the composition of the Board of Directors after the end of the reporting period of 2022, on April 11, 2023. The Company does not repeat the discussion for this information in this GCG chapter and has only disclosed the information regarding members of the Board Directors who have served until the end of the reporting period of 2022.

### Pedoman Kerja

Direksi juga bekerja sesuai panduan Pedoman Kerja (*Board Manual*) yang diikuti oleh Dewan Komisaris. Secara khusus, pedoman kerja bagi Direksi dijelaskan dalam Bab III dari Board Manual yang meliputi:

1. Fungsi Direksi;
2. Prinsip Dasar dan Kebijakan Umum Direksi;
3. Tugas dan Kewajiban Direksi;
4. Tugas dan Wewenang Direksi;
5. Persyaratan Direksi;
6. Keanggotaan Direksi;
7. Rangkap Jabatan;
8. Masa Jabatan;
9. Pemberhentian Anggota Direksi;
10. Pemberhentian Sementara Waktu Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris;
11. Pengunduran Diri Anggota Direksi;

### Board Manual

The Board of Directors also works according to the Board Manual that the Board of Commissioners follows. In particular, the guidelines for the Board of Directors are explained in Chapter III of the Board Manual which includes:

1. Functions of the Board of Directors;
2. Basic Principles and General Policy of the Board of Directors;
3. Duties and Obligations of the Board of Directors;
4. Duties and Authorities of the Board of Directors;
5. Requirements for the Board of Directors;
6. Membership of the Board of Directors;
7. Concurrent Position;
8. Term of Office;
9. Dismissal of Members of the Board of Directors;
10. Temporary Dismissal of Members of the Board of Directors by the Board of Commissioners;
11. Resignation of Members of the Board of Directors;

12. Keadaan Seluruh Anggota Direksi Lowong;
13. Pelaksana Tugas Anggota Direksi yang Lowong;
14. Pengalihan Tugas Sementara Anggota Direksi;
15. Rencana Pergantian atau Perubahan Direksi;
16. Independensi Direksi;
17. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
18. Peningkatan kapabilitas;
19. Waktu Kerja Anggota Direksi;
20. Etika Jabatan Direksi;
21. Penetapan Kebijakan Pengurusan Perusahaan oleh Direksi;
22. Pendelegasian Wewenang di Antara Anggota Direksi Perusahaan;
23. Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi;
24. Rapat Direksi;
25. Organ Pendukung Direksi;
26. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi;
27. Pertanggungjawaban Direksi dan Penilaian Kinerja Direksi.

#### Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab Kolegial

Direksi memiliki serangkaian tugas dan tanggung jawab yang terkait berbagai aspek meliputi RUPS, strategi dan rencana kerja, manajemen risiko, pemberantasan korupsi, Sistem Pengendalian Internal, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, hubungan Perseroan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), teknologi informasi, sistem akuntansi dan keuangan, tugas dan kewajiban lainnya, serta tugas dan tanggung jawab secara umum. Berikut disampaikan tugas dan tanggung jawab umum dari Direksi:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta dalam lingkup RKAP;
2. Mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dengan sejumlah pembatasan;
3. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan pengurusan Perseroan;
5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;
6. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan bagi karyawan Perseroan;

12. All Board of Directors members' positions are vacant;
13. Acting the Vacant Member of the Board of Directors;
14. Temporary Transfer of Duties of the Board of Directors Members;
15. Plan for Replacement or Change of the Board of Directors;
16. Independence of the Board of Directors;
17. Introduction and Capability Enhancement Programs;
18. Capability enhancement;
19. Working Hours of Members of the Board of Directors;
20. Ethics of the Board of Directors;
21. Determination of Company Management Policy by the Board of Directors;
22. Delegation of Authorities Among Members of the Company's Board of Directors;
23. Composition and Division of Duties of the Board of Directors;
24. Meetings of the Board of Directors;
25. Supporting Organs of the Board of Directors;
26. Working Relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors;
27. Accountability of the Board of Directors and Performance Assessment of the Board of Directors.

#### Collegial Duties, Authorities, and Responsibilities

The Board of Directors has a series of duties and responsibilities related to various aspects including the GMS, the strategy and work plans, the risk management, the corruption eradication, the Internal Control Systems, the information disclosure and confidentiality, the Company and stakeholder relations, the information technology, the accounting and financial systems, the other duties and obligations, as well as the general duties and responsibilities. The following is the information regarding the general duties and responsibilities of the Board of Directors:

1. Represent the Company inside and outside the court on all matters and in all events and within the scope of the Corporate Work Plan and Budget;
2. Bind the Company with other parties and other parties with the Company with a number of restrictions;
3. Perform all actions and deeds both regarding management and ownership, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations;
4. Establish policies in the leadership and management of the Company;
5. Regulate the transfer of power of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to a person or several Directors specifically appointed for that purpose or to one or several employees of the Company either individually or jointly or to several employees of the Company either individually or jointly or to another person or entity;
6. Regulate the provisions regarding the Company's employment including the determination of salaries, pensions, old age benefits and income for the Company's employees;

7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan kepegawaian Perseroan;
8. Memberi penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) kepada karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;
9. Memastikan sumber daya manusia Perseroan memiliki kompetensi dan kemampuan yang andal sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Melakukan aktivitas di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas tidak mengganggu aktivitas dalam menjalankan Perseroan;
11. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Mempergunakan saran profesional;
13. Menerima insentif dan tantiem apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
14. Menerima gaji berikut tunjangan, sarana dan fasilitas Perseroan serta santunan purnajabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perseroan, asas kepatutan dan kewajaran, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabaran tentang sarana dan fasilitas Perseroan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan RUPS.

Direksi juga memiliki wewenang yang mencakup wewenang umum, serta wewenang yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Berikut disampaikan wewenang umum dari Direksi:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Perseroan;
4. Menetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Perseroan yang menguntungkan bagi perusahaan baik dari sisi harga maupun kualitas barang/jasa tersebut;
5. Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan dan melakukan pengaturan tentang kepegawaian;
6. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Direksi menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi yang ditetapkan secara objektif dan transparan;

The Board of Directors also has authority which includes general authority, and other authorities that either requires and does not require written approval of the Board of Commissioners. The following is the general authority that the Board of Directors has:

1. Determine the management policy of the Company;
2. Regulate the delegation of power of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company inside and outside the court;
3. Regulate the transfer of power of the Board of Directors to one or several employees of the Company, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the court;
4. Establish Goods/Services Procurement Guidelines by the Company which are beneficial to the Company both in terms of price and quality of the said goods/services;
5. Stipulate provisions regarding the Company's staffing and to make regulation regarding staffing;
6. Appoint and dismiss the Company employees based on the Company's staffing regulations and applicable laws and regulations;
7. The Board of Directors establishes a performance assessment system/guideline for units and positions within the organization which are determined objectively and transparently;

8. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perseroan;
9. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Perseroan;
10. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

### Pembagian Tugas Setiap Anggota

Dalam mengoptimalkan fungsi pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi, setiap anggota Direksi memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara menyeluruh. Pembagian lingkup tugas antar Direksi adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Pengelolaan Management
<b>Gunta Prabawa</b>	Direktur Utama President Director	Mengkoordinasi pelaksanaan tugas Direksi dan membidangi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal Audit</li> <li>• Sekretaris Perusahaan dan Hukum</li> <li>• Cabang dan Unit</li> </ul> Coordinating the implementation of the duties of the Board of Directors and in charge of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal Audit</li> <li>• Corporate Secretary and Legal</li> <li>• Branches and Units</li> </ul>
<b>Ruri Indrasari Rachmaputri</b>	Direktur Operasi & PIt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Act. Commercial and Business Development Director	Membidangi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Bisnis</li> <li>• Pemasaran &amp; Pelayanan Pelanggan</li> <li>• Operasi</li> <li>• HSSE, Manajemen Risiko &amp; Mutu</li> <li>• Sistem Informasi &amp; Teknik</li> </ul> In charge of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Development</li> <li>• Marketing &amp; Customer Care</li> <li>• Operations</li> <li>• HSEE, Risk &amp; Quality Management</li> <li>• Information &amp; Technical System</li> </ul>
<b>Budi Azmi</b>	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Membidangi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuangan</li> <li>• SDM &amp; Umum</li> <li>• Memantau ketaatan terhadap GCG</li> </ul> In charge of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finance</li> <li>• HR &amp; General Affairs</li> <li>• Monitoring the compliance with GCG</li> </ul>

### Prosedur Pengangkatan Anggota

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Anggota Direksi. Persyaratan tersebut adalah Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.

Persyaratan umum merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Orang perseorangan;
2. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
3. Mampu melaksanakan ketaatan terhadap hukum yang berlaku;

8. The Board of Directors conducts analysis and evaluation of performance achievements for positions/units under the Board of Directors and at the company level;
9. Establish and adjust the organizational structure of the Company;
10. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.

### Segregation of Duties of Each Member

In optimizing the management function of the Company by the Board of Directors, each member of the Board of Directors has his and her own duties and responsibilities according to his and her expertise to make the Board of Directors work effectively. The segregation of the scope of duties among Directors are:

### Procedures to Appoint Members

There are 2 (two) types of requirements that must be met by a candidate for a member of the Board of Directors. These requirements are the general and special requirements.

General requirements are the basic requirements stipulated by the applicable laws and regulations, including:

1. Individuals;
2. Have good character, morals, and integrity;
3. Able to carry out compliance with applicable laws;



4. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
  5. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
  6. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon Direksi;
  7. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - a. Tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
    - b. Tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
  8. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada pemegang saham;
  9. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan Anggota Direksi lain dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
  10. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan atau yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Memiliki integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
    - a. Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan di tempat yang bersangkutan bekerja sebelumnya, sebelum pencalonan;
    - b. Cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati di tempat yang bersangkutan bekerja sebelumnya, sebelum pencalonan;
    - c. Perbuatan yang dapat dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai di tempat yang bersangkutan bekerja sebelumnya, sebelum pencalonan;
    - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat.
  12. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha untuk kemajuan Perseroan;
  13. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi;
  14. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  15. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif.
4. Never been declared bankrupt by the Court within 5 (five) years prior to the nomination;
  5. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination;
  6. Never been convicted for committing an unlawful act and a crime that harms the state's finances within 5 (five) years prior to the nomination;
  7. Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his/her tenure:
    - a. Not holding the Annual GMS;
    - b. Does not provide accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS and has caused the Company to obtain a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority.
  8. Not comply with the obligation to submit annual reports and/or financial statements to shareholders;
  9. No familial blood relationship to the third degree, either in a straight line or a sideways line or marital relationship (son in law or brother in law) with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
  10. May not hold concurrent positions that may cause a direct or indirect conflict of interest with the Company and or which is contrary to the provisions of the applicable laws and regulations;
  11. Having integrity and morals, that the person concerned has never been involved in:
    - a. Engineering acts and deviant practices in the management at the place where the person concerned worked before, prior to the nomination;
    - b. Breach of contracts that can be categorized as not fulfilling the commitments agreed upon at the place where the person concerned worked before, prior to the nomination;
    - c. Actions that can be categorized can provide personal benefits to candidates for members of the Board of Directors, employees at the place where the person concerned worked before, prior to the nomination;
    - d. Acts that can be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of sound company management;
  12. Having good characters and having the capability to develop business for the advancement of the Company;
  13. Having competence, namely the capability and experience in fields that support the implementation of the duties and obligations of the Board of Directors;
  14. Having a commitment to comply with the applicable laws and regulations;
  15. Not an administrator of a political party and/or a candidate for legislative members.

Persyaratan khusus merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan yang bergerak di jasa logistik. Selain anggota Direksi harus memiliki kompetensi teknis/keahlian terkait hal tersebut, yang bersangkutan juga harus:

1. Memiliki pengalaman menangani korporasi sebagai senior management dan dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang diperlukan;
2. Memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan perusahaan logistik;
3. Berani dan cepat di dalam pengambilan keputusan;
4. Mempunyai rekam jejak yang bersih dari aspek integritas;
5. Memiliki jiwa kepemimpinan dan insting kewirausahaan dan pengalaman;
6. Memiliki jaringan yang memadai dan kemampuan interpersonal.

#### Prosedur Pemberhentian Anggota

1. RUPS dapat memberhentikan Anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS;
  - b. Tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh Anggota Direksi yang bersangkutan;
  - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian di mana dimaksud di atas berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS;
3. Direktur yang diberhentikan tersebut tetap diminta pertanggungjawabannya terhitung dari awal tahun buku hingga tanggal efektif pengunduran dirinya, sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan;
4. Apabila semua Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu atau karena sebab apa pun tidak ada Anggota Direksi yang menjabat, Dewan Komisaris untuk sementara waktu menjalankan pengurusan Perseroan akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kejadian tersebut untuk mengangkat Direksi baru;
5. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah Direktur yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri;

Specific requirements are requirements that are tailored to the needs and nature of the Company's business that is engaged in logistics services. In addition, members of the Board of Directors must have technical competence/skills related to this matter, the person concerned must also:

1. Has experience in handling corporations as senior management and can provide recommendations and solutions needed;
2. Understand the provisions related to logistics companies;
3. Courageous and quick in decision making;
4. Have a clean track record in terms of integrity;
5. Have leadership and entrepreneurial instincts and experiences;
6. Have adequate network and interpersonal skills.

#### Procedures to Dismiss Members

1. The GMS may dismiss a Member of the Board of Directors at any time before his/her term of office ends by stating the reasons, including:
  - a. Unable to carry out their duties properly as stipulated in the Articles of Association and/or GMS Resolutions;
  - b. Not implementing laws and regulations;
  - c. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State due to negligence or error by the relevant member of the Board of Directors;
  - d. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force.
2. The dismissal referred to above is effective as of the closing of the GMS, unless otherwise determined by the GMS;
3. The dismissed Director is still held accountable from the beginning of the fiscal year until the effective date of his/her resignation, as long as the Director's actions are reflected in the Annual Report of the fiscal year concerned;
4. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or for any reason there is no serving member of the Board of Directors, the Board of Commissioners temporarily carries out the management of the Company but only with the right to carry out management actions related to ongoing matters and activities, and with the obligation to hold a GMS within 90 (ninety) days from the event to appoint a new Board of Directors;
5. The said temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned along with the reasons for such action. Within 90 (ninety) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners is required to hold a GMS which will decide whether the Director concerned will be permanently dismissed or returned to his/her position, while member of the Board of Directors who is temporarily dismissed is given the opportunity to attend and defend him/herself;

6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sampai dengan batas waktu tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat alasan yang mendesak/kepentingan Perseroan yang tidak dapat ditunda.

### Pengunduran Diri Anggota

1. Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh Direktur yang mengundurkan diri tersebut kepada Perseroan untuk perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada pemegang saham paling lambat 2 (dua) hari setelah:
  - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi;
  - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas.
3. Dalam hal Anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah Anggota Direksi;
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
5. Direktur yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai dengan tanggal penetapan pengunduran dirinya sepanjang tindakan Direktur tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tahun buku yang bersangkutan.

### Jabatan Lowong Anggota

1. Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong, selain karena pengunduran diri Anggota Direksi, sehingga jumlah Anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimum Direktur yang disyaratkan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal terjadinya lowongan;

6. In the event that the Company does not hold the GMS by that time limit or the GMS cannot make a decision, the temporary dismissal will be cancelled.

The Board of Commissioners may temporarily dismiss members of the Board of Directors if they act contrary to the Articles of Association or there are urgent reasons/interests of the Company that cannot be postponed.

### Members Resignation

1. If a member of the Board of Directors resigns, the resigning Director must submit written notification to the Company for the attention of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation request of a member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter;
2. The Company is obliged to disclose information to the public and submit it to the Shareholders no later than 2 (two) days after:
  - a. Receipt of the resignation request of the Board of Directors;
  - b. The results of the GMS as referred to above.
3. If a member of the Board of Directors resigns, resulting in the number of the Board of Directors members being less than 2 (two) people, then the resignation is valid if the GMS has determined it and a new Member of the Board of Directors has been appointed so that it meets the minimum requirements for the number of Members of the Board of Directors;
4. Before the resignation becomes effective, the member of the Board of Directors concerned remains responsible for his/her duties and responsibilities implementation according to the Articles of Association and the laws and regulations;
5. The resigning Director is still held accountable from his/her appointment until his/her resignation date as long as the Director's actions are reflected in the Annual Report of the fiscal year concerned.

### Filling of Vacancies for Members

1. If for any reason the position of a Member of the Board of Directors is vacant, other than due to the resignation of a Member of the Board of Directors so that the number of the Board of Directors Members becomes less than the minimum number of Board of Directors that is required, a GMS must be held to fill the vacancy within 45 (forty-five) days after the date of the vacancy occur;

2. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan Direktur tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, maka Direktur tersebut dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi;
3. Masa jabatan Anggota Direksi yang merangkap jabatan Anggota Direksi lain tidak boleh melebihi sisa masa jabatan Anggota Direksi yang digantikan tersebut;
4. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, dengan kewajiban selambat-lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah terjadinya lowongan, diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut;
2. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka untuk sementara salah seorang anggota Direksi yang ada yang ditetapkan oleh RUPS, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif;
3. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan lowong tersebut, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk tetap menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, sampai ditetapkannya anggota Direksi yang definitif;
4. Bagi Pelaksana Tugas anggota Direksi yang lowong selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

Pengalihan tugas sementara anggota Direksi memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal seorang anggota Direksi berhalangan hadir dalam jangka waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, Pelaksana Tugas (Plt) dapat ditunjuk untuk menjalankan fungsi Direktur tersebut dengan ketentuan penunjukan Plt dilakukan berdasarkan keputusan Direksi;
2. Dalam hal seorang anggota Direksi berhalangan hadir dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, Pelaksana Tugas (Plt) dapat ditunjuk untuk menjalankan fungsi Direktur tersebut dengan ketentuan penunjukan Plt dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Plt tersebut dapat memperoleh kompensasi tambahan secara proporsional;

2. As long as the position is vacant and there is no successor and or not yet held its position, then another Director appointed by the Board of Commissioners carries out the work of the relevant Director with the same power and authority. Then the relevant Director may act for and on behalf of the Board of Directors;
3. The term of office of a member of the Board of Directors who concurrently serves as another member of the Board of Directors may not exceed the remaining term of office of the replaced member of the Board of Directors;
4. If, at any time for any reason, the Company does not have the Board of Directors members, then the Board of Commissioners is temporarily obliged to carry out the ongoing work of the Board of Directors. With the obligation no later than 45 (forty five) days after the vacancy occurs, a GMS will be held to fill the vacancy.

If for any reason, the position of a Member of the Board of Directors is vacant, the following provisions shall apply:

1. Within 30 (thirty) days of the vacancy, a GMS must be held to fill the vacancy of the Board of Directors member;
2. As long as the position is vacant and the GMS has not filled the vacancy of the Board of Directors member, then temporarily, GMS appoints one of the existing members of the Board of Directors. This is to carry out the work of the vacant member of the Board of Directors with the same power and authority until the appointment of the definitive member of the Board of Directors;
3. If the vacancy is due to the end of the term of office, and the GMS has not filled the vacancy, the Board of Directors member whose term of office has ended may be appointed by the Board of Commissioners to continue to carry out his/her work with the same power and authority until a definitive member of the Board of Directors is appointed;
4. Acting the vacant members of the Board of Directors, other than the members of the Board of Directors who are still in office, then receive the same salary and allowances/facilities as the vacant members of the Board of Directors, excluding post employment benefits.

Temporary transfer of duties for a member of the Board of Directors has the following conditions:

1. If a member of the Board of Directors is unable to attend for a period of less than 90 (ninety) days, an Acting Director (Plt) may be appointed to carry out the function of the Director, provided that the appointment of the Acting Director is made based on a decision of the Board of Directors;
2. If a member of the Board of Directors is unable to attend for a period of more than 90 (ninety) days, an Acting Director (Plt) may be appointed to carry out the function of the Director, provided that the appointment of the Acting Director is made based on a decision of the Board of Commissioners. The Acting Director (Plt) can get additional compensation proportionally;



3. Dalam hal Pengalihan Tugas Sementara tersebut, Plt menjalankan fungsi Direktur disertai dengan surat kuasa dalam pengambilan keputusan pada Rapat Direksi.

#### Rencana Pergantian atau Perubahan Anggota

Apabila terdapat rencana pergantian atau perubahan Direksi, direkomendasikan agar:

1. Pemegang saham pengendali menginformasikan atau mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Direktur Utama, apabila perubahan menyangkut anggota Direksi lainnya;
2. Pemegang saham pengendali atau bersama dengan Direktur Utama memanggil Direksi dan menyampaikannya secara langsung dan baik mengenai rencana pergantian tersebut. Begitu pula apabila pemegang saham berencana untuk mengangkat kembali;
3. Calon pejabat pengganti yang akan ditunjuk oleh pemegang saham pengendali dapat bergabung terlebih dahulu sebagai advisor di Perseroan. Hal ini merupakan salah satu mekanisme agar transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar, di samping calon pejabat pengganti tersebut dapat memahami bisnis dan strategic issue Perusahaan serta bersosialisasi dengan karyawan, *client*, *business partner*, kreditor, maupun regulator terkait.

#### Rangkap Jabatan Anggota

Berdasarkan Board Manual, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan lain;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan lain;
3. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan akhir tahun buku 2022, seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain.

#### Hubungan Afiliasi Anggota

Berikut ini merupakan informasi hubungan afiliasi seluruh anggota Direksi yang menjabat pada akhir tahun 2022, baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping:

3. In the case of the Temporary Transfer of Duties, the Acting Director carries out the functions of the Director accompanied by a power of attorney in making decisions at the Board of Directors Meetings.

#### Replacement Plan or Changes of Members

If there is a plan of replacement or change of the Board of Directors, it is recommended that:

1. The controlling shareholder shall inform or discuss it in advance with the President Director if the change involves other members of the Board of Directors.
2. The controlling shareholder and the President Director summon the Board of Directors and convey directly and properly the replacement plan and or if the shareholders have a reappointment plan.
3. The candidate for the Director, who the controlling shareholder will appoint, may first join as an advisor in the Company. This is one of the mechanisms so that the leadership transition can run well and smoothly, in addition to the Prospective replacement Director being able to understand the Company's business and strategic issues and socialize with employees, clients, business partners, creditors, and related regulators.

#### Concurrent Position of Members

Based on the Board Manual, members of the Board of Directors may hold concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors are at most another company;
2. Members of the Board of Commissioners are at most 3 (three) other companies;
3. Committee members are at most 5 (five) committees in other companies where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

By the end of the financial year of 2022, all Directors have no other position outside the Company.

#### Affiliate Relationship of Members

The following is information on the affiliate relationship of all members of the Board of Directors who served by the end of 2022, both financial and familial relationships to the third degree, either in a straight line or sideways line.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with		
		Sesama Direksi Fellow Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders	Sesama Direksi Fellow Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders
<b>Gunta Prabawa</b>	Direktur Utama President Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
<b>Ruri Indrasari Rachmaputri</b>	Direktur Operasi & Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Act. Commercial and Business Development Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
<b>Budi Azmi</b>	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

### Program Pengenalan Bagi Anggota Baru

Program pengenalan kepada anggota Direksi baru wajib diberikan agar dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengangkatan anggota Direksi baru. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.

Pada tahun 2022, MTI telah menyelenggarakan program pengenalan Direktur baru yaitu Sdr. Budi Azmi, Direktur Keuangan dan SDM, pada tanggal 3 Juni 2022.

### Program Peningkatan Kapabilitas

Peningkatan kapabilitas bagi Direksi dinilai penting untuk dilakukan untuk mempersiapkan agar Direksi dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis inti Perusahaan serta mengantisipasi masalah yang timbul dikemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan.

Informasi mengenai realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2022 telah diuraikan pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dalam Laporan Tahunan ini.

### Penyelenggaraan Rapat

Berdasarkan *Board Manual*, rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan/atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Rapat Direksi membicarakan mengenai hal-hal strategis, operasional, atau rapat yang bersifat wacana.

### Induction Program for New Member

An introduction (induction) program for new members of the Board of Directors must be provided to allow the Board to always work in harmony with other Company organs. This program shall be carried out no later than a month after the appointment of new members of the Board of Directors. The Corporate Secretary is responsible for conducting the program.

In 2022, MTI has conducted the induction program on June 3, 2022, for Mr. Budi Azmi, the Finance and HR Director.

### Capability Development

The enhancement program for the Board of Directors is important to prepare the members about the latest developments of the Company's business and anticipate future problems for the sake of the Company's business continuity.

Information regarding the realization of the program that the Board of Directors has followed throughout 2022 has been disclosed in the Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit in this Annual Report.

### Board Meetings

Based on the Board Manual, the Board of Directors meeting is a meeting held by the Board of Directors, and each Director who is present and/or represented has the right to vote in the meeting. The Board of Directors meetings discuss strategic and operational issues or discourse meetings.

Setiap pembahasan masalah dalam rapat Direksi diupayakan untuk menghasilkan keputusan setelah melalui mekanisme pembahasan. Pembahasan dilakukan dengan mengungkapkan pendapat masing-masing Anggota Direksi agar dapat diambil keputusan yang terbaik.

Setiap Direktur berhak mengungkapkan pendapatnya termasuk bila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan harus tercatat dalam risalah rapat. Agenda rapat Direksi dapat diusulkan oleh masing-masing Direktur kepada Sekretaris Perusahaan dengan menyatakan bahan tertulis untuk disiapkan undangan dan agendanya. Agenda rapat dapat ditambah dengan disertai bahan yang cukup atau dikurangi, apabila menurut urgensinya dapat dibahas pada rapat berikutnya.

Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kehadiran anggota dalam rapat dan juga pengambilan keputusan yang harus didasarkan pada itikad baik. Hasil rapat Direksi juga wajib untuk didokumentasikan.

Selama tahun 2022, Direksi MTI menyelenggarakan rapat internal sebanyak 14 kali.

Every discussion of issues in the Board of Directors meeting is sought to produce a decision after going through a discussion mechanism. The discussion is carried out by expressing the opinions of each member of the Board of Directors to make the best decisions.

Each Director has the right to express his/her opinion, including if there is a dissenting opinion, and it must be recorded in the minutes of the meeting. Each Director may propose the agenda for the Board of Directors meeting to the Corporate Secretary by stating the written materials for preparing the invitation and the agenda. The meeting agenda can be added with sufficient material or reduced if it can be discussed at the next meeting according to the urgency.

There are provisions governing the attendance of members during meetings and decision making which must be based on good faith. The results of the Board of Directors meeting are also required to be documented.

In 2022, the Board of Directors of MTI held 14 internal meetings.

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Tahun 2022

### Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors in Internal Meetings in 2022

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Gunta Prabawa	Direktur Utama President Director	14	14	100%
Ruri Indrasari Rachmaputri	Direktur Operasi & Pjt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Act. Commercial and Business Development Director	14	14	100%
Budi Azmi	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	10	10	100%
Budi Priyanto*	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	4	4	100%

Keterangan | Remarks :

\* Beliau tidak lagi menjabat per 1 Juni 2022 dan digantikan oleh Sdr. Budi Azmi. | He is no longer in position as of June 1, 2022 and was replaced by Mr. Budi Azmi.

### Risalah Rapat Internal Direksi Tahun 2022

### Minutes of Internal Meeting in 2022

#### Agenda Rapat | Meeting Agenda

Direksi mengadakan rapat koordinasi dengan para Manajemen Senior dan Pimpinan Cabang untuk membahas pencapaian kinerja setiap bulannya. Secara garis besar, agenda pembahasan setiap bulannya mencakup:

1. Target bottom line bulanan;
2. Pengelolaan aset logistik (alat transportasi dan pengangkutan);
3. Perbaikan dan pengadaan aset logistik (alat bongkar muat dan pelayanan pelabuhan);
4. Aspek keselamatan & kesehatan kerja, dan lingkungan (HSSE) di setiap cabang;
5. Upaya percepatan pelunasan piutang;
6. Laporan arus kas setiap bulannya;
7. Pengelolaan fasilitas dan infrastruktur setiap cabang;
8. Pengelolaan tenaga kerja, terutama tenaga alih daya (TAD) untuk mendukung operasional;

The Board of Directors organizes regular coordination meetings with Senior Management and Branch Managers to discuss monthly performance. Following is the general agenda of monthly discussion:

1. Monthly bottom line target;
2. Logistics assets management (transportation and distribution equipment);
3. Repair and procurement of logistics assets (stevedoring equipment and port services);
4. Occupational safety & health and environmental (HSSE) implementation of each branch;
5. Acceleration of receivables settlement;
6. Monthly cash flow report;
7. Operation of facilities and infrastructure of each branch;
8. Manpower management, especially outsourced for operational support;

### Agenda Rapat | Meeting Agenda

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Efisiensi biaya operasional;</li> <li>10. Progres realisasi program strategis;</li> <li>11. Progres perubahan struktur organisasi;</li> <li>12. Memantau perkembangan komersialisasi logistik di setiap cabang regional;</li> <li>13. Percepatan proyek kerja sama dari berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan legal.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Operational cost efficiency;</li> <li>10. Strategic program achievement;</li> <li>11. Organizational structure update;</li> <li>12. Logistics commercialization monitoring of each regional branch;</li> <li>13. Acceleration of cooperation projects in various aspects, especially in terms of legal aspect.</li> </ol> |
|--|---|

### Laporan Singkat Pekerjaan Anggota Secara Kolektif

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan Direksi, Surat Edaran, dan Surat Keluar.

### Penilaian Kinerja Anggota Secara Kolektif

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan berdasarkan penilaian kinerja individu dan kinerja Perseroan. Penilaian individu dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi, melalui mekanisme peer review. Kinerja Direksi dari sisi Perseroan dilihat dari:

1. Pertanggungjawaban Direksi kepada seluruh pemegang saham secara formal dilakukan melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
2. Pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham pengendali dilakukan melalui pelaporan tertulis selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
3. Direksi harus menyusun pertanggungjawab pengelolaan perusahaan dalam bentuk:
  - a. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - b. Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
  - c. Laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan;
  - d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan kepada Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan;
  - e. Dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap menyetujui isi Laporan Tahunan tersebut.

### Brief Report of the Collective Work of Members

Throughout 2022, the Board of Directors has issued various decisions in the fields of operations, finance, as well as some business supports through policies in the form of Board of Directors Decrees, Circular Letters, and Outgoing Letters.

### Collective Assessment of Members

Assessment of members of the Board of Directors is done based on individual performance and corporate performance. The Board of Commissioners carries out the individual assessment with consideration on the peer review of members of the Board of Directors. In addition, when seen from the Company's performance, the assessment is seen from the following information:

1. The accountability of the Board of Directors to shareholders is formally carried out through the Annual GMS, which is held no later than 6 (six) months after the Company's fiscal year closes;
2. The accountability of the Board of Directors to the controlling shareholders is carried out through a written report no later than 3 (three) months after the Company's fiscal year closes;
3. The Board of Directors must formulate corporate management accountability in the form of:
  - a. Annual Financial Statements, consisting of balance sheet and profit or loss calculation of the relevant fiscal year, as well as an explanation of the documents for GMS approval;
  - b. Annual Report regarding the Company's condition and course, the results that have been achieved, and estimates regarding the Company's development in the future. In addition, the Company's main activities and their changes during the fiscal year and details of problems that arise during the fiscal year that affect the Company's activities, to obtain the GMS's approval;
  - c. The Annual Report is signed by all members of the Board of Directors who serve in the relevant fiscal year;
  - d. If a member of the Board of Directors does not sign the Annual Report, the person concerned must state the reasons in writing, or the reasons are stated to the Board of Directors in a separate letter attached to the Annual Report;
  - e. If a member of the Board of Directors does not sign the annual report and does not provide written reasons, the person concerned is deemed to have agreed to the contents of the Annual Report.



4. Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan, serta bahan-bahan lain yang akan dibahas dalam RUPS harus tersedia sebelum RUPS diselenggarakan, sesuai mekanisme yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian;
5. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan berarti RUPS telah memberi pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Direksi atas pengelolaan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan;
6. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan;
7. Penilaian Direksi dilakukan melalui penilaian kinerja Perseroan secara komprehensif dan terukur, baik itu dari sisi kinerja keuangan (struktur biaya dan pendanaan), kinerja bisnis, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan organisasi dan budaya perusahaan. Penilaian kinerja juga dapat menggunakan perbandingan dengan tahun sebelumnya, target, maupun benchmark dengan perusahaan sejenis yang memiliki skala usaha yang sama.

Penilaian atas kinerja Direksi pada tahun 2022 dilakukan oleh pemegang saham. Hasil penilaian kinerja Direksi selama tahun buku 2022 tercermin dalam hasil *Key Performance Indicators* (KPI) yang merupakan suatu Kontrak Manajemen antara pemegang saham dan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN RI No. S-676/MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen.

Pada tahun 2022, skor KPI Perseroan mencapai skor sebesar 99,18 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00. Skor KPI pada tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 yang tercatat sebesar 89,92.

Realisasi KPI Direksi tahun 2022 telah diuraikan dalam pembahasan Pencapaian Target 2022, Prospek Usaha dan Proyeksi 2023 pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

#### **Penilaian Kinerja Komite dan Organ Pendukung di Bawah Direksi**

Direksi tidak memiliki komite khusus, namun dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal. Kriteria umum penilaian masing-masing organ mencakup realisasi program dan kehadiran pada saat rapat. Pada tahun 2022 Direksi menilai bahwa kinerja para organ pendukung adalah baik karena secara garis besar telah mendukung Direksi dalam mencapai sejumlah target Perusahaan.

4. The Annual Financial Statements, Annual Report, and other materials to be discussed at the GMS must be available before the GMS is held, according to the applicable mechanism to enable shareholders to assess;
5. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements, it means that the GMS has granted full release and discharged of responsibilities of the Board of Directors for the Company's management, which has been carried out during the last fiscal year, as far as these matters are reflected in the Annual Report;
6. Release and Discharge of responsibilities does not reduce the responsibility of each member of the Board of Directors in the event of a criminal act or fault and/or negligence that causes losses to third parties that cannot be fulfilled with the Company's assets;
7. Assessment of the Board of Directors is carried out through a comprehensive and measurable assessment of the Company's performance, both in terms of financial performance (cost structure and financing), business performance, human resource development, organizational improvement, and corporate culture. Performance assessment can also use comparisons with the previous year, targets, or benchmarks with similar companies with the same business scale.

The shareholders assessed the performance of the Board of Directors in 2022. The assessment during the financial year of 2022 is reflected in the Key Performance Indicators (KPIs) which treated as the Management Contract between the Board of Directors and shareholders based on the Decree of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. S-676/MBU/2004 dated December 22, 2004, concerning Management Contracts.

The KPI score in 2022 is 99.18 from the targeted 100.00. The KPI score in 2022 is higher than the 89.92 in 2021.

The KPI realization of the Board of Directors in 2022 has been disclosed in the Achievement of 2022 Targets, Business Prospects and Projections for 2023 in the Management Discussion and Analysis of this Annual Report.

#### **Assessment of the Committees and Supporting Organs Under the Board of Directors**

The Board of Directors does not have a special committee, but receive the assistant from the Corporate Secretary and the Internal Control Unit. The general assessment criteria for each organ are the realization of their program and their attendance during meeting. In 2022 the Board of Directors considers that the supporting organs have been excellent in helping with the Company targets.

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

### Remuneration of the Board of Commissioners and the Board Of Directors

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, diatur bahwa BUMN wajib memberlakukan pedoman penetapan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN.

Kebijakan MTI dalam hal pemberian penghasilan atau remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2022 mengacu pada Keputusan Para Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perseroan Nomor: SK.03/12/8/3/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.566/04/13/KPM.TPK-22 tentang Penetapan Pedoman Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Selain itu, apabila Perseroan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian pada tahun buku sebelumnya, maka para Pemegang Saham dapat memberikan Tantiem kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris sebagaimana yang termaktub dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor SK.03/10/10/3/PBI/TUT/PI.II-17 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pedoman Penetapan Tantiem/ Insentif Kinerja Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Sekretaris Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kajian atau telaah yang dilakukan dan juga kondisi Perseroan. Usulan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, diajukan kepada RUPS untuk selanjutnya disetujui dan diusulkan untuk mendapatkan penetapan dan/atau persetujuan RUPS Tahunan. Ketetapanannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 24 Anggaran Dasar MTI diatur bahwa anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purnajabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019, concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. It is regulated that SOEs are required to apply the guidelines for determining remuneration as regulated in the Ministerial Regulation in determining the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners in SOEs Subsidiaries.

MTI's policy in providing income or remuneration and other facilities for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2022 referred to Resolutions of Shareholders (Circular GMS Resolution) of the Company Number: SK.03/12/8/3/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.566/04/13/KPM.TPK-22 regarding the Guideline of Remuneration for the Board of Directors and Commissioners of the Company.

In addition, if the Company earns a profit and does not experience accumulated losses in the previous fiscal year, the Shareholders can provide Bonuses to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Secretary to the Board of Commissioners. This is stipulated in the Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number SK.03/10/10/3/PBI/TUT/PI.II-17, dated October 10, 2017, concerning Guidelines for Determining Bonuses/Performance Incentives for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Secretary to the Board of Commissioners of Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Determining the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out based on the applicable rules, taking into account and considering the study carried out as well as the Company's condition. Finally, the proposal for the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is submitted to the GMS for further approval and proposed to obtain the determination and/or approval of the Annual GMS. The provision is as follows:

1. Based on the provisions of Article 10 Paragraph 24 of the Articles of Association of MTI, it is regulated that members of the Board of Directors are given salaries and allowances/facilities, including post-employment benefits, the types and amounts of which are determined by the GMS with due observance of the provisions of the applicable laws and regulations;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 21 Anggaran Dasar MTI diatur bahwa anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purnajabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;
  3. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan kondisi MTI serta peraturan perundang-undangan, maka para pemegang saham memandang perlu melakukan penyesuaian besaran penghasilan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Multi Terminal Indonesia Nomor UM.335/21/5/1/ PI.II-14 tanggal 21 Mei 2014 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013 di mana salah satu keputusannya mengatur mengenai remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris MTI;
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juncto Pasal 25 Ayat 10 Anggaran Dasar MTI dinyatakan bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
2. Based on the provisions of Article 14 Paragraph 21 of the Articles of Association of MTI, it is regulated that members of the Board of Commissioners are given honorarium and allowances/facilities, including post employment benefits, the type and amount of which is determined by the GMS;
  3. Whereas to motivate the Board of Directors and Board of Commissioners according to the conditions of MTI and the laws and regulations, the shareholders consider it necessary to make adjustments to the amount of remuneration. It was previously determined in the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Multi Terminal Indonesia Number UM.335/21/5/1/PI.II-14 dated May 21, 2014, concerning Approval of Annual Reports and Ratification of Financial Statements for Financial Year 2013, in which one of the resolutions regulated remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of MTI;
  4. Whereas pursuant to Article 91 of Law Number 40 of 2007 in conjunction with Article 25 Paragraph 10 of the Articles of Association of MTI, it is stated that shareholders can make valid decisions without holding a physical GMS provided that all shareholders have been notified in writing and all shareholders provide approval of the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally at the GMS.

Berikut disampaikan struktur dan besaran remunerasi dari Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan BUMN dan memotivasi Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga menerima bonus atas hasil kerja mereka. Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebesar Rp7.200.375 ribu.

The following is the structure and amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors which have been determined by paying attention to the prevailing rules and regulations within the environment of SOE and to motivate the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners and the Board of Directors also receive bonuses. Total salaries and other short term benefits for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors amounting to Rp7,200,375 thousands.

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Keterangan Information
<b>Dewan Komisaris   Board of Commissioners</b>	
Honorarium	<p>Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama per bulan President Commissioner: 45% of the President Director's monthly salary</p> <p>Wakil Komisaris Utama: 42,5% dari gaji Direktur Utama per bulan Vice President Commissioner: 45% of the President Director's monthly salary</p> <p>Komisaris: 90% dari honorarium Komisaris Utama per bulan Commissioner: 90% of the President Commissioner's monthly honorarium</p>
Tunjangan Hari Raya (THR) Religious Holiday Allowance	<p>1 x gaji   1 x month</p> <p>Dibayarkan selambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari raya. Paid at least 1 (one) week before the holiday.</p>
Tunjangan Transportasi Transport Allowance	20% dari honorarium   20% x the monthly honorarium
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	<p>Ketentuan mengenai Asuransi Purnajabatan Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan Asuransi Purnajabatan Dewan Komisaris. Provisions regarding Post Employment Insurance for Members of the Board of Directors apply mutatis mutandis to the determination of Post Employment Insurance of the Board of Commissioners.</p>
Fasilitas Kesehatan Healthcare Facility	<p>Ketentuan mengenai Fasilitas Kesehatan bagi Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan Fasilitas Kesehatan Dewan Komisaris. Provisions regarding Healthcare Facility for Members of the Board of Directors apply mutatis mutandis to the determination of Healthcare Facility of the Board of Commissioners.</p>
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	<p>Ketentuan mengenai Fasilitas Bantuan Hukum bagi Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan Fasilitas Bantuan Hukum bagi anggota Dewan Komisaris saat ini dan sebelumnya. Provisions regarding Legal Assistance Facility for Members of the Board of Directors apply mutatis mutandis to the determination of Legal Assistance Facility of the current and previous members of the Board of Commissioners.</p>
Tantiem/IK Tahun Buku 2021 Bonuses/Performance Incentives (IK) for the Financial Year of 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tantiem/IK Direktur Utama untuk tahun buku 2021 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perseroan Nomor: SK.03/5/10/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.566/05/01/KPM.TPK-22 tentang Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2021.</li> <li>Besaran mencapai Rp2.666.929.940 dengan komposisi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota Direksi: 85% dari Direktur Utama</li> <li>Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama</li> <li>Anggota Komisaris: 90% dari Komisaris Utama</li> </ol> </li> </ol> <p>1. The President Director's Bonus/Performance Incentive (IK) for the financial year of 2021 has been determined based on Resolutions of Shareholders (Circular GMS Resolution) of the Company Number: SK.03/5/10/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.566/05/01/KPM.TPK-22 regarding the Guideline of Tantiem for the Board of Directors and Commissioners of the Company on the Performance of the Financial Year of 2021.</p> <p>2. The amount reached Rp2,666,929,940 for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Members of the Board of Directors: 85% of the President Director</li> <li>President Commissioner: 45% of the President Director</li> <li>Commissioners: 90% of the President Commissioner</li> </ol>
Biaya Operasional Operating Expenses	<p>Termasuk pakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi. Biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan anggaran dalam RKAP sesuai arahan pemegang saham.</p> <p>It covers the uniform and professional membership expenses. These are set based on the RKAP according to the instruction of shareholders.</p>



Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Keterangan Information
<b>Direksi   Board of Directors</b>	
Gaji Salary	<p>Direktur Utama   President Director: 100% Wakil Direktur Utama   Vice President Director: 90% Direktur lain   Other Directors: 85%</p> <p>Besaran gaji Direktur Utama ditetapkan dalam keputusan RUPS tersendiri. The salary of the President Director is determined in a separate GMS resolution.</p>
Tunjangan Hari Raya (THR) Religious Holiday Allowance	<p>1 x gaji   1 x month</p> <p>Dibayarkan selambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari raya atau sesuai kebijakan Perseroan. Paid at least 1 (one) week before the holiday or based on the Company's policy.</p>
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	<p>40% dari gaji   40% salary</p> <p>Zonasi Jakarta dan sekitarnya maksimal Rp18.000.000. Zonation of Jakarta and its surrounding amounting Rp18,000,000 at most.</p>
Asuransi Purna Jabatan Post Employment Insurance	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) For the rest of term of office (from appointment to termination);</li> <li>Premi asuransi paling banyak 25% dari gaji dalam setahun The premium amounting 25% of annual salary;</li> <li>Sudah termasuk kecelakaan dan kematian Covering premiums for accident and death insurances.</li> </ol> <p>Tidak diberikan kepada Direksi yang berasal dari pemegang saham, yang masih berstatus aktif sebagai pekerja. Excluding Directors from the shareholders who are still considered active employees.</p>
Fasilitas Kendaraan Dinas Vehicle Facility	<p>Mendapatkan fasilitas kendaraan, termasuk dengan biaya operasional. Entitled to vehicle facilities, including its operational cost.</p>
Fasilitas Kesehatan Healthcare Facility	<p>Berupa penggantian biaya pengobatan yang diberikan kepada Direksi beserta seorang suami/istri dan maksimal 3 anak yang belum mencapai 25 tahun. In the form of reimbursement of medical expenses provided to members of the Board of Directors and their spouse, and a maximum of 3 children who have not reached 25 years old.</p>
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal tindakan berkaitan dengan jabatannya;</li> <li>Wajib membuat surat pernyataan bahwa fasilitas tersebut merupakan kasus posisi dan bukan pribadi;</li> <li>Diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>In terms of actions related to his position;</li> <li>Must make a statement that the facility is a case of position and not personal;</li> <li>Provided in the form of financing for attorney's office services.</li> </ol>
Tantiem/IK Tahun Buku 2021 Bonuses/Performance Incentives (IK) for the Financial Year of 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tantiem/IK Direktur Utama untuk tahun buku 2021 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perseroan Nomor: SK.03/5/10/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan Nomor: HK.566/05/01/KPM.TPK-22 tentang Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2021.</li> <li>Besaran mencapai Rp2.666.929.940 dengan komposisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggota Direksi: 85% dari Direktur Utama</li> <li>Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama</li> <li>Anggota Komisaris: 90% dari Komisaris Utama</li> </ol> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>The President Director's Bonus/Performance Incentive (IK) for the financial year of 2021 has been determined based on Resolutions of Shareholders (Circular GMS Resolution) of the Company Number: SK.03/5/10/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and Number: HK.566/05/01/KPM.TPK-22 regarding the Guideline of Tantiem for the Board of Directors and Commissioners of the Company on the Performance of the Financial Year of 2021.</li> <li>The amount reached Rp2,666,929,940 for: <ol style="list-style-type: none"> <li>Members of the Board of Directors: 85% of the President Director</li> <li>President Commissioner: 45% of the President Director</li> <li>Commissioners: 90% of the President Commissioner</li> </ol> </li> </ol>
Biaya Operasional Operating Expenses	<p>Termasuk biaya komunikasi, seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, club/corporate membership, biaya representasi. Biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan anggaran dalam RKAP yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. It covers the communication expenses, uniforms, professional membership, club/corporate membership, representation expenses. These are set based on the RKAP which requires approval from the Board of Commissioners.</p>

# Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

## Diverse Composition of the Board of Commissioners and the Board Of Directors

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan yang diikuti MTI adalah pernyataan bahwa sumber calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat berasal dari berbagai institusi berikut dengan ketentuan-ketentuannya.

Penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas usaha. Komposisi tersebut didasarkan pada pengetahuan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. MTI memberikan kesempatan kepada semua orang, oleh karenanya nominasi kandidat anggota Dewan Komisaris dikaji dan dievaluasi dengan cara yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.

The policy regarding the diverse composition of the Board of Commissioners and Board of Directors follows the regulation set out in the Minister of SOE Regulation Number PER-02/MBU/02/2015, dated February 17, 2015, concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. The provision followed by MTI is the statement that the candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors may come from various institutions along with its provisions.

The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is determined by considering MTI's needs and complexity of its business. The composition is based on knowledge, expertise, professional experience, and background to support their duties. MTI provides opportunities for everyone. Therefore nominations for candidates for the Board of Commissioners members are reviewed and evaluated in the same way regardless of gender, race, religion, or the source of the initial recommendation.

### Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2022

### Diverse Composition of the Board of Commissioners and the Board Of Directors as of December 31, 2022

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Usia Age	Pendidikan Terakhir Education	Keahlian Expertise
<b>Dewan Komisaris   Board of Commissioners</b>					
Roy Leonard	Komisaris Utama President Commissioner	Laki-laki Male	45	Sarjana Ekonomi Bachelor's Degree in Economics	Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting
Edison Simanjuntak	Komisaris Commissioner	Laki-laki Male	62	Sarjana Bachelor's Degree	Pertahanan dan Keamanan Defense and security
Buyung Lalana	Komisaris Commissioner	Laki-laki Male	65	Sarjana Angkatan Laut Bachelor's Degree in the Navy Science	Pertahanan dan Keamanan Defense and security
Sahat Martin Philip Sinurat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Laki-laki Male	34	Magister Studi Pembangunan Master's Degree in Development Studies	Manajemen dan Riset Management and Research
<b>Direksi   Board of Directors</b>					
Gunta Prabawa	Direktur Utama President Director	Laki-laki Male	56	Sarjana Teknik Sipil Master's Degree in Engineering	Transportasi, dan Logistik Transportation and Logistics
Ruri Indrasari Rachmaputri	Direktur Operasi & Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Operation Director & Commercial and Business Development Director	Wanita Female	45	Sarjana Ekonomi Bachelor's Degree in Economics	Ekonomi dan Akuntansi Economic and Accounting
Budi Azmi	Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Laki-laki Male	49	Magister Pemasaran Master's Degree in Marketing	Manajemen Ekonomi, Transportasi, dan Logistik Economic Management, Transportation and Logistics

## Sekretaris Dewan Komisaris

### Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam bidang kesekretariatan. Pada tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris MTI dijabat oleh Sdr. Rizqi Wijayanto yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK-SK/30/12/11/MTI-2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Multi Terminal Indonesia.

The Board of Commissioners appoints a Secretary to assist in terms of secretarial function. In 2022, this position was held by Mr. Rizqi Wijayanto who was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners Number DK-SK/30/12/11/MTI-2020 dated December 30, 2020, regarding Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Multi Terminal Indonesia.

#### Profil Pejabat

#### Profile of the Officer

<b>Rizqi Wijayanto</b> <b>Sekretaris Dewan Komisaris</b> Secretary to the Board of Commissioners	
<b>Data Pribadi</b> Personal Data	Warga Negara Indonesia   Indonesian Citizen 43 tahun   years old
<b>Pendidikan</b> Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister (S2) Manajemen di Universitas Gadjah Mada (2016)</li> <li>Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Diponegoro (2003)</li> <li>Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Diponegoro University (2003)</li> <li>Master's Degree in Management from Gadjah Mada University (2016)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vice President Sistem Manajemen PT Pelindo Solusi Logistik (2021-2022)</li> <li>Deputy Vice President Pengembangan Bisnis Pendukung PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pusat (2019-2021)</li> <li>Deputy Vice President Transformasi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pusat (2018-2019)</li> <li>Deputy Vice President Risiko Operasional PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pusat (2016-2018)</li> <li>Project Manager Cluster Peralatan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pusat (2015-2016)</li> <li>Asisten Senior Manager Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pusat (2012-2013)</li> <li>Advisor Manajemen Risiko dan Jaminan Mutu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang (2011-2012)</li> <li>Mechanical Research &amp; Development Unit Head LG Electronics Indonesia (2004-2008)</li> <li>Vice President of Management System of PT Pelindo Solusi Logistik (2021-2022)</li> <li>Deputy Vice President of Business Development Support of the Central PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2021)</li> <li>Deputy Vice President of Corporate Transformation of the Central PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2018-2019)</li> <li>Deputy Vice President of Operational Risk of the Central PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016-2018)</li> <li>Project Manager of Equipment Cluster of the Central PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2015-2016)</li> <li>Assistant Senior Manager of Risk Management of the Central PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2012-2013)</li> <li>Risk Management and Quality Assurance Advisor of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Panjang Branch (2011-2012)</li> <li>Mechanical Research &amp; Development Unit Head of LG Electronics Indonesia (2004-2008)</li> </ul>

### Tugas dan Tanggung Jawab

Pedoman kerja Sekretaris Dewan Komisaris merujuk pada *Board Manual* dan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
2. Mengatur teknis rapat Komisaris dan rapat/pertemuan antara Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (*stakeholders*) lainnya;
3. Menyiapkan data/dokumen yang diperlukan dalam persyaratan penilaian GCG dan *Area of Improvement* (AoI) GCG;
4. Menyiapkan data/dokumen tentang pembuatan Laporan Tahunan;
5. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
  - a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris;
  - b. Materi yang bersifat administrasi mengenai laporan Direksi dalam mengelola Perseroan;
  - c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal yang harus mendapatkan persetujuan atas rekomendasi dari Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi;
  - d. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Komisaris.

### Kegiatan Tahun 2022

Selama tahun 2022, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan bagi Dewan Komisaris, mencakup:
  - a. Surat masuk dan keluar Dewan Komisaris;
  - b. Surat Keputusan Dewan Komisaris;
  - c. Risalah rapat internal Dewan Komisaris (Rakom) dan rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir);
  - d. Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Komisaris;
  - e. Laporan/hasil analisis komite kepada Dewan Komisaris;

### Duties and Responsibilities

The work guidelines of the Secretary of the Board of Commissioners refer to the Board Manual and Decree on the Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners. The duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Organize secretarial administration activities within the Board of Commissioners;
2. Set up the technical meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, the Board of Directors, and other related parties (*stakeholders*);
3. Prepare the data/documents required for the GCG assessment requirements and GCG Areas of Improvement (AoI);
4. Prepare data/documents for preparing the Company's Annual Report;
5. Provide data/information needed by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners relating to:
  - a. Monitoring the follow ups to the decisions, recommendations, and directions of the Board of Commissioners;
  - b. Administrative material regarding the Board of Directors report in managing the Company;
  - c. Administrative support and monitoring related to matters that the Board of Commissioners must approve about the Company's management activities carried out by the Board of Directors;
  - d. Collect technical data from committees within the Board of Commissioners for the Board of Commissioners purposes.

### Activities in 2022

In 2022, the Secretary of the Board of Commissioners had carried out several activities according to his duties and responsibilities as follows:

1. Organizing secretarial administration for the Board of Commissioners, including:
  - a. Incoming and outgoing letters of the Board of Commissioners;
  - b. Decree of the Board of Commissioners;
  - c. Minutes of internal meetings of the Board of Commissioners (Rakom) and coordination meetings of the Board of Commissioners and Directors (Rakomdir);
  - d. Signing of the Integrity Pact of the Board of Commissioners;
  - e. Reports/results of committee analysis to the Board of Commissioners;



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan dalam pengumpulan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisaris;</li> <li>g. Koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan dalam administasi fasilitas kesehatan Komisaris (restitusi kesehatan);</li> <li>h. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris;</li> <li>i. Pelatihan Dewan Komisaris.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengatur teknis dan menyiapkan materi/tanggapan/ arahan dalam rapat Komisaris dan rapat/pertemuan antara Komisaris dengan pemegang saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait (<i>stakeholders</i>) lainnya;</li> <li>3. Menyiapkan data/dokumen yang diperlukan dalam persyaratan penilaian GCG mengenai dokumentasi kegiatan Dewan Komisaris;</li> <li>4. Menyiapkan data/dokumen tentang pembuatan Laporan Tahunan mengenai kegiatan Dewan Komsaris.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Coordination with the Corporate Secretary in the collection of the Board of Commissioner's State Official Wealth Report (LHKPN);</li> <li>g. Coordination with the Corporate Secretary in the administration of the Board of Commissioner's health facilities (health restitution);</li> <li>h. Working visits of the Board of Commissioners;</li> <li>i. The Board of Commissioners' training.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Arrange technical and prepare materials/responses/ directions in Board of Commissioners meetings and meetings/gatherings between Board of Commissioners and shareholders, Board of Directors, and other related parties (<i>stakeholders</i>);</li> <li>3. Prepare data/documents required for the GCG assessment of the activities of the Board of Commissioners;</li> <li>4. Prepare data/documents for preparing the Company's Annual Report, especially in terms of the activities of the Board of Commissioners.</li> </ol> |
|--|---|

## Komite Audit

### Audit Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk memperkuat pelaksanaan GCG. Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi Direksi mengelola Perseroan. Secara umum fungsi Komite Audit memastikan Perseroan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai prinsip GCG dan nilai-nilai usaha yang sesuai hukum. Komite Audit adalah komite yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

#### Komposisi Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DKSK/04/12/04/04/MTI-2019 tanggal 4 April 2019 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK--SK/03/08/01/MTI2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pembentukan serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners formed the Audit Committee to strengthen the GCG implementation. The Audit Committee supports the Board of Commissioners in managing the Company. The Audit Committee has a general function to ensure the Company is being soundly managed according to the GCG principles and corporate values and compliance with the law. The Audit Committee acts independently and answers only to the Board of Commissioners.

#### Composition of Members

Based on the Decree of the Board of Commissioners Number DKSK/04/12/04/04/MTI-2019 dated April 4, 2019, and Decree of Board of Commissioners Number DK-SK/03/08/01/MTI2020 dated August 3, 2020, concerning the Formation and Appointment of the Chairman and Members of the Audit Committee and Risk Management Committee. The composition of the Audit Committee is as follows:

Nama   Name	Posisi   Position	Status	Dasar Pengangkatan   Basis of Appointment
Edison Simanjuntak	Ketua Chairman	Komisaris MTI Commissioner of MTI	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK--SK/03/08/01/MTI-2020 tanggal 3 Agustus 2020 Decree of Board of Commissioners No. DK--SK/03/08/01/MTI-2020 dated August 3, 2020
Yoke Hasbyanto	Anggota Member	Pihak eksternal From outside the Company	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: DK/31/10/3/MTI-2016 tanggal 31 Oktober 2016 Decree of Board of Commissioners No. DK/31/10/3/ MTI-2016 dated October 31, 2016
Tony Utartono	Anggota Member	Pihak eksternal From outside the Company	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK-SK/08/09/02/MTI-2020 8 September 2020 Decree of Board of Commissioners No. DK-SK/08/09/02/ MTI-2020 dated September 8, 2020

## Profil Pejabat

## Profile of the Officer

### Edison Simanjuntak Ketua Chairman

<b>Masa Jabatan</b> Term of Office	3 Agustus 2020–saat ini August 3, 2020–present
<b>Profil Lengkap</b> Profile	Profil Beliau telah dimuat pada bagian Profil Dewan Komisaris. His profile is available in the Profile of the Board of Commissioners section.

### Yoke Hasbyanto Anggota Member

<b>Masa Jabatan</b> Term of Office	21 Juni 2017–saat ini June 21, 2017–present
<b>Data Pribadi</b> Personal Data	Warga Negara Indonesia   Indonesian Citizen 48 tahun   years old
<b>Pendidikan</b> Education	Magister Manajemen SDM dari Universitas Surapati (2019) Master's Degree in HR from the Surapati University (2019)
<b>Sertifikasi</b> Certificate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certification in Audit Committee Practice (CACP) IKAI (2019)</li> <li>• Certified Corporate Fraud Auditor (CCFA) (2019)</li> </ul>
<b>Riwayat Pelatihan</b> Training History	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Problem of Value Added Tax and Corporate Income Tax (Pph) on Freight Forwarding Business Transaction and Its Related Accounting Practices (2010)</li> <li>• Aspek Perpajakan Jasa Shipping dan Freight Forwarding (2005)</li> <li>• Management &amp; Finance Engineering untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang Freight Forwarder (2001)</li> <li>• Pengembangan Pelayanan Ekspor Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Perolehan Devisa Negara (2001)</li> <li>• The Problem of Value Added Tax and Corporate Income Tax (PPh) on Freight Forwarding Business Transaction and Its Related Accounting Practices (2010)</li> <li>• Taxation Aspect in Shipping and Freight Forwarding Services (2005)</li> <li>• Development of Export Service in Indonesia as an Effort to Improve Foreign Exchange Income (2001)</li> <li>• Finance Management &amp; Finance Engineering to address the issues in Freight Forwarder field (2001)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja &amp; Rangkap Jabatan</b> Work Experience & Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurus DPP GPEI (2017–sekarang)</li> <li>• Wakil Ketua Bidang Logistik, Supplychain, Angkutan Laut &amp; Kemaritiman Depalindo – Indonesia National Shippers Council (INSC) (2017–sekarang)</li> <li>• Manajer Keuangan dan Akuntansi di PT Jakarta Cargotama Handling (2001–2014)</li> <li>• Staf Keuangan dan Akuntansi di PT Jakarta Intermoda Trans (2001)</li> <li>• Dosen Honorer di LP3I Pasar Minggu (1999–2000)</li> <li>• Advanced Accounting – B Laboratory (Perpajakan) di Universitas Gunadarma (1996–1998)</li> <li>• DPP GPEI Management (2017–present)</li> <li>• Deputy Head of Logistics, Supply Chain, Sea Transportation &amp; Maritime Depalindo–Indonesia National Shippers Council / INSC (2017–present)</li> <li>• Financial and Accounting Manager at PT Jakarta Cargotama Handling (2001–2014)</li> <li>• Financial and Accounting Staff at PT Jakarta Intermoda Trans (2001)</li> <li>• Honorary Lecturer at LP3I Pasar Minggu (1999–2000)</li> <li>• Assistant for Advanced Accounting – B Laboratory (Taxation) at Gunadarma University (1996–1998)</li> </ul>

<b>Tony Utartono</b> Anggota Member	
<b>Masa Jabatan</b> Term of Office	8 September 2020–saat ini September 8, 2020–present
<b>Data Pribadi</b> Personal Data	Warga Negara Indonesia   Indonesian Citizen 48 tahun   years old
<b>Pendidikan</b> Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>Magister Manajemen Finance &amp; Banking dari Institut Teknologi Bandung</li> <li>Sarjana Manajemen Informasi dari Universitas Gunadarma</li> <li>Master's Degree in Finance &amp; Banking Management from the Bandung Institute of Technology</li> <li>Bachelor's Degree in Information Management from Gunadarma University</li> </ul>
<b>Riwayat Pelatihan</b> Training History	<ul style="list-style-type: none"> <li>Professional Commissioner, Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT)</li> <li>Forensic Accounting</li> <li>Special Audit for Internal Fraud Disclosure</li> <li>Fraud Examiner, Investigation and Forensic Audit Specialist</li> <li>Governance, Risk and Control (GRC)</li> <li>COSO Framework Specialist (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)</li> <li>Internal Control Framework, SOX Specialist (Sarbanes Oxley Act Section 404 and 302)</li> <li>Audit Software: ACL (Audit Command Language)</li> <li>Indonesian Taxation (Brevet A &amp; B)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja &amp; Rangkap Jabatan</b> Work Experience & Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Committee PT Uni-Charm Indonesia Tbk (2020–saat ini   present)</li> <li>Senior Technical Advisor GLC Consulting (2018–saat ini   present)</li> <li>Chief Internal Auditor ASEAN Secretariat (2017)</li> <li>Risk &amp; Audit Director MCA-Indonesia (2016–2017)</li> <li>General Manager Internal Audit PT Nusantara Infrastructure (2011–2016)</li> <li>General Manager Human Resources PT Nusantara Infrastructure (2011–2013)</li> <li>General Manager Tax PT Nusantara Infrastructure (2011–2013)</li> <li>Head of Internal Audit PT Indika Energy, Tbk (2008–2010)</li> <li>Senior Manager – SOX/ Compliance FCC Indonesia (2007–2008)</li> <li>Project Leader – Business Process &amp; Audit Atlas Copco Indonesia (2006–2007)</li> <li>Project Leader Semen Andalas Indonesia di Medan (2005)</li> <li>Internal Audit Manager Semen Andalas Indonesia di Jakarta (2004–2005)</li> <li>Head of Internal Audit &amp; Business Analyst MG Prima Consultant (2003–2004)</li> <li>Finance Manager/Procurement &amp; Logistic Manager NDC Indonesia (2002–2003)</li> <li>Audit Assistant Manager Bank BTN (1995–1999)</li> <li>Officer Internal Controller Bank BDN (1993–1995)</li> </ul>

### Piagam Komite

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam (*Charter*) Komite Audit sebagai pedoman tata laksana kerja sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor: DK-SK/02/11/01/MTI-2020 tentang *Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit) PT Multi Terminal Indonesia, tertanggal 2 November 2020. Piagam tersebut memuat aspek-aspek pelaksanaan tugas Komite Audit, di antaranya visi dan misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, kode etik, persyaratan auditor, pelaksanaan rapat, dan mekanisme kerja lainnya.

Dalam piagam juga diatur mengenai hubungan kerja komite yaitu dengan Dewan Komisaris dan Direksi, serta auditor eksternal dan Satuan Pengawas Intern (SPI).

### Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee Charter guides the committee to work since the charter has been stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia Number: DK-SK/02/11/01/MTI-2020 concerning the Audit Committee Charter of PT Multi Terminal Indonesia, dated November 2, 2020. The charter contains the Audit Committee's aspect of duties including the vision and mission, structure and position, duties and responsibilities, authorities, working relationship, code of ethics, auditor requirements, meeting implementation, and other working mechanisms.

The charter also governs the relationship between the committee and the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as the external auditor and the Internal Control Unit (SPI).

## Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab

### Bidang Pelaporan Keuangan

Melakukan penilaian dan review mengenai kebijakan dan praktik pelaporan akuntansi dan keuangan, termasuk adanya kemungkinan perubahan-perubahan yang signifikan, dasar pertimbangan perlakuan akuntansi yang digunakan, standar pelaporan dan akuntansi, baik atas laporan tahunan maupun laporan triwulanan/bulanan.

### Bidang Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko atas Semua Lini Bisnis

Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal manajemen Perusahaan dan manajemen risiko serta pelaksanaannya.

### Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Kebijakan Penerapan GCG

Melakukan evaluasi atas pengawasan manajemen terhadap pelaksanaan GCG.

### Wewenang

1. Mengakses catatan atau informasi karyawan, aset, dana, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.;
2. Memiliki akses atas informasi yang ada di Perusahaan dari Direksi, Satuan Pengawas Intern (SPI), dan semua satuan organisasi Perusahaan, jika terjadi kasus/indikasi penyimpangan Komite Audit yang perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasus tersebut;
3. Komite Audit dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perusahaan.

### Kewajiban

1. Membuat laporan hasil *review* dan evaluasi secara berkala kepada Dewan Komisaris;
2. Memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan tahunan telah menyajikan tentang masalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan GCG;
3. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perusahaan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.

### Independensi

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi dan bebas dari benturan kepentingan dengan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi. Informasi mengenai independensi Komite Audit disajikan dalam tabel sebagai berikut:

## Duties, Authorities, and Responsibilities

### Financial Reporting

Assessing and reviewing accounting and financial reporting policies and practices, including the possibility of significant changes, the basis for consideration of accounting treatment used, and reporting and accounting standards, both on annual reports and quarterly/monthly reports.

### Internal Control and Risk Management of Business Lines

Providing recommendations regarding improving the Company's Internal Control System and risk management and its implementation.

### Compliance with Applicable Laws and Regulations and GCG Implementation

Evaluating management supervision on the GCG implementation.

### Authorities

1. Access records or information on employees, assets, funds, and other company resources related to their duties implementation;
2. Have access to information in the Company from the Board of Directors, Internal Audit Unit (SPI), and all organizational units if there are cases/indications of deviations from the Audit Committee that need to examine/clarify these cases;
3. The Audit Committee, with the Board of Commissioners' approval, may seek advice and assistance from experts and other professionals at the expense of the Company.

### Obligations

1. Make reports on the results of the review and evaluation regularly to the Board of Commissioners;
2. Ensure that the financial statements and annual reports have presented the issue of compliance with applicable laws and regulations and the GCG implementation;
3. Obligation to maintain the confidentiality of documents, data, and information regarding the Company, obtained while carrying out their duties as the Audit Committee.

### Independence

The Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not according to the laws and regulations. All members of the Audit Committee have met the criteria of independence and are free of conflicts of interest with no affiliation, either familial or financial relationships with the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Information regarding the independence of the Audit Committee is presented in the following table:



Kriteria Independensi Independence Criteria	Edison Simanjuntak	Yoke Hasbyanto	Tony Utartono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan induk, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. No managerial relationship at the parent company, subsidiaries, or affiliated companies.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan induk. Does not own a share of the parent company.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit. No familial relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or fellow Audit Committee members.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau pejabat Pemerintah Daerah. Not serving as a manager of political parties and/or regional government officers.	✓	✓	✓

### Program Peningkatan Kapabilitas

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan audit, PT MTI memberikan kesempatan bagi Komite Audit untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit selama tahun 2022 telah diuraikan pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dalam Laporan Tahunan ini.

### Penyelenggaraan Rapat

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Secara umum, agenda rapat yang diselenggarakan Komite Audit membahas mengenai:

- Monitoring dan evaluasi kinerja dan temuan SPI;
- Monitoring dan evaluasi kinerja KAP;
- Monitoring dan evaluasi kinerja perkembangan logistik;
- Monitoring dan evaluasi Laporan Keuangan.

Selama tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali.

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota dalam Rapat Tahun 2022

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Edison Simanjuntak	Ketua Chairman	10	10	100%
Yoke Hasbyanto	Anggota Member	10	10	100%
Tony Utartono	Anggota Member	10	10	100%

### Capability Development

To improve the competence of the Audit Committee in carrying out the supervisory function of audit, PT MTI provides opportunities for the Audit Committee to attend training, education, seminars, and/or workshops according to the required competencies. Information regarding competency development that the Audit Committee participated in during 2022 has been described in the Education and/or Training section of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit in this Annual Report.

### Committee Meetings

The Audit Committee holds regular meetings, as stipulated in the Audit Committee Charter, at least once a month.

In general, the agendas of meetings held by the Audit Committee discuss:

- Monitoring and evaluation of SPI's performance and findings;
- Monitoring and evaluation of KAP's performance;
- Monitoring and evaluation of logistics development performance;
- Monitoring and evaluation of Financial Statements.

In 2022, the Audit Committee held 10 meetings.

### Frequency and Attendance Rate of Members during Meetings in 2022

## Risalah Rapat Komite Tahun 2022

## Minutes of Meeting in 2022

### Agenda Rapat | Meeting Agenda

Komite Audit mengadakan rapat terkait sejumlah agenda yang secara garis besar berkaitan dengan telaah (*review*) terhadap sejumlah hal sebagai berikut di sepanjang tahun:

1. Laporan Kinerja Manajemen setiap bulannya;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022;
3. Program Kerja Audit Tahunan terkait pengendalian intern untuk tahun 2022;
4. Program kerja kunjungan Dewan Komisaris dan Komite.

The Audit Committee organized a number of meetings with the main agenda that has always revolved around the assessment of following matters throughout the year:

1. Monthly Management Report;
2. Work Plan and Budget for 2022;
3. Annual Audit Program related to internal control for 2022;
4. Official visits by the Board of Commissioners and Committees.

### Penghasilan Komite

Ketentuan mengenai penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Audit telah ditentukan maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

### Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya mencakup penugasan rutin maupun tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Telaah terkait sejumlah dokumen mengenai Laporan Kinerja Manajemen per bulannya, RKAP Tahun 2022, proyek kerjasama, program kerja audit tahunan terkait pengendalian intern;
2. Mengadakan rapat internal Komite Audit, serta rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Melakukan kunjungan kerja ke lapangan untuk memberikan arahan teknis kepada cabang dan unit usaha;
4. Mempersiapkan dokumen terkait temuan dan tindak lanjut audit;
5. Hadir dalam sejumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

### Committee Remuneration

The Board of Commissioners determines provisions regarding the remuneration of members of the Audit Committee by taking into account the Company's ability. Accordingly, the honorarium for the Audit Committee members has been determined to be a maximum of 20% of the salary of the Company's President Director, provided that the Company bears the tax, and they are not allowed to receive other income other than the honorarium.

Members of the Board of Commissioners who become Chairman/Members of the Audit Committee are not given additional income from the position other than income as the Board of Commissioners.

### Brief Report of the Work

Throughout 2022, the Audit Committee has carried out its duties covering the routine assignments and other tasks requested by the Board of Commissioners as follows:

1. Reviewed a number of documents regarding monthly Management Reports, RKAP for 2022, collaboration projects, annual audit programs related to internal control;
2. Organized internal Audit Committee meetings and coordination meetings with the Board of Commissioners and Directors;
3. Prepared a number of documents regarding audit findings and follow-up;
4. Visited the site to provide technical instruction to branches and business units;
5. Attended a number of trainings to improve competency.

## Komite Manajemen Risiko

### Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko MTI dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris terkait dengan mengidentifikasi, memetakan, menganalisis, dan memitigasi risiko atas seluruh proses bisnis Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko bersifat mandiri, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

MTI's Risk Management Committee is formed to assist the Board of Commissioners. Its function is to assist the duties and authorities implementation of the Board of Commissioners related to efforts to identify, map, analyze, and mitigate risks of all PT MTI core processes aimed at preventing and minimizing risks. In carrying out its duties, the Risk Management Committee is independent and is directly responsible to the Board of Commissioners.

#### Komposisi Anggota

Komite Manajemen Risiko MTI dibentuk pada tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK-SK/03/08/01/MTI-2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang pembentukan serta pengangkatan ketua dan anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Susunan Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

#### Composition of Members

MTI's Risk Management Committee was formed on August 3, 2020 based on the Decree of the Board of Commissioners Number DK-SK/03/08/01/MTI-2020 dated August 3, 2020, regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Audit Committee and Risk Management Committee. The composition of the Risk Management Committee is as follows:

Nama   Name	Posisi   Position	Status	Dasar Pengangkatan   Basis of Appointment
Buyung Lalana	Ketua Chairman	Komisaris MTI Commissioner of MTI	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK--SK/03/08/01/MTI-2020 tanggal 3 Agustus 2020 Decree of Board of Commissioners No. DK--SK/03/08/01/MTI-2020 dated August 3, 2020
Basril Novaris	Anggota Member	Pihak eksternal From outside the Company	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK--SK/03/08/01/MTI-2020 tanggal 3 Agustus 2020 Decree of Board of Commissioners No. DK--SK/03/08/01/MTI-2020 dated August 3, 2020

#### Profil Pejabat

#### Profile of the Officer

<b>Buyung Lalana</b> Ketua Chairman	
Masa Jabatan Term of Office	3 Agustus 2020--saat ini August 3, 2020--present
Profil Lengkap Profile	Profil Beliau telah dimuat pada bagian Profil Dewan Komisaris. His profile is available in the Profile of the Board of Commissioners section.

**Basril Novaris**  
**Anggota**  
 Member

<b>Masa Jabatan</b> Term of Office	3 Agustus 2020–saat ini August 3, 2020–present
<b>Data Pribadi</b> Personal Data	Warga Negara Indonesia   Indonesian Citizen 49 tahun   years old
<b>Pendidikan</b> Education	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Business Administration/Leadership &amp; Logistics dari Kuhne Logistics University (2015)</li> <li>• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (2001)</li> <li>• Master's Degree in Business Administration/Leadership &amp; Logistics from Kuhne Logistics University (2015)</li> <li>• Bachelor's Degree in Civil Engineering from the University of Indonesia (2001)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja &amp; Rangkap Jabatan</b> Work Experience & Concurrent Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VP Manajemen Risiko PT PSL (2021–saat ini)</li> <li>• DVP Risiko Non Operasional Pelindo Kantor Pusat (2018–2021)</li> <li>• DVP Pemeliharaan Fasilitas Kantor Pusat Pelindo 2 (2016–2018)</li> <li>• ASM. Pemeliharaan Fasilitas &amp; Pengerukan Kantor Pusat Pelindo 2 (2014–2016)</li> <li>• Manager Teknik &amp; Sistem Informasi Pelindo 2 Cabang Teluk Bayur (2010–2014)</li> <li>• Manager Teknik &amp; Sistem Informasi Pelindo 2 Cabang Banten (2006–2010)</li> <li>• Asisten Manager Teknik Sipil Pelindo 2 Cabang Panjang (2003–2006)</li> <li>• VP of Risk Management of PT PSL (2021–present)</li> <li>• DVP of Non-Operational Risk of Pelindo Head Office (2018–2021)</li> <li>• DVP of Facility Maintenance of Pelindo 2 Head Office (2016–2018)</li> <li>• Assistant Senior Manager of Facility Maintenance &amp; Dredging of Pelindo 2 Head Office (2014–2016)</li> <li>• Manager of Engineering &amp; Information Systems at Pelindo 2 Teluk Bayur Branch (2010–2014)</li> <li>• Manager of Engineering &amp; Information Systems at Pelindo 2 Banten Branch (2006–2010)</li> <li>• Assistant Manager of Civil Engineering at Pelindo 2 Panjang Branch (2003–2006)</li> </ul>

### Piagam Komite

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko berpedoman pada Piagam (*Charter*) Komite Manajemen Risiko yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK/26/04/01/MTI-2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Manajemen Risiko PT Multi Terminal Indonesia.

Piagam Komite Manajemen Risiko memuat Landasan Hukum, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Tujuan dan Ruang Lingkup Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Tata Cara Prosedur Kerja, Komposisi dan Struktur, Persyaratan keanggotaan, Kebijakan Penyelenggaraan Rapat, Sistem Pelaporan Kegiatan, Masa Tugas, Pendanaan, Penilaian Kinerja pada Komite Manajemen Risiko yang merupakan salah satu organ Dewan Komisaris.

### Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab

1. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional, keuangan, SDM dan organisasi, teknik dan teknologi serta pengembangan usaha Perusahaan;
2. Memantau dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal/hukum;
3. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris;
4. Mengawasi pelaksanaan dampak risiko terhadap aspek keuangan, keluhan/komplain dari stakeholder, reputasi, keselamatan dan lingkungan sosial;
5. Mengawasi pelaksanaan kelompok risiko internal dan eksternal yang berupa:

### Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management Committee is guided by the Committee Charter which has been stipulated through the Decree of the Board of Commissioners No. DK/26/04/01/MTI-2021 dated April 26, 2021, regarding the Risk Management Committee Charter of PT Multi Terminal Indonesia.

The Risk Management Committee Charter contains the Legal Basis, Appointment, and Dismissal of Members, Objectives, Scope of Work, Duties and Responsibilities, Authorities, and Work Procedures. Besides, Composition and Structure, Membership Requirements, Meeting Implementation Policy, Activity Reporting System, Term of Service, Funding, Performance Assessment on the Risk Management Committee which is one of the organs of the Board of Commissioners.

### Functions, Duties, and Responsibilities

1. Evaluate policies and strategies for risk management in terms of operational, financial, HR and organizational, technical, and technology as well as the Company's business development;
2. Monitor and evaluate the risk management implementation and its mitigation on the Company's business and investment plans as well as operational implementation in terms of financial and legal aspects;
3. Report the monitoring and evaluation results as well as provide recommendations on matters that need the attention of the Board of Commissioners;
4. Supervise the risk impact implementation on financial, complaints from stakeholders, reputation, safety, and social environment aspects;
5. Supervise the internal and external risk groups implementation in the form of:



- a. Risiko internal yaitu risiko SDM & organisasi, risiko usaha/bisnis, risiko strategi, risiko operasi, risiko aset, risiko keuangan dan risiko teknik serta teknologi;
- b. Risiko eksternal yaitu risiko hukum perusahaan, risiko reputasi, risiko keamanan, risiko K3 & lingkungan hidup, risiko politik, risiko ekonomi, risiko sosial & budaya, risiko hukum dan perundangan, risiko kebijakan pemerintah.

- a. Internal risks, namely HR & organizational risk, business risk, strategic risk, operating risk, asset risk, financial risk, and technical and technological risk;
- b. External risks are company legal, reputation, security, OHS & environment, political, economic, social & cultural risk, legal and regulatory risks, and government policy risks.

### Independensi

Komite Manajemen Risiko bekerja secara independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota telah memenuhi kriteria independensi dan bebas benturan kepentingan dengan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Direksi. Informasi mengenai independensi Komite Manajemen Risiko disajikan dalam tabel sebagai berikut:

### Independence

The Risk Management Committee acts independently, without interference from anyone that is not according to the prevailing regulations. All members have met the independence criteria and are free of conflicts of interest with no affiliation, either familial or financial relationships, with the Company, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Information regarding the independence of the Risk Management Committee is presented in the following table:

Kriteria Independensi   Independence Criteria	Buyung Lalana	Tony Utartono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. No financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan induk, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. No managerial relationship at the parent company, subsidiaries, or affiliated companies.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan induk. Does not own a share of the parent company.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit. No familial relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or fellow Audit Committee members.	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau pejabat Pemerintah Daerah. Not serving as a manager of political parties and/or regional government officers.	✓	✓

### Program Peningkatan Kapabilitas

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Komite Manajemen Risiko, PT MTI memberikan kesempatan bagi Komite Manajemen Risiko untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau *workshop* sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Manajemen Risiko selama tahun 2022 telah diuraikan pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dalam Laporan Tahunan ini.

### Capability Development

To improve the competence of the Risk Management Committee, PT MTI provides opportunities for the Risk Management Committee to attend training, education, seminars, and/or workshops according to the required competencies. Information regarding competency development that the Risk Management Committee participated in during 2022 has been described in the Education and/or Training section of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit in this Annual Report.

### Penyelenggaraan Rapat

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat secara berkala dengan agenda rapat secara umum mengenai risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta upaya mitigasinya. Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali.

### Committee Meetings

The Risk Management Committee convenes in a regular meeting in which each meeting has a general agenda to discuss the Company's risks and their mitigation efforts. In 2022, the Risk Management Committee has held 10 meetings.

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota dalam Rapat Tahun 2022

### Frequency and Attendance Rate of Members during Meetings in 2022

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Buyung Lalana	Ketua Chairman	10	10	100%
Basril Novaris	Anggota Member	10	10	100%

### Risalah Rapat Komite Tahun 2022

### Minutes of Meeting in 2022

#### Agenda Rapat | Meeting Agenda

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat terkait sejumlah agenda yang secara garis besar berkaitan dengan telaah (*review*) terhadap identifikasi dan mitigasi risiko di sepanjang tahun:

1. Komitmen dan persiapan implementasi manajemen risiko untuk sepanjang tahun;
2. Identifikasi dan mitigasi profil risiko untuk setiap triwulan;
3. Usulan profil risiko untuk RKAP Tahun 2023.

The Risk Management Committee organized a number of meetings with the main agenda that has always revolved around the assessment of risk identification and mitigation throughout the year:

1. Commitment and preparation for implementing risk management throughout the year;
2. Identification and mitigation of risk profiles for each quarter;
3. Preparing the proposal for the risk profile of 2023 to be set in RKAP.

#### Penghasilan Komite

Ketentuan mengenai penghasilan Anggota Komite Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan Perseroan. Honorarium Anggota Komite Manajemen Risiko telah ditentukan maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan pajak ditanggung oleh Perseroan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

#### Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya mencakup penugasan rutin maupun tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Menelaah kesesuaian Pedoman Manajemen Risiko Perseroan dengan kondisi terkini;
2. Menelaah Profil Risiko Perseroan pada awal tahun 2022 (*inherent risk & risk target*);
3. Melakukan evaluasi dan monitoring profil risiko sepanjang tahun 2022 secara berkala;
4. Menelaah profil risiko untuk usulan RKAP 2022;
5. Menghadiri pelatihan terkait tugas komite;
6. Menghadiri sejumlah rapat, baik internal antar anggota Komite, dan rapat koordinasi dengan pihak lain (Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen Senior);
7. Melakukan kunjungan kerja;
8. Menyusun Laporan Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko.

#### Committee Remuneration

The Board of Commissioners determines provisions regarding the remuneration of members of the Risk Management Committee by taking into account the Company's ability. Accordingly, the honorarium for the Risk Management Committee members has been determined to be a maximum of 20% of the salary of the Company's President Director, provided that the Company bears the tax, and they are not allowed to receive other income other than the honorarium.

Members of the Board of Commissioners who become Chairman/Members of the Risk Management Committee are not given additional income from the position other than income as the Board of Commissioners.

#### Brief Report of the Work

Throughout 2022, the Risk Management Committee has carried out its duties covering the routine assignments and other tasks requested by the Board of Commissioners as follows:

1. Assessed whether the Company's Risk Management Guidelines is still suitable with current situation;
2. Assessed the Company's Risk Profile at the beginning of 2022 (*inherent & targeted risks*);
3. Regularly assessed and monitored the risk profile throughout 2022;
4. Assessed the risk profile to be proposed for the RKAP of 2022;
5. Participated in trainings related to the committee's duties;
6. Attended a number of meetings, including the internal meeting between Committee members, and coordination meetings with other parties (Board of Commissioners, Board of Directors, Senior Management);
7. Visited the sites;
8. Prepared Risk Management Implementation Monitoring Reports.

## Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee

Sampai dengan 31 Desember 2022, PT MTI belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi sepenuhnya menjadi wewenang PT Pelindo Solusi Logistik selaku pemegang saham utama dan pengendali. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai nama, jabatan, profil anggota, independensi, tugas dan tanggung jawab, frekuensi rapat, penilaian kinerja, hingga laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sampai dengan 31 Desember 2022, PT MTI belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi sepenuhnya menjadi wewenang PT Pelindo Solusi Logistik selaku pemegang saham utama dan pengendali. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai nama, jabatan, profil anggota, independensi, tugas dan tanggung jawab, frekuensi rapat, penilaian kinerja, hingga laporan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi.

## Sekretaris Perusahaan & Hukum Corporate Secretary & Legal

Sekretaris Perusahaan & Hukum berperan sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi antar organ Perusahaan, mulai dari RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja. Sekretaris Perusahaan & Hukum merupakan salah satu organ Perusahaan yang bertanggung jawab memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal termasuk Pemerintah Indonesia, regulator, dan masyarakat. Perusahaan menunjuk seorang pejabat sebagai Sekretaris Perusahaan & Hukum (*Corporate Secretary*).

The Corporate Secretary & Legal acts as a liaison that facilitates the communication between the Company's organs, starting from the GMS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees. In addition, the Corporate Secretary & Legal is responsible in maintaining the relations with external parties, including the Government of Indonesia, regulators, and the public. Accordingly, the Company appoints an officer to take the role as the Corporate Secretary & Legal (*Corporate Secretary*).

Sekretaris Perusahaan & Hukum diangkat oleh Direksi. Pada tahun 2022, Sekretaris Perusahaan & Hukum MTI dijabat oleh Sdri. Elis Suhana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP.33/4/1/1/MTI-2021 tanggal 4 Januari 2021.

The Board of Directors appoints the Corporate Secretary & Legal. In 2022, this positions was held by Mrs. Elis Suhana who was appointed based on the Decree of the Board of Directors Number KP.33/4/1/1/MTI-2021 dated January 4, 2021.

### Struktur dan Kedudukan

### Structure and Position



Kedudukan Sekretaris Perusahaan & Hukum dalam struktur organisasi Perseroan berada langsung di bawah Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa fungsi spesialis di bawahnya Kehumasa & Hubungan Antar Lembaga, Hukum, Tata Kelola Perusahaan.

The Corporate Secretary & Legal is positioned under the President Director. The Corporate Secretary & Legal has several functions of specialties underneath, including Public Relations & Institutional Relations, Legal, Corporate Governance.

### Profil Pejabat

### Profile of the Officer

#### Elis Suhana Sekretaris Perusahaan & Hukum Corporate Secretary & Legal

<b>Data Pribadi</b> Personal Data	Warga Negara Indonesia   Indonesian Citizen 46 tahun   years old
<b>Pendidikan</b> Education	Sarjana Ekonomi dari Universitas STIE (2001) Bachelor's Degree in Economics from STIE University (2001)
<b>Riwayat Pelatihan</b> Training History	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Optimizing The Future Role of Corporate Secretary</i> (2018)</li> <li>• <i>Workshop Optimizing Corporate Secretary and Corporate Communication Role Towards Digital Port</i> (2018)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager Keuangan &amp; SDM Cabang Jakarta PT MTI (2020-2021)</li> <li>• Manager Customer Care &amp; Klaim (2019-2020)</li> <li>• Senior Vice President Hukum &amp; Pengadaan (2018-2019)</li> <li>• Vice President Hukum &amp; Klaim (2018-2019)</li> <li>• Executive Vice President Corporate Secretary (2017-2018)</li> <li>• Manager of Finance &amp; HR of PT MTI Jakarta Branch (2020-2021)</li> <li>• Manager of Customer Care &amp; Claims (2019-2020)</li> <li>• Senior Vice President of Legal &amp; Procurement (2018-2019)</li> <li>• Vice President of Legal &amp; Claims (2018-2019)</li> <li>• Executive Vice President of Corporate Secretary (2017-2018)</li> </ul>

### Tugas dan Tanggung Jawab

### Duties and Responsibilities

1. Menghadiri rapat Direksi dan membuat risalah rapat;
  2. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atas kepemilikan saham pada akhir tahun yang ditandatangani paling lambat awal tahun berikutnya;
  3. Bertanggung jawab dalam kegiatan penyelenggaraan RUPS/RUPSLB;
  4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan atau kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
  5. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan dan hal yang berkaitan dengan bahan untuk rapat bersama Dewan Komisaris;
  6. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun tidak;
  7. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta pertanggungjawaban dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat;
  8. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dan administrasi dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
1. Attend the Board of Directors meetings and prepare the minutes;
  2. Prepare and periodically update the Special Register based on statements made by members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors on share ownership at the end of the year which signed no later than the beginning of the following year;
  3. Responsible for the activities of holding the GMS/EGM;
  4. Prepare the necessary materials related to reports or routine activities of the Board of Directors to be submitted to external parties;
  5. Prepare the necessary materials relating to matters that must obtain decisions from the Board of Directors regarding the Company's management and matters relating to materials for the joint meetings with the Board of Commissioners;
  6. Organize meetings within the Board of Directors, whether routine or not;
  7. Follow up on every decision of the Board of Directors by recording every decision made in decision making forums along with accountability and monitor and check the progress of the implementation of the meeting results;
  8. Organize secretarial and administrative activities within the Board of Directors and the Company.



### Program Peningkatan Kapabilitas

PT MTI memiliki kebijakan terkait program pengembangan kompetensi bagi Sekretaris Perusahaan & Hukum. Sebagai wujud kepatuhan PT MTI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada beberapa bidang yang dapat memberikan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan & Hukum, PT MTI memberikan kesempatan bagi Sekretaris Perusahaan & Hukum untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan & Hukum selama tahun 2022 telah diuraikan pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan & Hukum, dan Unit Audit Internal dalam Laporan Tahunan ini.

### Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun tahun 2022, Sekretaris Perusahaan & Hukum telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

#### A. Bidang Tata Kelola Perusahaan

1. Survei Kepuasan Pekerja Tahun 2022;
2. Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2022;
3. Survei Kepuasan Pemasok/Vendor Tahun 2022;
4. *Annual Report* 2021;
5. Assessment GCG 2021;
6. Perpanjangan polis asuransi purna jabatan dan kesehatan Komisaris & Direksi;
7. Realisasi penyelenggaraan rapat;
8. Pembuatan notulen/risalah rapat rutin bulanan;
9. Pembuatan laporan-laporan dan surat-menyurat;
10. Penyelenggaraan Pra RUPS & RUPS tahun 2021;
11. Penyempurnaan Dokumen GCG tahun 2021 yang disesuaikan dengan tindak lanjut *Area Of Improvement* GCG.

#### B. Bidang Antar Lembaga & Kehumasan

1. Pelaksanaan Program CSR;
2. Kegiatan promosi, *customer relation* dan *internal relation*;
3. Pemasangan iklan di media cetak dan *online*;
4. *Sponsorship* kegiatan dengan *stakeholder*.

#### C. Bidang Hukum

1. Penyusunan draft perjanjian/berita acara/ kesepakatan;
2. Penyusunan draft opini hukum dari internal/eksternal lawyer pembahasan rumusan permasalahan hukum;
3. Pengurusan perizinan dan/atau akta
4. Pendampingan permasalahan hukum ke instansi kepolisian/disnaker/instansi/kejaksaan / lembaga terkait;
5. Pemberian dokumen hukum identifikasi pemohon internal/eksternal terhadap dokumen hukum dan penyiapan tanda terima klarifikasi kepada divisi terkait;

### Capability Development

PT MTI has a policy related to competency program development for the Corporate Secretary & Legal. As a form of PT MTI's compliance with applicable laws and regulations, especially in several areas that can provide competence improvement in carrying out the duties and functions of the Corporate Secretary & Legal, PT MTI provides an opportunity for the Corporate Secretary & Legal to participate in training, education, seminars, and/or workshops in accordance with the required competencies. Information regarding competency development that the Corporate Secretary & Legal participated in during 2022 has been described in the Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary & Legal, and Internal Audit Unit section in this Annual Report.

### Brief Report of the Work

Throughout 2022, the Corporate Secretary & Legal has carried out its duties as follows:

#### A. Corporate Governance

1. 2022 Employee Satisfaction Survey;
2. 2022 Customer Satisfaction Survey;
3. 2022 Supplier/Vendor Satisfaction Survey;
4. Annual Report 2021;
5. 2021 GCG Assessment;
6. Extended the pension and health insurance policies for Commissioners & Directors;
7. Meetings coordination;
8. Prepared minutes of monthly meetings;
9. Prepared reports and correspondence letter;
10. Organized the Pre-GMS & GMS in 2021;
11. Updated the GCG Documents in 2021 according to the follow up on Areas of Improvement of GCG.

#### B. Inter Agency & Public Relations

1. CSR Program;
2. Promotional, customer and internal relations;
3. Published advertisements in print and online media channels;
4. Sponsorship of activities with stakeholders.

#### C. Legal

1. Prepared draft regarding agreements/minutes/deals;
2. Prepared draft of legal opinions from internal/external lawyers regarding legal issues;
3. Dealt with permits and/or deeds
4. Solved legal issues with the police/manpower agency/ institutions/prosecutor's office/relevant institutions;
5. Prepared legal documents of internal/external applicants and prepared the receipts of clarification from every division in question;

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peneilaian peraturan perundang-undangan;</li> <li>7. Identifikasi peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di lingkungan Perusahaan;</li> <li>8. Draft surat/nota dinas terkait hukum dan/atau divisi pemohon (perizinan, kerjasama, dll) identifikasi tujuan surat dan pembahasan bersama divisi terkait;</li> <li>9. Dokumentasi hukum rekapitulasi scan arsip fisik arsip online penyampaian dokumen hukum.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Assessed the compliance with regulations;</li> <li>7. Identified laws and regulations that affected the Company;</li> <li>8. Prepared the draft of official letter/notice related to law and/or the applicant's division (licensing, cooperation, etc.), identified the purpose of the letter and coordinated every division that is relevant with the situation;</li> <li>9. Stored legal document, digitally and physically.</li> </ol> |
|--|---|

## Audit Internal

### Internal Audit

Dalam rangka merealisasikan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam mengelola Perusahaan, terdapat organ korporasi yaitu Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi.

SPI membantu Direksi untuk menciptakan manajemen Perusahaan yang 3E – efektif, efisien, ekonomis – untuk melindungi Perusahaan dari praktik-praktik penyimpangan. Secara khusus, SPI menjalankan fungsi Audit Internal Perusahaan sebagai berikut:

1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direktur Utama dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan secara efektif;
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kerja kegiatan Perusahaan;
3. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan mendampingi pelaksanaan audit oleh auditor eksternal untuk memastikan proses audit berjalan lancar.

Perusahaan menunjuk seorang pejabat Kepala Audit Internal yang diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pada tahun 2022, Kepala Audit Internal MTI dijabat oleh Sdr. Priya Buddaya yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.06.02/27/12/1/SBP/SUM/PI.II-17 tanggal 27 Desember 2017 tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

To make the principles of accountability and responsibility a reality in the management of the Company, there is an Internal Audit Unit (SPI) that answers directly to the Board of Directors.

SPI supports the Board of Directors in creating a management style that complies with the 3E principles – effective, efficient, economical – in protecting the Company from irregular practices. The SPI also acts to operate under the Internal Audit function as follows:

1. Become an independent auditor to assist the President Director in protecting the Company's investments and assets;
2. Analyze and evaluate the effectiveness of corporate systems and procedures of all divisions and units;
3. Coordinate with the Audit Committee and assist the audit implementation by external auditors to ensure a seamless audit process.

The Company has an officer of Internal Audit Head which appointed by the President Director with the approval from the Board of Commissioners. In 2022, this positions was held by Mr. Priya Buddaya who was appointed based on the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. KP.06.02/27/12/1/SBP/SUM/PI.II-17 dated December 27, 2017 concerning Transfer of Duties/Positions for Employees within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

## Struktur dan Kedudukan

## Structure and Position



Kedudukan SPI dalam struktur organisasi Perseroan berada langsung di bawah Direktur Utama. Hingga akhir tahun 2022, jumlah pekerja yang tergabung dalam unit SPI sebanyak 5 (lima) orang. Anggota SPI juga diangkat oleh Direktur Utama. Personil Internal Audit Perseroan juga telah memiliki Sertifikasi Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Audit Internal.

SPI is positioned under the President Director. By the end of 2022, the employees of the SPI consisted of 5 (five) people. Members of SPI also appointed by the President Director. The personnel of the Company's Internal Audit are certified Internal Audit Professional issued by the Professional Internal Audit Organization.

### Personil Tim Audit Internal

### Internal Audit Personnel

Jabatan   Position	Jumlah Pekerja   Total Employee
Internal Audit Head	1
Auditor	1
Assistant Specialist Auditor	1
Junior Officer	1
Coordinator Officer	1
<b>Total</b>	<b>5</b>

### Sertifikasi Tim Audit Internal

### Internal Audit Certification

Sertifikasi   Certification	Instansi Penerbit   Issuer	Jumlah Pekerja   Total Employee
Qualified Internal Auditors (QIA) Tingkat Dasar Qualified Internal Auditors (QIA) Basic Level	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)	3
Qualified Internal Auditors (QIA) Tingkat Lanjutan Qualified Internal Auditors (QIA) Intermediate Level	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

## Profil Pejabat

## Profile of the Officer

### Priya Buddha Kepala Audit Internal Internal Audit Head

<b>Data Pribadi</b> Personal Data	Warga Negara Indonesia   Indonesian Citizen 49 tahun   years old
<b>Pendidikan</b> Education	Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Trisakti (1999) Bachelor's Degree in Civil Engineering from Trisakti University (1999)
<b>Riwayat Pelatihan</b> Training History	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Intern Tingkat Manajerial (2014)</li> <li>• Workshop Internal Audit (2012)</li> <li>• Pelatihan Audit Sampling (2011)</li> <li>• Diklat "Psikologi Komunikasi Audit" (2011)</li> <li>• Workshop Penulisan Laporan Audit yang Efektif (2011)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal Audit – Managerial Level (2014)</li> <li>• Workshop on Internal Audit (2012)</li> <li>• Training on Audit Sampling (2011)</li> <li>• Education and Training on "Audit Communication Psychology" (2011)</li> <li>• Workshop on Writing an Effective Audit Report (2011)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experience	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager Keuangan &amp; SDM Cabang Jakarta PT MTI (2020–2021)</li> <li>• Manager Customer Care &amp; Klaim (2019–2020)</li> <li>• Senior Vice President Hukum &amp; Pengadaan (2018–2019)</li> <li>• Vice President Hukum &amp; Klaim (2018–2019)</li> <li>• Executive Vice President Corporate Secretary (2017–2018)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager of Finance &amp; HR of PT MTI Jakarta Branch (2020–2021)</li> <li>• Manager of Customer Care &amp; Claims (2019–2020)</li> <li>• Senior Vice President of Legal &amp; Procurement (2018–2019)</li> <li>• Vice President of Legal &amp; Claims (2018–2019)</li> <li>• Executive Vice President of Corporate Secretary (2017–2018)</li> </ul>

### Pedoman Kerja

#### Internal Audit Charter

*Internal Audit Charter* merupakan pedoman kerja bagi Internal Audit, yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Internal Audit yang berlaku saat ini merupakan revisi ke-satu tertanggal 15 Maret 2021. Secara berkala, Internal Audit Charter dikaji ulang dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, *Internal Audit Charter* memuat:

1. Visi Misi, Tata Nilai, dan Strategi
2. Prinsip Dasar, Standar Perilaku dan Kaidah Acuan
3. Organisasi
4. Fungsi, Tanggung Jawab, Kewenangan dan Akuntabilitas
5. Aktivitas Internal Audit
6. Pelaporan dan Monitoring

#### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab memastikan terlaksananya audit internal berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
2. Merumuskan kebijakan, strategi pengawasan dan pengembangan serta menjamin pelaksanaan audit internal;
3. Mengelola penyusunan dan pelaksanaan program kerja audit tahunan sesuai program kerja perusahaan;

### Work Charter

#### Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter is a guideline for Internal Audit, which is determined by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The applicable Internal Audit Charter at the moment is the first revised edition dated March 15, 2021. Periodically, the Internal Audit Charter is reviewed and refined in accordance with the development of applicable regulations.

In general, the Internal Audit Charter contains:

1. Vision Mission, Values and Strategies
2. Basic Principles, Standards of Conduct and Rules of Reference
3. Organization
4. Functions, Responsibilities, Authorities and Accountability
5. Internal Audit Activities
6. Reporting and Monitoring

#### Duties and Responsibilities

1. Responsible for ensuring the implementation of the internal audit based on Good Corporate Governance;
2. Formulating policies, monitoring and development strategies and ensuring the implementation of internal audits;
3. Managing the preparation and implementation of the annual audit work program in accordance with the Company's work program;



4. Melaksanakan pengelolaan audit khusus, baik yang bersifat preventif dan represif atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan (investigatif/fraud/audit);
5. Memfasilitasi audit oleh pihak eksternal (auditor eksternal) termasuk Audit Dewan Komisaris dan pihak-pihak lainnya, serta mengelola arsip hasil temuan auditor eksternal;
6. Membuat rekomendasi untuk meminta keterangan saksi ahli untuk kebenaran/akurasi hasil audit;
7. Memonitor, membina dan memfasilitasi tindak lanjut temuan Auditor Internal dan Eksternal;
8. Menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
9. Menyusun rencana audit internal, mengevaluasi jadwal audit dan mengkaji kecukupan efektivitas pengelolaan risiko di bidang Keuangan, SDM, Umum dan Administrasi;
10. Menyiapkan rekomendasi dan saran perbaikan kepada Direktur Utama dan Auditee serta memberikan laporan pelaksanaan audit;
11. Mengevaluasi laporan tindak lanjut hasil audit dari auditee dan melakukan pembinaan untuk perbaikan terhadap hasil temuan pada bidang Keuangan, SDM, Umum dan Administrasi;
12. Memfasilitasi pelaksanaan audit oleh auditor eksternal;
13. Menyusun rencana audit internal dan mengevaluasi jadwal audit di bidang operasional/teknik;
14. Memimpin pelaksanaan audit dan mengkaji atas kepatuhan terhadap sasaran dan kebijakan serta mengkaji kecukupan efektivitas pengelolaan risiko pada bidang operasional (unit bisnis);
15. Mengevaluasi laporan tindak lanjut hasil audit dari auditee dan melakukan pembinaan untuk perbaikan terhadap hasil temuan pada bidang operasional;
16. Mengembangkan rencana audit tahunan yang tertuang di dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi risk-based audit dan memfokuskan aktivitas audit pada aktivitas-aktivitas PT MTI yang memiliki risiko tinggi. PKAT dan setiap perubahannya (jika ada) diajukan secara berkala kepada Direktur Utama untuk ditelaah dan disetujui, serta kepada Komite Audit untuk diminta masukannya;
17. Menerapkan PKAT yang telah disetujui, termasuk segala tugas yang diminta oleh manajemen dan Komite Audit;
18. Secara berkesinambungan mengembangkan staf audit yang profesional dengan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi profesional untuk memenuhi persyaratan kompetensi;
19. Mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi merging/konsolidasi yang signifikan serta jasa-jasa baru atau tengah berubah proses-proses operasi dan proses pengendalian bersama dengan pengembangan, penerapan dan atau ekspansinya;
20. Mengeluarkan laporan secara periodik kepada Direktur Utama mengenai rangkuman kegiatan audit;
4. Carrying out preventive and repressive special audit management for irregularities, fraud and waste (investigative/fraud/audit);
5. Facilitating audits by external parties (external auditors) including the Audit of the Board of Commissioners and other parties, as well as managing the archives of external auditor findings;
6. Making recommendations to request expert witness testimony for the truth/accuracy of the audit results;
7. Monitoring, fostering and facilitating follow ups on the findings of the Internal and External Auditors;
8. Submitting reports and recommendations to the President Director and the Board of Commissioners;
9. Preparing an internal audit plan, evaluating the audit schedule and reviewing the adequacy of the effectiveness of risk management in the fields of Finance, Human Resources, General Affairs and Administration;
10. Preparing recommendations and suggestions for improvement to the President Director and the Auditees and providing reports on the implementation of the audit;
11. Evaluating follow up reports on audit results from auditees and fostering for improvements to findings in the fields of Finance, Human Resources, General Affairs and Administration;
12. Facilitating the implementation of audits by external auditors;
13. Preparing an internal audit plan and evaluating the audit schedule in the operational/technical field;
14. Leading the implementation of audits and reviewing compliance with targets and policies as well as reviewing the adequacy of the effectiveness of risk management in the operational field (business units);
15. Evaluating follow up reports on audit results from the auditees and fostering for improvements to findings in the operational field;
16. Developing an annual audit plan contained in the Annual Audit Work Program (PKAT) which is flexible by using a risk-based audit methodology and focusing audit activities on PT MTI activities that have a high risk. PKAT and any amendments thereto (if any) are submitted periodically to the President Director for review and approval, as well as to the Audit Committee for inputs;
17. Implementing the approved PKAT, including all duties requested by management and the Audit Committee;
18. Continuously developing professional audit staff with sufficient knowledge, expertise and experience as well as professional certification to meet competency requirements;
19. Evaluating and assessing significant merging/consolidation functions as well as new or changing services of operating and control processes along with their development, implementation and/or expansion;
20. Submitting periodic reports to the President Director regarding the summary of audit activities;

21. Secara berkesinambungan memberi informasi kepada Komite Audit mengenai tren terbaru dan praktik sukses dalam internal audit dalam pertemuan reguler dengan Komite Audit;
22. Bersama-sama dengan Direktur Utama membahas target dan Key Performance Indicator Internal Audit;
23. Berperan aktif dalam pengawasan mekanisme pelaksanaan kode etik usaha serta pencegahan fraud;
24. Memperhatikan informasi untuk membantu penyidikan terhadap kegiatan fraud di dalam organisasi dan menginformasikan hasilnya kepada Direktur Utama;
25. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yang dibuat oleh Internal Audit.

#### **Wewenang**

1. Melakukan audit terhadap semua kegiatan unit kerja, fungsi dalam organisasi Perusahaan;
2. Melakukan audit atas badan usaha afiliasi dan pihak-pihak yang terkait dengan Perusahaan (seperti Anak Perusahaan/Cabang/Unit);
3. Internal audit memiliki akses tak terbatas ke seluruh fungsi, catatan, dokumen, aktiva, dan karyawan, baik Perusahaan dan Anak Perusahaan;
4. Mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, memilihobyek audit, menentukan lingkup kerja, dan menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit.

#### **Program Peningkatan Kapabilitas**

PT MTI mengakomodasi kebutuhan audit internal yang dinamis melalui penyediaan dan pemberian kesempatan bagi Internal Audit untuk mengikuti program pengembangan kompetensi secara sistematis dan berjenjang, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Program pengembangan kompetensi yang diberikan tentunya mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan audit PT MTI dan perkembangan industri.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Internal Audit selama tahun 2022 telah diuraikan pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal dalam Laporan Tahunan ini.

#### **Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas**

Sepanjang tahun 2022, SPI telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit rutin Logistik Regional dengan Fokus: Project Cargo, HLC (*Halal Logistic Center*) dan *Common Area*;
2. Pelaksanaan Penilaian Kecukupan Kebijakan Perusahaan untuk Mengelola Kegiatan Logistik dengan Spesifikasi Tertentu;
3. Melaksanakan Penilaian *Assurance* dan *Consulting* dalam rangka rencana pelaksanaan Konsolidasi Ekspor MTI;

21. Continuously providing information to the Audit Committee on the latest trends and successful practices in internal audit in regular meetings with the Audit Committee;
22. Together with the President Director discussing the targets and Key Performance Indicators of Internal Audit;
23. Taking an active role in monitoring the mechanism for implementing the code of business ethics and preventing fraud;
24. Paying attention to information to assist in the investigation of fraudulent activities within the organization and informing the results to the President Director;
25. The Board of Directors must pay attention to and immediately take the steps stated in each audit report made by the Internal Audit.

#### **Authorities**

1. Carrying out an audit of all work unit activities, functions within the Company's organization;
2. Carrying out audits of affiliated business entities and parties related to the Company (such as Subsidiaries/Branches/Units);
3. Internal audit has unrestricted access to all functions, records, documents, assets, and employees, both the Company and its Subsidiaries;
4. Allocating resources, preparing a schedule, selecting audit objects, determining the scope of work, and applying the necessary techniques to achieve audit objectives.

#### **Capability Development**

PT MTI accommodates the dynamic needs of internal audit by providing opportunities for Internal Audit to participate in systematic and tiered competency development programs, both organized internally and externally. The competency development program provided certainly considers and adapts to the development of PT MTI's audit needs and industrial developments.

Information regarding the competency development program participated by Internal Audit during 2022 has been described in the Education and/or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit section in this Annual Report.

#### **Brief Report of the Work**

Throughout 2022, the SPI has carried out its duties as follows:

1. Routine Regional Logistics audits on Project Cargo, HLC (Halal Logistic Center) and Common Area;
2. Assessment of the Corporate Policies of Logistics Activities with Certain Specifications;
3. Conducted Assurance and Consulting Assessments of the Export Consolidation Plan;

4. Monitoring Tindak Lanjut Audit dengan Tujuan Tertentu pada Logistik Regional Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris;
5. Monitoring Tindak Lanjut Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal atas Ketersediaan dan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi di Lingkungan MTI oleh Divisi Sistem Informasi & Teknik;
6. Monitoring Tindak Lanjut Audit Cabang dan Regional;
7. Monitoring Tindak Lanjut Atas Temuan SPI IPC;
8. Monitoring Tindak Lanjut Atas Temuan KAP;
9. Laporan Gratifikasi;
10. Laporan KPI.

## Akuntan Publik

### Public Accountant

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia atas dasar arahan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk Perseroan berperan dalam melakukan audit secara eksternal dan memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan Perusahaan. Penunjukan KAP sendiri diputuskan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit.

#### Penugasan KAP Tahun Buku 2022

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan PT Multi Terminal Indonesia tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, pemegang saham telah menyetujui penunjukan KAP Purwanto, Sungjoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Multi Terminal Indonesia untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penunjukan KAP juga telah disahkan melalui Surat Penunjukan No. PL.516/7/11/1/MTI-2022.

The Management is responsible for presenting the Company's financial statements in accordance with the prevailing Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia based on the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The Public Accounting Firm (KAP) appointed by the Company conducts an external audit and provides opinions on the fairness of the Company's Financial Statements. The appointment of the KAP itself is decided at the GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee.

#### Assignment of the KAP for the Financial Year of 2022

Based on the Minutes of the Annual GMS of PT Multi Terminal Indonesia regarding Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Financial Year of 2022, the shareholders have approved the appointment of KAP Purwanto, Sungjoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited) as the external auditor to audit the Consolidated Financial Statements of PT Multi Terminal Indonesia for the financial year ended on December 31, 2022. The appointment of the KAP has also been ratified through the Appointment Letter No. PL.516/7/11/1/MTI-2022.

<b>Kantor Akuntan Publik</b> Public Accounting Firm	Purwanto, Sungjoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited)
<b>Akuntan   Accountant</b>	Moch. Dadang Syachruna
<b>Jasa   Services</b>	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Multi Terminal Indonesia untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang mencakup audit atas review Konsolidasian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Multi Terminal Indonesia for the fiscal year ended on December 31, 2022 which includes an audit of the review of the Consolidated Financial Statements according to Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia.
<b>Jasa Lainnya   Other Services</b>	Tidak ada   None
<b>Biaya   Cost</b>	Rp772.572.210

### Daftar KAP Lima Tahun Terakhir

Berikut ini merupakan nama KAP dan Akuntan Publik (AP) yang mengaudit Laporan Keuangan PT Multi Terminal Indonesia beserta Opini Audit dalam 5 (lima) tahun terakhir:

### List of KAP in the Last Five Year

The following are the names of the KAP and the Public Accountants (AP) that audited the Financial Statements of PT Multi Terminal Indonesia along with Audit Opinions in the last 5 (five) years:

Tahun Buku Financial Year	KAP	Akuntan Accountant	Opini Opinion
2022	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Muhammad Kurniawan Izin No. AP.0240	Wajar, dalam semua hal material Fair, in all material respects
2021	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Muhammad Kurniawan Izin No. AP.0240	Wajar, dalam semua hal material Fair, in all material respects
2020	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Moch. Dadang Syachruna Izin No. AP.0697	Wajar, dalam semua hal material Fair, in all material respects
2019	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Moch. Dadang Syachruna Izin No. AP.0697	Wajar, dalam semua hal material Fair, in all material respects
2018	Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/KM.1/2015	Moch. Dadang Syachruna Izin No. AP.0697	Wajar, dalam semua hal material Fair, in all material respects

## Manajemen Risiko

### Risk Management

Operasional usaha tidak terlepas dari berbagai risiko yang berada di bawah kendali maupun di luar kendali Perusahaan sehingga keberadaan sistem manajemen risiko menjadi penting untuk mengelola risiko secara efektif. Pelaksanaan manajemen risiko dalam lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No. HK.48/3/7/1/MTI-2017 tanggal 3 Juli 2017 yang disertai dengan pedoman dan prosedur pelaksanaannya.

Berdasarkan SK tersebut, Direksi dan seluruh pekerja didorong untuk memiliki komitmen kuat dalam merealisasikan manajemen risiko. Upaya dalam merealisasikan komitmen ini telah ditetapkan dalam sebuah Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang memiliki 6 (enam) substansi kuat untuk menciptakan budaya sadar risiko di seluruh lingkungan kerja Perusahaan.

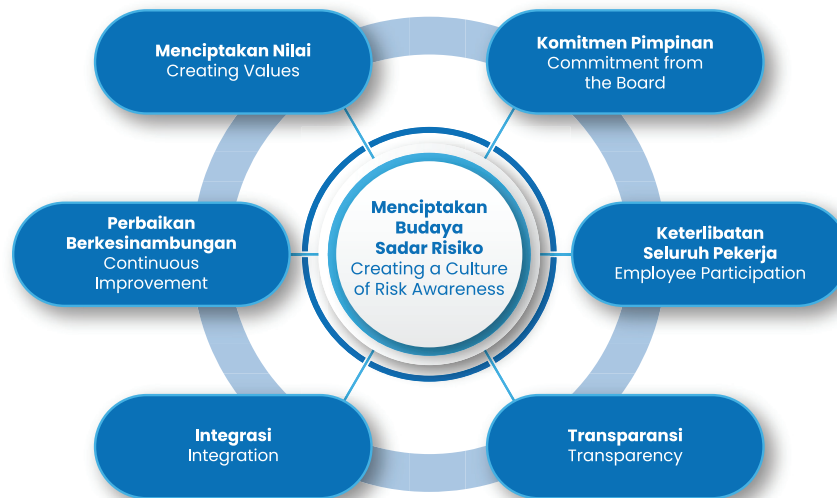
Business operations cannot be separated from the risks that are under control or beyond the control of the Company, and therefore a risk management system is important to exist to manage all risks effectively. The risk management implementation within the Company has been regulated in the Decree of the Board of Directors No. HK.48/3/7/1/MTI-2017 dated July 3, 2017 which also regulated about the guidelines and procedures for its implementation.

Based on this decree, the Board of Directors and all employees are encouraged to have a strong commitment towards risk management implementation. This commitment is being uphold through a Risk Management Framework with 6 (six) strong substances to create a risk awareness culture within the Company's environment.



## Kerangka Kerja

## Management Framework



### Tujuan

1. Mewujudkan GCG yang lebih baik;
2. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi oleh Perusahaan, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkannya;
3. Melindungi Perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan mengamankan aset Perusahaan yang meliputi sumber daya manusia, aktiva, dan reputasi;
4. Mengidentifikasi, mengukur, merespons, mengendalikan, mengkomunikasikan dan memantau risiko signifikan yang dihadapi Perusahaan secara sistematis, terstruktur dan komprehensif di seluruh aktivitas Perusahaan;
5. Menciptakan pelaporan risiko seluruh Perusahaan yang komprehensif mencakup risiko strategis, risiko finansial, risiko operasional, dan risiko eksternal atau kategori lain yang dikembangkan Perusahaan;
6. Menciptakan kesadaran dan kepedulian Insan Perusahaan terhadap pentingnya manajemen risiko bagi Perusahaan dan budaya risiko;
7. Meningkatkan kredibilitas di mata para stakeholders eksternal dan secara potensial mengurangi biaya premi risiko.

### Strategi Penerapan

1. Membentuk unit kerja yang bertanggung jawab secara profesional untuk mengkoordinasikan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi untuk seluruh unit kerja;
2. Mengintegrasikan wewenang dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam penerapan manajemen risiko ke dalam job description Perusahaan;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko;
4. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan;
5. Menjadikan manajemen risiko sebagai budaya perusahaan yang melekat pada setiap Insan Perusahaan;

### Objectives

1. To realize better GCG;
2. To establish and manage risks faced by the Company, as well as minimize the resulting impacts;
3. To protect the Company from significant risks that can hinder the achievement of objectives and secure the Company's assets that include human resources, assets, and reputation;
4. To identify, measure, respond, control, communicate, and monitor significant risks faced by the Company in a systematic, structured, and comprehensive manner in all Company's activities;
5. To create comprehensive Company wide risk reporting covering strategic risk, financial risk, operational risk, and external risk or other categories developed by the Company;
6. To create awareness and concern of the Company's personnel on the importance of risk management for the Company and risk culture;
7. To enhance credibility in the eyes of external stakeholders and potentially reduce the risk premium costs.

### Implementation Strategy

1. Forming a work unit that is professionally responsible for coordinating the implementation of risk management in an integrated manner for all work units;
2. Integrating the authority and responsibility of each party involved in risk management implementation into the Company's job description;
3. Improving the competence of human resources in the field of risk management;
4. Integrating risk management into the Company's business processes;
5. Making risk management as a corporate culture that is inherent in every Company's Personnel;

- 6. Membangun kesadaran dan kepedulian risiko dari seluruh Insan Perusahaan sebagai fondasi penerapan manajemen risiko;
- 7. Menumbuhkan pemahaman konsep manajemen risiko dan pentingnya pengelolaan risiko dalam meningkatkan kinerja Perusahaan.

- 6. Building risk awareness in all Company's Personnel as the foundation for implementing risk management;
- 7. Nurturing an understanding of risk management concept and the importance of risk management in improving the Company's performance.

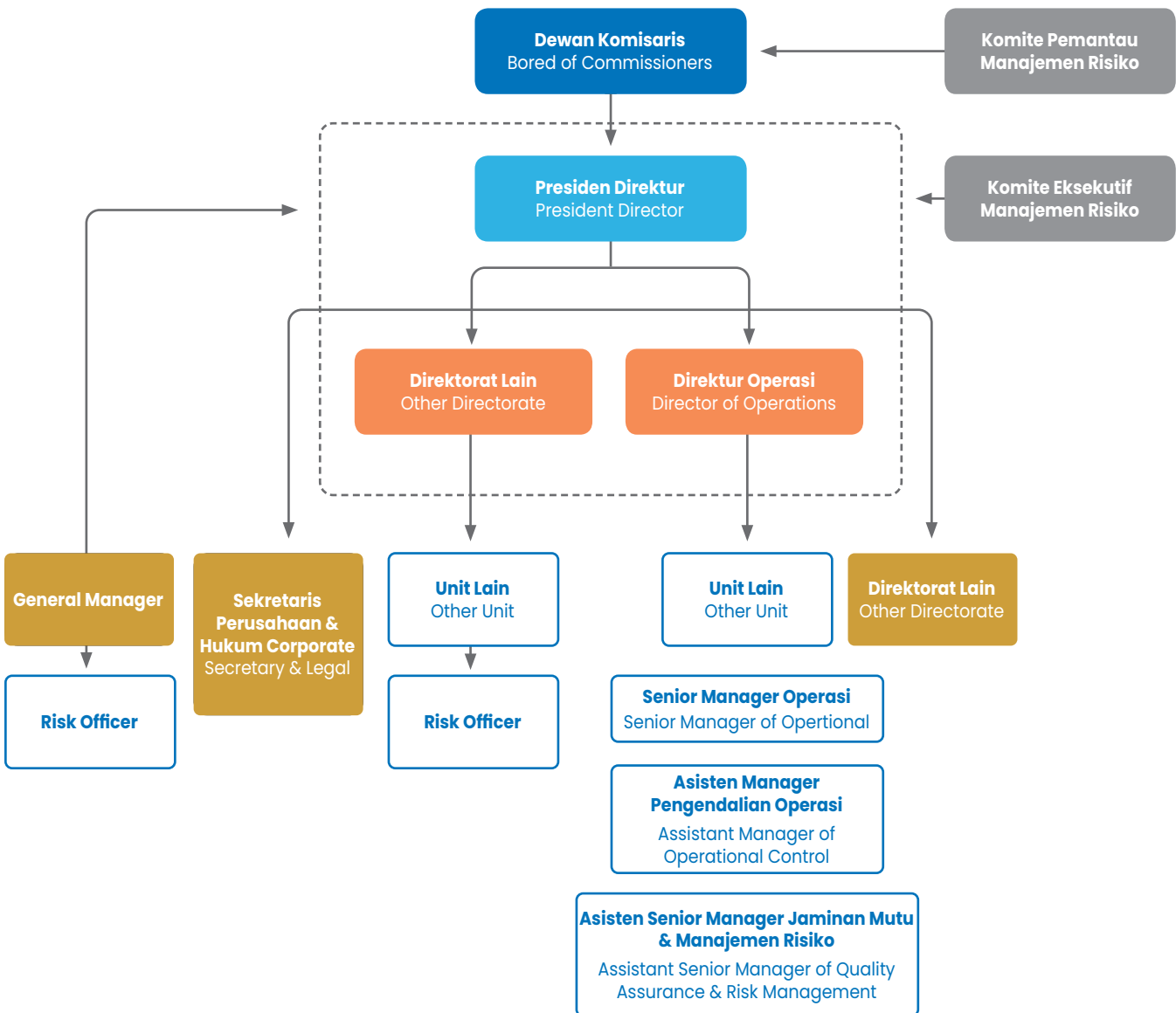
**Struktur Tata Kelola**

Bagi MTI, penerapan manajemen risiko menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan dari penerapan GCG. Hal ini tercermin dari struktur tata kelola manajemen risiko yang memuat 5 (lima) organ Perusahaan yang berperan dalam menjalankan sistem manajemen risiko yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Pengawas Intern, Unit Kerja Pemilik Risiko (Unit Penanggung Risiko).

**Governance Structure**

For MTI, the implementation of risk cannot be separated from the implementation of GCG. This is reflected in the risk management governance structure which contains 5 (five) Company organs that has its own role in running the risk management system including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Risk Management Work Unit, Internal Audit Unit, Risk Owner Unit (Risk Bearer Unit).

**Struktur Tata Kelola Risiko PT Multi Terminal Indonesia**  
PT Multi Terminal Indonesia's Risk Management Structure



### Dewan Komisaris

Berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan Direksi dan berwenang dalam memberikan saran perbaikan.

### Direksi

Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko Perusahaan dengan wewenang untuk menetapkan ketentuan baru dalam pedoman manajemen risiko dan menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance level*. Direksi juga memiliki sejumlah tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan manajemen risiko menjadi budaya Perusahaan;
2. Memastikan telah dilaksanakannya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
3. Memastikan bahwa organisasi yang dibentuk untuk mengelola manajemen risiko telah berfungsi secara independen;
4. Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko Perusahaan;
5. Melaksanakan risk assessment level korporat;
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerapan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris dan RUPS;
7. Meninjau penerapan manajemen risiko secara periodik.

### Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

SKMR berperan sebagai koordinator dari penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan perubahannya kepada Direksi;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai Perusahaan;
3. Bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan self-assessment baik di level korporat maupun di level unit kerja;
4. Menerima Profil Risiko Unit Kerja dan melakukan kompilasi guna menyusun Profil Risiko Perusahaan;
5. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan RUPS melalui Direksi.

### Audit Internal

Melaksanakan fungsi *assurance* dan *consulting* secara independen untuk meningkatkan kinerja operasi Perusahaan melalui implementasi manajemen risiko sesuai tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Menggunakan profil risiko dan *risk assessment* unit kerja dalam menyusun rencana audit berbasis risiko (*risk-based audit planning*) dalam sebuah Rencana Pengawasan Tahunan (RPT);
2. Menyusun rencana kegiatan evaluasi (*assurance*) manajemen risiko sebagai bagian dari rencana kerja audit tahunan;

### Board of Commissioners

Has a role is to supervise the implementation of risk management by the Board of Directors;

### Board of Directors

Responsible for the implementation of the Company's risk management and is authorize to issue a new policy regarding risk management guideline, and establish risk appetite and risk tolerance levels. The Board of Directors also has other responsibilities as follows:

1. Ensure that risk management becomes the corporate culture;
2. Ensure the implementation of competency improvement of human resources related to risk management;
3. Ensure that the established organization to conduct risk management has functioned independently;
4. Be responsible for the implementation of the Company's risk management;
5. Implement risk assessment at corporate level;
6. Submit accountability report on risk management implementation to the Board of Commissioners and the GMS;
7. Review the implementation of risk management periodically.

### Risk Management Work Unit (SKMR)

SKMR becomes the coordinator of the risk management within the Company with the following responsibilities:

1. Preparing and proposing the Guidelines of Risk Management Implementation and the amendment to the Board of Directors;
2. Disseminating the Guidelines of Risk Management Implementation to all employees of the Company;
3. Acting as a facilitator in self-assessment activities, both at corporate level and work unit level;
4. Receiving Work Units' Risk Profile and conducting compilation to formulate the Company's risk profile;
5. Preparing the Company's Risk Management Implementation Report and submitting it to the Board of Commissioners and GMS through the Board of Directors.

### Internal Audit

Performs an independent assurance and consulting function to improve the Company's operation through the risk management, implementation according to its following responsibilities:

1. Using the risk profile and risk assessment of units in preparing the risk based audit planning in an Annual Audit Plan (RPT);
2. Preparing a plan for risk management evaluation (*assurance*) of risk management as part of the annual audit work plan;

3. Mengevaluasi manajemen risiko berdasarkan standar profesi audit internal untuk memastikan tingkat kecukupan rancangan dan efektivitas penerapan manajemen risiko;
4. Melakukan audit internal berbasis risiko (*risk-based audit*) sesuai rencana kerja audit tahunan untuk aktivitas audit rutin dan audit khusus berdasarkan instruksi Direktur Utama atau kondisi spesifik dari hasil evaluasi manajemen risiko;
5. Melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Utama;
6. Melakukan klarifikasi dengan Unit Penanggung Risiko (UPR) jika UPR telah mengambil risiko melebihi risk tolerance.

### Unit Penanggung Risiko (UPR)

UPR merupakan unit kerja pemilik risiko yang terdiri dari *Corporate Secretary*, Audit Internal, *Senior Manager Operation Control*, Senior Manager Pengembangan Bisnis & Legal, Senior Manager Sistem Informasi & Teknik, Senior Manager Keuangan, Senior Manager SDM & *Procurement*, General Manager (cabang), dan seluruh unit yang memiliki aktivitas operasi. Wewenang dan tanggung jawab para UPR berkaitan dengan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan *self-assessment* atas risiko di unit kerja masing-masing;
2. Menyusun hasil risk assessment dalam bentuk Profil Risiko Unit Kerja untuk dilaporkan kepada SKMR;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian risiko pada saat proses;
4. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis normal, baik yang telah teridentifikasi sebelumnya pada saat *self-assessment*, maupun yang belum teridentifikasi, kepada SKMR;
5. Memelihara catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan *database* untuk memprediksi risiko mendatang;
6. Memberikan masukan kepada SKMR dalam rapat manajemen.

### Upaya Pengembangan Sistem Melalui Pelatihan

Perusahaan mengikutsertakan sejumlah pekerja dalam UPR untuk mengikuti pelatihan dalam rangka mengembangkan sistem manajemen risiko. Unit kerja yang mengikuti pelatihan adalah Sekretaris Perusahaan & Hukum mengenai GRC (*Governance, Risk Management, Compliance*) dan Audit Internal mengenai *Risk-Based Annual Audit Plan*. Informasi lengkap mengenai pelatihan tersebut telah diuraikan pada bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan & Hukum, dan Unit Audit Internal dalam Laporan Tahunan ini.

3. Evaluating the risk management based on the internal audit professional standards to ensure the design and effectiveness of risk management implementation are adequate;
4. Performing risk based internal audit according to the annual audit work plan for routine and special audits, based on the President Director's instructions and/or specific conditions determined from the results of risk management evaluation;
5. Reporting the assessment results to the President Director;
6. Clarify with the Risk Bearer (UPR) if the UPR has taken risks beyond the risk tolerance.

### Risk Bearer (UPR)

UPR is the unit that bears the risk and it consists of the Corporate Secretary, Internal Audit, Senior Manager of Operation Control, Senior Manager of Business Development & Legal, Senior Manager of Information & Engineering Systems, Senior Manager of Finance, Senior Manager of HR & Procurement, General Manager (branches), and all units that have operational activities. The authorities and responsibilities of the UPR in terms of risk management are as follows:

1. Carrying out self-assessment on the risks of each unit;
2. Preparing the risk assessment results in the Risk Profile for the SKMR;
3. Monitoring and controlling the risks during the process;
4. Reporting any events occur during the course of normal business implementation, including those that have been identified, those during the self-assessment time, and those that have not been identified, to the SKMR;
5. Maintaining historical records of past performance and risk events as an early warning indicator and a database for predicting risk events in the future;
6. Giving inputs to the SKMR during the management meeting.

### Improvement of System through Training

A number of employees of UPR has followed training programs to improve their risk management system. The units that took part in the training were Corporate & Legal Secretary regarding GRC (*Governance, Risk Management, Compliance*) and Internal Audit regarding the *Risk-Based Annual Audit Plan*. Complete information regarding the competency development program participated by Internal Audit during 2022 has been described in the Education and/ or Training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit section in this Annual Report.



## Penanganan Risiko Tahun 2022

Berikut disampaikan upaya penanganan risiko pada tahun 2022 yang pada akhirnya menghasilkan profil risiko sebagai berikut:

## Risk Mitigation in 2022

The following is the mitigation that the Company has done in managing risks in 2022 which ultimately resulted in the following risk profile:

### Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi

### Types of Risks and Mitigation

Portofolio Bisnis & Aksi Korporasi   Business Portfolio & Corporate Action	
Dampak Impact	Tidak tercapainya target pertumbuhan dan pengembangan bisnis logistik dan <i>hinterland development</i> . Failure to achieve the growth and development target of the logistics business and hinterland business.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja sama dengan Bank BNI terkait pelayanan ISUTW dan Perusahaan telah menangani kegiatan stevedoring, haulage, warehouse kargo pupuk milik PT Permata Agro Persada;</li> <li>• Kerja sama konsolidasi ekspor dengan hasil pengurusan ijin konsolidator barang ekspor dari bea cukai, finalisasi draft kontrak kerja sama dengan KN, pelaksanaan layanan perdana konsolidasi ekspor milik Kuehne+ Nagel, kontrak kerja sama pelayanan petikemas LCL impor &amp; ekspor dengan pelanggan baru PT Nadira Permata Mandiri;</li> <li>• Perusahaan memenangkan tender angkutan darat Pupuk Indonesia dan menangani kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan militer Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Lampung.</li> <li>• Collaborated with Bank BNI in terms of the ISUTW services and the Company has handled the stevedoring, haulage, and warehouse cargo of fertilizer of PT Permata Agro Persada;</li> <li>• Consolidated the export cooperation by obtaining a consolidator permit for export from customs, finalizing the cooperation draft with KN, conducted the consolidated export service for Kuehne+ Nagel, secured the import &amp; export LCL container service contract with new customer – PT Nadira Permata Mandiri;</li> <li>• Obtained the land transport tender for Pupuk Indonesia and handled the mobilization and demobilization of military equipment for the United States Armed Forces in Lampung.</li> </ul>
Strategi Keuangan   Financial Strategy	
Dampak Impact	Potensi pembebanan biaya konsensi Lini II pada MTI yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan. Potentially having to pay the Line II concession fees that may ended up reducing MTI's income.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan saat ini posisinya masih menunggu arahan dari Sub-Holding dan Holding. Has been coordinating with the Port Authority and PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and currently is still awaiting direction from the Sub-Holding and Holding.
K3L – COVID-19   HSE – COVID-19	
Dampak Impact	Penyebaran COVID-19 di antara para pekerja yang dapat menyebabkan kinerja penjualan terhambat, pelayanan tidak maksimal, dan kinerja produksi terganggu. COVID-19 virus spreads among employees and may disrupt the performance of sales, service, and production.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberlakukan protokol kesehatan secara ketat mulai dari pembersihan ruangan (disinfektan) secara rutin, pemeriksaan suhu, pemberian vitamin;</li> <li>• Mengoptimalkan sistem kerja <i>remote</i> tanpa tatap muka melalui sistem WFH &amp; WFO secara bergantian, memaksimalkan rapat secara daring;</li> <li>• Pembuatan dinding pemisah pada loket pelayanan;</li> <li>• Pembuatan spanduk tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan.</li> <li>• Enforcing strict health protocols by cleaning rooms routinely (using disinfectant), checking temperatures of workers, suppling workers with vitamins;</li> <li>• Optimizing remote work systems without having the need to conduct face to face meeting by alternating the WFH &amp; WFO systems, maximizing online meetings;</li> <li>• Constructing separation (non-permanent walls) at service counters;</li> <li>• Making banners about the importance of maintaining health protocols.</li> </ul>

**K3L – Pencemaran Lingkungan dari Kegiatan Operasional | HSE – Environmental Pollution from the Operation**

Dampak Impact	Kegiatan bongkar muat memiliki dampak negatif seperti polusi udara dan sampah yang dapat menimbulkan keluhan dari masyarakat. The stevedoring activities have negative impacts such as air pollution and garbage which can cause complaints from the public.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan prosedur operasional terkait lingkungan hidup, pengadaan safety equipment, pelatihan dan sertifikasi bertahap pekerja terkait penanganan limbah dan barang berbahaya;</li> <li>• Peninjauan kualitas lingkungan di kantor pusat, seperti contohnya kualitas udara di kantor pusat yang telah diukur memenuhi persyaratan (skor 825);</li> <li>• Penindakan tegas (sanksi dan teguran) atau safety alert terhadap operasi bongkar muat yang berbahaya di lapangan.</li> <li>• Prepared operational procedures related to the environment, procured safety equipment, prepared the training and certification for employees on how to handle hazardous waste and goods;</li> <li>• Reviewed the environmental quality at the head office, such as the air quality with a score of 825 (according to standard);</li> <li>• Performed safety alerts (sanctions and warnings) on dangerous operations of stevedoring on field.</li> </ul>

**K3L – Kecelakaan kerja | HSE – Occupational Hazard**

Dampak Impact	Aktivitas operasional Perusahaan yang rawan dengan risiko inheren yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja – cedera ringan, berat, hingga kematian. The Company's operation has its inherent risks with high chance of causing accidents – minor and serious injuries and even fatality.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan prosedur operasional terkait kecelakaan kerja, pengadaan safety equipment (pembatas lapangan dan kereta), pelatihan dan sertifikasi bertahap pekerja terkait keselamatan kerja;</li> <li>• Melakukan inspeksi alat bongkar muat;</li> <li>• Penindakan tegas (sanksi dan teguran) atau safety alert terhadap operasi bongkar muat yang berbahaya di lapangan.</li> <li>• Prepared operational procedures related to the occupational hazard, procured safety equipment (border between yard and train), prepared the training and certification for employees regarding occupational hazard;</li> <li>• Inspection on stevedoring equipment and facilities;</li> <li>• Performed safety alerts (sanctions and warnings) on dangerous operations of stevedoring on field.</li> </ul>

**Sumber Daya Manusia | Human Resources**

Dampak Impact	Turunnya kinerja pekerja yang menyebabkan tidak tercapainya target usaha. Declining performance of employees that may disrupt the achievement of business targets.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikutsertakan para pekerja dalam sejumlah pelatihan, termasuk pelatihan PPN, internalisasi AKHLAK, seminar kepabeanan, webinar kiat mengatasi konflik <i>e-office</i>, dan peningkatan kompetensi SMK3;</li> <li>• Pengawasan terhadap hasil kerja individu setiap bulan;</li> <li>• Penyesuaian upah minimum provinsi untuk pekerja organik.</li> <li>• Prepared several training programs to improve employees competencies on VAT, internalization of AKHLAK, customs, e-office conflict resolution, and SMK3;</li> <li>• Monitored employee performance monthly;</li> <li>• Adjusted the provincial minimum wage for organic employees.</li> </ul>

**Proyek | Project**

Dampak Impact	Rendahnya penyerapan investasi sehingga tidak tercapainya target pengembangan usaha. Low investment realization that may cause the Company to fail in achieving its improvement targets.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih dalam proses merealisasikan target dari sejumlah obyek investasi termasuk pengembangan Priok Integrated Logistics Park (PILP), pengembangan infrastruktur TI, pengadaan <i>forklift</i>;</li> <li>• Terdapat penundaan dari beberapa target investasi yang telah direncanakan, termasuk salah satunya pengadaan alat bongkar muat;</li> <li>• Investasi yang sudah terealisasi 100% adalah normalisasi <i>fire protection hydrant</i>.</li> <li>• Several investment targets are still under process of being realized including the development of Priok Integrated Logistics Park (PILP), IT infrastructure, forklift;</li> <li>• Delays in realizing several investment targets, including the procurement of stevedoring equipment;</li> <li>• The investment that has been realized 100% is the normalization of the fire protection hydrant.</li> </ul>

**Operasional Keuangan | Finance Operation**

Dampak Impact	Hilangnya pendapatan MTI dari berakhirnya kontrak pengoperasian Dermaga 300 dan Lapangan 214 Tanjung Priok pada bulan April 2022. Losing a revenue stream when the Company's operational contract of the Tanjung Priok Pier 300 and Field 214 expired in April 2022.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah mendapatkan persetujuan perpanjangan kontrak hingga 2 (dua) tahun ke depan dari PSL;</li> <li>• Telah dilakukan perpanjangan kerja sama untuk setahun ke depan dengan PT MAL.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extended the contract for 2 (two) years with the approval from PSL;</li> <li>• Extended the contract with PT MAL for another year.</li> </ul>

**Fraud, Penyuapan, Kepatuhan | Fraud, Bribery, Compliance**

Dampak Impact	Potensi fraud dan pungutan liar (pungli) pada pelayanan logistik akibat lamanya antrian di loket, janji imbalan balas jasa, ataupun ketiadaan sistem manajemen anti penyuapan yang dapat menurunkan citra Perusahaan dan meningkatkan biaya logistik. The potential for fraud and extortion to exist on logistics services due to long queues at counters, promises of receiving benefits, or the absence of an anti-bribery management system that may tarnished the Company's image and increase logistics costs.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan para pekerja dan mitra memahami semangat <i>anti fraud</i> dan pungli yang digalakkan MTI melalui sosialisasi SMAP dan larangan fraud dan pungli, penandatanganan Pakta Integritas;</li> <li>• Budaya Anti Penyuapan yang dimiliki Perusahaan telah mengimplementasi ISO 37001:2016;</li> <li>• Melakukan uji kelayakan pekerja yang bertanggung jawab terhadap pelayanan logistik;</li> <li>• Pengawasan dan evaluasi laporan gratifikasi;</li> <li>• Pelaksanaan audit rutin dalam rangka pengendalian internal.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure that employees and partners understand the spirit of anti-fraud and extortion prohibition using SMAP and signed the Integrity Pact;</li> <li>• The Company's Anti-Bribery Culture has followed ISO 37001:2016;</li> <li>• Assess the diligence of field employees handling logistics services;</li> <li>• Monitoring and evaluating gratification reports;</li> <li>• Routine audits within the framework of internal control.</li> </ul>

**Transformasi & Pengembangan | Transformation & Development**

Dampak Impact	Tidak terlaksananya integrasi layanan logistik dalam PILP yang menyebabkan rencana pengembangan bisnis di Tanjung Priok tidak tercapai. Failure to integrate the logistics services within the PILP area may hinder the business development plan in Tanjung Priok.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkoordinasi dengan PSL mengenai optimalisasi aset idle dan usaha penambahan aset lini II yang kemudian disesuaikan menjadi layanan baru konsolidasi ekspor di CDC Banda;</li> <li>• Menunggu tindak lanjut dari MOU dengan PT Gemilang Logistik Terminal mengenai pemanfaatan lapangan penumpukan;</li> <li>• Pemetaan aset Pelindo Group yang dapat dikelola MTI.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinated with PSL in optimizing idle assets and investing on additional assets for line II which then adjusted to become a new export consolidation service at CDC Banda;</li> <li>• Waiting for further action on the MOU with PT Gemilang Logistik Terminal regarding the utilization of the stacking yard;</li> <li>• Mapping Pelindo Group assets manageable by MTI.</li> </ul>

**Akuntansi | Accounting**

Dampak Impact	Rendahnya validitas dan kredibilitas laporan keuangan akibat adanya kesalahan dalam faktor manusia ataupun kesalahan sistem yang menyebabkan data tidak valid. Lack of validity and credibility of financial statements due to human errors or system errors that cause the data to be invalid.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pelatihan <i>in-house</i> mengenai perpajakan untuk para pekerja di bidang keuangan dan non-keuangan;</li> <li>• Pelaksanaan <i>closing</i> laporan keuangan sesuai jadwal;</li> <li>• Verifikasi dokumen secara ketat;</li> <li>• Persiapan dalam rangka sentralisasi.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducted in-house training on taxation for workers in financial and non-financial fields of jobs;</li> <li>• Closed the financial statements according to schedule;</li> <li>• Stringent document verification;</li> <li>• Prepared for centralization.</li> </ul>

### Teknologi dan Sistem Informasi | Technology and Information System

Dampak Impact	Serangan siber dalam sistem informasi MTI yang dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan operasional, dan mencemari reputasi Perusahaan. Cyber attacks on MTI's information systems that may cause financial loss, operational disruptions, and spoiled the Company's reputation.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Mengawasi <i>Data Center</i> , DRC, firewall dan perangkat jaringan lainnya, serta <i>updating</i> sistem ( <i>patch</i> ). Monitoring the Data Center, DRC, firewall and other network devices, and updating the system ( <i>patches</i> ).

### Sosial Politik & Regulasi | Social Politics & Regulation

Dampak Impact	Perubahan regulasi yang mempengaruhi bisnis Perusahaan dapat menyebabkan Perusahaan tertinggal dalam mengantisipasi perkembangan bisnis. Changes in the regulation of the Company's field of business may hinder the Company's progress in anticipating current business trend.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	Selalu update dengan perkembangan situasi terkini dan mempererat komunikasi dengan regulator terkait. Keeping abreast with the latest situation and strengthen communication with relevant regulators.

### Pengelolaan Stakeholder | Stakeholder Management

Dampak Impact	Tuntutan masyarakat sekitar pelabuhan yang menuntut adanya peningkatan kesejahteraan dan hal ini dapat berdampak pada kelancaran kegiatan operasional karena adanya konflik dengan masyarakat. The community around the port demanded that the Company contributed to their welfare and this may affected the operation since there might be a conflict with the local community.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan bidang sosial kemasyarakatan;</li> <li>• Perusahaan juga telah menjalin komunikasi dan membina hubungan dengan masyarakat sekitar Kalibaru melalui kegiatan TJSL secara berkesinambungan.</li> <li>• Conducted Corporate Social Responsibility (CSR) activities in the health, environment, education, and social sectors;</li> <li>• The Company has also established a communication chanel and fostered relationships with the community around Kalibaru and committed to conduct the TJSL activities continuously.</li> </ul>

### Pajak | Tax

Dampak Impact	Kurang bayar dan denda pajak dapat meningkatkan beban dan mengakibatkan Perusahaan terlibat dalam permasalahan hukum. Underpayment and tax fines will increase expenses and the Company may even involve in legal problems.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar pajak tepat waktu;</li> <li>• Merekonsiliasi jurnal audit dan SPT yang telah dibayarkan;</li> <li>• Menggunakan sistem perpajakan berbasis web;</li> <li>• Berkoordinasi dengan petugas pajak;</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan perihal perpajakan.</li> <li>• Paid taxes on time;</li> <li>• Reconciled the audit journals and paid SPT;</li> <li>• Utilized a web-based tax system;</li> <li>• Coordinated with tax officers;</li> <li>• Organized training programs on taxation.</li> </ul>

### Tata Kelola | Corporate Governance

Dampak Impact	Tidak optimalnya pelaksanaan GRC dalam implementasi GCG sehingga berpotensi menyebabkan pelanggaran dan ketidakpatuhan. GRC implementation is not optimal within the GCG implementation and therefore has the potential to cause violations and non-compliance.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan telah memiliki pedoman GCG internal yang sesuai dengan praktik terbaik;</li> <li>• Secara konsisten melaksanakan <i>self-assessment</i> GCG;</li> <li>• Mengikuti ajang TOP GRC Award;</li> <li>• Menindaklanjuti laporan <i>whistleblowing</i> (WBS);</li> <li>• Melaksanakan pelatihan GRC;</li> <li>• Penandatanganan Pakta Integritas dan Kode Etik.</li> <li>• The Company has internal GCG guidelines in compliance with the best practices;</li> <li>• Consistently conducted a GCG self-assessment;</li> <li>• Followed the TOP GRC Award event;</li> <li>• Responded to the incoming whistleblowing reports (WBS);</li> <li>• Followed the GRC training;</li> <li>• Signing of the Integrity Pact and Code of Conduct.</li> </ul>



### Teknologi dan Sistem Informasi | Technology and Information System

Dampak Impact	Belum terimplementasinya sistem portal logistik digital yang dapat mempengaruhi pelayanan kepada pelanggan. The digital logistics portal system has not yet been implemented which may affect the quality of service to customers.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus mengembangkan sistem portal digital;</li> <li>• Terus berkomunikasi dengan "Klikargo" untuk kerja sama operasional dan integrasi sistem;</li> <li>• Pengembangan hasil <i>User Acceptance Test</i> (UAT).</li> <li>• Continue developing the digital portal system;</li> <li>• Continue communicating with "Klikargo" for operational cooperation and system integration;</li> <li>• Developing the results of the User Acceptance Test (UAT).</li> </ul>

### Strategi Keuangan | Financial Strategy

Dampak Impact	Piutang macet membuat arus kas tidak seimbang dan kinerja keuangan menjadi tidak sehat. Bad debts create an unbalanced cash flow and unsound financial performance.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan seluruh pendapatan diakui dengan didukung oleh perjanjian yang berlaku sesuai standar akuntansi;</li> <li>• Memperbaiki semua perjanjian terkait pengakuan pendapatan dan piutang;</li> <li>• Melakukan penagihan secara tepat waktu dengan kesepakatan dalam hal tanggal jatuh tempo;</li> <li>• Meningkatkan intensitas penagihan;</li> <li>• Membuat laporan dan analisa yang rinci, akurat, dan komplit atas seluruh piutang usaha sesuai laporan keuangan konsolidasian dengan informasi yang lengkap setiap bulannya;</li> <li>• Meningkatkan pengawasan atas piutang;</li> <li>• Bekerjasama dengan JPN menagih piutang macet yang memenuhi kelengkapan syarat penagihan;</li> <li>• Mengevaluasi sistem pembayaran dan pelayanan.</li> <li>• Ensured that all income is recognized and supported by valid agreements in accordance with the prevailing accounting standards;</li> <li>• Updated all agreements related to revenue and receivables;</li> <li>• Made invoice collection on time according to the agreed due date;</li> <li>• Improved billing intensity;</li> <li>• Prepared detailed, accurate and complete reports and analysis of all trade receivables according to the consolidated financial statements monthly;</li> <li>• Intense monitoring of receivables;</li> <li>• Cooperated with JPN to collect bad debts that have met billing requirements;</li> <li>• Assessed the payment and service systems.</li> </ul>

### Rendahnya Produktivitas SDM | Low Productivity Rate of HR

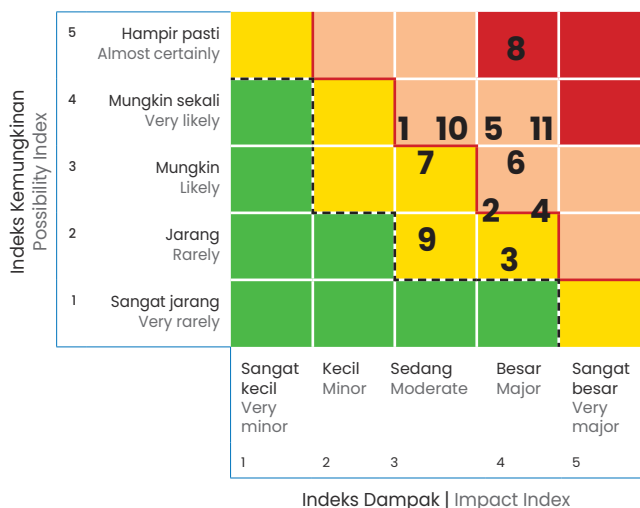
Dampak Impact	Produktivitas pekerja yang rendah meningkatkan beban SDM dan membuat Perusahaan menjadi tidak efisien. Low rate of employee productivity increases HR expenses and made the Company becomes inefficient.
Upaya Mitigasi Mitigation Efforts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan pekerja sesuai potensi pasar;</li> <li>• Mengevaluasi dan mengawasi produktivitas kerja secara berkala sehingga membuat biaya lembur menjadi lebih efisien;</li> <li>• Mengevaluasi komposisi SDM dan merencanakan job transfer sesuai dengan kebutuhan operasional dan komersial.</li> <li>• Improved the abilities of employees according to market potential;</li> <li>• Evaluated and monitored the productivity periodically to make overtime costs more efficient;</li> <li>• Evaluate the HR composition and planned for job transfers in accordance with operational and commercial needs.</li> </ul>

Profil Risiko

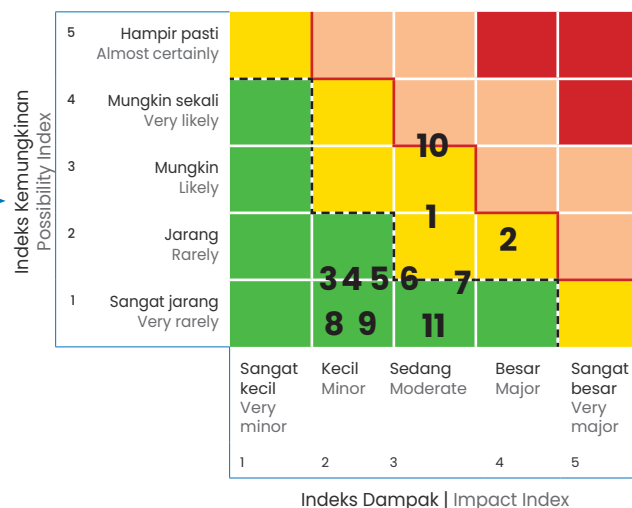
Risk Profile

No.	Tipe Risiko Risk Type	Nama Risiko Risk Name	Inherent Risk Awal tahun 2022 Inherent Risk Early 2022	Residual Risk November 2022 Residual Risk November 2022	Residual Risk Desember 2022 Residual Risk December 2022
1	Portofolio Bisnis & Aksi Korporasi Business Portfolio & Corporate Action	Tidak tercapainya target pertumbuhan dan pengembangan bisnis logistik dan <i>hinterland development</i> Failure of reaching growth target and logistics and hinterland development business	3x4	3x3	3x3
2	Strategi Keuangan Finance Strategy	Potensi pembebanan biaya konsesi Lini II pada PT MTI Incurred cost of Line II consession at PT MTI	4x3	4x3	4x3
3	K3L HSSE	Penyebaran Covid-19 Covid-19	4x3	2x2	2x2
4	K3L HSSE	Kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam Kegiatan Operasional Environmental damage caused by Operational Activity	4x3	3x2	2x2
5	K3L HSSE	Kecelakaan Kerja Work accident	4x4	3x2	2x2
6	SDM HR	Turunnya Kinerja Pegawai Lower employee performance	4x4	3x3	3x2
7	Proyek Project	Rendahnya Penyerapan Investasi Low investment absorption	3x4	3x3	3x2
8	Operasional Keuangan Finance Operation	Hilangnya Pendapatan PT MTI dari Pengoperasian Dermaga 300 dan 214 Tanjung Priok Revenue Loss from Dock 300 and 2014 of Tanjung Priok	4x3	2x2	2x2
9	Fraud, Penyuaan & Kepatuhan Fraud, Extortion & Compliance	Potensi <i>Fraud</i> & <i>Pungli</i> pada pelayanan logistik Fraud & Extortion on logistics services	3x3	3x2	2x2
10	Transformasi & Pengembangan Transformation & Development	Tidak terlaksananya integrasi layanan logistik dalam pelabuhan (Priok Intergrated Logistics Park) pada pertengahan Tahun 2022 Failure of integrating logistics services (Priok Integrated Logistics Park) mid-2022	3x4	3x4	3x4
11	Akuntansi Accounting	Rendahnya Validitas dan Kredibilitas Laporan Keuangan Low Validity and Credibility of Financial Report	4x4	3x3	3x2

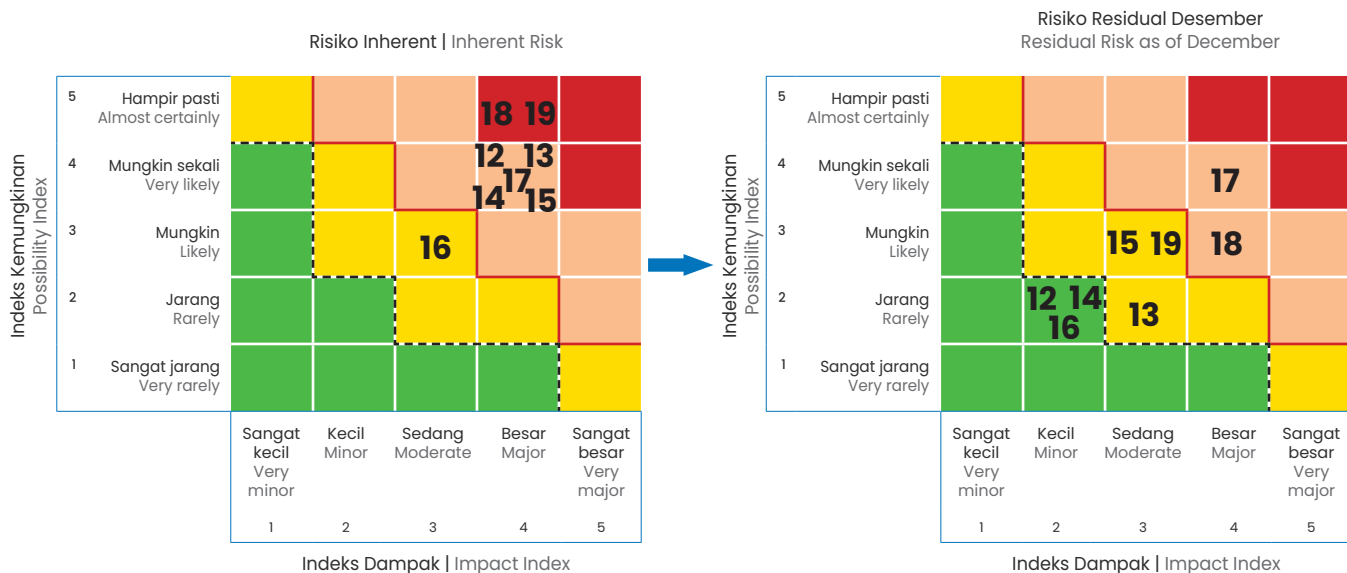
Risiko Inherent | Inherent Risk



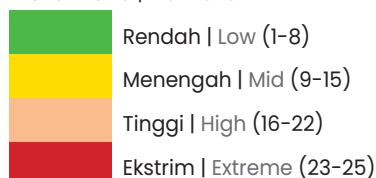
Risiko Residual Desember  
Residual Risk as of December



No.	Tipe Risiko Risk Type	Nama Risiko Risk Name	Inherent Risk Awal tahun 2022 Inherent Risk Early 2022	Residual Risk November 2022 Residual Risk November 2022	Residual Risk Desember 2022 Residual Risk December 2022
12	Teknologi & Sistem Informasi Technology & Information System	Cyber attack sistem Informasi Cyber attack of information system	4x4	3x2	2x2
13	Sosial Politik & Regulasi Social Politic & Regulation	Perubahan regulasi yang mempengaruhi bisnis Perusahaan Changes in regulation impacting corporate business	4x4	3x3	3x2
14	Pengelolaan Stakeholder Stakeholder Management	Tuntutan masyarakat sekitar pelabuhan untuk peningkatan kesejahteraan Local community around the port demanding welfare improvement	4x4	2x3	2x2
15	Pajak Tax	Kurang bayar dan denda pajak Tax underpayment and penalties	4x4	3x3	3x2
16	Tata Kelola Governance	Tidak optimalnya pelaksanaan Governance Risk and Compliance (GRC) dalam tata kelola perusahaan Low level of Governance Risk and Compliance (GRC) implementation within the corporate governance	3x3	2x3	2x2
17	Teknologi & Sistem Informasi Technology & Information System	Belum terimplementasi sistem portal digital logistik Digital logistic portal system has not been implemented	4x4	4x4	4x4
18	Strategi Keuangan Finance Strategy	Piutang Macet Bad Debt	4x5	4x3	4x3
19	SDM HR	Rendahnya Produktivitas SDM Low Employee Productivity	4x5	4x3	3x3



Level Risiko | Risk Level



----- Batas Selera Risiko | Risk Appetite Limit

———— Batas Toleransi Risiko | Risk Tolerance Limit

### Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

Bila dilihat dari profil risiko, terdapat 14 risiko berlevel tinggi dan 3 risiko level ekstrim yang harus dihadapi Perusahaan pada awal tahun 2022. Sisanya hanya risiko berlevel menengah.

Seiring berjalannya proses mitigasi risiko, Perusahaan berhasil menurunkan level risiko dari 14 risiko berlevel tinggi menjadi hanya 7 risiko berlevel menengah, 8 risiko berlevel rendah, dan 4 risiko berlevel tinggi.

Tidak ada risiko yang tergolong ekstrim yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen risiko yang dilakukan Perusahaan tergolong efektif.

### Pandangan Dewan Komisaris dan Direksi

Bila dilihat dari tingkat risiko usaha di tahun 2022, secara keseluruhan tingkat risiko usaha Perusahaan tergolong menengah. Perusahaan berhasil menurunkan tingkat risiko usaha akibat keberhasilan upaya mitigasi risiko.

Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyimpulkan bahwa aktivitas manajemen risiko Perusahaan di tahun 2022 sudah sepenuhnya efektif karena Direksi senantiasa memantau proses mitigasi dan evaluasi yang sedang berjalan dan melaporkannya ke Dewan Komisaris secara berkala. Komite Audit juga memiliki peran dalam memastikan berjalannya manajemen risiko melalui opini dan pandangan setiap anggotanya yang bersifat independen. Melalui perannya, Komite Audit dapat bertindak sebagai perantara antara Direksi dan Dewan Komisaris.

### Evaluation of Risk Management Effectiveness

When seen from the risk profile, there were 14 high level risks and 3 extreme level risks that the Company must face at the beginning of 2022. The rest were only medium level risks.

As the risk mitigation progressed, the Company succeeded in reducing the risk level from 14 high level risks to only 7 medium level risks, 8 low level risks and 4 high level risks.

There were no extreme risks that could affect the Company's business. Therefore, it can be concluded that the effectiveness of risk management the Company carried out was effective.

### View from the Board of Commissioners and the Board of Directors

When viewed from the level of business risk in 2022, in overall it can be considered as medium. The Company managed to reduce the level of business risk because of the success of risk mitigation.

Thus, the Board of Commissioners and the Board of Directors have made a joint conclusion that the Company's risk management activities in 2022 have been effective because the Board of Directors always monitor the ongoing mitigation and evaluation process and report it to the Board of Commissioners. The Audit Committee also has a role in ensuring the implementation of risk management with their independent opinion and perspective. The Audit Committee can act as an intermediary between the Board of Directors and the Board of Commissioners.

## Sistem Pengendalian Internal

### Internal Control System

MTI menerapkan sistem pengendalian internal untuk mengelola aset, validasi kebenaran data keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal di lingkungan MTI mengacu pada Pedoman dan Kebijakan Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. HK.48/01/01/MTI-16 tanggal 4 Januari 2016, di mana pedoman tersebut mengatur antara lain tentang pendekatan unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporan.

MTI runs the internal control system to maintain the Company's assets, validate the accounting data, and ensure the compliance with the current regulations.

The implementation of internal control system at MTI refers to the Guidelines and General Policy of Internal Control System, Attachment to the Decree of the Board of Directors No. HK.48/01/01/MTI-16 dated January 4, 2016, which regulate, among others, the approach of control environment, risk management, control activities, information and communication systems, and monitoring, implementation, and reporting.



### Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kerangka COSO – Internal Control

Konsep sistem pengendalian internal MTI mengacu pada sistem pengendalian internal yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Menurut COSO, sistem pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, serta personil lainnya. Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian internal MTI dalam membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada.

Adapun sistem pengendalian internal MTI terdiri dari 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk kondisi yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, mengembangkan dan melaksanakan kompetensi, independensi, integritas, serta patuh pada peraturan yang berlaku di Perusahaan;
2. Penilaian Risiko merupakan tindakan untuk menentukan pengaruh negatif suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan bila terjadi akan menghalangi pencapaian tujuan perusahaan;
3. Kegiatan Pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada secara konsisten dipatuhi;
4. Informasi dan Komunikasi yang meliputi unsur pengendalian yaitu penggunaan informasi yang relevan, komunikasi internal, dan eksternal;
5. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal pada Perusahaan berjalan dengan baik.

### Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal MTI merupakan kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non-keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat:

1. Menjaga dan mengamankan aset Perusahaan;
2. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*;
3. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional MTI;
6. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*) pada organisasi secara menyeluruh.

### Conformity of Internal Control System to the COSO Framework – Internal Control

MTI's internal control system refers to the internal control system developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). According to COSO, the internal control system is a process that involves the Board of Commissioners, Board of Directors, and other personnel. This is in line with MTI's internal control system in building an organization's control system by involving all available resources.

MTI's internal control system consists of 5 (five) control elements, namely:

1. Control Environment that is realized in the form of conditions that can create a conducive work atmosphere, develop and implement competence, independence, integrity, and comply with the regulations that apply in the Company;
2. Risk assessment is an action to determine the negative influence of an unexpected event and if it happens will hinder the achievement of company objectives;
3. Control Activities include the establishment of control policies and procedures as well as verification processes to ensure that the existing policies and procedures are consistently complied;
4. Information and Communication which includes control elements, namely the use of relevant information, internal and external communication;
5. Internal Control System Monitoring to ensure that the internal control system in the Company is running well.

### Financial and Operational Control Systems

MTI's internal control system is an organizational framework and working procedures for financial and non-financial operations that can provide guarantees that the Company's activities can:

1. Maintain and secure Company assets;
2. Reduce financial/losses impacts, irregularities including fraud;
3. Ensure the implementation of all business activities in accordance with the provisions and applicable laws;
4. Provide correct, complete and timely financial and management information;
5. Increase efficiency, effectiveness and economics in MTI's operational activities;
6. Increase the effectiveness of risk management in the organization as a whole.

### Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2022, MTI telah melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat korporasi sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dengan opini wajar dalam semua hal material.

Hasil audit dari auditor independen juga mendukung hasil pencapaian KPI yang didapatkan Perusahaan pada akhir tahun 2022 dengan skor 99,18 dan tingkat kesehatan AA (Sehat). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal MTI sudah cukup efektif untuk memastikan keberlangsungan usaha.

### Pandangan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi sangat mempedulikan jalannya sistem pengendalian internal Perusahaan dan memberikan perhatian khusus terhadap hasil audit, terutama dari auditor internal. Dewan Komisaris memanfaatkan Komite Audit sebagai organ pendukung yang turut memantau dan bekerja sama dengan auditor eksternal (bilamana diperlukan) sebelum kemudian memberikan opini yang bersifat independen terhadap hasil audit. Direksi memiliki mekanisme rapat berkala yang salah satunya agendanya senantiasa membahas mengenai proses audit Perusahaan.

Berdasarkan hasil audit terhadap sistem pengendalian internal yang telah disampaikan di atas, Dewan Komisaris dan Direksi juga berkesimpulan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan sudah memadai dan diperlukan upaya terus-menerus untuk memaksimalkan efektivitas pengendalian.

### Evaluation of Internal Control System Implementation

In 2022, MTI has assessed the effectiveness of internal control at the corporate level as reported in the Financial Statements which have been audited by an independent auditor with a result of fair opinion in all material respects.

The audit results from independent auditor also supports the KPI achievement in 2022 with a score of 99.18 and the AA (Sound) of corporate soundness level. Therefore it can be concluded that the Internal Control System of MTI has been effective to ensure business continuity.

### View from the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors are very concerned about the Company's internal control system and pay special attention to audit results, especially from the internal auditor. The Board of Commissioners utilizes the Audit Committee as a supporting organ that also monitors and cooperates with external auditors (when necessary) before providing an independent opinion on the audit results. The Board of Directors has a regular meeting with one of the agenda to always discuss the Company's audit process.

Therefore the Board of Commissioners and the Board of Directors concluded that the Company's internal control system is adequate and there needs to be continuous efforts to maximize its effectiveness.

## Perkara Penting dan Sanksi

### Important Issues and Sanctions

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perkara hukum pidana dan perdata, serta sanksi administrasi yang harus dihadapi Perusahaan ataupun para karyawannya.

Throughout 2022, there were no criminal or civil law cases, as well as administrative sanctions that either the Company or its employees had to face.

## Akses Informasi dan Data Perusahaan

### Access to Company Information and Data

MTI memiliki kebijakan pengendalian informasi Perusahaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor HK. 48/29/12/1/MTI-17 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi Data dan Dokumen Perusahaan di Lingkungan PT Multi Terminal Indonesia tanggal 29 Desember 2017 dengan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
3. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta;
4. Informasi Wajib Dikecualikan.

Dalam dokumen tersebut terdapat kebijakan umum yang mengatur mengenai sejumlah hal sebagai berikut:

1. Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi mengenai kegiatan Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
3. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa baik Auditor Eksternal, SPI maupun Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
4. Perusahaan memberikan informasi yang relevan dan materil kepada *stakeholders* terkait melalui media Laporan Tahunan, *website*, buletin, dan media lainnya.

Perusahaan juga memiliki kebijakan untuk menjaga kerahasiaan informasi sebagai berikut:

1. Kebijakan di bidang kerahasiaan informasi Perusahaan disusun untuk menjamin keamanan atas informasi yang dikategorikan rahasia;
2. Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Eksternal, Komite-Komite Komisaris dan seluruh pekerja (organik dan non-organik) menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan Perusahaan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik, serta mereka dapat dikenakan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan;
3. Penyampaian informasi berkategori rahasia kepada pihak ketiga (dan atas permintaan pihak ketiga) hanya dapat diberikan melalui otoritas khusus oleh Dewan Komisaris/Direksi;
4. Bertindak sebagai juru bicara Perusahaan hanya Komisaris Utama, Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan atau seseorang yang diberi pelimpahan tugas khusus dari pejabat yang bersangkutan.

The Company has an information control policy as regulated in the Decree of Board of Directors No. HK.48/29/12/1/MTI-17 regarding Policy for Managing Corporate Information, Data, and Documents within PT Multi Terminal Indonesia dated December 29, 2017, which stipulates the following issues:

1. Information that Must be Provided and Announced Periodically;
2. Information that must be available at all times;
3. Information that Must Be Announced Immediately;
4. Information that Must be Excluded.

The document also has a set of general regulations as follows:


1. Shareholders are entitled to obtain all information relating to the Company's activities from the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
2. The Board of Commissioners has the right to obtain access to information regarding the Company's activities in a timely, complete, and in accordance with applicable procedures;
3. The Board of Commissioners and Board of Directors ensure that both the External Auditor, SPI and the Audit Committee have access to information about the Company needed to carry out their duties;
4. The Company provides relevant and material information to relevant stakeholders through the Annual Report, website, bulletin and other media.

The Company also has its own policy to protect the confidentiality of its information as follows:

1. The Company's information confidentiality policy is formulated to ensure the security of information classified as confidential;
2. The Board of Commissioners, Directors, External Auditors, Committees of Board of Commissioners and all employees (organic and non-organic) maintain the confidentiality of information in accordance with Company regulations, prevailing laws and regulations and the Code of Conduct, and they may be subject to sanctions for violations committed;
3. Submission of information classified as confidential to third parties (and at the request of third parties) can only be provided through a special authority by the Board of Commissioners/Board of Directors;
4. Acting as a spokesperson for the Company is only the President Commissioner, President Director and Corporate Secretary or someone who is given a special assignment from the official concerned.

## Saluran Komunikasi dan Informasi MTI

## The Communication and Information Channels of MTI

<b>Website</b>	<p><a href="http://www.mtimultiscm.co.id">www.mtimultiscm.co.id</a></p> <p>Pengelolaan <i>website</i> PT MTI telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor HK.48/1/30/2/MTI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Website PT MTI. The management of MTI's website is regulated in the Decree of Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia No. HK.48/1/30/2/MTI-2016 dated December 30, 2016, regarding Website Management Policy and Procedure of PT MTI.</p>
<b>Media Sosial Social Media</b>	 <p>@MTI_MultiSCM      MTI Multi SCM (PT Multi Terminal Indonesia)</p> <p>PT Multi Terminal Indonesia      PT Multi Terminal Indonesia      PT Multi Terminal Indonesia</p>
<b>Laporan Tahunan Annual Report</b>	<p>Laporan Tahunan PT MTI di terbitkan secara berkala yaitu satu tahun sekali yang nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.</p> <p>The Annual Report of PT MTI is published periodically, once a year which will later be distributed to shareholders and other stakeholders.</p>
<b>Majalah Internal Internal Magazine</b>	MTI News
<b>Media Lainnya Other Media</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leaflet</li> <li>• Standing Banner</li> <li>• Company Profile</li> </ul>
<b>Kontak Contact</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +6221-2910-4000</li> <li>• email: <a href="mailto:cs@multiterminal.co.id">cs@multiterminal.co.id</a>, <a href="mailto:customer care@ipclogistic.co.id">customer care@ipclogistic.co.id</a></li> </ul>

## Budaya Perusahaan Corporate Culture

MTI telah menyusun Tata Nilai yang menjadi pedoman prinsip dalam berperilaku dan membuat keputusan. Perubahan nilai Perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi bisnis logistik dan tantangannya dalam menghadapi kompetisi bisnis yang lebih ketat, untuk mencapai visi dan menjalankan misinya. Seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, MTI melakukan perubahan tata nilai Perusahaan, dari JTP (Jujur – Terpercaya – Pintar) menjadi AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Penjelasan mengenai tata nilai Perusahaan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

PT MTI has developed Values that serve as guiding principles for behavior and decision making. Changes in the Company's values were made to adjust to the logistics business conditions and challenges in facing tougher business competition to achieve its vision and carry out its mission. Along with the issuance of Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 regarding the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises, PT MTI made changes to the Company's values, from JTP (Honest – Trusted – Smart) to AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative). An explanation of the Company's values can be seen in the Company Profile Chapter.



## Kode Etik

### Code of Conduct

Perusahaan memiliki Kode Etik (*Code of Conduct/COC*) untuk memastikan pengelolaan Perusahaan menjunjung tinggi norma dan nilai etika untuk meningkatkan reputasi Perusahaan. Kode Etik Perusahaan berlaku bagi seluruh level organisasi mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan, sebagai wujud komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kode Etik telah beberapa kali direvisi untuk lebih menyesuaikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan ketentuan yang berlaku. Kode Etik terakhir mengalami pembaruan/revisi kelima yang disahkan pada 1 Juni 2020.

#### Pokok-Pokok COC

1. Etika Bisnis Perusahaan
 

Etika bisnis merupakan cara-cara baik untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun Perusahaan di masyarakat.

  - a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemberian dan penerimaan hadiah, suap, dan lainnya;
  - c. Kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja;
  - d. Pemberian kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, dan pemberhentian kerja;
  - e. Standar etika dalam berhubungan dengan stakeholders;
  - f. Standar etika jajaran manajemen dan karyawan;
  - g. Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right).
2. Etika/Tuntutan Perilaku Insan MTI
  - a. Komitmen Insan MTI;
  - b. Menjaga nama baik Perusahaan;
  - c. Menjaga hubungan baik antar Insan MTI;
  - d. Menjaga kerahasiaan Perusahaan;
  - e. Menjaga dan menggunakan aset Perusahaan;
  - f. Menjaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja;
  - g. Perilaku asusila, narkoba, obat terlarang, perjudian, dan merokok;
  - h. Melakukan pencatatan data Perusahaan dan penyusunan laporan;
  - i. Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi (insider trading);
  - j. Pemberian dan penerimaan hadiah, suap, dan lainnya;
  - k. Tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi (benturan kepentingan);
  - l. Aktivitas politik.

The Company owns a Code of Conduct (COC) to ensure that the Company is being managed by upholding ethical norms and values. The Code of Conduct applies to all levels within the organization including the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees, as a form of commitment to implementing good corporate governance. The Company's Code of Conduct has been revised several times, to better adapt to the development of the business world and applicable provisions. PT MTI's Code of Conduct last underwent a fifth update/revision which was ratified on June 1, 2020.

#### Key Points of COC

1. Business Ethics
 

Business ethics are proper ways to conduct business activities, which cover all aspects related to individuals, the Company, industries, and also society. All of this includes how we conduct business fairly, in accordance with applicable laws, and does not depend on the position of the individual or the Company in society.

  - a. Compliance with laws and regulations;
  - b. Giving and receiving gifts, bribes, and others;
  - c. Concern for Occupational Safety and Health (K3);
  - d. Providing equal opportunities to employees to get a job, promotion, and termination of employment;
  - e. Ethical standards in dealing with stakeholders;
  - f. Ethical standards of management and employees;
  - g. Intellectual Property Rights (IPR).
2. Ethics/Requirements from Personnel
  - a. MTI Personnel Commitment;
  - b. Maintain the good name of the Company;
  - c. Maintain good relations between PT MTI Personnel;
  - d. Maintain Company confidentiality;
  - e. Maintain and use the Company's assets;
  - f. Maintain safety, health and work environment;
  - g. Immoral behavior, narcotics, illegal drugs, gambling, and smoking;
  - h. Recording Company data and compiling reports;
  - i. Avoiding conflicts of personal interest (insider trading);
  - j. Giving and receiving of gifts, bribes, and others;
  - k. Not taking advantage of the position for personal gain (conflict of interest);
  - l. Political activity.

### Komitmen Pekerja

1. Seluruh Insan MTI wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan MTI untuk melaksanakan *Code of Conduct* yang diperbarui setiap tahun;
2. *Code of Conduct* harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh Insan MTI;
3. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam beberapa rangkap asli sesuai dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Sebanyak 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Sumber Daya Manusia, 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan, dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan;
4. Pakta Integritas Pekerja Perusahaan dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Sumber Daya Manusia, dan 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh Karyawan Perusahaan yang bersangkutan;
5. Unit Kerja/Bagian yang menangani bidang Sumber Daya Manusia membuat rekapitulasi pekerja Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan pada setiap awal tahun;
6. Format penandatanganan Pakta Integritas adalah sebagai berikut:
  - a. Pakta Integritas Dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. Pakta Integritas Pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja sampai dengan pimpinan setingkat Kepala Logistik;
  - c. Pakta Integritas Pekerja Non-Struktural Perusahaan.
7. Atasan Langsung (serendah-rendahnya setingkat Kepala Logistik) dari pekerja Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas, wajib ikut serta dalam penandatanganan Pakta Integritas Pekerja Perusahaan tersebut;
8. Seluruh Pimpinan Unit Organisasi/Unit Kerja sampai dengan pimpinan setingkat Kepala Logistik bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan *Code of Conduct* tersebut.

### Sosialisasi dan Internalisasi

*Code of Conduct* MTI selalu dikomunikasikan dan disosialisasikan secara berkala, kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pemimpin Unit sampai dengan pegawai melalui berbagai media komunikasi antara lain poster, pengiriman email, buletin, dan standing banner.

Selain itu, *Code of Conduct* juga dibagikan kepada pihak ketiga, sehingga diharapkan pihak ketiga dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dari *Code of Conduct*. Penerapan dan penegakan dilakukan dengan memastikan bahwa semua pihak telah membaca dan memahami isi dari *Code of Conduct*.

### Commitment from Employees

1. All MTI Personnel are required to sign an Integrity Pact which is the commitment of PT MTI Personnel to implement the Code of Conduct which is updated every year;
2. The Code of Conduct must be disseminated and understood by all MTI Personnel;
3. The Integrity Pact of the Board of Commissioners and Board of Directors is made and signed in several original copies according to the number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. An original copy is submitted to the Work Unit/Department that is in charge of the Human Resources field, 1 (one) original copy is submitted to the Corporate Secretary, and 1 (one) original copy is kept by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors concerned;
4. The Company's Employee Integrity Pact is made and signed in 2 (two) original copies. 1 (one) original copy is submitted to the Work Unit/Department that is in charge of the Human Resources field, and 1 (one) original copy is kept by the employee concerned of the Company;
5. The Work Unit/Department that is in charge of the Human Resources field makes a recapitulation of the Company's employees who carry out the signing of the Integrity Pact every year, to be submitted to the Corporate Secretary at the beginning of each year;
6. The format for signing the Integrity Pact is as follows:
  - a. Integrity Pact of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
  - b. Integrity Pact of Organizational Unit/Work Unit Leaders up to leadership at the level of Head of Logistics;
  - c. Company Non-Structural Employee Integrity Pact.
7. The Direct Supervisor (at least at the level of the Head of Logistics) of the Company's employees who executed the signing of the Integrity Pact, must participate in the signing of the Company's Employee Integrity Pact;
8. All Heads of Organizational Units/Work Units up to the level of the Head of Logistics are responsible and set an example for their subordinates for the implementation of the Code of Conduct.

### Socialization and Internalization

Periodically, the Code of Conduct of is always communicated and socialized to the Board of Commissioners, Board of Directors, Unit Leaders to employees through various communication media including posters, sending emails, bulletins, and standing banners.

In addition, PT MTI's Code of Conduct is also distributed to third parties, so it is hoped that third parties can provide support for the implementation of the Code of Conduct. Implementation and enforcement is carried out by ensuring that all parties have read and understood the contents of the Code of Conduct.

Pada tahun 2022, telah dilakukan penandatanganan oleh karyawan secara berkala terkait penyertaan kepatuhan terhadap Code of Conduct. Penandatanganan ini dilakukan oleh pekerja MTI. Pada tahun yang sama, MTI juga telah melakukan survei guna mengukur tingkat pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan terhadap Code of Conduct periode tahun 2022 dengan hasil survei sebagai berikut:

In 2022, employees have signed periodically regarding the inclusion of compliance with the Code of Conduct. The signing was by employees. In addition, in the same year, MTI has also conducted a survey to measure the level of understanding of the Board of Commissioners and Board of Directors and employees of the Code of Conduct for the 2022 period with the following survey results:

Organ Perusahaan   Company Organs	Pemahaman   Understanding
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Sangat Paham Expert
Direksi Board of Directors	Sangat Paham Expert
Pekerja Employees	Paham Adequate

### Penegakan COC

Pelanggaran *Code of Conduct* merupakan tindakan indisipliner. Setiap Insan Perusahaan yang mengetahui terjadinya pelanggaran *Code of Conduct* wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan, atasan langsung, atau melalui saluran *Whistleblowing System*, dan identitas pelapor akan dilindungi sepanjang laporannya dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tugas Sekretaris Perusahaan dalam penegakan *Code of Conduct* adalah:

1. Memonitor kepatuhan atas *Code of Conduct*;
2. Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan;
3. Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

### Enforcement of COC

Violation of the Code of Conduct is a disciplinary action. Employees knowing that there are violations of Code of Conduct shall report it to the Corporate Secretary, direct superior, or through the Whistleblowing System, and their identities will be protected for as long as their reports are accountable. In particular, the Corporate Secretary has the following duties in enforcing the COC:

1. Monitor compliance with the Code of Conduct;
2. Record all types of alleged violations;
3. Follow up on violations that occur in accordance with applicable regulations;
4. Report violations to the Board of Directors.

### Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

1. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah;
2. Segenap Insan MTI dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja, dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum Insan MTI dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, dan lain sebagainya;
3. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor;
4. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
5. Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### Reporting Mechanism

1. Disclosure must be made in good faith and not a personal complaint against a certain company policy (*grievance*) or based on bad will/defamation;
2. All PT MTI Personnel and external parties of the Company (Customers, Work Partners, and Community) can report violations of the Code of Conduct committed by unscrupulous MTI Personnel, and the Company is obliged to follow up on reports that have the potential to harm materially and can damage the Company's image, among others caused by irregularities, manipulation, and so on;
3. The reporter must clearly state his/her identity on the report made, accompanied by relevant supporting evidence. The recipient of the report must keep the identity of the reporter confidential;
4. The Company is obliged to follow up on every report received in accordance with the applicable procedures and mechanisms;
5. The Company will also provide legal protection in accordance with the applicable laws and regulations.

### Sanksi Atas Pelanggaran

1. Setiap Insan MTI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
2. Sanksi bagi pekerja yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung pekerja yang bersangkutan;
3. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing;
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh pemegang saham;
5. Bila mitra kerja atau *stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

### Pelanggaran Tahun 2022

Selama tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran kode etik.

### Sanctions

1. Every Personnel who is proven to have violated this Code of Conduct will be given sanctions in accordance with the applicable rules and regulations in the Company;
2. Sanctions for employees who commit violations are determined by the Board of Directors after receiving a report from the employee's direct superior;
3. The Board of Commissioners and the Board of Directors decide to provide coaching actions, disciplinary sanctions, and/or other actions as well as prevention that must be carried out by the direct superiors in their respective environments;
4. Sanctions for the Board of Directors and the Board of Commissioners who commit violations are decided by the shareholders;
5. If partner or other stakeholders commit a violation, the provisions as stated in the contract will be imposed. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

### Violations in 2022

There was no violation of code of conduct during 2022.

## Kebijakan Anti Korupsi

### Anti-Corruption Policy

Perusahaan tidak memberikan ruang bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan telah menegakkan komitmen tersebut sejumlah kebijakan sebagai berikut:

1. Pedoman *Corporate Governance (Code of Corporate Governance)*;
2. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
3. Pedoman Gratifikasi;
4. Pedoman *Whistleblowing System*;
5. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
6. Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

There is no room for Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) within the Company and it has been enforced through a number of policies as follows:

1. Code of Corporate Governance;
2. Code of Conduct;
3. Gratification Guidelines;
4. Whistleblowing System Guidelines;
5. Anti-Bribery Management System (SMAP) Policy;
6. Guidelines for State Officials Wealth Reports (LHKPN).



## Kebijakan Anti Gratifikasi

### Anti-Gratification Policy

MTI berkomitmen untuk mematuhi etika dalam memberi dan menerima hadiah atau gratifikasi sesuai kebijakan keputusan Direksi yang diterbitkan tahun 2020 melalui SK Direksi Nomor HK.48/6/8/1/MTI-2020 tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PT Multi Terminal Indonesia. Kebijakan ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan MTI serta upaya-upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT MTI. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi telah dipublikasikan dalam portal internal dan *website* Perusahaan. Kebijakan (*Management Policy*) Pengendalian Gratifikasi telah dilaksanakan secara efektif di Perusahaan.

#### Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Batasan gratifikasi yang harus dilaporkan oleh Insan MTI antara lain berupa:

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
2. Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pension, promosi jabatan, dan ulangtahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberian yang sama;
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberian yang sama.

MTI is committed to complying with ethics in giving and receiving gifts or gratuities in accordance with the policy of the Board of Directors decree issued in 2020 through the Decree of the Board of Directors Number HK.48/6/8/1/MTI-2020 concerning PT Multi Terminal Indonesia's Gratification Control Policy. This policy regulates the giving and receiving of gratification by MTI personnel as well as efforts to prevent and control gratifications within MTI. This policy refers to KPK Regulation Number 2 of 2019 concerning Gratification Reporting. The Gratification Control Policy has been published on the Company's internal portal and website. Management Policy for Gratification Control has been implemented effectively in the Company.

#### Gratification Control Management

The limits of gratification that must be reported by the personnel are as follows:

1. Gifts due to family relationships, namely from grandfather/grandmother/mother/mother/father-in-law, husband/wife, child/son-in-law, grandchildren, in-law, uncle/aunt, brother/sister/in-law, cousin, and nephew who have a conflict of interest;
2. Receipt of money/goods by an official/employee in an activity such as a wedding, birth, aqiqah, baptism, circumcision, tooth cutting, or other religious/customary/traditional ceremonies that exceed Rp1,000,000 (one million rupiahs) per gift per person;
3. The gift is related to a disaster experienced by the recipient, father/mother/in-law, husband/wife, or child who receives the gratification that exceeds Rp1,000,000 (one million rupiahs) per gift per person;
4. Gifts to fellow employees in the context of farewell/greetings, pensions, promotions, and birthdays that are not in the form of money or in the form of cash equivalents (cheque, bilyet giro, shares, time deposits, vouchers, pulses, etc.) that exceed the value equivalent to Rp300,000 (three hundred thousand rupiahs) per gift per person with a total gift of Rp1,000,000 (one million rupiahs) in one year from the same gift;
5. Gifts to colleagues are not in the form of money or not in the form of cash equivalents (cheque, bilyet giro, shares, deposits, vouchers, pulses, etc.) that exceeds the value equivalent to Rp200,000 (two hundred thousand rupiahs) per gift per person with a total gift of Rp1,000,000 (one million rupiahs) in one year from the same gift.

### Pengelola Laporan

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dibentuk berdasarkan SK Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor: HK.48/6/8/1/MTI-2020 tentang pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi pada pelaksanaan sistem pencegahan dan penanggulangan gratifikasi di lingkungan PT Multi Terminal Indonesia. UPG bersifat Ad-hoc yang terdiri dari:

**Ketua : Sekretaris Perusahaan**

**Wakil Ketua : Internal Audit**

**Sekretaris : Tata Kelola Perusahaan**

**Anggota : SM SDM & Umum**

### Laporan yang Diterima Tahun 2022

Selama tahun 2022, tidak terdapat pelaporan terkait gratifikasi.

### Team in Charge

Gratification Control Unit (UPG) was formed based on the Decree of the Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia Number: HK.48/6/8/1/MTI-2020 concerning the Formation of a Gratification Control Unit Team in the implementation of the gratification prevention and control system within PT Multi Indonesian Terminal. UPG is an Ad-hoc consisting of:

**Chairman : Corporate Secretary**

**Vice Chairman : Internal Audit**

**Secretary : Corporate Governance**

**Member : SM of HR & General Affairs**

### Incoming Reports in 2022

There was no report of gratification during 2022.

## Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Policy

MTI memiliki kebijakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yaitu Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.48/6/8/1/MTI-2020 Tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan MTI telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan juga pemutakhiran pedoman dalam Surat Keputusan Direksi PT Multi Terminal Indonesia Nomor: HK.48/20/1/1/MTI-2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di di Lingkungan PT Multi Terminal Indonesia, tertanggal 20 Januari 2021.

MTI telah melaksanakan *e-procurement* melalui Aplikasi *e-Procurement* Multi Terminal Indonesia ([ipclogistic.co.id](http://ipclogistic.co.id)).

Setiap pekerja dan mitra yang melaksanakan *e-procurement* telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MTI has a policy in terms of procurement which is the Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Number HK.01/8/6/1/ADP/UT/PLII-2020 concerning Guidelines for Goods and Services Procurement within PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). MTI has implemented ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System and also updated the guidelines in the Decree of the Board of Directors of PT Multi Terminal Indonesia Number: HK.48/20/1/1/MTI-2021 regarding Guidelines for Goods and Services Procurement within PT Multi Terminal Indonesia, dated January 20, 2021.

MTI has applied the *e-procurement* through the E-Procurement App of Multi Terminal Indonesia ([ipclogistic.co.id](http://ipclogistic.co.id)).

Employees and partners involve in *e-procurement* have signed the integrity pact as a commitment to carry out all duties and responsibilities in accordance with applicable regulations.

## Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Official Wealth Report (LHKPN)

Kebijakan mengenai LHKPN di MTI mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan dalam tahap pengkinian mengacu pada dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 yang telah diatur pada peraturan sebelumnya. Beberapa penyempurnaan yang dimaksud antara lain mengenai:

1. Media Penyampaian LHKPN;
2. Posisi Harta;
3. Kelengkapan Dokumen Pendukung;
4. Tanda Terima LHKPN.

Direktur Utama menghimbau kepada pekerja untuk menyampaikan LHKPN dan amanat ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT MTI Nomor: HK.48/1/12/3/MTI-2020 tentang Kebijakan Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT MTI.

Pada tahun 2022 realisasi pelaporan LHKPN MTI dilaksanakan dengan tingkat kepatuhan 100%, dan keseluruhannya disampaikan dengan tepat waktu.

MTI's LHKPN policy refers to the Corruption Eradication Commission Regulation Number 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials Wealth in the updating stage refers to the Corruption Eradication Commission Regulation Number 2 of 2020, which has been regulated in the previous regulation. Improvements were made on:

1. LHKPN Submission Media;
2. Asset Position;
3. Completeness of Supporting Documents;
4. LHKPN Receipt.

The President Director instructed employees to submit LHKPN and this instruction has been decreed in the Decree of the Board of Directors of PT MTI Number: HK.48/1/12/3/MTI-2020 concerning Compliance Policy for Submission of State Official Wealth Report (LHKPN) of PT MTI.

In 2022, MTI's LHKPN report has all been reported a compliance level of 100%, and all of them were submitted on time.

## Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) adalah sistem pelaporan atas dugaan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Insan MTI dan Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas dan memberikan perlindungan kepada pelapor. Mekanisme penerapan *Whistleblowing System* dijalankan sesuai SOP yang berlaku di Perusahaan.

MTI telah memiliki Pedoman WBS yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT MTI Nomor: HK.48/2/11/1/MTI-2021 tentang Kebijakan Pelaporan Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing system*). Penyusunan kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh Direksi sekaligus memberikan keamanan pelapor pelanggaran dan penerima laporan melalui jaminan kerahasiaan pelapor.

The Whistleblowing System (WBS) is a reporting system for alleged indications of fraud committed by MTI personnel, and the Company guarantees the confidentiality of identity and provides protection to the whistleblower. The mechanism for implementing the Whistleblowing System is carried out in accordance with the applicable SOPs in the Company.

MTI already has a WBS Manual which is stipulated based on the Decree of the Board of Directors of PT MTI Number: HK.48/2/11/1/MTI-2021 regarding Whistleblowing System Policy. The formulation of this Whistleblowing System (WBS) policy has the aim of providing certainty and confidence that the submitted report will be followed up by the Board of Directors, as well as providing security for whistleblower and reporting recipients through guarantees for the confidentiality of the whistleblower.

**Ruang Lingkup dan Sosialisasi**

Ruang lingkup pedoman pelaporan dugaan pelanggaran diberlakukan bagi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Direksi, dan seluruh pekerja (pekerja tetap dan *outsourcing*) di lingkungan Perusahaan dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk kepentingan perusahaan serta para pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan WBS MTI memiliki cakupan antara lain:

1. Perlindungan pelapor;
2. Unit pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran;
3. Mekanisme penyampaian pelanggaran;
4. Pelaksanaan investigasi;
5. Pelaporan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Pedoman-pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Insan MTI dan mitra kerja melalui berbagai saluran media komunikasi sebagai berikut:

<b>Sosialisasi Internal</b> Internal Dissemination	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendistribusian dokumen tentang <i>Whistleblowing System</i>;</li> <li>• Website Perusahaan;</li> <li>• E-Office; e-mail WBS.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribution of documents regarding the Whistleblowing System;</li> <li>• Company Website;</li> <li>• E-Office; WBS e-mail.</li> </ul>
<b>Sosialisasi Eksternal</b> External Dissemination	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Website Perusahaan;</li> <li>• e-mail dan situs WBS;</li> <li>• Nota Dinas.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Company Website;</li> <li>• WBS e-mail and website;</li> <li>• Official Memo.</li> </ul>

**Penyampaian Laporan dan Pengelola**

Pengelolaan WBS MTI dipusatkan pada perusahaan induk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) seiring dengan dibentuknya Komite Pelindo Bersih. Perusahaan telah membentuk media penyampaian laporan pelanggaran untuk mendukung kelancaran penerapan *Whistleblowing System* melalui berbagai saluran komunikasi. Setiap laporan yang masuk akan dikelola sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan. Informasinya adalah sebagai berikut:

**Saluran Komunikasi WBS**

<b>Telepon   Phone</b>	+62-21 2782 2345
<b>Faksimili   Facsimile</b>	+62-21 2782 3456
<b>SMS/WA</b>	+62 811 933 2345
<b>E-mail</b>	pelindobersih@whistleblowing.link
<b>Website</b>	www.pelindobersih.whistleblowing.link
<b>PO BOX</b>	Pelindo Bersih PO BOX 1074 Jks

**Scope and Dissemination**

The scope of the whistleblowing system manual applies to the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, Board of Directors, Supporting Organs of the Board of Directors, and all employees (permanent and outsourcing employees) within MTI in carrying out daily duties for the interest of the Company and other stakeholders. MTI's WBS policy covers, among others:

1. Whistleblower protection;
2. Whistleblowing System management unit;
3. Mechanism for submitting violations;
4. Conduct investigations;
5. Reporting on the Whistleblowing System implementation.

Those guidelines have been disseminated to all Personnel of MTI and partners through the following communication channels:

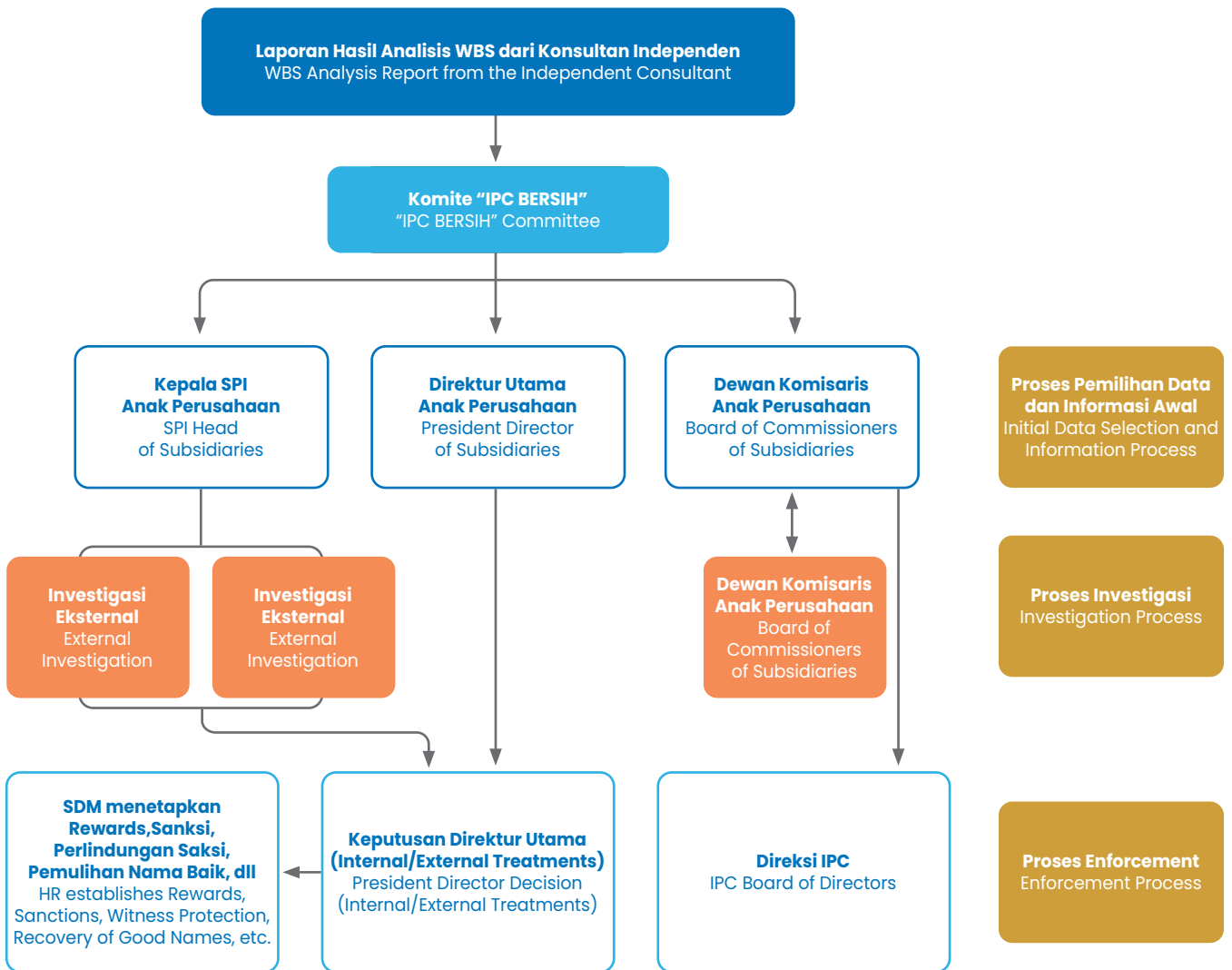
**Report Submission and Team in Charge**

The management of PT MTI's WBS is centered on the holding company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), in line with the establishment of Clean Pelindo Committee. The Company has established several channels for any incoming report. Every report will be managed according to the prevailing system the Company set. The information is as follows:

**Communication Channels of WBS**



**Mekanisme Penanganan WBS**  
**Handling Management of WBS**



**Perlindungan bagi Pelapor**

Perlindungan *Whistleblower* (Pelapor) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan atas kerahasiaan identitas Pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor. Perlindungan bagi Pelapor akan menumbuhkan rasa aman bagi Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya, sehingga akan mengefektifkan kebijakan. MTI memberikan perlindungan kepada Pelapor, atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
3. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

**Protection for Whistleblowers**

Protection for the Whistleblower is intended to provide security and safety guarantees for the confidentiality of the Whistleblower's identity and protection from actions detrimental to the Whistleblower. In addition, protection for the Whistleblower will foster a sense of security for the Company's Personnel and other Whistleblowers; hence, the WBS policy will be effective. MTI protects Whistleblowers from the possibility of doing the following things:

1. Unfair dismissal;
2. Demotion for unclear reasons;
3. Adverse personal file record.

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tanggal 11 November 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
2. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
3. Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan. Dalam hal Pelapor merasa perlu, maka ia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### Laporan Masuk Tahun 2022

Selama tahun 2022, tidak terdapat laporan yang masuk ke sistem WBS Perseroan .

In addition to the above protections, the Company provides legal protection for Whistleblower with good intention, in line with the provisions stipulated in Law No. 8 of 2010 dated October 22, 2010, concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts, Law No. 13 of 2006 dated August 11, 2006, concerning Protection of Witnesses and Victims, Government Regulation No. 57 of 2003 dated November 11, 2003, concerning Special Protection Procedures for Whistleblowers and Witnesses in Money Laundering Criminal Act, namely:

1. Protection from criminal and/or civil charges;
2. Personal protection and/or protection for Whistleblower's family from physical and/or mental threats;
3. Protection of Whistleblower's assets; and/or
4. Provision of information without meeting the Reported Party face to face at each level of case examination in the event the violation enters the court dispute stage. If necessary, the Whistleblower can also request assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), according to Law No. 13 of 2006, dated August 11, 2006, concerning Protection of Witnesses and Victims.

#### Incoming Reports in 2022

The Company's WBS system did not receive such report from any whistleblower during 2022.

## Tata Kelola Teknologi Informasi

### Information Technology Governance

Kebijakan tata Kelola teknologi informasi di MTI mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT MTI Nomor: HK.48/29/12/1/MTI-2017 tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, data, dan dokumen perusahaan di lingkungan PT MTI, yang secara garis besar mengatur mengenai: definisi umum, informasi, keterbukaan informasi, permohonan informasi publik, keberatan, penyalahgunaan informasi perusahaan, evaluasi, administrasi, dan penutup.

Information technology governance policy at MTI refers to the Decree of the Board of Directors of PT MTI Number: HK.48/29/12/1/MTI-2017 concerning the Policy for the Company Information, Data, and Documents Management within PT MTI. In general, it regulates general definition, information, information disclosure, requests for public information, objections, misuse of company information, evaluation, administration, and closing.

## Informasi Bad Corporate Governance

### Information on Bad Corporate Governance

Dengan menempatkan komitmen yang besar dalam pemenuhan seluruh prinsip-prinsip GCG di lingkungan MTI, Perseroan berupaya sebaik mungkin dalam melakukan pencegahan dan meminimalkan terjadinya praktik *Bad Corporate Governance*. Evaluasi atas keberhasilan pencegahan terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* dijabarkan melalui keterangan berikut:

1. Laporan Perkara yang Tidak Dijabarkan  
Selama tahun 2022, tidak terdapat perkara atau gugatan hukum yang dihadapi MTI.
2. Ketidapatuhan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Selama tahun 2022  
Tidak terdapat teguran yang bersifat ketidapatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pajak yang ditujukan kepada MTI.
3. Kasus terkait Buruh dan Pekerja  
Selama tahun 2022, tidak tercatat adanya kasus yang melibatkan MTI dengan buruh atau pekerja.
4. Informasi Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Penyajian Materi dalam Laporan Tahunan  
PT MTI telah merujuk pada parameter yang berlaku seperti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
5. Kesesuaian Laporan Tahunan *Hardcopy* atau *Softcopy*  
MTI menjamin bahwa isi Laporan Tahunan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* telah sesuai dan tidak terdapat adanya perbedaan.

MTI has made a great commitment on GCG principles and has tried its best to prevent and minimize the occurrence of Bad Corporate Governance practices. Assessment in the success of preventing Bad Corporate Governance practices is described in the following information:

1. Unexplained Case Report  
In 2022, there was no case or lawsuits against MTI.
2. Non-compliance in Fulfilling Tax Obligations in 2022  
There were no warnings for non-compliance in terms of tax payment.
3. Cases related to Labor  
In 2022, there were no cases involving MTI with its workers.
4. Information on Discrepancies in the Presentation of Annual Reports and Financial Statements Presentation of Information in the Annual Report  
MTI has followed to the applicable parameters such as the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number 20/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.
5. Compatibility of Hardcopy or Softcopy Annual Reports  
MTI guarantees that the contents of the Annual Report in hardcopy and softcopy are the same and there are no discrepancies.







# 7

## Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

### Social and Environmental Responsibility

Pemenuhan tanggung jawab sosial lebih dari sekedar bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan menjadi mekanisme memelihara hubungan sinergis dan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

The Company fulfills its social responsibilities beyond the compliance with the laws and regulations to foster a strong, harmonious relationship with all stakeholders.



# Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

## Commitment to Social and Environmental Responsibility (CSR)

### Regulasi Internal Mewujudkan Komitmen TJSL Tepat Sasaran dan Berdampak Positif

#### Internal Regulation of Realizing Positive CSR Programs that are Right on Target

Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Direksi Nomor HK.48/30/12/2/MTI-2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

*Articles of Association and Decree of the Board of Directors Number HK.48/30/12/2/MTI-2016 dated December 30, 2016 concerning the Social and Environmental Responsibility Policy*

Sebagai entitas usaha, MTI berkomitmen untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Komitmen ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MTI menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan usaha saat ini tidak hanya ditentukan dari capaian kinerja keuangan semata, tetapi juga didukung oleh terpenuhinya tanggung jawab sosial Perusahaan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Dalam hal ini, pemenuhan tanggung jawab memiliki makna yang melebihi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, yaitu menjadi mekanisme untuk memelihara hubungan yang sinergis dan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, kepercayaan dan loyalitas yang terjaga pada saatnya dapat mendukung kelangsungan usaha MTI secara jangka panjang.

Program TJSL akan mendukung keseimbangan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah triple bottom line yakni 3P (*Profit, Planet, dan People*). Hal ini membuat MTI senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan dan lingkungan melalui pelaksanaan program TJSL.

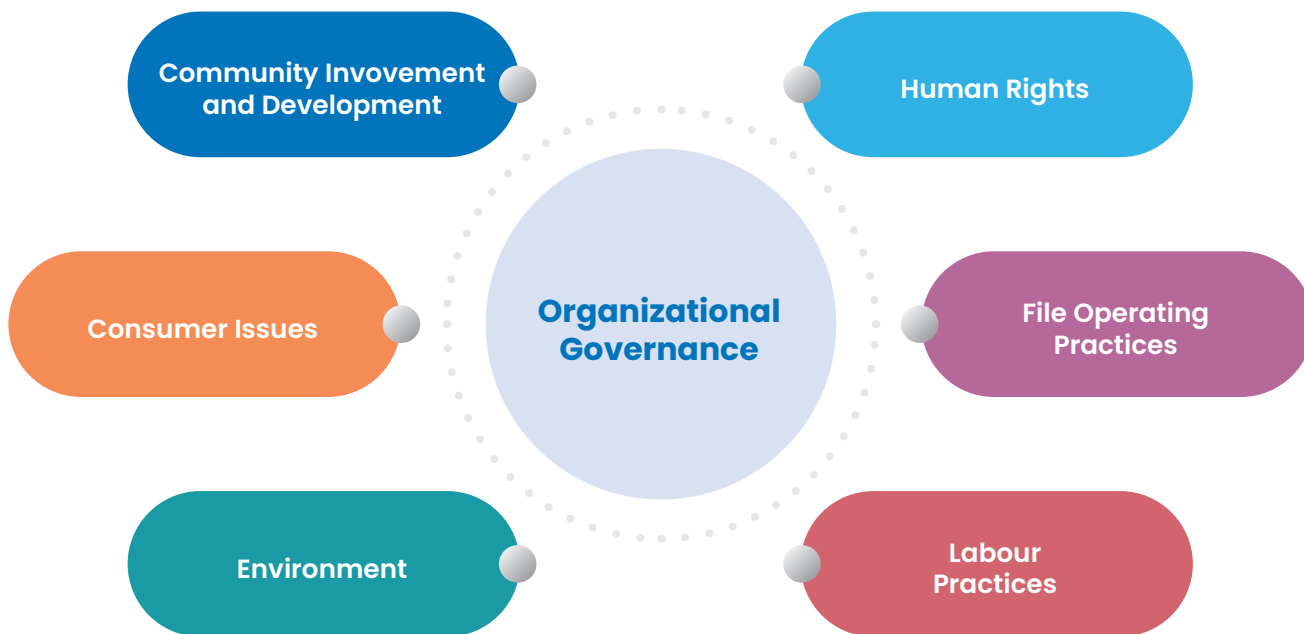
As a business entity, MTI is committed to participating in sustainable development through the activities of the Social and Environmental Responsibility or Corporate Social Responsibility (CSR). This commitment is in accordance with the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

MTI is fully aware that the success of its business is not only being determined by the financial performance, because the Corporate Social Responsibility also takes part to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).

In this case, the Company fulfills its responsibilities beyond the compliance with the laws and regulations and treating it as a mechanism for maintaining a synergistic and harmonious relationship with all stakeholders. Thus, the trust and loyalty that has been maintained will support the long-term business continuity of MTI.

The CSR program will create a balance between the economic, environmental, and social performance or better known as the triple bottom line, namely the 3Ps (Profit, Planet, and People). For this reason, MTI always maintains a harmonious relationship with stakeholders and the environment through the CSR program.

**7 Subyek Inti Program TJSL**  
**7 Core Subjects of CSR**



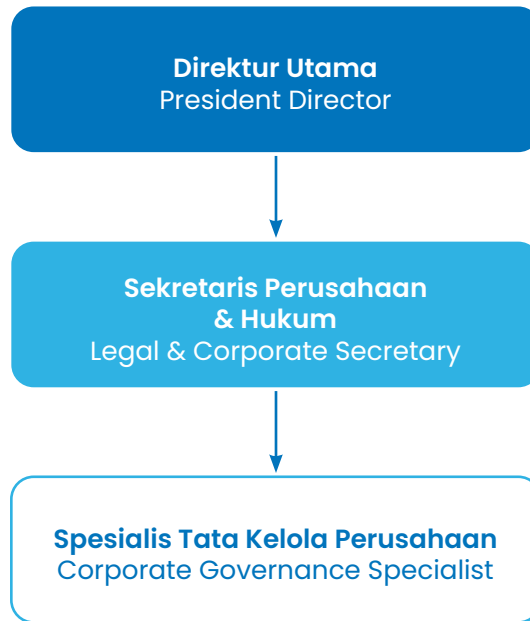
Pelaksanaan TJSL dari MTI mengacu pada standar internasional berdasarkan referensi ISO 26000 dengan 7 Subyek Inti TJSL. Berdasarkan referensi tersebut, MTI menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dengan diawali analisis strategis terhadap kebutuhan dan harapan *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Analisis tersebut mencakup pengelolaan terhadap isu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

MTI conducted its CSR by taking reference to the international standards of the ISO 26000 with its 7 Core Subjects of CSR. Based on the reference, MTI starts its social responsibility program through a strategic analysis of the needs and expectations of stakeholders. The analysis covers the management of the economic, social, and environmental issues.

# Struktur Organisasi Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

## Organizational Structure of Corporate Governance and Social Responsibility

**Struktur Organisasi Tata Kelola dan TJSL Perusahaan**  
**Organizational Structure of Corporate Governance and TJSL**



### Unit Kerja Sesuai Tujuh Subyek Inti TJSL

#### Units Responsible for Handling Each Core Subjects of CSR

Subyek Inti Core Subjects	Unit Kerja Unit
Tata Kelola Organisasi Organisational Governance	Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum, Divisi Internal Audit, Divisi Operasi Corporate Secretary & Legal Division, Internal Audit Division, Operations Division
Hak Asasi Manusia (HAM) Human Rights	Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum, Divisi SDM & Umum Corporate Secretary & Legal Division, HR & General Affairs Division
Operasi yang Adil Fair Operations	Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum, Divisi Internal Audit, Divisi SDM & Umum Legal & Corporate Secretary Division, Internal Audit Division, HR & General Affairs Division
Lingkungan Hidup Environment	Divisi Operasi, Divisi Sistem Informasi & Teknik Operation Division, Information System & Engineering Division
Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Manpower, Occupational Health and Safety	Divisi SDM & Umum, Divisi Operasi HR & General Affairs Division, Operations Division
Pengembangan Masyarakat/Komunitas Lokal Local Community Development	Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum Corporate Secretary & Legal Division
Tanggung Jawab terhadap Pelanggan Responsibility to Customers	Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi Pemasaran Business Development Division, Marketing Division



Pelaksanaan TJSL menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengembangan usaha. Pengelolaan program TJSL dilakukan secara profesional dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan & Hukum. Spesialis Tata Kelola bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan program dan anggaran TJSL, dan melakukan penilaian secara independen terhadap program TJSL berdasarkan RKAP.

The CSR program is conducted along with the strategy of business development. The CSR program is managed professionally and becomes part of the duties and responsibilities of the Legal & Corporate Secretary. The Corporate Governance Specialist is responsible for planning and implementing the CSR program and budget, and making an independent evaluation of the program based on the RKAP.

## Realisasi Anggaran Program TJSL

### Realization of the Budgets for CSR Programs

Secara keseluruhan, anggaran CSR Perseroan tahun 2022 untuk 4 (empat) bidang adalah sebesar Rp610.000.000. Realisasinya hingga Desember 2022 adalah sebesar Rp538.988.750. Jumlah realisasi ini menurun tipis dibandingkan jumlah tahun sebelumnya yang mencapai Rp571.700.000.

In overall, the Company's CSR budget in 2022 was set for the following 4 (four) fields which amounted Rp610,000,000. The realization until December 2022 amounted to Rp538,988,750. The amount of realization was slightly lower compared to last year's amount of Rp571,700,000.

No.	Program CSR CSR Programs	Jumlah Dana (Rp) Total Budget (Rp)
1.	Pendidikan Education	26.388.670
2.	Lingkungan Environment	15.000.000
3.	Kesehatan Healthcare	93.350.000
4.	Kemasyarakatan & Sosial Social & Community Welfare	404.250.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>538.988.750</b>

## Informasi TJSJ Lainnya Diungkapkan pada Laporan Keberlanjutan Tahun 2022

### Other Information Related to TJSJ is Disclosed in the Sustainability Report 2022

Setelah menjabarkan komitmen, struktur, metode, penerima manfaat, dan biaya TJSJ, selanjutnya Perseroan akan mengungkapkan mengenai program-program TJSJ yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Pengungkapan program disampaikan secara singkat mencakup fokus strategi dan pelaksanaan program. Berhubung Perseroan juga menerbitkan buku Laporan Keberlanjutan yang pertama kalinya, maka para pembaca diharapkan juga membaca buku Laporan Keberlanjutan tahun 2022 dari MTI untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja keberlanjutan Perseroan, terutama terkait program-program TJSJ di luar pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

After describing the commitments, structure, methods, recipients, and CSR budget, the Company will then disclose the CSR programs throughout 2022. Information about the program will be disclosed by focusing on the strategy and implementation of the program. Since the Company is also publishing its first Sustainability Report, readers are encouraged to also read the 2022 Sustainability Report of MTI to get a clear picture of the Company's sustainability performance, especially for other programs outside the community and social development.

## Program-Program TJSJ CSR Programs

### Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Pengembangan sosial dan kemasyarakatan menjadi tanggung jawab unit kerja Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum. Secara umum, Perseroan berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/komunitas lokal di sekitar Perseroan. Upaya ini direalisasikan melalui sejumlah program pada tahun 2022 yang berfokus pada aktivitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Perseroan telah melakukan pemetaan melalui pendekatan *top down (company interest)* dan *bottom up*, melalui studi pemetaan sosial dan workshop dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan pemetaan dan *workshop* yang telah dilakukan Perseroan, dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, penerima manfaat dari program TJSJ adalah:

1. Masyarakat kelompok rentan, seperti masyarakat miskin;
2. Tempat ibadah;
3. Sekolah seperti Sekolah Dasar, Pendidikan Kejuruan, Pendidikan Umum;
4. Kelompok pemuda binaan;
5. Pekerja lokal.

Berikut disampaikan realisasi program-program TJSJ tahun 2022 di bidang sosial kemasyarakatan, beserta dengan total biaya, dan dokumentasi.

### Social and Community Development

The social and community development becomes the responsibility of the Corporate Secretary & Legal Division. In general, the Company has set its focus on helping the local community around the Company's vicinity. The Company has conducted several programs in 2022 which focused on several activities in the education, health, and social fields.

The Company has also conducted a mapping mechanism through a top down (*company interest*) and bottom up approaches using the social mapping study and workshop with stakeholders. Based on the mapping and workshops that the Company has conducted, in consideration of the Company's interest, the beneficiaries of our CSR programs are:

1. Vulnerable groups, such as the underprivileged;
2. Places of worship;
3. Schools such as Elementary Schools, Vocational Schools, General Education;
4. Fostered youth groups;
5. Local employees.

The following is the realization of TJSJ programs of 2022 in the social community sector, along with its total costs and documentation.

### Bantuan Pendidikan Educational Assistance



Perseroan, bekerja sama dengan Pelindo Group, mengadakan program Kejar Paket B untuk mendapatkan ijazah SLTP bagi warga Kalibaru yang tidak mampu. MTI menghabiskan dana sebesar Rp26.388.750 untuk mendukung pelaksanaan program ini.

The Company, in collaboration with the Pelindo Group, has held a Kejar Paket B program to obtain junior high school diplomas for the residents of Kalibaru. MTI spent Rp26,388,750 to support this program.

### Bantuan Kesehatan Healthcare Assistance



MTI mengadakan program pemeriksaan penglihatan untuk anak-anak di jenjang Sekolah Dasar yang masuk dalam kategori tidak mampu. Pemeriksaan ini juga berfungsi untuk mendeteksi secara dini apabila mereka memiliki kekurangan buta huruf. Dalam kesempatan ini Perseroan juga memberikan kaca mata baca secara cuma-cuma. Perseroan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp93.350.000 untuk mendukung kegiatan ini.

MTI organized a social program to assess the eyesight of elementary students who are categorized as poor. This assessment also useful as an early preventive measure if any of them had a tendency to suffer from illiteracy. On this occasion the Company also gave free reading glasses. The Company has spent Rp93,350,000 to support this activity.



**Sosial & Kemasyarakatan**  
**Social & Community**



**Pembagian Takzil**  
Distribution of Breakfasting Meal Packages



**Santunan Anak Yatim Piatu**  
Donation to Orphans



**Pembagian Sembako Gratis**  
Donation of Staple Foods



**Bantuan Kaki Palsu**  
Prosthetic Leg Donation



**Bantuan Hewan Qurban**  
Donation of Sacrificial Animals



**Bantuan Bencana Gempa Bumi Cianjur**  
Donation for Victims of Cianjur Earthquake

Perseroan mengadakan sejumlah kegiatan CSR berbeda di bidang sosial & kemasyarakatan.

The Company has organized a number of CSR activities in this social & community field.

Dalam rangka perayaan Ramadhan, Perseroan mengadakan sejumlah kegiatan yaitu pemberian santunan anak yatim piatu sejumlah Rp15 juta dan pembagian bingkisan takzil untuk para sopir di Pelabuhan Tanjung Priok sejumlah Rp7 juta. Pada saat bulan Ramadhan, Perseroan juga memberikan bantuan dana sebesar Rp5 juta untuk Yayasan Al-Bayan Jakarta dan bantuan lainnya sebesar Rp1,5 juta untuk warga di wilayah Talang Duku, Jambi.

In celebrating Ramadhan, the Company has held a number of activities, such as donation to orphans in the amount of Rp15 million and meal packages for breakfasting for drivers around Tanjung Priok Port which amounted Rp7 million. During Ramadhan month, the Company also donated Rp5 million for the Jakarta Al-Bayan Foundation and gave several assistance packages amounted Rp1.5 million for residents of the Talang Duku in Jambi.

Selain perayaan Ramadhan, Perseroan juga memeriahkan perayaan Idul Adha dengan bantuan hewan qurban berjumlah Rp230 juta.

In addition to the Ramadhan celebration, the Company also supported the Eid al-Adha celebration by donating sacrificial animals worth Rp230 million in total.

Selain perayaan Ramadhan, Perseroan juga membagikan sejumlah sembako. Perseroan membagikan sembako sebanyak 300 paket di wilayah Pontianak dalam rangka "Pelindo Berbagi Sembako" dan menghabiskan biaya sebesar Rp45 juta. Pembagian sembako juga dilakukan untuk masyarakat umum & TKBM dengan biaya Rp12 juta. Bantuan sembako juga diberikan dalam rangka percepatan Vaksin Covid-19 yang berkolaborasi dengan PSL dan menghabiskan dana Rp10 juta.

In addition to the Ramadhan celebration, the Company also distributed a number of staple food packages. The Company distributed 300 packages in Pontianak to support the "Pelindo Sharing" activity and the activity costed the Company Rp45 million. Staple food packages were also distributed to the general public & TKBM worth Rp12 million. They were also distributed to accelerate the Covid-19 vaccine acceleration and the Company collaborated with PSL in this program and spent Rp10 million.

Perseroan juga memberikan bantuan kaki palsu untuk kaum disabilitas dengan total Rp43,75 juta. Selain itu Perseroan juga memberikan bantuan berupa makanan dan bantuan lainnya untuk membantu korban gempa bumi Cianjur dengan total mencapai Rp20 juta.

The Company also donated prosthetics for people with disabilities totaling Rp43.75 million. In addition, the Company also helped the victims of Cianjur earthquake in the form of food and others amounted Rp20 million.



## Pelestarian Lingkungan Hidup Environmental Preservation

Pelestarian lingkungan hidup menjadi tanggung jawab unit kerja Divisi Operasi, Divisi Sistem Informasi & Teknik. Strategi yang ditetapkan berfokus kepada pengelolaan dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasional Perseroan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Program kerja yang telah dilakukan terkait pelestarian lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan energi dan air;
2. Pengendalian emisi;
3. Pengelolaan limbah, baik limbah B3 dan Non-B3;
4. Kepatuhan terhadap peraturan tentang Lingkungan Hidup.

Selain menjalankan program kerja rutin seperti yang telah diungkapkan, Perseroan juga menjalankan sebuah program yaitu penanaman 25.100 benih mangrove Bersama SPSL Group di Mangunharjo, Semarang. Biaya yang dikeluarkan untuk program ini adalah sebesar Rp15.000.000.

Environmental preservation is the responsibility of the Operations Division, Information Systems & Engineering Division. The strategy that the Company has set is focusing to managing the negative impacts that might come from the Company's operational activities against the environmental sustainability.

The programs that the Company has conducted in preserving the environment were as follows:

1. Managing the energy and water consumption;
2. Controlling the emission;
3. Managing both hazardous and non-hazardous waste;
4. Complying with regulations concerning the Environment.

In addition to the routine programs which mentioned earlier, the Company has also conducted a program of planting 25,100 mangrove seeds in Mangunharjo, Semarang with the SPSL Group. The Company spent Rp15,000,000 for this program.



## Pelaksanaan Operasi yang Adil

### Fair Operation

Pelaksanaan operasi yang adil menjadi tanggung jawab unit kerja Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum, Divisi Internal Audit, Divisi SDM & Umum. Strategi yang ditetapkan berfokus kepada pencegahan terjadinya konflik dan benturan kepentingan, tindakan korupsi dan *fraud*, pelaksanaan praktik pengadaan barang dan jasa yang adil dan transparan, serta menghormati Hak Kekayaan Intelektual.

Program kerja yang telah dilakukan terkait pelaksanaan operasi yang adil adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Pakta Integritas;
2. Pencegahan benturan kepentingan;
3. Keterlibatan dalam aktivitas politik yang bertanggung jawab;
4. Pengendalian gratifikasi;
5. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
6. Proses pengadaan yang adil dan transparan;
7. Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Pembahasan terkait operasi yang adil tidak dapat dilepaskan dari praktik Tata Kelola Organisasi yang menjadi tanggung jawab unit kerja Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum, Divisi Internal Audit, Divisi Operasi. Strategi yang dijalankan berfokus kepada pelaksanaan tata kelola yang mengacu kepada 5 (lima) prinsip GCG yaitu Transparansi/Keterbukaan, Akuntabilitas, Responsibilitas/Pertanggungjawaban, Independensi/Kemandirian, Kewajaran & Kesetaraan.

Program kerja yang telah dilakukan terkait pelaksanaan operasi yang adil dari sisi tata kelola organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *assessment* GCG;
2. Evaluasi kinerja organ tata kelola perusahaan sistem pengendalian internal, dan sistem manajemen risiko;
3. Pemenuhan keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan Perseroan dan publik.

To ensure the Company applies a fair operation, the responsibility lies with the Corporate Secretary & Legal Division, Internal Audit Division, HR & General Affairs Division. The strategy that the Company has set is focusing to prevent conflicts and conflicts of interest, as well as corruption and fraud, implementing fair and transparent procurement of goods and services, and respecting Intellectual Property Rights.

The programs that the Company has conducted in ensuring a fair operation were as follows:

1. Signing of the Integrity Pact;
2. Preventing conflict of interest;
3. Conducting a responsible political activity;
4. Gratuity control;
5. Submission of State Officer Wealth Reports (LHKPN);
6. Fair and transparent procurement process;
7. Respect for Intellectual Property Rights.

Fair operations cannot be separated from the Organizational Governance practice and this is the responsibility of several units including the Corporate Secretary & Legal Division, Internal Audit Division, and Operations Division. The strategy focuses on the corporate governance which refers to the 5 (five) principles including Transparency/Openness, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness & Equality.

The programs that have been carried out regarding fair operations in terms of organizational governance were as follows:

1. GCG assessment;
2. Assessment of the corporate governance organs, the internal control system and the risk management system;
3. Information disclosure for the Company's stakeholders and the public.

## Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia

### Protection and Enforcement of Human Rights

Perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia menjadi tanggung jawab unit kerja Divisi Sekretaris Perusahaan & Hukum, Divisi SDM & Umum. Strategi yang ditetapkan berfokus kepada pemenuhan hak asasi manusia dalam menjalankan aktivitas operasional Perseroan. Program kerja yang telah dilakukan terkait hak asasi manusia adalah pengakuan keberadaan Serikat Pekerja dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2021-2023.

The protection and enforcement of human rights is the responsibility of the Corporate Secretary & Legal Division, HR & General Affairs Division. The fulfillment of the human rights is focused on the Company's operational activities. The realization in fulfilling the human rights is done through the acknowledgment of the existence of a Trade Union and the signing of the 2021-2023 Collective Labor Agreement.

## Praktik Ketenagakerjaan dan Perlindungan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

### Employment Practices and Protection on Employee Health and Safety

Praktik ketenagakerjaan yang sesuai dengan undang-undang dan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja menjadi tanggung jawab Divisi SDM & Umum, Divisi Operasi. Strategi yang ditetapkan berfokus kepada pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka menjadi Insan Perseroan yang kompeten di bidangnya. Selain itu Perseroan juga berfokus untuk memberikan jaminan keselamatan dan fasilitas kesehatan yang memadai di lingkungan kerja.

Program kerja yang telah dilakukan adalah:

1. Memastikan bahwa Perseroan telah melakukan proses rekrutmen yang adil dan transparan;
2. Menjalankan program pengembangan kompetensi dan pengembangan karier pekerja;
3. Memiliki program remunerasi dan kesejahteraan pekerja yang sesuai dengan regulasi pemerintah;
4. Menjalankan program keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja secara bertanggung jawab.

Employment practices that are in accordance with the law and the protection for employees in terms of their health and safety are the responsibility of the HR & General Affairs Division, and the Operations Division. The Company has set a strategy with a focus of managing and improving Human Resources to become competent personnel. In addition, the Company has also focused on providing adequate safety guarantees and health facilities within the work environment.

The programs that have been conducted were:

1. Ensuring that the Company has carried out a fair and transparent recruitment process;
2. Conducted various programs regarding employee competency development and career development;
3. Have a remuneration and welfare program for employees that have followed the government regulations;
4. Conducted safety and health programs responsibly.

## Tanggung Jawab Produk & Perlindungan Pelanggan

### Product Responsibility & Customer Protection

Dalam hal ini, unit yang secara khusus bertanggung jawab adalah Divisi Pengembangan Bisnis dan Divisi Pemasaran. Strategi yang ditetapkan Perseroan berfokus kepada transparansi terkait informasi produk dan layanan. Selain itu Perseroan juga berfokus untuk melindungi pelanggan dari segala macam kesalahan yang dapat berdampak buruk bagi mereka.

Realisasi yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2022 berpusat pada kemudahan akses informasi terkait produk dan jasa bagi pelanggan, penanganan pengaduan pelanggan secara tepat dan efisien, serta upaya-upaya lain yang berfungsi untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan.

In this case, the Company has set two units to responsible for this and they are the Business Development Division and the Marketing Division. The strategy that the Company has set is to focus on transparency when it comes to the information of product and service. In addition, the Company also set to focus on protecting customers from all kinds of mistakes that might have a negative impact on them.

The realization that has been carried out by the Company in 2022 was centered on easy access to information related to products and services, appropriate and efficient handling of customer complaints, as well as various efforts that function to strengthen the relationships with customers.





NICHIIYA

C

SICOS  
AC 20

070

PELINDO  
SOLUSI LOGISTIK  
MTI MULTI SCM

ASET  
PT MTI

ASET NAMA		SICROS	
Merk		SICROS	
Model		SICROS	
Tipe		SICROS	
Warna		SICROS	
Merk Produsen		SICROS	
Produksi		SICROS	
Cetakan		SICROS	



8

# Laporan Keuangan

Financial Report

---



## PT Multi Terminal Indonesia

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/  
*Financial statements as of December 31, 2022 and  
for the year then ended with independent auditor's' report*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
PT MULTI TERMINAL INDONESIA**

**DIRECTOR'S STATEMENT  
ON  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED  
PT MULTI TERMINAL INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

*I, the undersigned:*

1. Nama/*Name*

: Ruri Indrasari Rachmaputri

Alamat kantor/*Office address*

: Jl. Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, Indonesia

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Domicile address/in accordance with personal identity card*

: Jl. Pahlawan No 15 RT 006 RW 007 Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat

Jabatan/*Title*

: Direktur Utama/*President Director*

menyatakan bahwa:

*declare that:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

1. *Responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements December 31, 2022 and for the year then ended.*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;*  
b. *The Company's financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *Directors are responsible for the Company's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Atas nama dan mewakili direksi

*For and on behalf of directors*

Jakarta, 20 April 2023/April 20, 2023



**Ruri Indrasari Rachmaputri**  
Direktur Utama/*President Director*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**

Jl. Pulau Payung No. 1 Tanjung Priok, Jakarta 14310  
Telp. (021) 29104000  
Email : [customercare@multiterminal.co.id](mailto:customercare@multiterminal.co.id)

[www.multiterminal.co.id](http://www.multiterminal.co.id)



The original financial statements included herein  
are in the Indonesian language.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN  
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022  
AND FOR THE YEAR ENDED  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

	<u>Halaman/Pages</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan .....	1 - 2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas .....	4	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas .....	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan .....	6 - 88	<i>Notes to the Financial Statements</i>

\*\*\*\*\*



## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-  
3/1/IV/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan  
Direksi  
PT Multi Terminal Indonesia

## Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Multi Terminal Indonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Independent Auditor's Report

Report No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-  
3/1/IV/2023

*The Shareholders and the Boards of  
Commissioners and Directors  
PT Multi Terminal Indonesia*

## Opinion

*We have audited the accompanying financial statements of PT Multi Terminal Indonesia (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

## Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

### Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

### Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

## Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

### Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations or has no realistic alternative but to do so.

### Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

### Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

### Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

### Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

### Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



### Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

### Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

### Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

### Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.



### Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (lanjutan)

### Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

### Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/IV/2023 (continued)

### Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Independent Auditor's Report (continued)**

Laporan No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-  
3/1/IV/2023 (lanjutan)

Report No. 00995/2.1032/AU.1/06/0697-  
3/1/IV/2023 (continued)

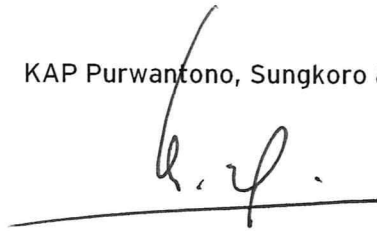
**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas  
laporan keuangan (lanjutan)**

**Auditor's responsibilities for the audit of the  
financial statements (continued)**

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwanto, Sungkoro & Surja



**Moch. Dadang Syachruna**

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/Public Accountant Registration No. AP.0697

20 April 2023/April 20, 2023



00995

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**As of December 31, 2022**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
		5,20		
Kas dan setara kas	336.451.923	28,29	192.776.700	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha - neto		6,20,28		<i>Trade receivables - net</i>
Pihak ketiga	38.313.574		59.199.632	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	51.112.284	28	47.937.008	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain - neto		20		<i>Other receivables - net</i>
Pihak ketiga	899.892		1.068.142	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	184.267.972	28	147.432.858	<i>Related parties</i>
Persediaan	707.633	7	707.633	<i>Inventories</i>
Pendapatan masih akan diterima		8,20		<i>Accrued revenues</i>
Pihak ketiga	19.938.729		18.769.374	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	16.240.057	28	30.217.180	<i>Related parties</i>
Uang muka	64.225		37.200	<i>Advances</i>
Pajak dibayar di muka	3.811.793	15a	10.171.320	<i>Prepaid taxes</i>
Beban dibayar di muka	16.284.607	9	21.665.004	<i>Prepaid expenses</i>
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>668.092.689</b>		<b>529.982.051</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Investasi saham	3.889.237		3.889.237	<i>Investment in shares of stock</i>
Aset tetap - neto	178.683.804	10	257.198.875	<i>Fixed assets - net</i>
Aset hak-guna - neto	-	11	191.961	<i>Right-of-use assets - net</i>
Beban ditangguhkan - neto	51.852.105	12	57.871.755	<i>Deferred charges - net</i>
Tagihan restitusi pajak	1.637.132	15f	4.807.739	<i>Estimated claims for tax refund</i>
Aset tidak lancar lain-lain	4.111.411	13	6.839.462	<i>Other non-current assets</i>
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>240.173.689</b>		<b>330.799.029</b>	<b>Total Non-current Assets</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>908.266.378</b>		<b>860.781.080</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2022**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)**  
**As of December 31, 2022**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Catatan/ Notes	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha		20,28		Trade payables
Pihak ketiga	3.591.146	14	1.579.668	Third parties
Pihak berelasi	160.475.380	28	168.648.856	Related parties
Utang lain-lain	1.409.891	16,20,28	1.529.562	Other payables
Utang dividen	100.000.000	17	-	Dividend payables
Utang pajak	2.016.283	15b	2.240.962	Taxes payable
Beban akrual	92.081.976	18,20,28	70.863.056	Accrued expenses
Uang titipan	5.251.035	19,20	5.521.367	Customer deposits
Liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	20	105.857	Current maturities of long-term lease liabilities
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>364.825.711</b>		<b>250.489.328</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas imbalan kerja	34.913.038	21	31.998.613	Employee benefit liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	7.630.955	15g	13.196.017	Deferred tax liabilities
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>42.543.933</b>		<b>45.194.630</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>407.369.704</b>		<b>295.683.958</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				<b>Equity attributable to owners of the parent entity</b>
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham				Share capital - par value of Rp500 (full amount) per share
Modal dasar - 57.000.000 saham				Authorized capital - 57,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 34.629.439 saham	17.314.720	22	17.314.720	Issued and fully paid - 34,629,439 shares
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	376.713.890	23	526.713.890	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	106.868.064		21.068.512	Unappropriated
<b>Ekuitas - neto</b>	<b>500.896.674</b>		<b>565.097.122</b>	<b>Equity - net</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>908.266.378</b>		<b>860.781.080</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN**  
**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**  
**31 Desember 2022**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS**  
**AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**For the Year Ended December 31, 2022**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/  
Year Ended December 31,

	2022	Catatan/ Notes	2021	
Pendapatan operasi	612.413.190	24	571.668.330	Operating revenues
Beban operasi	(537.433.940)	25	(541.129.353)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya	16.920.487	26a	891.886	Other operating income
Beban operasi lainnya	(2.760.889)	26b	(12.039.747)	Other operating expenses
<b>LABA USAHA</b>	<b>89.138.848</b>		<b>19.391.116</b>	<b>INCOME FROM OPERATIONS</b>
Pendapatan keuangan	5.780.785	27a	3.934.472	Finance income
Beban keuangan	(834.989)	27b	(736.991)	Finance cost
<b>LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>94.084.644</b>		<b>22.588.597</b>	<b>INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX</b>
Beban pajak final	(16.352.451)		(11.489.597)	Final tax expense
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	<b>77.732.193</b>		<b>11.099.000</b>	<b>INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>				<b>CORPORATE INCOME TAX</b>
Kini	-	15d	-	Current
Tangguhan	6.115.567	15e,15g	(1.035.417)	Deferred
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>83.847.760</b>		<b>10.063.583</b>	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF INCOME TAX</b>
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Item that will not be reclassified to profit or loss</b>
Pengukuran kembali program imbalan pasti	2.502.298		1.304.457	Remeasurements of defined benefit plans
Pajak penghasilan terkait	(550.506)		(286.981)	Related income tax
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.951.792</b>		<b>1.017.476</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF INCOME TAX</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>85.799.552</b>		<b>11.081.059</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the Year Ended December 31, 2022**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share capital	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Saldo laba/Retained earnings Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Ekuitas - neto/ Equity - net	Balance as of December 31, 2020
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>		<b>17.314.720</b>	<b>526.713.890</b>	<b>9.987.453</b>	<b>554.016.063</b>	<b>554.016.063</b>
Penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali program imbalan pasti		-	-	1.017.476	1.017.476	Other comprehensive income - remeasurements of defined benefit plans
Laba tahun berjalan		-	-	10.063.583	10.063.583	Income for the year
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>		<b>17.314.720</b>	<b>526.713.890</b>	<b>21.068.512</b>	<b>565.097.122</b>	<b>565.097.122</b>
Dividen	23	-	(150.000.000)	-	(150.000.000)	Dividend
Penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali program imbalan pasti		-	-	1.951.792	1.951.792	Other comprehensive income - remeasurements of defined benefit plans
Laba tahun berjalan		-	-	83.847.760	83.847.760	Income for the year
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>		<b>17.314.720</b>	<b>376.713.890</b>	<b>106.868.064</b>	<b>500.896.674</b>	<b>500.896.674</b>

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
 31 Desember 2022  
 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
 kecuali dinyatakan lain)

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS**  
 For the Year Ended December 31, 2022  
 (Expressed in Thousands of Rupiah,  
 unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2022	Catatan/ Notes	2021	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	704.804.219		546.308.583	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada supplier	(464.455.907)		(428.489.782)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(53.399.915)		(82.423.373)	Payment to employees
Penerimaan pengembalian pajak	12.906.949		1.588.418	Receipt of tax refund
Pembayaran pajak	(53.981.654)		(2.625.108)	Payment for income taxes
Penerimaan bunga deposito	5.780.785		3.934.472	Receipt of interest from deposit
Pembayaran beban bunga	(834.989)		(736.991)	Payment of interest expense
<b>Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>150.819.487</b>		<b>37.556.219</b>	<b>Net cash flow provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dividen kas	424.206		78.938	Receipt of cash dividend
Pembelian aset tetap	(5.964.290)	9	(2.383.104)	Purchase of fixed assets
Penjualan aset tetap	36.671.590		-	Sales of fixed assets
<b>Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>31.131.506</b>		<b>(2.304.166)</b>	<b>Net cash flow provided by (used in) investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran liabilitas sewa	(105.857)	10	(1.005.872)	Payment of lease liabilities
Pembayaran dividen kas	(50.000.000)	23	-	Payment of cash dividend
<b>Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(50.105.857)</b>		<b>(1.005.872)</b>	<b>Net cash flow used in financing activities</b>
<b>Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas</b>	<b>11.830.088</b>		<b>14.560.828</b>	<b>Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents</b>
<b>KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>131.845.135</b>		<b>48.807.009</b>	<b>INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>192.776.700</b>	5	<b>143.969.691</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>336.451.923</b>	5	<b>192.776.700</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR</b>

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum**

PT Multi Terminal Indonesia ("Perusahaan") didirikan dengan akta notaris No. 15 oleh Herdimansyah Chaidirsyah SH, notaris di Jakarta tanggal 15 Februari 2002. Anggaran dasar Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan No. C-06123.HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 April 2002.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir mengenai penambahan kegiatan usaha berdasarkan yang diaktakan melalui akta notaris No. 5 tanggal 28 November 2022 dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0093174.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022.

Perusahaan berkantor pusat di Jl. Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Saat ini, Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, kepabeanan, dan lainnya.

Pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh saham Perusahaan milik Pelindo dialihkan kepada PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") (Catatan 22).

Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.

**1. GENERAL**

**a. Establishment of the Company and general information**

*PT Multi Terminal Indonesia (the "Company") was established by notarial deed No. 15 Herdimansyah Chaidirsyah SH, notary in Jakarta on February 15, 2002. Articles of Association of the Company has been approved by the Minister of Justice and Human Right of the Republic of Indonesia in accordance with decree No. C-06123.HT.01.01.TH.2002 dated April 11, 2002.*

*The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest related to addition of business activity through notarial deed No. 5 dated November 28, 2022 of Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., in Jakarta. Amendment to the Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-0093174.AH.01.02.Year 2022 dated December 22, 2022.*

*The Company's head office is located at Jl. Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara.*

*Currently, the Company engages in transportation, warehousing, cargo consolidation, customs, and others.*

*On March 1, 2022, all of the Company's shares owned by Pelindo are transferred to PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") (Note 22).*

*The Company's parent is PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") and its ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.*



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

**b. Board of Commissioners, Directors and Employees**

Pada tanggal 31 Desember 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

**31 Desember 2022/December 31, 2022**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris  
Komisaris

Roy Leonard  
Edison Simanjuntak  
Buyung Lalana  
Sahat Martin Philip Sinurat

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Commissioner

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur Keuangan dan SDM  
Direktur Operasi  
Direktur Komersial dan  
Pengembangan Bisnis

Ir. Gunta Prabawa  
Budi Azmi  
Ruri Indrasari Rachmaputri  
Ruri Indrasari Rachmaputri

**Directors**

President Director  
Finance and HR Director  
Operation Director  
Commercial and Business  
Development Director

**31 Desember 2021/December 31, 2021**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris  
Komisaris

Ogi Rulino  
Edison Simanjuntak  
Buyung Lalana  
Solikhin

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Commissioner

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur Keuangan dan SDM  
Direktur Operasi  
Direktur Komersial dan  
Pengembangan Bisnis

Ir. Gunta Prabawa  
Budi Priyanto  
Ruri Indrasari Rachmaputri  
Ruri Indrasari Rachmaputri

**Directors**

President Director  
Finance and HR Director  
Operation Director  
Commercial and Business  
Development Director

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing 366 dan 367 karyawan (tidak diaudit). Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki 14 karyawan tetap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo"), entitas induk, yang ditugaskan di Perusahaan.

As of December 31, 2022, and 2021, the Company has 366 and 367 employees, respectively (unaudited). As of December 31, 2022, the Company has 14 permanent employees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo"), a parent entity, which were assigned to the Company.

**c. Mata uang pelaporan**

**c. Reporting currency**

Mata uang fungsional dan pelaporan Perusahaan adalah Rupiah.

The Company's functional and reporting currency is Indonesian Rupiah.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 20 April 2023. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI").

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**1. GENERAL (continued)**

**d. Completion of financial statements**

The management is responsible for the preparation of these financial statements which were completed and authorized for issuance on April 20, 2023. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the financial statements, which have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

**a. Basis of preparation of the financial statements**

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI")

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the financial statements herein.

The statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

**Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71:  
Instrumen Keuangan**

Amandemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain

Amandemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 73: Sewa**

Amandemen ini diterapkan secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan namun amandemen ini tidak diekspektasikan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Perusahaan pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**c. Klasifikasi lancar dan tak lancar**

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles  
(continued)**

*The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2022, including the following revised standards that have affected the financial statements of the Company:*

**2020 Annual Improvements - PSAK 71:  
Financial Instruments**

*The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the modified terms of a financial liability required derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf.*

*The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first-time adoption.*

**2020 Annual Improvements - PSAK 73:  
Leases**

*The amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022, with earlier adoption permitted but not expected to have any impact to the financial reporting of the Company upon first-time adoption.*

**c. Current and non-current classification**

*The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:*

- 1) *expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- 2) *held primarily for the purpose of trading,*
- 3) *expected to be realized within 12 months after the reporting period, or*
- 4) *cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)**

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

**d. Pengukuran Nilai Wajar**

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Current and non-current classification  
(continued)**

All other assets are classified as non-current

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**d. Fair Value Measurement**

The Company initially measure financial instruments at fair value.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i) In the principal market for the asset or liability, or
- ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**d. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)**

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Fair Value Measurement (continued)**

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1* - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- ii) *Level 2* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- iii) *Level 3* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**d. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)**

Tim pelaporan keuangan Perusahaan bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Perusahaan dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

**e. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

Berikut ini adalah kurs mata uang asing (angka penuh) yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	<b>2022</b>
Dolar Amerika Serikat (\$AS) 1	15.731

**f. Transaksi dengan pihak berelasi**

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 28.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Fair Value Measurement (continued)**

The Company's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Company and external valuers.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**e. Foreign currency transactions and balances**

Below are the exchange rates (full amount) used for translation as of December 31, 2022 and 2021:

	<b>2021</b>	
	14.269	United States Dollar (USD) 1

**f. Transactions with related parties**

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 28.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the financial statements are unrelated parties.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas meliputi kas, bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi atau dijadikan jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

**h. Instrumen Keuangan**

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

**Aset Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less from the date of placement and not restricted or pledged as collateral for loans and other borrowings.

**h. Financial Instruments**

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

**Financial Assets**

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2p.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLRL).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

*Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)*

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dan uang jaminan yang merupakan bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, accrue revenues, and guarantee deposits under other non-current financial assets.



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

*Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas)*

Pada pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Perusahaan memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

*For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.*

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

*Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.*

*Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.*

*The Company elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Perusahaan diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan) Perusahaan ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Company had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

The Company does not own financial assets FVTPL.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired or;

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan) Perusahaan ketika: (lanjutan)

- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**h. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Derecognition (continued)

*A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when: (continued)*

- *The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

*When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.*

*Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Impairment

*The Company recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.*

*ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).*

*Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.*



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai (lanjutan)

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 180 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

**Liabilitas Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, uang titipan dan liabilitas sewa.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

*Liabilitas keuangan pada NWLR*

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Impairment (continued)

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 180 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

**Financial Liabilities**

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade payables, other payables, accrued expense, customer deposits and lease liabilities.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Perusahaan dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

**i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga**

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

*Financial liabilities at FVTPL (continued)*

*Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.*

*Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.*

*Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at FVTPL.*

*Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)*

**i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings**

*Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.*

*Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman) (lanjutan)

ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha, utang lain-lain beban akrual, uang titipan dan liabilitas sewa dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings) (lanjutan)

ii) Payables and Accruals

Liabilities for trade payables, other payables, accrued expenses, customer deposits and lease liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

**Offsetting of Financial Instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
**(lanjutan)**

**i. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang dan termasuk semua pengeluaran untuk memperoleh persediaan, biaya produksi atau konversi, dan biaya lainnya yang timbul untuk membawa persediaan ke tempat dan kondisi saat ini. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pinjaman. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualannya.

Persediaan milik Perusahaan terdiri dari pelumas dan suku cadang.

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

**j. Beban dibayar di muka**

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

**k. Aset tetap**

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan rugi penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Termasuk juga ke dalam biaya perolehan adalah biaya-biaya penggantian bagian dari aset tetap jika biaya itu terjadi, dan apabila terdapat kemungkinan yang besar bahwa Perusahaan akan mendapat manfaat ekonomis di masa depan dari bagian aset tersebut serta biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Demikian pula, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**  
**POLICIES (continued)**

**i. Inventories**

*Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted average cost method and includes expenditure incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing the inventory to its existing location and condition. It excludes borrowing costs. Net realizable value is the estimated sales amount in the ordinary course of business less the costs of completion and selling expenses.*

*The Company's inventories consist of lubricant and spare parts.*

*The Company provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.*

**j. Prepaid expenses**

*Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.*

**k. Fixed assets**

*Property and equipment is stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Land is not depreciated. The cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when that cost is incurred, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied.*

*The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.*



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**k. Aset tetap (lanjutan)**

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Gedung dan bangunan	10 - 40
Fasilitas pelabuhan	4 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	3 - 10
Emplasemen	3 - 25
Kendaraan bermotor	5 - 8
Peralatan	3 - 5
Peralatan dan perabotan kantor	3

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya konstruksi aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Biaya perolehan atas aset dalam penyelesaian termasuk transfer keuntungan dan kerugian selisih kurs atas lindung nilai arus kas berkaitan dengan pengadaan aset tersebut.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Fixed assets (continued)**

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

Building and construction
Port facilities
Installation port facilities
Emplacement
Vehicles
Equipments
Office equipment and furnitures

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year in which the asset is derecognized.

The costs of the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. These costs are reclassified into fixed asset accounts when the construction or installation is complete. Depreciation of an asset begins when it is ready for use, i.e. when the asset is in the preferred location and condition to be readily used in accordance with intended by management. The costs of construction in progress include the transfer of foreign exchange gains and losses on qualifying cash flow hedges for the acquisition of assets.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate, at each end of reporting period.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**I. Sewa**

Perusahaan menilai pada saat insepri kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Note 2h).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**I. Lease**

*The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.*

The Company as lessee

*The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.*

Right-of-use-assets

*The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.*

*If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2h).*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**I. Sewa (lanjutan)**

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

*Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah*

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Perusahaan juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**I. Lease (continued)**

The Company as lessee (continued)

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Company also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**l. Sewa (lanjutan)**

Perusahaan sebagai pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

**m. Beban ditangguhkan**

Beban ditangguhkan merupakan pengeluaran untuk perbaikan sarana bongkar muat, biaya pengembangan lapangan penumpukan dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Biaya ditangguhkan disajikan di laporan posisi keuangan pada nilai bersihnya yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi pada periode berjalan dihitung dengan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaatnya. Beban ditangguhkan diamortisasi selama 2 - 30 tahun.

**n. Perpajakan**

Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46 "Pajak Penghasilan".

Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan keuangan sebagai bagian dari beban operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**l. Lease (continued)**

The Company as lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

**m. Deferred charges**

Deferred charges are expenditures for repair of loading and unloading facilities, development for yard and other expenses that have benefit of more than 1 (one) year. Deferred charges are disclosed in the statements of financial position at the net amount of cost less accumulated amortization. Amortization of the current period is computed with the straight-line method over estimated useful lives. Deferred charges are amortized over 2 - 30 years.

**n. Taxation**

Final tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scope out from PSAK 46 "Income Tax".

The Company present the final tax expense arising from finance income as part of operating expenses in the statements of profit or loss and other comprehensive income.



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**n. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam SPT sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Taxation (continued)**

Current tax

*Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.*

*Interest and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expenses.*

*Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.*

Deferred tax

*Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.*

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:*

- i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*
- ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**n. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Taxation (continued)**

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
- ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**n. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Taxation (continued)**

Deferred tax (continued)

*Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recognized subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.*

*The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

Value Added Tax

*Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:*

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

*The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**o. Imbalan kerja**

Imbalan pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku.

Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Employee benefits liabilities**

Post-employment benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA).

The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the *projected-unit-credit* method.



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**o. Imbalan kerja (lanjutan)**

Imbalan pascakerja (lanjutan)

**Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS *Interpretation Committee* ("IFRIC") *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* IAS 19. Perusahaan telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Perusahaan mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Mulai April 2022, berdasarkan siaran pers, Perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material di bawah program tersebut.

**p. Pengakuan pendapatan dan beban**

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisis transaksi melalui 5 (lima) langkah analisa berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Employee benefits liabilities (continued)**

Post-employment benefits (continued)

**Changes in Accounting Policy**

In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board ("DSAK IAI") issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: *Imbalan Kerja* which was adopted from IAS 19 *Employee Benefits*. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS *Interpretation Committee* ("IFRIC") *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* IAS 19. The Company has adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.

In prior years, the Company attribute benefits under the defined benefit plan's benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until their retirement age. Starting from April, 2022, based on the press release, the Company change the policy for attributing benefits under the plan to the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan.

**p. Revenue and expense recognition**

In determining revenue recognition, the Company perform analysis transaction through the following 5 (five) steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisis transaksi melalui 5 (lima) langkah analisis berikut: (lanjutan)

3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima dimuka".

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah.

**i) Penjualan jasa**

Pendapatan dari penjualan jasa diakui dalam laba rugi pada saat jasa diberikan. Untuk penjualan jasa yang mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal pelaporan, tingkat penyelesaian transaksi ditentukan dengan memperhatikan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Revenue and expense recognition  
(continued)**

*In determining revenue recognition, the Company perform analysis transaction through the following 5 (five) steps of assessment: (continued)*

3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

*Payment of the transaction price differs for each contract. Contract asset is recognised when performance obligation satisfied is more than the payments by customer. Contract liability is recognised when the payment by customer is more than the performance obligation satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred Income".*

*The specific criteria also must be met for each of the Company's activities as described below.*

**i) Sales of services**

*Revenue from sales of services is recognized in profit or loss when the services are rendered. For sales of services in which the service are rendered by reference to the stage of completion of the transaction at the reporting date, the stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

**p. Revenue and expense recognition  
(continued)**

**i) Penjualan jasa (lanjutan)**

**i) Sales of services (continued)**

Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

*Revenue from rendering of services is recognized when all of the following conditions are met:*

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Perusahaan;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

- the amount of revenue can be measured reliably;
- it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company;
- the stage of completion of the transaction at the reporting date can be measured reliably; and
- the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.

Bila hasil transaksi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. Taksiran rugi pada jasa segera diakui dalam laba rugi.

*When the outcome of a transaction involving the rendering of services cannot be estimated reliably, revenue is recognized only to the extent of the expenses recognized that are recoverable. An expected loss on a service is recognized immediately in profit or loss.*

**ii) Beban**

**ii) Expenses**

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

*Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).*

**q. Penurunan nilai aset non-keuangan**

**q. Impairment of non-financial assets**

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas, sebagai contoh *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan, tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai.

*Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill or intangible assets not ready for use - are not subject to amortization and are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired.*

Aset yang diamortisasi atau disusutkan ditinjau ulang ketika terdapat indikasi bahwa jumlah tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan sampai tingkat yang paling rendah dimana arus kasnya dapat diidentifikasi (Unit Penghasil Kas/"UPK").

*Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (Cash Generating Units/"CGU").*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**q. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)**

Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan kerugian penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak peninjauan ulang penurunan nilai yang terakhir. Pembalikan kerugian penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali untuk aset yang disajikan pada jumlah revaluasi yang diatur PSAK lain. Kerugian penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik kembali.

**r. Provisi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Impairment of non-financial assets  
(continued)**

*Non-financial assets other than goodwill that suffer an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.*

*Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognized if there had been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment loss will be immediately recognized in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK. Impairment loss relating to goodwill would not be reversed.*

**r. Provision**

*Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**s. Penerapan standar akuntansi baru**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 24 Februari 2022:

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023**

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Adoption of new accounting standards**

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of February 24, 2022:

**Effective beginning on or after January 1, 2023**

Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2023 and shall be applied retrospectively to items of property, plant and equipment made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Company.

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements – Classification of a Liability as current or non-current

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**s. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 24 Februari 2022: (lanjutan)

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)**

Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang (continued)

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan: (lanjutan)

- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggulangi liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan secara retrospektif.

Amandemen tersebut diekspektasikan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Adoption of new accounting standards (continued)**

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of February 24, 2022: (continued)

**Effective beginning on or after January 1, 2023 (continued)**

Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements – Classification of a Liability as current or non-current (continued)

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and shall be applied retrospectively.

The amendments are not expected to have a material impact on the financial reporting of the Company.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**s. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)**

**s. Adoption of new accounting standards  
(continued)**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 24 Februari 2022: (lanjutan)

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of February 24, 2022: (continued)

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1  
Januari 2023 (lanjutan)**

**Effective beginning on or after January 1,  
2023 (continued)**

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan  
keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan  
Akuntansi

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial  
statement - Disclosure of accounting policies

Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

This amendments provides guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

Amandemen ini berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Th The amendments are effective on or after 1 January 2023 with earlier application permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's accounting policy disclosures.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,  
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan  
terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies,  
Changes in Accounting Estimates and Errors –  
Definition of Accounting Estimates

Amandemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

The amendments introduces a definition of 'accounting estimates' and clarify the distinction between changes in accounting estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**s. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 24 Februari 2022: (lanjutan)

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1  
Januari 2023 (lanjutan)**

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi (lanjutan)

Amandemen tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**s. Adoption of new accounting standards  
(continued)**

*The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of February 24, 2022: (continued)*

**Effective beginning on or after January 1,  
2023 (continued)**

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors – Definition of Accounting Estimates (lanjutan)

*The amendments are effective on or after 1 January 2023 and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur on or after the start of that period. Earlier application is permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.*

Amendment of PSAK 46: Income Taxes – Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

*This amendment proposes that entities recognize deferred tax assets and liabilities at the time of initial recognition, for example from a lease transaction, to eliminate differences in current practice for such transactions and similar transactions.*

*The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.*



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**s. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan)**

**s. Adoption of new accounting standards  
(continued)**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan masih diestimasi pada tanggal 24 Februari 2022: (lanjutan)

*The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective, and the impact to the financial position and performance of the Company is still being estimated as of February 24, 2022: (continued)*

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1  
Januari 2024 (lanjutan)**

**Effective beginning on or after January 1,  
2024 (continued)**

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang  
dengan Kovenan

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities  
with Covenants

Amendemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

*This amendment clarifies that only covenants with which entities must comply on or before the reporting date will affect a liability's classification as current or non-current.*

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan.

*The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 with early adoption permitted.*

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam  
Jual Beli dan Sewa-balik

Amendment to PSAK 73: Lease Liability in a Sale  
and Leaseback

Amendemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

*The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.*

Amendemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Perusahaan saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perusahaan.

*The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after 1 January 2024. Earlier application is permitted. The Company is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Company's financial reporting.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban Perusahaan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional Perusahaan adalah dalam Rupiah.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.016.283 dan Rp2.240.962. Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 15b.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

**Judgments**

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of functional currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influence the Company's revenue and expenses. Based on the Company's management assessment, the Company's functional currency is the Rupiah.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2022, and December 31, 2021, was Rp2,016,283 and Rp2,240,962, respectively. Further details regarding taxation are disclosed in Note 15b.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.637.132 dan Rp4.807.739. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 15f.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Perusahaan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 11.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgments (continued)**

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

*Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amount of the Company's claims for tax refund and tax assessments under appeal as of December 31, 2022, and December 31, 2021, was Rp1,637,132 and Rp4,807,739, respectively. Further explanations regarding this account are provided in Note 15f.*

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Company as lessee

*The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.*

*The Company has several lease contracts that include extension and termination options. The Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Company considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.*

*Further disclosures of leases are made in Note 11.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp182.739.177 dan Rp190.872.951. Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimation and Assumptions**

*The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

Allowance for Impairment of Trade Receivables

*The Company estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.*

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

The carrying amount of the Company's trade receivables before allowance for impairment as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp182,739,176 and Rp190,872,951, respectively. Further details on trade receivables are disclosed in Note 6.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI  
AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap, termasuk tanaman produktif, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 30 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp178.683.804 dan Rp257.198.875. Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 10.

Imbalan kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimation and Assumptions (continued)**

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets, including bearer plants, are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 30 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The net carrying amount of the Company's fixed assets as of December 31, 2022, and December 31, 2021, was Rp178,683,804 and Rp257,198,875, respectively. Further details on fixed asset are disclosed in Note 10.

Employee benefit

The measurement of the Company's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Imbalan kerja (lanjutan)

Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp34.913.038 dan Rp31.998.613. Penjelasan lebih rinci atas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 21.

**4. REKLASIFIKASI AKUN**

Berikut adalah akun - akun pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah direklasifikasi untuk memungkinkan perbandingan mereka dengan akun pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022:

	<b>Sebelum reklasifikasi/ As previously reported</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Setelah reklasifikasi/ As reclassified</b>	
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	28.228.155	39.607.617	67.835.772	Third parties
Pihak berelasi	117.812.548	(39.607.617)	78.204.931	Related parties

**5. KAS DAN SETARA KAS**

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Kas	584.620	720.986	Cash on hand
Bank	143.141.779	53.281.934	Cash in banks
Deposito berjangka	192.725.524	138.773.780	Time deposits
<b>Total</b>	<b>336.451.923</b>	<b>192.776.700</b>	<b>Total</b>

**a. Kas**

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Rupiah	584.620	720.986	Rupiah

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimation and Assumptions (continued)**

Employee Benefit (continued)

The net carrying amount of the Company's employee benefits liability as of December 31, 2022, and December 31, 2021, was Rp34,913,038 and Rp31,998,613, respectively. Further details on employee benefits are disclosed in Note 21.

**4. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS**

Following are the accounts in the statements of financial position as of December 31, 2021 which have been reclassified to allow their comparison with the account in the December 31, 2022 financial statements:

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
<b>a. Cash on hand</b>			
Rupiah	584.620	720.986	Rupiah

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

**b. Bank**

	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>
Rupiah:		
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	33.294.654	928.735
PT Bank CIMB Niaga Tbk	466.060	465.828
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.000	4.300
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41.790.151	17.621.194
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22.339.480	868.097
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	18.958.671	12.118.127
<b>Subtotal</b>	<b>116.853.016</b>	<b>32.006.281</b>
Dolar AS:		
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.288.763	21.275.653
<b>Total bank</b>	<b>143.141.779</b>	<b>53.281.934</b>

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

**b. Cash in banks**

	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>
Rupiah:		
Third parties		
PT Bank Central Asia Tbk	928.735	928.735
PT Bank CIMB Niaga Tbk	465.828	465.828
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	4.300	4.300
Related parties		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.621.194	17.621.194
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	868.097	868.097
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	12.118.127	12.118.127
<b>Sub-total</b>	<b>32.006.281</b>	<b>32.006.281</b>
US Dollar:		
Related party		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21.275.653	21.275.653
<b>Total cash in banks</b>	<b>53.281.934</b>	<b>53.281.934</b>

**c. Deposito berjangka**

	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>
Rupiah:		
Pihak berelasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	78.000.000	68.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	47.268.887	28.796.530
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	41.563.119	16.207.845
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.000.000	20.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.893.518	5.769.405
<b>Total deposito berjangka</b>	<b>192.725.524</b>	<b>138.773.780</b>

**c. Time deposits**

	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>
Rupiah:		
Related parties		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	68.000.000	68.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	28.796.530	28.796.530
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	16.207.845	16.207.845
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.000.000	20.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.769.405	5.769.405
<b>Total time deposits</b>	<b>138.773.780</b>	<b>138.773.780</b>

Suku bunga tahunan atas deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on time deposits are as follows:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,</b>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Rupiah	2,50% - 5,00%	5,91% - 6,69%

Rupiah

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**6. PIUTANG USAHA**

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

**6. TRADE RECEIVABLES**

The details of trade receivables are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Terminal <i>multi purpose</i>			<i>Multi purpose terminal</i>
PT Renada Wira Samudera	2.115.380	2.242.880	<i>PT Renada Wira Samudera</i>
PT Mitra Karunia Samudra	1.972.849	1.972.849	<i>PT Mitra Karunia Samudra</i>
PT Anugrah Firdaus Mandiri	1.803.093	1.813.093	<i>PT Anugrah Firdaus Mandiri</i>
PT Angkasa Bongkar Muat Abadi	1.612.502	1.632.502	<i>PT Angkasa Bongkar Muat Abadi</i>
PT Prima Firdaus Mandiri	834.670	1.173.161	<i>PT Prima Firdaus Mandiri</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.363.322	1.385.822	<i>Others (each below Rp1 billion)</i>
Subtotal terminal <i>multi purpose</i>	9.701.816	10.220.307	<i>Sub-total multi purpose terminal</i>
Terminal peti kemas			<i>Container terminal</i>
PT Meratus Line	1.098.307	1.098.307	<i>PT Meratus Line</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	349.978	349.978	<i>Others (each below Rp1 billion)</i>
Subtotal terminal peti kemas	1.448.285	1.448.285	<i>Sub-total container terminal</i>
Logistik			<i>Logistic</i>
Penta-Ocean Construction Co., Ltd - TOA Corporation-Rinkai Nissan Construction Co., Ltd. - PT PP (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Konsorsium	23.387.394	39.607.617	<i>Penta-Ocean Construction Co., Ltd - TOA Corporation-Rinkai Nissan Construction Co., Ltd.-PT PP (Persero) Tbk- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Consortium</i>
PT Quarryndo Bukit Barokah	8.720.583	8.720.583	<i>PT Quarryndo Bukit Barokah</i>
PT Siswanto Logistik Indonesia	3.845.000	4.027.153	<i>PT Siswanto Logistik Indonesia</i>
PT Angkasa Bongkar Muat Abadi	3.112.984	3.112.984	<i>PT Angkasa Bongkar Muat Abadi</i>
PT Dwipa Manunggal Kontena	2.893.803	2.893.803	<i>PT Dwipa Manunggal Kontena</i>
PT Polyplex Film Indonesia	2.769.594	2.272.891	<i>PT Polyplex Film Indonesia</i>
PT Isamu Lestari Utama	2.572.895	2.572.895	<i>PT Isamu Lestari Utama</i>
PT Alumindo Light Metal Industry	2.326.224	2.326.224	<i>PT Alumindo Light Metal Industry</i>
PT OKI Pulp and Paper Mills	2.239.126	1.039.692	<i>PT OKI Pulp and Paper Mills</i>
PT Manguni Express	2.220.721	2.220.721	<i>PT Manguni Express</i>
PT Mayora Indah Tbk	2.132.009	186.496	<i>PT Mayora Indah Tbk</i>
PT Fazza Bakhti Nusantara	2.107.500	2.107.500	<i>PT Fazza Bakhti Nusantara</i>
PT Haki Mas Raya	2.047.519	2.082.519	<i>PT Haki Mas Raya</i>
PT Alam Manis Indonesia	1.845.246	2.115.387	<i>PT Alam Manis Indonesia</i>
PT Anugerah Citra Abadi	1.722.625	1.722.625	<i>PT Anugerah Citra Abadi</i>
PT Hero Supermarket Tbk	1.583.634	3.652.878	<i>PT Hero Supermarket Tbk</i>
PT Eka Wahana Indocon	1.576.872	1.576.872	<i>PT Eka Wahana Indocon</i>
PT Zum Global Indonesia	1.491.859		<i>PT Zum Global Indonesia</i>
PT Sinar Tambang Arthalestari	1.432.884	1.392.411	<i>PT Sinar Tambang Arthalestari</i>
PT Berkah Niat Ibadah	1.374.145		<i>PT Berkah Niat Ibadah</i>
PT Wahana Inti Selaras	1.217.249	584.413	<i>PT Wahana Inti Selaras</i>
PT Tirta Fresindo Jaya	1.132.143	860.154	<i>PT Tirta Fresindo Jaya</i>
PT Evo Nusa Bersaudara	1.131.585	49	<i>PT Evo Nusa Bersaudara</i>
PT Multi Structure	1.041.800	1.041.800	<i>PT Multi Structure</i>
PT Jatim Petroleum Transport	1.041.766	1.074.873	<i>PT Jatim Petroleum Transport</i>
CV Dita Jaya Abadi	1.025.762	1.025.762	<i>CV Dita Jaya Abad</i>
PT Maspion	916.911	916.911	<i>PT Maspion</i>
PT Delta Merlin Dunia Textile	883.095	948.663	<i>PT Delta Merlin Dunia Textile</i>
PT Damar Alam Selaras	877.155	122.586	<i>PT Damar Alam Selaras</i>
PT Citra Selaras Logistik	795.700	169.980	<i>PT Citra Selaras Logistik</i>
PT Mega Titian Nusantara Cargo Service	765.000	765.000	<i>PT Mega Titian Nusantara Cargo Service</i>
PT Star Trading International	724.444	1.045.094	<i>PT Star Trading International</i>
PT Jong International	723.094	407.131	<i>PT Jong International</i>
PT Suri Nusantara Jaya	709.449		<i>PT Suri Nusantara Jaya</i>
PT Intisehat Prima Makmur	695.086	913.500	<i>PT Intisehat Prima Makmur</i>
PT Amanah Samudra Logistik	685.685	1.012.547	<i>PT Amanah Samudra Logistik</i>
PT Wiharta Prametel	682.785	682.785	<i>PT Wiharta Prameta</i>

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**6. PIUTANG USAHA**

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
Logistik (lanjutan)		
PT Intisehat Sentosa	626.793	1.329.844
PT Inti Persada Transindo	566.804	566.804
PT Transworld Centralindo Logistik	566.153	566.153
PT Nindya Beton	556.309	806.309
PT So Good Food	528.563	526.484
PT Mustika Karya	525.306	525.306
PT Distribusi Mebel Nusantara	517.809	
PT Cahaya Kasih Setia	510.000	510.000
PT Sri Rejeki Isman Tbk	370.170	688.714
PT Citra Dermaga Perkasa	357.699	565.125
PT Sumber Pangan Utama	243.626	524.478
PT Delta Dunia Sandang Tekstil	152.327	513.132
PT Hakaaston	45.052	2.116.283
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 Juta)	28.458.855	26.826.220
<b>Subtotal logistik</b>	<b>120.476.792</b>	<b>131.267.351</b>
Total pihak ketiga	131.626.893	142.935.943
Penyisihan penurunan nilai	(93.313.319)	(83.736.311)
Pihak ketiga - neto	38.313.574	59.199.632
Pihak berelasi (Catatan 29)	51.112.284	47.937.008
<b>Total - neto</b>	<b>89.425.858</b>	<b>107.136.640</b>

**6. TRADE RECEIVABLES**

The details of trade receivables are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
Logistic (continued)		
PT Intisehat Sentosa	626.793	1.329.844
PT Inti Persada Transindo	566.804	566.804
PT Transworld Centralindo Logistik	566.153	566.153
PT Nindya Beton	556.309	806.309
PT So Good Food	528.563	526.484
PT Mustika Karya	525.306	525.306
PT Distribusi Mebel Nusantara	517.809	
PT Cahaya Kasih Setia	510.000	510.000
PT Sri Rejeki Isman Tbk	370.170	688.714
PT Citra Dermaga Perkasa	357.699	565.125
PT Sumber Pangan Utama	243.626	524.478
PT Delta Dunia Sandang Tekstil	152.327	513.132
PT Hakaaston	45.052	2.116.283
Others (each below Rp500 Million)	28.458.855	26.826.220
<b>Sub-total logistic</b>	<b>120.476.792</b>	<b>131.267.351</b>
Total third parties	131.626.893	142.935.943
Allowance for impairment	(93.313.319)	(83.736.311)
Third parties - net	38.313.574	59.199.632
Related parties (Note 29)	51.112.284	47.937.008
<b>Total - net</b>	<b>89.425.858</b>	<b>107.136.640</b>

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Belum jatuh tempo	2.515.666	4.996.751	No yet overdue
Lewat jatuh tempo			Overdue
1-30 hari	19.998.414	10.590.744	1-30 days
31-60 hari	7.959.045	13.013.822	31-60 days
61-150 hari	65.267.133	7.992.382	61-150 days
Lebih dari 150 hari	86.998.919	154.279.252	Over 150 days
Saldo awal	<b>182.739.177</b>	<b>190.872.951</b>	Beginning balance
Penyisihan penurunan nilai	(93.313.319)	(83.736.311)	Allowance for impairment
<b>Neto</b>	<b>89.425.858</b>	<b>107.136.640</b>	<b>Net</b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Saldo awal	83.736.311	63.026.291	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	9.577.008	20.710.020	Allowance for the year
<b>Saldo akhir</b>	<b>93.313.319</b>	<b>83.736.311</b>	<b>Ending balance</b>

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Based on management's evaluation of the collectability of the individual trade receivable accounts as of December 31, 2022 and 2021, management believes that the allowance for impairments is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**7. PERSEDIAAN**

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Pelumas	455.966	455.966	Lubricants
Suku cadang	251.667	251.667	Spare parts
<b>Total</b>	<b>707.633</b>	<b>707.633</b>	<b>Total</b>

**7. INVENTORIES**

The details of inventories are as follows:

**8. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA**

Merupakan pendapatan yang diakui atas jasa yang telah dilakukan namun belum diterbitkan tagihan, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Mustika Alam Lestari	10.897.031	10.731.622	PT Mustika Alam Lestari
High Speed Railway Contractor Consortium	3.214.742	-	High Speed Railway Contractor Consortium
PT OKI Pulp and Paper Mills	2.592.797	-	PT OKI Pulp and Paper Mills
PT Pupuk Swadaya Purimas	1.388.790	-	PT Pupuk Swadaya Purimas
PT Suri Nusantara Jaya	442.680	-	PT Suri Nusantara Jaya
PT Citra Selaras Logistisk	434.535	-	PT Citra Selaras Logistisk
PT Permata Agro Persada	392.053	-	PT Permata Agro Persada
PT Jatim Petroleum Transport	285.751	-	PT Jatim Petroleum Transport
PT Amanah Samudra Logistisk	205.296	-	PT Amanah Samudra Logistisk
PT Dwipa Manunggal Kontena	-	3.029.585	PT Dwipa Manunggal Kontena
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta)	85.054	8.326.883	Others (each below Rp100 million)
Total pihak ketiga	19.938.729	22.088.090	Total third parties
Penyisihan penurunan nilai	-	(3.318.716)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	19.938.729	18.769.374	Third parties - net
Pihak berelasi (Catatan 29)	16.240.057	30.217.180	Related Parties (Note 29)
<b>Total</b>	<b>36.178.786</b>	<b>48.986.554</b>	<b>Total</b>

**8. ACCRUED REVENUES**

Represents revenues from activities that have been completed, which invoices have not been issued, with details as follows:

**9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA**

Rincian beban dibayar di muka adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Kerjasama mitra usaha	12.883.643	15.135.955	Partnership
Asuransi	2.587.108	2.663.715	Insurance
Gaji pegawai	-	3.191.750	Employee salaries
Lain-lain	813.856	673.584	Others
<b>Total</b>	<b>16.284.607</b>	<b>21.665.004</b>	<b>Total</b>

**9. PREPAID EXPENSES**

The detail of prepaid expenses are as follows:



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP**

Aset tetap terdiri dari:

**10. FIXED ASSETS**

Fixed assets consist of:

		Tanggal 31 Desember 2022/As of December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>						<b>Acquisition cost</b>	
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>	
Tanah	13.500.310	-	-	-	13.500.310	Land	
Gedung dan bangunan	8.963.184	-	-	-	8.963.184	Building and construction	
Fasilitas pelabuhan	450.058.184	2.646.841	118.845.495	-	333.859.530	Port facilities	
Instalasi fasilitas pelabuhan	14.639.863	103.821	-	-	14.743.684	Installation port facilities	
Kendaraan bermotor	21.998.135	-	566.067	-	21.432.068	Vehicle	
Peralatan dan perabotan kantor	1.014.440	-	-	-	1.014.440	Office equipment and furnitures	
Peralatan	35.713.160	5.174.300	-	-	40.887.460	Equipment	
Emplasemen	271.389	-	-	-	271.389	Emplacement	
Aset dalam penyelesaian	-	1.198.691	-	-	1.198.691	Construction in progress	
Total harga perolehan	546.158.665	9.123.653	119.411.562	-	435.870.756	Total acquisition cost	
<b>Dikurangi:</b>						<b>Less:</b>	
<b>Penyisihan penurunan nilai</b>						<b>Allowance for impairment</b>	
Fasilitas pelabuhan	8.269.413	-	-	-	8.269.413	Port facilities	
Kendaraan bermotor	502.667	-	-	-	502.667	Vehicles	
Peralatan	51.447	-	-	-	51.447	Equipment	
Total harga perolehan	537.335.138	9.123.653	119.411.562	-	427.047.229	Total acquisition cost	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>	
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>	
Gedung dan bangunan	7.263.383	191.628	-	-	7.455.011	Building and construction	
Fasilitas pelabuhan	223.231.374	20.886.323	58.549.962	-	185.567.735	Port facilities	
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.695.523	1.006.040	-	-	11.701.563	Installation port facilities	
Kendaraan bermotor	10.940.388	1.939.783	474.616	-	12.405.555	Vehicle	
Peralatan dan perabotan kantor	1.014.441	-	-	-	1.014.441	Office equipment and furnitures	
Peralatan	26.728.456	3.227.130	-	-	29.955.586	Equipment	
Emplasemen	262.698	836	-	-	263.534	Emplacement	
Total akumulasi penyusutan	280.136.263	27.251.740	59.024.578	-	248.363.425	Total accumulated depreciation	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>257.198.875</b>				<b>178.683.804</b>	<b>Net book value</b>	
Tanggal 31 Desember 2021/As of December 31, 2021							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>						<b>Acquisition cost</b>	
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>	
Tanah	13.500.310	-	-	-	13.500.310	Land	
Gedung dan bangunan	8.963.184	-	-	-	8.963.184	Building and construction	
Fasilitas pelabuhan	450.058.184	-	-	-	450.058.184	Port facilities	
Instalasi fasilitas pelabuhan	14.628.371	11.490	-	-	14.639.861	Installation port facilities	
Kendaraan bermotor	21.998.136	-	-	-	21.998.136	Vehicle	
Peralatan dan perabotan kantor	1.014.441	-	-	-	1.014.441	Office equipment and furnitures	
Peralatan	31.377.605	4.335.555	-	-	35.713.160	Equipment	
Emplasemen	271.389	-	-	-	271.389	Emplacement	
Total harga perolehan	541.811.620	4.347.045	-	-	546.158.665	Total acquisition cost	
<b>Dikurangi:</b>						<b>Less:</b>	
<b>Penyisihan penurunan nilai</b>						<b>Allowance for impairment</b>	
Fasilitas pelabuhan	8.269.413	-	-	-	8.269.413	Port facilities	
Kendaraan bermotor	502.667	-	-	-	502.667	Vehicles	
Peralatan	51.447	-	-	-	51.447	Equipment	
Total harga perolehan	532.988.093	4.347.045	-	-	537.335.138	Total acquisition cost	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>	
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>	
Gedung dan bangunan	6.584.800	678.583	-	-	7.263.383	Building and construction	
Fasilitas pelabuhan	199.471.617	23.759.757	-	-	223.231.374	Port facilities	
Instalasi fasilitas pelabuhan	9.590.255	1.105.268	-	-	10.695.523	Installation port facilities	
Kendaraan bermotor	8.892.294	2.048.094	-	-	10.940.388	Vehicle	
Peralatan dan perabotan kantor	1.014.441	-	-	-	1.014.441	Office equipment and furnitures	
Peralatan	23.848.772	2.879.684	-	-	26.728.456	Equipment	
Emplasemen	262.698	-	-	-	262.698	Emplacement	
Total akumulasi penyusutan	249.664.877	30.471.386	-	-	280.136.263	Total accumulated depreciation	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>283.323.216</b>				<b>257.198.875</b>	<b>Net book value</b>	

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Berdasarkan laporan revaluasi aset tetap oleh Kantor Jasa Penilai Publik Febriman dan rekan Nomor 00102/2.019-05/PP/10/0069/0/XII/2020, Perusahaan mencatat kenaikan nilai akumulasi penyusutan fasilitas pelabuhan, kendaraan bermotor, dan peralatan dan perabotan kantor sebesar Rp8.823.527.

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan dalam beban operasi (Catatan 25).

Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kerugian kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya pada PT Asuransi Ramayana Tbk dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp279.174.687 dan Rp319.799.987 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

**Penjualan dan penghapusan Aset Tetap**

Pada tahun 2022, Perusahaan menjual beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

**Penjualan aset tetap Tahun 2022 / 2022 Sale of fixed assets**

Nilai pelepasan/ Sales value	Nilai buku/ Book value	Laba (rugi) penjualan/ Gain (loss) of sales	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/ Shareholders/Board of Commissioners Approval
73.877.880	60.364.192	13.513.688	No. SK.03/25/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dan No. HK.566/03/11/KPM.TPK-22 tanggal 25 Mei 2022 /No. SK.03/25/5/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 and No. HK.566/03/11/KPM.TPK-22 dated May 25, 2022
<b>73.877.880</b>	<b>60.364.192</b>	<b>13.513.688</b>	

**10. FIXED ASSETS (continued)**

Based on fixed assets revaluation report by Febriman and colleagues Public Appraisal Service Office No. 00102/2.019-05/PP/10/0069/0/XII/2020, the Company recorded increase of accumulated depreciation on port facilities, vehicle, and office equipment and furniture amounting to Rp8,823,527.

Depreciation expense of fixed assets is allocated in operating expenses (Note 25).

Fixed assets are covered by insurance against damage from accident, fire and other risks with PT Asuransi Ramayana Tbk and PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) with total coverage amounting to Rp279,174,687 and Rp319,799,987 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

**Sale and write-off of fixed assets**

In 2022, the Company sold several fixed assets with details as follows:

**11. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA**

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

**11. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES**

The movements in right-of-use assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan Kendaraan	1.343.724	7.360	-	-	1.351.084	Acquisition costs Vehicles
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	1.151.763	199.321	-	-	1.351.084	Accumulated Depreciation Vehicles
Nilai buku neto	<b>191.961</b>					<b>Net book value</b>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**11. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA**  
**(lanjutan)**

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:  
(lanjutan)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31, 2021				
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga perolehan Kendaraan	1.478.356	-	(134.632)	1.343.724
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	633.581	518.182	-	1.151.763
<b>Nilai buku neto</b>	<b>844.775</b>			<b>191.961</b>

**11. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE**  
**LIABILITIES (continued)**

The movements in right-of-use assets are as follows: (continued)

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
<b>Liabilitas sewa</b>			<b>Lease liabilities</b>
Bagian lancar	-	105.857	Current portion

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2022	2021	
Beban penyusutan aset hak-guna	199.321	518.182	Depreciation of right-of-use assets
Bunga atas liabilitas sewa	-	53.915	Interest on lease liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beban penyusutan aset hak-guna dicatat sebagai bagian dari beban operasi (Catatan 25).

As of December 31, 2022 and 2021, the depreciation expense of right of use assets was recorded as part of operating expenses (Note 25).

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2022	2021	
<b>Liabilitas sewa</b>			<b>Lease liabilities</b>
Saldo awal	105.857	1.111.729	Beginning balance
Arus kas	(105.857)	(1.059.787)	Cash flow
Perubahan non-kas	-	53.915	Non-cash changes
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>105.857</b>	<b>Total</b>

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**12. BEBAN DITANGGUHKAN**

Rincian beban ditangguhkan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Beban ditangguhkan	105.923.883	105.923.883	<i>Deferred charges</i>
Akumulasi amortisasi	(54.071.778)	(48.052.128)	<i>Accumulated amortization</i>
<b>Total</b>	<b>51.852.105</b>	<b>57.871.755</b>	<b>Total</b>

Beban ditangguhkan merupakan biaya-biaya untuk perbaikan sarana bongkar muat, lapangan penumpukan dan pembangunan gudang yang ditangguhkan pembebanannya, diantaranya peninggian lapangan 215X, eks Adi Purusa dan HLC, pembangunan gudang pendingin di gudang Sulawesi, peninggian dan penataan gudang Sulawesi, perbaikan fasilitas lapangan dan kantor Sulawesi, pembuatan *site office* domestik dan Halal Hub, penambahan daya listrik di gudang Sulawesi, serta pembuatan pintu gerbang masuk/keluar otomatis Lapangan Pasoso.

**12. DEFERRED CHARGES**

The detail of deferred charges are as follows:

*Deferred charges represent repair costs for loading and unloading facilities, container yard and construction of warehouse which expenses are deferred, among others elevation of yard 215X, ex Adi Purusa and HLC, construction of cold storage in Sulawesi storage, elevation and arrangement of Sulawesi storage, repair of the Sulawesi yard and office facilities, construction of domestic and Halal Hub site office, addition of electrical power in Sulawesi storage, and construction of automatic gate in/out at Pasoso yard.*

**13. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN**

Rincian aset tidak lancar lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Aset takberwujud - neto	2.959.711	5.371.833	<i>Intangible asset - net</i>
Uang jaminan	1.151.700	1.467.629	<i>Guarantee deposit</i>
<b>Total</b>	<b>4.111.411</b>	<b>6.839.462</b>	<b>Total</b>

**13. OTHER NON-CURRENT ASSETS**

The detail of other non-current assets are as follows:

**14. UTANG USAHA**

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Laju Mandiri	1.146.518	-	<i>PT Laju Mandiri</i>
Orchid Griya Nutrisi	306.396	-	<i>Orchid Griya Nutrisi</i>
CV Sinar Lematang Indah	161.405	-	<i>CV Sinar Lematang Indah</i>
PT Multi Utama Risetindo	119.900	-	<i>PT Multi Utama Risetindo</i>
PT Sinar Bahagia Gajahmada	116.550	-	<i>PT Sinar Bahagia Gajahmada</i>
PT Astra Graphia	82.241	-	<i>PT Astra Graphia</i>
PT Mitra Pajakku	56.113	-	<i>PT Mitra Pajakku</i>
PT Tangguh Maju Bersama	56.113	-	<i>PT Tangguh Maju Bersama</i>
PT Pasifik Energi Trans	-	205.440	<i>PT Pasifik Energi Trans</i>
PT Indomarsan Utama			<i>PT Indomarsan Utama</i>
Internasional	-	104.022	<i>Internasional</i>
CV Grand Cool Jaya Utama	-	78.667	<i>CV Grand Cool Jaya Utama</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50 juta)	1.545.910	1.191.539	<i>Others (each below Rp50 million)</i>
Subtotal	3.591.146	1.579.668	<i>Sub-total</i>
Pihak berelasi (Catatan 29)	160.475.380	168.648.856	<i>Related parties (Note 29)</i>
<b>Total</b>	<b>164.066.526</b>	<b>170.228.524</b>	<b>Total</b>

**14. TRADE PAYABLES**

The detail of trade payables are as follows:

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN**

- a. Pajak dibayar di muka
- Pajak dibayar di muka seluruhnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai masukan.

- b. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Pajak penghasilan		
Pasal 21	1.763.845	487.436
Pasal 23 dan 26	249.541	352.282
Pasal 4(2)	2.897	262.387
Lain-lain	-	1.138.857
<b>Total</b>	<b>2.016.283</b>	<b>2.240.962</b>

- c. Pajak final

Pajak final atas transaksi sewa lahan Dermaga 300 telah dipotong dan dicatat sebagai beban pajak final dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seluruh beban Perusahaan merupakan beban yang terkait dengan transaksi ini sehingga dimasukkan sebagai perbedaan permanen dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

- d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,	
	2022	2021
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	77.732.193	11.099.000
Dikurangi:		
Laba dari pendapatan yang dikenakan pajak final	(115.278.142)	(82.827.342)
Rugi sebelum pajak penghasilan badan	(37.545.949)	(71.728.342)
<b>Beda temporer:</b>		
Penyisihan penurunan nilai piutang	(646.186)	22.808.298
Imbalan kerja karyawan	6.700.598	5.847.038
Beban sewa	(57.434)	(147.566)
Penyusutan aset tetap	50.526.859	(23.790.009)

**15. TAXATION**

- a. Prepaid taxes

Prepaid taxes fully represents Value Added Tax-in.

- b. Tax payables

This account consists of:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Income tax		
Article 21	1.763.845	487.436
Article 23 dan 26	249.541	352.282
Article 4(2)	2.897	262.387
Others	-	1.138.857
<b>Total</b>	<b>2.016.283</b>	<b>2.240.962</b>

- c. Final tax

The final tax on rent of Dock 300 transaction has been withheld and is recorded as final tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income. All the Company's expenses are considered related to this transaction hence they are included as permanent differences in the calculation of taxable income.

- d. Current tax

The reconciliation between income (loss) before income tax and estimated taxable income in 2022 and 2021 are as follows:

Income (loss) before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income	77.732.193	11.099.000
Less:		
Profit from revenue subject to final tax	(115.278.142)	(82.827.342)
Loss before corporate income tax	(37.545.949)	(71.728.342)
<b>Temporary differences:</b>		
Allowance for impairment of receivables	(646.186)	22.808.298
Employee benefits	6.700.598	5.847.038
Lease expense	(57.434)	(147.566)
Depreciation of fixed asset	50.526.859	(23.790.009)



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**15. TAXATION (continued)**

d. Pajak kini (lanjutan)

d. Current tax (continued)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The reconciliation between income (loss) before income tax and estimated taxable income in 2022 and 2021 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
<u>Beda permanen:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	7.204.130	23.172.154	Non-deductible expense
Pendapatan yang pajaknya bersifat final	(3.772.384)	(2.486.459)	Income subject to final tax
Taksiran laba (rugi) fiskal tahun berjalan	22.409.634	(46.324.886)	Estimated tax profit (loss) for the year
Akumulasi rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya			Cummulative tax losses carried forward from previous years
Tahun 2021	(46.324.885)	-	Year 2021
Tahun 2020	(60.919.687)	(61.575.402)	Year 2020
Tahun 2019	(55.104.132)	(55.104.132)	Year 2019
Tahun 2018	(36.746.387)	(36.746.387)	Year 2018
Tahun 2017	(24.016.625)	(24.016.625)	Year 2017
Tahun 2016	-	(59.816.287)	Year 2016
<b>Taksiran akumulasi rugi fiskal</b>	<b>(200.702.082)</b>	<b>(283.583.719)</b>	<b>Estimated cumulative tax losses</b>
Pajak penghasilan - kini	-	-	Income tax - current
Pembayaran di muka pajak penghasilan	(837.689)	(799.443)	Prepayment of income taxes
<b>Taksiran tagihan pajak penghasilan</b>	<b>(837.689)</b>	<b>(799.443)</b>	<b>Estimated claim for tax</b>

Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan yang timbul dari akumulasi rugi fiskal.

The Company does not recognize deferred tax assets arising from the cumulative tax losses.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income (loss) before income tax multiplied by applicable tax rate with income tax expense is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	77.732.193	11.099.000	Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi:			Less:
Laba dari pendapatan yang dikenakan pajak final	(115.278.142)	(82.827.342)	Profit from revenue subject to final tax
Rugi sebelum pajak penghasilan badan	(37.545.949)	(71.728.342)	Loss before corporate income tax
Pajak penghasilan (tarif tetap yang berlaku)	(8.260.108)	(15.780.235)	Income tax expense (at applicable fixed tax rate)

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

d. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal</b> <b>31 Desember/Year ended December 31,</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Pengaruh pajak penghasilan pada beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.584.909	5.097.874
Pendapatan yang pajaknya bersifat final	(829.924)	(547.021)
Lain-lain	12.129.845	-
Rugi fiskal yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan	-	10.191.475
Penyesuaian	1.490.846	2.073.324
	<u>6.115.567</u>	<u>1.035.417</u>

Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2022.

Pada tahun 2022 dan 2021, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan yang timbul dari akumulasi rugi fiskal.

e. Beban pajak penghasilan badan

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal</b> <b>31 Desember/Year Ended December 31,</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Beban pajak penghasilan badan		
Kini	-	-
Tangguhan	6.115.567	(1.035.417)
<b>Total</b>	<b>6.115.567</b>	<b>(1.035.417)</b>

f. Tagihan restitusi pajak

Rincian tagihan restitusi pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<b>Tahun yang Berakhir pada tanggal</b> <b>31 Desember/Year ended December 31,</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Tahun pajak 2022	837.689	-
Tahun pajak 2021	799.443	799.443
Tahun pajak 2020	-	4.008.296
<b>Total</b>	<b>1.637.132</b>	<b>4.807.739</b>

**15. TAXATION (continued)**

d. Current tax (continued)

The reconciliation between income (loss) before income tax multiplied by applicable tax rate with income tax expense is as follows: (continued)

Income tax effect of permanent differences:	
Non-deductible expenses	
Income subject to final tax	
Others	
Fiscal loss not recognized as deferred tax assets	
Adjustment	
Income tax expense per statement of profit or loss and other comprehensive income	

The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2022 will be used as a basis in filling the 2022 annual corporate income tax return.

In 2022 and 2021, the Company does not recognize deferred tax assets arising from the cumulative tax losses.

e. Corporate income tax expense

Corporate income tax expense	
Current	
Deferred	
<b>Total</b>	

f. Claim for tax refund

The details of claims for income tax refund are as follows:

Fiscal Year 2022	
Fiscal Year 2021	
Fiscal year 2020	
<b>Total</b>	

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

f. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

Perusahaan menyampaikan pajak tahunan atas dasar perhitungan sendiri ("self assessment"). Sesuai dengan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008. Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Pada tahun 2021, Perusahaan mengoreksi jumlah tagihan restitusi pajak dari yang sebelumnya Rp2.555.666 menjadi Rp4.008.296 atas lebih bayar PPh Badan tahun 2020 sebesar Rp2.555.666 dan lebih bayar PPN masa September 2020 sebesar Rp1.452.630.

Pada bulan September 2022, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP") PPh Badan tahun 2020 atas nama MTI sebesar Rp2.543.627. Selisih sebesar Rp12.039 dicatat sebagai beban operasi lainnya pada tahun 2022. Pada bulan September 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp2.404.520 setelah dipotong tagihan pajak dan kewajiban pajak lainnya sebesar Rp139.107.

Pada tanggal 14 Oktober 2022, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas PPN untuk tahun fiskal 2020 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp1.450.181 dari yang diajukan sebesar Rp1.452.630. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp2.449 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**15. TAXATION (continued)**

f. Claim for tax refund (continued)

*The Company submits its annual tax returns on the basis of self-assessment. In accordance with the latest amendments of the general taxation and procedural law which become effective on January 1, 2008, the Tax Office may assess or amend taxes within 5 (five) years from the date the tax becomes payable.*

*On 2021, the Company amended the amount of claims for tax refund from the previous claim amounting to Rp2,555,666 to Rp4,008,296 for the overpayment of Corporate Income Tax of 2020 amounting to Rp2,555,666 and the VAT overpayment for September 2020 amounting to Rp1,452,630*

*On September 2022, the Company received the SPMKP Corporate Income Tax of 2020 tax year on behalf of MTI amounting to Rp2,543,627. The difference of Rp12,039 was recorded as other operating expenses in 2022. On September 2022, the Company has received a refund of Rp2,404,520 after deducting the other tax bills of Rp139,107.*

*On October 14, 2022, the Company received tax overpayment letter ("SKPLB") for VAT fiscal year 2020, with agreed amount is Rp1,450,181 from proposed amount of Rp1,452,630. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp2,449 had been recorded in the current year's profit or loss and other comprehensive income statement.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

g. Pajak tangguhan

Rincian liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ Year ended December 31, 2022					
Dibebankan pada/Charged to					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Penyisihan nilai piutang	17.791.734	(142.161)	2.879.358	20.528.931	Provision impairment of receivables
Imbalan kerja	7.039.695	923.625	-	7.963.320	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(37.985.213)	11.115.909	(9.253.902)	(36.123.206)	Depreciation of fixed assets
Aset hak guna	(42.233)	(12.635)	54.868	-	Right-of-use assets
<b>Total</b>	<b>(13.196.017)</b>	<b>11.884.738</b>	<b>(6.319.677)</b>	<b>(7.630.955)</b>	<b>Total</b>

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ Year ended December 31, 2021					
Dibebankan pada/Charged to					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Penyisihan nilai piutang	15.023.317	5.017.825	(2.249.408)	17.791.734	Provision impairment of receivables
Imbalan kerja	6.040.328	999.367	-	7.039.695	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(32.751.412)	(5.233.801)	-	(37.985.213)	Depreciation of fixed assets
Aset hak guna	(185.852)	(32.465)	176.084	(42.233)	Right-of-use assets
<b>Total</b>	<b>(11.873.619)</b>	<b>750.926</b>	<b>(2.073.324)</b>	<b>(13.196.017)</b>	<b>Total</b>

Perusahaan berkeyakinan bahwa liabilitas pajak tangguhan dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

The details of deferred tax liabilities are as follows:

The Company believes that the deferred tax liabilities can be fully recovered through future taxable income.

h. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 20% menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu. Tarif pajak sebesar 22% mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% untuk tahun pajak 2022 seperti diatur pada Perppu No. 1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).

h. Tax rates

On October 29, 2021, the Government issued the Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2021 which stipulates, among others, addition to the tax rates for corporate income taxpayers and permanent establishment entities from previously 20% to become 22% for fiscal year 2021 and onwards for corporate income taxpayers that fulfill certain criteria. Tax rate of 22% is effective starting fiscal year 2022 (previously 20% for fiscal year 2022 as stipulated in Perppu No. 1 Year 2020 dated March 31, 2020).

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**16. UTANG LAIN-LAIN**

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
PT Arista Jaya Niaga	721.360	721.360
PT Energi Cakrawala Buana	35.860	35.860
PT Mitra Integrasi Informatika	-	119.671
Lain-lain	652.671	652.671
<b>Total</b>	<b>1.409.891</b>	<b>1.529.562</b>

Utang lain-lain merupakan investasi Perusahaan untuk aktivitas bongkar muat, kendaraan dan pengembangan perangkat lunak.

**17. UTANG DIVIDEN**

Pada tanggal 7 Desember 2022, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2022 PT Pelindo Solusi Logistik dan Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok sebesar Rp148.500.000 dan Rp1.500.000. Pada tanggal 31 Desember 2022, dividen yang belum dibayarkan masing-masing sebesar Rp99.000.000 dan Rp1.000.000 kepada PT Pelindo Solusi Logistik dan Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok.

**18. BEBAN AKRUAL**

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
Beban kerjasama mitra usaha	71.581.227	54.571.095
Beban pegawai	10.775.405	9.518.715
Beban umum	5.674.646	2.964.266
Beban bahan	1.597.783	977.600
Beban pemeliharaan	2.013.422	240.207
Beban lain-lain	439.493	2.591.173
<b>Total</b>	<b>92.081.976</b>	<b>70.863.056</b>

Beban pegawai merupakan perhitungan bonus dan tantiem untuk akhir tahun buku yang belum dibayarkan.

Beban kerjasama mitra usaha merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan penyediaan fasilitas *cargo handling*, sewa lapangan penumpukan di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Beban umum terutama merupakan beban akrual atas pencadangan penghargaan masa bakti untuk karyawan Perusahaan yang dipindahkan ke Pelindo.

**16. OTHER PAYABLES**

The detail of other payables are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
PT Arista Jaya Niaga	721.360	721.360
PT Energi Cakrawala Buana	35.860	35.860
PT Mitra Integrasi Informatika	-	119.671
Others	652.671	652.671
<b>Total</b>	<b>1.409.891</b>	<b>1.529.562</b>

Other payables represent Company's investment for offloading activities, vehicle and software development.

**17. DIVIDEND PAYABLES**

On December 7, 2022, the Company declared the distribution of an interim dividend of 2022 for PT Pelindo Solusi Logistik and Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok amounting to Rp148,500,000 and Rp1,500,000, respectively. As of December 31, 2022 dividend not yet paid amounting to Rp99,000,000 and Rp1,000,000 to PT Pelindo Solusi Logistik and Koperasi Pegawai Maritim, respectively.

**18. ACCRUED EXPENSES**

The detail of accrued expenses are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
Partnership expenses	71.581.227	54.571.095
Employee expenses	10.775.405	9.518.715
General expenses	5.674.646	2.964.266
Materials expenses	1.597.783	977.600
Maintenance expenses	2.013.422	240.207
Other expenses	439.493	2.591.173
<b>Total</b>	<b>92.081.976</b>	<b>70.863.056</b>

Employee expenses represent calculation of bonus and tantiem (directors' bonuses) for the year which has not been paid.

Partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing cargo handling facilities, rent of stacking fields at the ports and outsourcing expenses.

General expenses mainly represent accrued expense for long service benefits for the Company employees who are transferred to Pelindo.



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**19. UANG TITIPAN**

Rincian uang titipan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
Pengguna jasa	3.013.865	3.666.476
Zakat infaq dan shadaqah	461.254	386.464
Asuransi	235.620	238.465
Koperasi Pegawai Maritim	217.989	324.363
Purna bakti	209.763	207.526
Jamsostek	161.891	148.071
Lain-lain	950.653	550.002
<b>Total</b>	<b>5.251.035</b>	<b>5.521.367</b>

**19. CUSTOMER DEPOSITS**

The detail of customer deposits are as follows:

Customer deposits
Zakat infaq and shadaqah
Insurance
Koperasi Pegawai Maritim
Pension
Jamsostek
Others
<b>Total</b>

**20. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Perusahaan:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan setara kas	336.451.923	192.776.700
Piutang usaha - neto	89.425.858	107.136.640
Piutang lain-lain - neto	185.167.864	148.501.000
Pendapatan masih akan diterima	36.178.786	48.986.554
<b>Total</b>	<b>647.224.431</b>	<b>497.400.894</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Utang usaha	164.066.526	170.228.524
Utang lain-lain	1.409.891	1.529.562
Beban akrual	92.081.976	70.863.056
Uang titipan	5.251.035	5.521.367
Liabilitas sewa	-	105.857
<b>Total</b>	<b>262.809.428</b>	<b>248.248.366</b>

**20. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

<b>Financial Assets</b>
Cash and cash equivalents
Trade receivables - net
Other receivables - net
Accrued revenues
<b>Total</b>
<b>Financial Liabilities</b>
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Customer deposits
Lease liabilities
<b>Total</b>

Nilai tercatat instrumen keuangan merefleksikan nilai wajarnya. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

The carrying amounts of financial instruments reflect the estimated fair value. Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**20. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

a. Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek:

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, pendapatan masih akan diterima, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, uang titipan, beban akrual dan liabilitas sewa. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

b. Liabilitas keuangan jangka panjang:

Nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang diasumsikan sama dengan nilai tunai yang akan diterima atau dibayarkan karena saat jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak-kontrak terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan kapan liabilitas keuangan jangka panjang tersebut akan direalisasi dan dilunasi.

Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

**20. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS  
(continued)**

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments are as follow:

a. Short-term financial assets and liabilities:

Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, trade receivables, accrued revenue, other receivables, trade payables, other payables, customer deposits, accrued expenses and lease liabilities. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts.

b. Long-term financial liabilities:

The fair values of non-current financial liabilities are assumed to be the same as the cash amount that will be received or paid due to the fact that their maturities are not stated in the related contracts, therefore it is not possible to determine when the financial liabilities will be realized and settled.

Fair value estimation is judgmental and involved various boundaries, including:

- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
- Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.
- Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs), either directly or indirectly.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**20. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

Selain aset dan liabilitas keuangan yang disebutkan di atas, Perusahaan tidak mempunyai aset dan liabilitas lain yang diukur dan disajikan pada nilai wajar, oleh karena itu, Perusahaan tidak menyajikan hirarki nilai wajar sesuai PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar".

**21. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2023 dan 23 Februari 2022 menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Tingkat bunga diskonto	5,52% - 7,43%	3,40% - 7,55%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,45%	6,45%	Annual salary increase rate
Tabel mortalita	TMI 2019	TMI 2019	Mortality rate
Tingkat cacat tetap	5 % TMI 2019	5 % TMI 2019	Permanent disability rate
Tingkat pengunduran diri	1,00%	1,00%	Resignation rate
Umur pensiun normal (tahun)	56	56	Normal retirement age (years)

Rincian liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Program penghargaan masa bhakti	31.944.604	29.387.870	Gratuity and compensation benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	2.968.434	2.610.743	Other long-term employee benefits
<b>Total</b>	<b>34.913.038</b>	<b>31.998.613</b>	<b>Total</b>

**a. Penghargaan masa bhakti**

Manfaat yang dihitung dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>
Nilai kini liabilitas	31.944.604	29.387.870

**20. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS  
(continued)**

Other than financial assets and financial liabilities mentioned above, the Company does not have other assets or liabilities measured and disclosed at fair value, therefore the Company does not present fair value hierarchy under PSAK 68 "Fair Value Measurements".

**21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

As of December 31, 2022, and 2021, the Company determined the employee benefit liabilities based on the actuarial computations performed by Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, independent actuaries, in their report dated January 4, 2023 and February 23, 2022 using the "Projected Unit Credit" method.

Below are the important assumptions used by the independent actuaries:

The details of employee benefit liabilities are as follows:

**a. Gratuity and compensation benefits**

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

Present value of obligation

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**a. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)**

Beban yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Biaya jasa kini	4.096.657	4.184.017	Current service cost
Biaya bunga	1.902.201	1.614.980	Interest cost
Biaya jasa lampau	-	197.143	Past service cost
Pengukuran kembali atas manfaat imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	(6.854)	Re-measurement of the benefit of long-term employee benefit
<b>Beban yang diakui</b>	<b>5.998.858</b>	<b>5.989.286</b>	<b>Expense recognized</b>

**21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**a. Gratuity and compensation benefits (continued)**

The employee benefit expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefit liabilities are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Saldo awal tahun	29.387.869	25.289.096	Beginning balance of the year
Beban yang diakui dalam laba rugi	5.998.858	5.989.286	Expense recognized in the profit or loss
Pendapatan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(2.502.298)	(1.304.457)	Income recognized in the other comprehensive income
Pembayaran tahun berjalan	(939.825)	(586.056)	Payment during the year
<b>Liabilitas akhir tahun</b>	<b>31.944.604</b>	<b>29.387.869</b>	<b>Liability at end of year</b>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the benefits obligations are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	29.387.869	25.289.096	Present value liability - beginning year
Biaya jasa kini	4.096.657	4.184.017	Current service cost
Biaya bunga	1.902.201	1.614.980	Interest cost
Pembayaran manfaat	(939.825)	(586.056)	Benefit payment
Biaya jasa lampau	-	197.143	Past service cost
Keuntungan aktuarial	(2.502.298)	(1.311.311)	Actuarial gain
<b>Nilai kini liabilitas - akhir tahun</b>	<b>31.944.604</b>	<b>29.387.869</b>	<b>Present value liability - end of year</b>

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in statement of financial position based on its maturities as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Jatuh tempo <= 1 tahun	1.815.982	761.115	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	10.895.673	10.067.098	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	230.291.037	253.324.849	Maturity > 5 years
<b>Total</b>	<b>243.002.692</b>	<b>264.153.062</b>	<b>Total</b>

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**a. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)**

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

	<b>Kenaikan/ Increase</b>	<b>Penurunan/ Decrease</b>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	29.163.032	35.170.489	<i>Effect on the aggregate current Current services cost</i>
Biaya jasa kini	3.695.174	4.566.472	

*A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2022:*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

	<b>Kenaikan/ Increase</b>	<b>Penurunan/ Decrease</b>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	35.003.950	29.261.200	<i>Effect on the aggregate current Current service cost</i>
Biaya jasa kini	4.539.917	3.711.578	

*A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2022:*

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

*Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.*

**b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya**

**b. Other long-term employee benefits**

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Nilai kini liabilitas	2.968.434	2.610.743	<i>Present value of obligation</i>

Beban yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

*The employee benefit expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:*

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Biaya jasa kini	497.459	497.186	<i>Current service cost</i>
Biaya Bunga	134.625	118.148	<i>Interest cost</i>
Keuntungan aktuarial yang diakui	(274.393)	(171.528)	<i>Recognized actuarial gain</i>
<b>Beban yang diakui</b>	<b>357.691</b>	<b>443.806</b>	<b><i>Expense recognized</i></b>



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)**

**b. Other long-term employee benefits (continued)**

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefit liabilities are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Saldo awal tahun	2.610.743	2.166.937	Beginning balance of the year
Beban yang diakui dalam laba rugi	357.691	443.806	Expense recognized in the profit or loss
<b>Liabilitas akhir tahun</b>	<b>2.968.434</b>	<b>2.610.743</b>	<b>Liability at end of year</b>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the benefits obligations are as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	2.610.743	2.166.937	Present value liability - beginning year
Biaya jasa kini	497.459	497.186	Current service cost
Biaya bunga	134.625	118.148	Interest cost
Keuntungan aktuarial	(35.618)	(318.759)	Actuarial gain
Penyesuaian atas pengalaman	(238.775)	147.231	Experience adjustment
<b>Nilai kini liabilitas - akhir tahun</b>	<b>2.968.434</b>	<b>2.610.743</b>	<b>Present value liability - end of year</b>

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The maturity of employee benefit liabilities as of December 31, 2022 and 2021 is as follows:

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Jatuh tempo <= 1 tahun	1.486.702	129.575	Maturity <= 1 year
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	381.435	1.886.008	Maturity > 1 year and <= 5 years
Jatuh tempo > 5 tahun	7.217.680	7.626.420	Maturity > 5 years
<b>Total</b>	<b>9.085.817</b>	<b>9.642.003</b>	<b>Total</b>

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2022:

	<b>Kenaikan/ Increase</b>	<b>Penurunan/ Decrease</b>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	2.864.352	3.084.957	Effect on the aggregate current
Biaya jasa kini	479.826	517.229	Current services cost
Biaya bunga	134.625	134.625	Interest cost

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**b. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)**

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2022 sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	3.084.602	2.862.800	<i>Effect on the aggregate current Current service cost</i>
Biaya jasa kini	517.117	479.612	

**22. MODAL SAHAM**

Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
PT Pelindo Solusi Logistik	34.283.150	99,00%	17.141.575	<i>PT Pelindo Solusi Logistik Koperasi</i>
Koperasi Pegawai Maritim	346.289	1,00%	173.145	
<b>Total</b>	<b>34.629.439</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.314.720</b>	<b>Total</b>

**21. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**b. Other long-term employee benefits (continued)**

A one percentage point change in the assumed salary increase rate would have the following effects in 2022:

**22. SHARE CAPITAL**

The details of share ownership as of December 31, 2022, are as follows:

Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	34.283.150	99,00%	17.141.575	<i>PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Koperasi Pegawai Maritim</i>
Koperasi Pegawai Maritim	346.289	1,00%	173.145	
<b>Total</b>	<b>34.629.439</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.314.720</b>	<b>Total</b>

The details of share ownership as of December 31, 2021, are as follows:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perusahaan No. 20 tanggal 28 Februari 2022 dari Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan seluruh saham Perusahaan milik Pelindo sebanyak 34.283.150 lembar saham atau setara dengan 99% dengan nilai nominal Rp17.141.575.000 (nilai penuh) kepada PT Pelindo Solusi Logistik.

Based on Deed of Shareholders Decision in Lieu of Limited Corporation General Shareholders Meeting of the Company No. 13 dated February 28, 2022 of notary Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., notary in Jakarta, the shareholders of the Company agreed on the transfer of all of the Company's shares owned by Pelindo amounting to 34,283,150 shares or equivalent to 99% with nominal value of Rp17,141,575,000 (full amount) to PT Pelindo Solusi Logistik.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**22. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui suratnya No. S-133/MBU/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Pengalihan saham tersebut telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0133671 tanggal 1 Maret 2022.

**23. SALDO LABA**

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diadakan pada tanggal 7 Desember 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk menggunakan dana cadangan Perusahaan untuk pembagian dividen sebesar Rp150.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- PT Pelindo Solusi Logistik dengan presentase kepemilikan 99% sebesar Rp148.500.000.
- Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok dengan presentase kepemilikan 1% sebesar Rp1.500.000.

Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 31 Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn tanggal 4 Juni 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui penetapan rugi tahun berjalan Perusahaan tahun 2020 sebesar Rp10.009.775 dan tidak ada dividen yang didistribusikan kepada pemegang saham Perusahaan untuk tahun buku 2020.

**24. PENDAPATAN OPERASI**

Rincian pendapatan operasi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,	
	2022	2021
Pelayanan jasa barang	274.746.242	268.185.831
Jasa logistik	156.969.253	163.505.456
Kerjasama dan fee for services	150.107.811	114.441.388
Pengusahaan peralatan	30.589.884	25.535.655
<b>Total</b>	<b>612.413.190</b>	<b>571.668.330</b>

**22. SHARE CAPITAL (continued)**

The transfer of shares has been approved by the Ministry of State-Owned Entity through its letter No. S-133/MBU/02/2022 on February 25, 2022. Based on the letter, the shares transfer value needs to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

The transfer of shares has been legalized by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0133671 on March 1, 2022.

**23. RETAINED EARNINGS**

Based on the Decisions of Shareholders Outside General Meeting of Shareholders of the Company on December 7, 2022, the shareholders agreed to use the Company's reserve funds for distribution of dividends amounting to Rp150,000,000 with the following details:

- PT Pelindo Solusi Logistik with a 99% ownership percentage amounting to IDR 148,500,000.
- Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok with a 1% ownership percentage amounting to IDR 1,500,000.

Based on Minutes of Meeting No. 31 Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn dated June 4, 2021, the Company's shareholders approved the determination of the Company's 2020 current year loss of Rp.10,009,775 and no dividends were distributed to the Company's shareholders for the 2020 financial year.

**24. OPERATING REVENUE**

The detail of operating revenue from customer are as follows:

Cargo services  
Logistic services  
Partnership and fee for services  
Equipment services

**Total**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**25. BEBAN OPERASI**

Rincian beban operasi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
Beban kerjasama mitra usaha	302.723.335	318.538.841	Partnership expenses
Beban pegawai	71.760.187	64.944.140	Employee expenses
Beban umum	45.200.998	60.679.103	General expenses
Beban bahan	37.956.604	23.525.181	Material expenses
Beban pemeliharaan	37.860.416	26.901.417	Maintenance expenses
Beban penyusutan dan amortisasi	35.763.162	38.943.992	Depreciation and amortization expenses
Beban administrasi kantor	3.500.124	3.236.893	Offices administration expenses
Beban asuransi	2.669.114	4.359.786	Insurance expenses
<b>Total</b>	<b>537.433.940</b>	<b>541.129.353</b>	<b>Total</b>

**25. OPERATING EXPENSES**

The detail of operating expenses are as follows:

**26. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA**

**a. Pendapatan operasi lainnya**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
Laba penjualan aset	13.513.688	-	Gain on sale of assets
Laba selisih kurs	2.756.008	655.010	Gain on foreign exchange
Pendapatan dividen	587.729	78.938	Dividend income
Lain-lain	63.062	157.938	Others
<b>Total</b>	<b>16.920.487</b>	<b>891.886</b>	<b>Total</b>

**26. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES**

**a. Other operating income**

**b. Beban operasi lainnya**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
Pajak yang tidak dapat di klaim	1.345.781	10.484.969	Unclaimable tax
Rugi selisih kurs	273.712	789.841	Loss on foreign exchange
Pajak final giro dan deposito	1.141.396	764.937	Final tax on current account and deposits
<b>Total</b>	<b>2.760.889</b>	<b>12.039.747</b>	<b>Total</b>

**b. Other operating expenses**

Pada tahun 2021, Perusahaan mencatat beban pajak yang tidak dapat di klaim untuk tahun 2019, 2018, 2016, dan 2015 sebesar Rp10.484.969.

On 2021, the Company recorded unclaimable tax for the year of 2019, 2018, 2016, and 2015 amounting to Rp10,484,969.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**27. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN**

**27. FINANCE INCOME AND COST**

**a. Pendapatan keuangan**

**a. Finance income**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
Pendapatan bunga	4.121.130	3.275.601	Interest income
Pendapatan jasa giro	1.659.655	658.871	Interest income on current account
<b>Total</b>	<b>5.780.785</b>	<b>3.934.472</b>	<b>Total</b>

**b. Beban keuangan**

**b. Finance costs**

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ended December 31,		
	2022	2021	
Beban administrasi bank	834.989	683.076	Bank administrative expenses
Beban bunga sewa	-	53.915	Lease interest expense
<b>Total</b>	<b>834.989</b>	<b>736.991</b>	<b>Total</b>

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION OF RELATED PARTIES**

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang Saham/Shareholder	Pelindo	Pendapatan operasi, imbalan kerja, dan deviden Operating revenue, employee benefit, and dividend
	PT Pelindo Solusi Logistik	Pendapatan operasi dan deviden/ Operating revenue and dividend
Entitas sepengendalian Pelindo/ Entities under common control of Pelindo	Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok	Deviden/ Dividend
	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Pendapatan operasi dan investasi/ Operating revenue and investment
	Kerjasama Operasi Terminal Petikemas ("TPK Koja")	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT IPC Terminal Petikemas	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Electronic Data Interchange Indonesia	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	Pendapatan operasi/ Operating revenue
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Investasi/ Investment	
PT Pelabuhan Indonesia Investama	Penjualan saham dan investasi/ Sales of shares and investment	



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION OF RELATED PARTIES (continued)**

*In the ordinary course of business, the Company engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows: (continued)*

<b>Sifat relasi/ Nature of relationship</b>	<b>Nama pihak berelasi/ Name of related party</b>	<b>Jenis transaksi/ Nature of transaction</b>
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entities	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ Banking services
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ Banking services
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Jasa perbankan/ Banking services
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan/ Banking services
	PT PP Presisi Tbk	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Pertamina (Persero)	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Industri Kereta Api (Persero)	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)	Pendapatan operasi/ Operating Revenue
	PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP")	Jasa Kesehatan/ Health Service
	PT Krakatau Posco	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT New Priok Container Terminal 1	Pendapatan operasi/ Operating revenue
	PT Berdikari (Persero)	Pendapatan operasi/ Operating Revenue
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Pendapatan operasi/ Operating Revenue	
PT Jasa Prima Logistik Bulog	Pendapatan operasi/ Operating Revenue	

**a. Piutang usaha (Catatan 6)**

**a. Trade receivables (Note 6)**

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	28.102.812	20.970.806	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
PT Berdikari (Persero)	10.859.875	-	PT Berdikari (Persero)
PT Pelabuhan Tanjung Priok	4.839.413	2.062.531	PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT PP Presisi Tbk	4.203.201	10.582.088	PT PP Presisi Tbk
PT Krakatau Posco	900.267	1.457.863	PT Krakatau Posco
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	605.610	659.625	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)	425.877	821.155	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	385.050	379.230	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Perikanan Nusantara (Persero)	303.918	-	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT New Priok Container Terminal 1	126.691	-	PT New Priok Container Terminal 1
PT TPK Koja	83.993	83.993	PT TPK Koja
PT IPC Terminal Petikemas	80.154	520.595	PT IPC Terminal Petikemas
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	65.605	65.793	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	53.815	10.176.645	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pertamina (Persero)	36.103	156.684	PT Pertamina (Persero)
PT Jasa Prima Logistik Bulog	35.400	-	PT Jasa Prima Logistik Bulog
Lain-lain	4.500	-	Others
<b>Total</b>	<b>51.112.284</b>	<b>47.937.008</b>	<b>Total</b>
Persentase dari total aset	5,63%	5,57%	Percentage from total assets

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION OF RELATED PARTIES (continued)**

a. Piutang usaha (Catatan 6) (lanjutan)

a. Trade receivables (Note 6) (continued)

Piutang usaha pihak berelasi antara Perusahaan dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI") merupakan piutang atas transaksi pengalihan hak kepemilikan atas 23 (dua puluh tiga) unit peralatan milik Perusahaan kepada JPPI.

Trade receivable related parties between the Company and PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI") represents receivables from transfer of ownership rights of 23 (dua puluh tiga) units of the Company's equipment to JPPI.

Piutang usaha pihak berelasi antara Perusahaan dengan PT Berdikari (Persero) merupakan piutang atas transaksi pengeluaran petikemas reefer dari Common Area.

Trade receivable related parties between the Company PT Berdikari (Persero) represents receivables from transactions for removing reefer containers from the Common Area.

b. Piutang lain-lain

b. Other Receivables

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	147.432.858	147.432.858	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Tanjung Priok	36.671.590	-	PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	163.524	-	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
<b>Total</b>	<b>184.267.972</b>	<b>147.432.858</b>	<b>Total</b>
Persentase dari total aset	20,29%	17,13%	Percentage from total assets

c. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 8)

c. Accrued revenues (Note 8)

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
PT Pertamina (Persero)	8.912.449	-	PT Pertamina (Persero)
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	2.027.981	20.963.500	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
PT IPC Terminal Petikemas	1.256.832	33.681	PT IPC Terminal Petikemas
PT New Priok Container Terminal 1	1.255.037	4.278.124	PT New Priok Container Terminal 1
PT Pelabuhan Tanjung Priok	1.247.530	1.764.521	PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	913.801	-	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	626.427	3.177.354	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
<b>Total</b>	<b>16.240.057</b>	<b>30.217.180</b>	<b>Total</b>
Persentase dari total aset	1,79%	3,51%	Percentage from total assets

d. Utang usaha (Catatan 14)

d. Trade payables (Note 14)

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	52.520.372	54.282.412	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	3.243.898	373.558	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
PT Pelindo Daya Sejahtera	1.939.954	-	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Intan Sejahtera Utama	815.316	-	PT Intan Sejahtera Utama
PT Pelindo Energi Logistik	353.637	-	PT Pelindo Energi Logistik
PT Rumah Sakit Pelabuhan	53.371	99.131	PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT IPC Terminal Petikemas	-	3.900.488	PT IPC Terminal Petikemas
PT Pelabuhan Tanjung Priok	-	980.991	PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Jakarta International Container Terminal	-	899.587	PT Jakarta International Container Terminal
PT Energi Pelabuhan Indonesia	-	63.415	PT Energi Pelabuhan Indonesia

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION OF RELATED PARTIES (continued)**

d. Utang usaha (Catatan 14) (lanjutan)

d. Trade payables (Note 14) (continued)

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok	-	20.939	Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok
Lain-lain	-	132.777	Others
<b>Total</b>	<b>58.926.548</b>	<b>60.753.298</b>	<b>Total</b>
Persentase dari total liabilitas	14,46%	20,55%	Percentage from total liabilities

e. Beban akrual (Catatan 18)

e. Accrued Expenses (Note 18)

	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember 2021/ December 31, 2021</b>	
PT Pelindo Solusi Logistik	19.657.069	-	PT Pelindo Solusi Logistik
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	5.727.731	3.002.814	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Pelindo	3.306.980	6.601.375	Pelindo
PT Pelindo Daya Sejahtera	2.567.277	-	PT Pelindo Daya Sejahtera
PT IPC Terminal Petikemas	2.542.669	1.924.005	PT IPC Terminal Petikemas
PT Pelabuhan Tanjung Priok	1.562.145	6.235.875	PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Energi Pelabuhan Indonesia	1.323.633	819.470	PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Pelindo Energi Logistik	547.133	-	PT Pelindo Energi Logistik
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	90.161	-	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
<b>Total</b>	<b>37.324.798</b>	<b>18.583.539</b>	<b>Total</b>
Persentase dari total liabilitas	9,16%	6,28%	Percentage from total liabilities

Perjanjian dengan pihak berelasi

Related parties agreement

a) Perjanjian serah terima operasi

a) Operational handover agreement

Efektif tanggal 1 Mei 2016, besaran bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Perusahaan tidak lagi berdasarkan persentasi namun menggunakan setoran pasti yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi Pelindo tanggal 30 November 2015.

Effective on May 1, 2016, the sharing that has to be paid by the Company is no longer based on percentage but based on fixed amount referring to Decision Letter of Pelindo's Board of Directors dated November 30, 2015.

Efektif tanggal 1 Desember 2017, berdasarkan addendum tanggal 22 Desember 2017, besarnya bagi hasil pendapatan yang harus dibayarkan kepada Pelindo sebesar 15% dari pendapatan kotor *sharing* atau minimal Rp6.750.000 per tahun atau kembali kepada perjanjian tanggal 10 April 2002. Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk mengubah beberapa pasal dalam perjanjian, diantaranya, rincian aset yang akan diserahkan operasikan oleh Pelindo kepada Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Effective on December 1, 2017 based on addendum dated December 22, 2017, the amount of revenue sharing paid to Pelindo amounted to 15% of gross income or a minimum of Rp6,750,000 per year or back to agreement dated April 10, 2002. The Company and Pelindo agreed to amend several articles in the agreement, among others, the details of the assets that will be handed over by Pelindo to the Company became as follows:

- Terminal 300 sepanjang 258 m<sup>2</sup> berikut lapangan seluas 41.661 m<sup>2</sup> dan lapangan 212X seluas 8.800 m<sup>2</sup>

- Terminal 300 with length of 258 m<sup>2</sup> including yard with area of 41,661 m<sup>2</sup> and yard 212X with area of 8,800 m<sup>2</sup>

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

a) Perjanjian serah terima operasi (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Desember 2017, berdasarkan addendum tanggal 22 Desember 2017, besarnya bagi hasil pendapatan yang harus dibayarkan kepada Pelindo sebesar 15% dari pendapatan kotor *sharing* atau minimal Rp6.750.000 per tahun atau kembali kepada perjanjian tanggal 10 April 2002. Perusahaan dan Pelindo sepakat untuk mengubah beberapa pasal dalam perjanjian, diantaranya, rincian aset yang akan diserahkan operasikan oleh Pelindo kepada Perusahaan menjadi sebagai berikut: (lanjutan)

- Gudang CDC Jl. Banda seluas 20.000 m<sup>2</sup>
- Lapangan Jl. Banda (215X) seluas 14.000 m<sup>2</sup>
- Lapangan Terminal Pasoso seluas 6.750 m<sup>2</sup>
- Lapangan 220X (Eks. Adipurusa/BHS) seluas 8.374 m<sup>2</sup>
- Lapangan dan gudang PT DMK seluas 30.000 m<sup>2</sup>

Pada tanggal 29 Desember 2021, Pelindo dan PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") menandatangani perjanjian pengalihan usaha pelayanan jasa logistik. Berdasarkan perjanjian tersebut, pada tanggal 30 Desember 2021 Pelindo mengalihkan perjanjian serah terima operasi ini kepada SPSL.

Pada tanggal 18 Februari 2022, Perusahaan dan SPSL menandatangani perjanjian serah operasi fasilitas terminal dan fasilitas penunjang terminal di Pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian ini dibuat berdasarkan perjanjian pengalihan usaha pelayanan jasa logistik antara Pelindo dengan SPSL dan sebagai bentuk perpanjangan perjanjian serah terima operasi tanggal 10 April 2002 antara Perusahaan dan Pelindo.

Perjanjian berlaku sampai dengan 14 April 2024, kecuali perjanjian ini diputuskan lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian, dimana jangka waktu perjanjian akan berakhir secara otomatis pada Tanggal Keputusan Perjanjian.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

a) Operational handover agreement (continued)

Effective on December 1, 2017 based on addendum dated December 22, 2017, the amount of revenue sharing paid to Pelindo amounted to 15% of gross income or a minimum of Rp6,750,000 per year or back to agreement dated April 10, 2002. The Company and Pelindo agreed to amend several articles in the agreement, among others, the details of the assets that will be handed over by Pelindo to the Company became as follows: (continued)

- CDC warehouse on Jl. Banda with area of 20,000 m<sup>2</sup>
- Yard on Jl. Banda (215X) with area of 14,000 m<sup>2</sup>
- Yard on Terminal Pasoso with area of 6,750 m<sup>2</sup>
- Yard 220X (Ex. Adipurusa/BHS) with area of 8,374 m<sup>2</sup>
- Yard and warehouse PT DMK with area of 30,000 m<sup>2</sup>

On December 29, 2021, Pelindo and PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") signed a business transfer agreement for logistics services. Based on the agreement, on December 30, 2021, Pelindo transferred the common area assets and facilities rent in Tanjung Priok Port agreement to SPSL.

On February 18, 2022, the Company and SPSL signed an agreement to hand over the operation of terminal facilities and terminal supporting facilities at Tanjung Priok Port. This agreement was made based on the agreement to transfer the logistics services business between Pelindo and SPSL and as an extension of the operation handover agreement dated April 10, 2002 between the Company and Pelindo.

The agreement is valid until April 14, 2024, unless this agreement is terminated earlier based on the terms of the agreement, where the term of the agreement will end automatically on the Termination Date of the Agreement.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

a) Perjanjian serah terima operasi (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Maret 2022, berdasarkan addendum atas perjanjian serah terima operasi fasilitas terminal dan fasilitas penunjang terminal di Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 24 Maret 2022, besarnya bagi hasil pendapatan yang harus dibayarkan kepada SPSL sebesar 10% dari realisasi pendapatan kotor.

b) Perjanjian pengoperasian *Gantry Luffing Crane* (GLC) di Pelabuhan Banten

Pada tanggal 23 September 2013, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian kerjasama pengoperasian 2 (dua) unit GLC di Pelabuhan Banten, Ciwandan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan berkewajiban menyediakan alat bongkar muat berupa GLC sebanyak 2(dua) unit termasuk kelengkapannya seperti *grab*, *hopper*, dan alat bantu bongkar muat lainnya dalam kondisi siap operasi untuk mendukung kelancaran penanganan bongkar muat kargo di pelabuhan Pelindo.

Atas pemakaian GLC tersebut, Perusahaan dan Pelindo sepakat menentukan tarif bongkar muat sebesar Rp15.000 per ton (nilai penuh), dimana Perusahaan akan memperoleh bagi hasil 70% atau Rp10.500 (nilai penuh) dan Pelindo akan memperoleh 30% atau Rp4.500 (nilai penuh) dari pendapatan.

Perjanjian ini berlaku 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak dimulainya pengoperasian alat yang dituangkan dalam Berita Acara Pengoperasian Alat.

Berdasarkan perpanjangan perjanjian pada tanggal 24 Juni 2017, Perusahaan akan memperoleh bagi hasil atas pemakaian GLC sebesar 60% untuk pasar Pelindo dan Perusahaan, namun sebesar 72% untuk pasar Perusahaan untuk *cargo food/feed* dan *non-food*.

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan 23 Juni 2018.

Pada tanggal 4 Juli 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perpanjangan perjanjian. Perjanjian ini berisi penambahan jangka waktu kerjasama selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 23 Juni 2019.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

a) *Operational handover agreement (continued)*

*Effective March 1, 2022, based on addendum to the agreement to hand over the operation of terminal facilities and terminal support facilities at Tanjung Priok Port dated March 24, 2022, the amount of revenue sharing paid to SPSL is 10% of realized gross income.*

b) *Gantry Luffing Crane (GLC) operating agreement at Banten Port*

*On September 23, 2013, the Company and Pelindo entered into operation agreement of 2 (two) units of GLC in Banten port, Ciwandan. Based on the agreement, the Company has the obligation to provide 2 (two) units of loading and unloading equipment in the form of GLC and its supporting equipment such as grab, hopper and other supporting equipment in ready to operate condition to support the cargo handling in Pelindo port.*

*For the use of the GLC, the Company and Pelindo agreed to set the loading/unloading rate amounting to Rp15,000 per ton (full amount), where the Company will receive revenue sharing 70% or Rp10,500 (full amount) and Pelindo will receive 30% or Rp4,500 (full amount) from the revenues*

*The agreement is valid for 20 (twenty) months since the start of the equipment operation as stated in Minutes of asset operation.*

*Based on extended agreement on June 24, 2017, the Company will receive revenue sharing on the use of GLC amounting to 60% for Pelindo and Company's market, and 72% for Company's market in food/feed and non-food cargo.*

*The agreement was valid for 1 (one) year from June 24, 2017 until June 23, 2018.*

*On July 4, 2018, the Company and Pelindo signed the extended agreement. This agreement contains the additional period of contract, starting from June 24, 2018 until June 23, 2019.*



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

b) Perjanjian pengoperasian *Gantry Luffing Crane* (GLC) di Pelabuhan Banten (lanjutan)

Pada tanggal 1 Januari 2019, Pelindo menandatangani perjanjian novasi atas kerjasama optimalisasi pelayanan kegiatan bongkar muat barang dan kegiatan perusahaan lainnya di terminal non petikemas pada Pelabuhan Banten dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP"). Berdasarkan perjanjian tersebut, perjanjian pengoperasian GLC ini beralih ke PTP.

Perjanjian ini berlaku selama 18 bulan sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan memberlakukan tarif bagi hasil yang sama.

Pada tanggal 22 November 2019, Perusahaan, PTP dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI") menandatangani perjanjian tentang pengalihan perjanjian dari Perusahaan ke JPPI. Perjanjian ini dibuat atas adanya arahan segmentasi bisnis anak perusahaan di lingkungan Pelindo Grup. Perjanjian ini berlaku dihitung mulai tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020.

Pada tanggal 1 Februari 2022, Perusahaan dan PTP menandatangani perjanjian tentang Kerjasama penyediaan dan pengoperasian 2 (dua) unit GLC (*Gantry Luffing Crane*) di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Atas pemakaian GLC tersebut, Perusahaan dan PTP sepakat menentukan bagi hasil pendapatan dimana Perusahaan akan memperoleh bagi hasil 60% dan PTP akan memperoleh 40% dari pendapatan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan dan PTP menandatangani Perjanjian Jual Beli Alat Berat *Gantry Luffing Crane* (GLC). Atas berlakunya perjanjian ini, maka berakhir perjanjian Kerjasama penyediaan dan pengoperasian 2 (dua) unit GLC (*Gantry Luffing Crane*) di Pelabuhan Ciwandan, Banten.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

b) *Gantry Luffing Crane* (GLC) operating agreement at Banten Port (continued)

On January 1, 2019, Pelindo signed the novation agreement for the optimization of the cooperation in the loading and unloading of goods and other business activities in the non-container terminal at Banten port with PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTP"). Based on that agreement, this operating agreement is transferred to PTP.

This agreement is valid for 18 months starting from June 24, 2019 until December 31, 2020 using the same revenue sharing rate.

On November 22, 2019, the Company, PTP and PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI") signed the agreement about the transfer of agreement from the Company to JPPI. This agreement was made in relation to direction of subsidiaries business segmentation within Pelindo Group. This agreement is valid starting from December 1, 2019 until November 30, 2020.

On February 1, 2022, the Company and PTP entered into an agreement on Cooperation in the supply and operation of 2 (two) units of GLC (*Gantry Luffing Crane*) at Ciwandan Port, Banten. For the use of the GLC, the Company and PTP agreed to determine revenue sharing where the Company will receive 60% revenue sharing and PTP will get 40% from the revenues. This agreement is valid from February 1, 2022 to January 31, 2023.

On July 6, 2022, the Company and PTP entered into a Sale and Purchase Agreement for Heavy Equipment *Gantry Luffing Crane* (GLC). Upon the entry into force of this agreement, the Cooperation Agreement for the provision and operation of 2 (two) GLC (*Gantry Luffing Crane*) units at Ciwandan Port, Banten has ended.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

- c) Sewa menyewa 2 (dua) unit *Gantry Luffing Crane* (GLC) di Pelabuhan Tanjung Priok (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan dan PTP menandatangani perjanjian kerjasama penyewaan 2 (dua) unit GLC.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PTP berkewajiban untuk membayar sewa kepada Perusahaan, menyediakan operator alat dan melakukan pemeliharaan serta menyediakan bahan bakar mesin atas penggunaan dan untuk mengoperasikan 2 (dua) unit GLC tersebut.

Atas perjanjian ini, PTP berkewajiban untuk membayar biaya sewa menyewa sebesar 45% kepada Perusahaan dari tarif yang diberlakukan per ton barang yang ditangani dengan menggunakan GLC tersebut.

Berdasarkan perjanjian tanggal 15 Desember 2016 atas pemakaian GLC, PTP berkewajiban membayar sewa sejumlah 50% dari tarif yang diberlakukan per ton barang/petikemas yang ditangani menggunakan GLC milik Perusahaan. Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.

Berdasarkan perjanjian tanggal 19 September 2017, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2017.

Berdasarkan perjanjian tanggal 19 September 2017, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. PTP berkewajiban untuk membayar biaya sewa menyewa sebesar 35% kepada Perusahaan dari tarif yang diberlakukan per ton barang yang ditangani dengan menggunakan GLC tersebut.

Pada tanggal 22 November 2019, Perusahaan, PTP dan JPPI menandatangani perjanjian tentang pengalihan perjanjian dari Perusahaan ke JPPI. Perjanjian ini dibuat atas adanya arahan segmentasi bisnis anak perusahaan di lingkungan Pelindo Grup.

Berdasarkan perjanjian tanggal 31 Desember 2018, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan pengalihan perjanjian tersebut, perjanjian ini berlaku sejak 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

- c) *Rent of 2 (two) units Gantry Luffing Crane (GLC) at Tanjung Priok Port (continued)*

*On December 31, 2014, the Company and PTP entered into rent agreement of 2 (two) units of GLC.*

*Based on the agreement, PTP was obligated to pay the rent to the Company, provides operators for the equipment and performs maintenance as well as provides fuels for the use and operation of the 2 (two) units of GLC.*

*Based on the agreement, PTP was obligated to pay rent fee of 45% to the Company from applicable rate for each ton of goods handled using GLC.*

*Based on agreement dated December 15, 2016 due to the usage of the GLC, PTP was obligated to pay rental fee amounting to 50% from the applicable rate per ton of goods/container handled using the GLC owned by Company. The agreement was valid from January 1, 2015 until December 31, 2016.*

*Based on agreement dated September 19, 2017, the agreement was extended until December 31, 2017.*

*Based on agreement dated September 19, 2017, the agreement was extended until December 31, 2018. PTP was obligated to pay rental fee of 35% to the Company from applicable rate for each ton of goods handled using GLC.*

*On November 22, 2019, the Company, PTP and JPPI signed the agreement about the transfer of agreement from the Company to JPPI. This agreement was made in relation to direction of subsidiaries business segmentation within Pelindo Group.*

*Based on agreement dated December 31, 2018, the agreement was extended until December 31, 2019.*

*Based on the transfer of the agreement, this agreement is valid from December 1, 2019 until November 30, 2020.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

- c) Sewa menyewa 2 (dua) unit *Gantry Luffing Crane* (GLC) di Pelabuhan Tanjung Priok (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tanggal 31 Maret 2021, pengalihan perjanjian ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.

Pada tanggal 2 Februari 2022, Perusahaan dan PTP menandatangani perjanjian tentang Kerjasama penyediaan dan pengoperasian 2 (dua) unit GLC (*Gantry Luffing Crane*) di Pelabuhan Tanjung Priok. Atas pemakaian GLC tersebut, Perusahaan dan PTP sepakat menentukan bagi hasil pendapatan dimana Perusahaan akan memperoleh bagi hasil 65% dan PTP akan memperoleh 35% dari pendapatan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

Pada tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan dan PTP menandatangani Perjanjian Jual Beli Alat Berat *Gantry Luffing Crane* (GLC). Atas berlakunya perjanjian ini, maka berakhir perjanjian Kerjasama penyediaan dan pengoperasian 2 (dua) unit GLC (*Gantry Luffing Crane*) di Pelabuhan Tanjung Priok

- d) Perjanjian kerjasama penanganan petikemas *Full Container Load* (FCL) untuk kegiatan pindah lokasi penimbunan

Pada tanggal 19 Desember 2018, Perusahaan dan PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK") menandatangani perjanjian kerjasama tentang penanganan petikemas (FCL) untuk kegiatan pindah lokasi penimbunan.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019.

Berdasarkan perjanjian tanggal 17 Desember 2019, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Desember 2020.

Bedasarkan perjanjian pada tanggal 20 Januari 2021, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan 16 Desember 2021.

Bedasarkan Berita Acara tanggal 14 Desember 2021 perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 Desember 2022, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

- c) *Rent of 2 (two) units Gantry Luffing Crane (GLC) at Tanjung Priok Port (continued)*

*Based on agreement on March 31, 2021, the transfer agreement was extended until December 31, 2021.*

*On February 2, 2022, the Company and PTP entered into an agreement on Cooperation in the supply and operation of 2 (two) units of GLC (Gantry Luffing Crane) at Tanjung Priok Port. For the use of the GLC, the Company and PTP agreed to determine revenue sharing where the Company will receive 65% revenue sharing and PTP will get 35% from the revenues. This agreement is valid from February 1, 2022 to January 31, 2023.*

*On July 6, 2022, the Company and PTP entered into a Sale and Purchase Agreement for Heavy Equipment Gantry Luffing Crane (GLC). Upon the entry into force of this agreement, the Cooperation Agreement for the provision and operation of 2 (two) GLC (Gantry Luffing Crane) units at Tanjung Priok Port has ended.*

- d) *Agreement on cooperation in handling Full Container Load (FCL) containers for landfill relocation activities*

*On December 19, 2018, the Company and PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK") entered into an agreement on handling FCL containers for landfill relocation activities.*

*The agreement was valid for 1 (one) year, starting from December 19, 2018 until December 18, 2019.*

*Based on agreement dated December 17, 2019, the agreement was extended until December 16, 2020.*

*Based on agreement dated January 20, 2021, the agreement was extended until December 16, 2021.*

*Based on Memorandum of Understanding on 14 December 2021. The agreement was extended 1(one) year since the signing date of the agreement.*

*Based on the agreement dated December 30, 2022, the agreement was extended until January 1, 2024.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

Related parties agreement (continued)

- e) Perjanjian sewa menyewa aset dan fasilitas *Common Area* di Pelabuhan Tanjung Priok

- e) *Agreement of Common Area assets and facilities rent in Tanjung Priok Port*

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo Cabang Tanjung Priok menandatangani perjanjian sewa menyewa aset dan fasilitas *common area* di Pelabuhan Tanjung Priok.

*On December 31, 2018, the Company and Pelindo Tanjung Priok Branch entered into an agreement on common area assets and facilities rent in Tanjung Priok Port.*

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

*This agreement is valid for 1 (one) year starting from January 1, 2019 until December 31, 2019.*

Perusahaan membayar uang sewa kepada Pelindo Cabang Tanjung Priok sebesar Rp22.196.981 setiap tanggal 15 dalam triwulan berjalan.

*The Company pays rental fee to Pelindo Tanjung Priok Branch for the amount of Rp22,196,981 every 15th date of the current quarter.*

Berdasarkan addendum tanggal 10 Januari 2020, perjanjian ini diperpanjang selama 3 (tiga) bulan, mulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.

*Based on addendum on January 10, 2020, this agreement is extended for 3 (three) months, starting from January 1, 2020 until March 31, 2020.*

Perusahaan membayar uang sewa kepada Pelindo Cabang Tanjung Priok sebesar Rp5.242.341 setiap tanggal 15 dalam triwulan berjalan.

*The Company pays rental fee to Pelindo Tanjung Priok Branch for the amount of Rp5,242,341 every 15th date of the current quarter.*

Berdasarkan addendum tanggal 1 Desember 2020, perjanjian ini diperpanjang selama 14 bulan, mulai dari tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2021.

*Based on addendum on December 1, 2020 this agreement is extended for 14 months, starting from April 1, 2020 until May 31, 2021..*

Pada tanggal 27 Januari 2023, Perusahaan dan PT Pelindo Solusi Logistik menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Aset dan Fasilitas *Common Area* di Pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025, kecuali perjanjian ini diputuskan lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian, dimana jangka waktu perjanjian akan berakhir secara otomatis pada Tanggal Pemutusan Perjanjian.

*On March 23, 2022, the Company and PT IPC TPK signed a Minute of Cooperation in the use of 6 units of Rubbed Tyred Gantry Crane (RTGC) at Tanjung Priok Port. This agreement is valid started from January 1, 2023 until December 31, 2025, unless this agreement is terminated earlier based on the terms of the agreement, where the term of the agreement will end automatically on the Termination Date of the Agreement.*

Presentase *Revenue Sharing* atas kegiatan Pengoperasian Objek Kerjasama *Common Area* di Pelabuhan Tanjung Priok adalah 90% dari pendapatan kotor Perusahaan setelah dikurangi kewajiban konsesi.

*The percentages of Revenue Sharing for the Operation of Common Area Cooperation Objects at Tanjung Priok Port is 90% of the Company's gross revenue after deducting concession obligations.*

Untuk periode perjanjian sewa tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 November 2020, Perusahaan membayar uang sewa kepada Pelindo Cabang Tanjung Priok sebesar Rp14.642.321 setiap tanggal 15 dalam triwulan berjalan.

*For the rental agreement period from April 1, 2020 to November 30, 2020, the Company pays the rental fee to Pelindo Tanjung Priok Branch amounting to Rp14,642,321 every 15th of the current quarter.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

Related parties agreement (continued)

- e) Perjanjian sewa menyewa aset dan fasilitas *Common Area* di Pelabuhan Tanjung Priok (lanjutan)

- e) *Agreement of Common Area assets and facilities rent in Tanjung Priok Port (continued)*

Untuk periode perjanjian sewa tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Mei 2021, Perusahaan membayar uang sewa kepada Pelindo Cabang Tanjung Priok sebesar Rp11.862.853 setiap tanggal 15 dalam triwulan berjalan.

*For the rental agreement period from December 1, 2020 to May 31, 2021, the Company pays the rental fee to Pelindo Tanjung Priok Branch amounting to Rp11,862,863 every 15th of the current quarter.*

Pada tanggal 29 Desember 2021, Pelindo dan PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") menandatangani perjanjian pengalihan usaha pelayanan jasa logistik. Berdasarkan perjanjian tersebut, pada tanggal 30 Desember 2021 Pelindo mengalihkan perjanjian sewa menyewa aset dan fasilitas *common area* di Pelabuhan Tanjung Priok ini kepada SPSL. Pengalihan perjanjian kerjasama ini berlaku sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2022.

*On December 29, 2021, Pelindo and PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") signed a business transfer agreement for logistics services. Based on the agreement, on December 30, 2021 Pelindo transferred the common area assets and facilities rent in Tanjung Priok Port agreement to SPSL. The transfer of this cooperation agreement is valid from January 1 until December 31, 2022.*

Efektif tanggal 1 Maret 2022, berdasarkan addendum atas sewa menyewa aset dan fasilitas *Common Area* di Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 24 Maret 2022, besarnya bagi hasil pendapatan yang harus dibayarkan kepada SPSL sebesar 10% dari realisasi pendapatan kotor.

*Effective March 1, 2022, based on addendum to the Common Area assets and facilities rent at Tanjung Priok Port dated March 24, 2022, the amount of revenue sharing paid to SPSL is 10% of realized gross income.*

- f) Perjanjian kerjasama pengelolaan peralatan

- f) *Agreement of equipment management cooperation*

Pada tanggal 5 November 2019, Perusahaan dan JPPI menandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan peralatan. Perjanjian ini bertujuan untuk melakukan transaksi pengalihan hak kepemilikan atas 23 unit peralatan milik Perusahaan kepada JPPI.

*On November 5, 2019, the Company and JPPI entered into an agreement of equipment management cooperation. This agreement aims to carry out the transfer of ownership rights of 23 units of the Company's equipment to JPPI.*

Cara pembayaran yang disepakati Perusahaan dan JPPI adalah menggunakan skema *rental fee* dengan total Rp1.092.027 setiap bulannya. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020.

*The method of payment agreed by the Company and JPPI is to use a rental fee scheme amounting to Rp1,092,027 per month. This agreement was valid starting from December 1, 2019 until November 30, 2020.*

Berdasarkan addendum tanggal 1 Februari 2021, perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, mulai dari tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2021, atau beralihnya kepemilikan peralatan kepada JPPI, atau diakhiri lebih cepat oleh Perusahaan dan JPPI, atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan baru.

*Based on addendum on February 1, 2021, this agreement is valid for 2 (two) years, starting from December 1, 2019 until December 31, 2021, or the transfer of ownership of the equipment to JPPI, or terminated earlier by the Company and JPPI, or extended according to the new agreement.*



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

- f) Perjanjian kerjasama pengelolaan peralatan (lanjutan)

Pada tanggal 24 Januari 2022, Perusahaan dan JPPI menandatangani addendum perjanjian kerjasama pengelolaan peralatan. Berdasarkan addendum tersebut, perjanjian berlaku sampai dengan 31 Januari 2022, atau diakhiri lebih cepat oleh Perusahaan dan JPPI, atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan baru.

Perusahaan dan JPPI menyetujui setelah berakhirnya perjanjian pada tanggal 31 Januari 2022, Perusahaan dan JPPI akan menandatangani Berita Acara Serah Terima Peralatan

- g) Perjanjian kerjasama penggunaan 6 (enam) unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) oleh PT IPC TPK di Pelabuhan Tanjung Priok

Pada tanggal 23 Agustus 2019, Perusahaan dan IPC TPK menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan 6 (enam) unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) di Pelabuhan Tanjung Priok.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2024.

Persentase bagi hasil pendapatan yang disepakati adalah 35% untuk IPC TPK dan 65% untuk Perusahaan berdasarkan tarif *lift on* dan *lift off* yang berlaku.

Pada tanggal 22 November 2019, Perusahaan, IPC TPK dan JPPI menandatangani perjanjian tentang pengalihan perjanjian dari Perusahaan ke JPPI. Perjanjian ini dibuat atas adanya arahan segmentasi bisnis anak perusahaan di lingkungan Pelindo Grup.

Berdasarkan pengalihan perjanjian tersebut, perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020.

Berdasarkan Perjanjian tanggal 23 Maret 2021 pengalihan perjanjian diperpanjang sampai dengan 30 November 2021.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

- f) *Agreement of equipment management cooperation (continued)*

*On January 24, 2022, the Company and JPPI signed the addendum agreement of equipment management cooperation. Based on the addendum, the agreement is valid until January 31, 2022, or terminated earlier by the Company and JPPI, or extended according to the new agreement.*

*The Company and JPPI agreed that after the end of the agreement on January 31, 2022, the Company and JPPI will sign the Minutes of the Equipment Handover.*

- g) *Agreement of cooperation in the use of 6 (six) units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) by PT IPC TPK in Tanjung Priok Port*

*On August 23, 2019, the Company and IPC TPK signed the agreement of cooperation in the use of 6 (six) units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) in Tanjung Priok Port.*

*This agreement is valid from September 1, 2019 until August 31, 2024.*

*Agreed revenue sharing percentage are 35% for IPC TPK and 65% for the Company based on applicable lift on and lift off rate.*

*On November 22, 2019, the Company, IPC TPK and JPPI signed the agreement about the transfer of agreement from the Company to JPPI. This agreement was made in relation to direction of subsidiaries business segmentation within Pelindo Group.*

*Based on the transfer of agreement, this agreement is valid from December 1, 2019 until November 30, 2020.*

*Based on agreement on March 23, 2021 the transfer agreement is extended until November 30, 2021.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

Related parties agreement (continued)

- g) Perjanjian kerjasama penggunaan 6 (enam) unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) oleh PT IPC TPK di Pelabuhan Tanjung Priok (lanjutan)

- g) *Agreement of cooperation in the use of 6 (six) units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) by PT IPC TPK in Tanjung Priok Port (continued)*

Pada tanggal 23 Maret 2022, Perusahaan dan PT IPC TPK menandatangani Berita Acara Kerjasama penggunaan 6 unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) di Pelabuhan Tanjung Priok. Berita Acara ini dibuat berdasarkan berakhirnya perjanjian kerjasama pengelolaan peralatan antara Perusahaan dengan JPPI dan berakhirnya pengalihan perjanjian dari Perusahaan ke JPPI. Berdasarkan berita acara ini, seluruh ketentuan perjanjian kembali mengacu kepada perjanjian awal Perusahaan dengan PT IPC TPK. Perjanjian berlaku sejak 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024.

*On March 23, 2022, the Company and PT IPC TPK signed a Minute of Cooperation in the use of 6 units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) at Tanjung Priok Port. This Minute of Cooperation is made based on the expiration of the equipment management cooperation agreement between the Company and JPPI and the end of the transfer of the agreement from the Company to JPPI. Based on this minute of cooperation, all terms of the agreement again refer to the Company's initial agreement with PT IPC TPK. The agreement is valid from February 1, 2022, until August 31, 2024.*

- h) Perjanjian kerjasama penggunaan 6 (enam) unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) oleh PT PTP di Pelabuhan Tanjung Priok

- h) *Agreement of cooperation in the use of 6 (six) units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) by PT PTP in Tanjung Priok Port*

Pada tanggal 23 Agustus 2019, Perusahaan dan PTP menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan 6 unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) di Pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2024.

*On August 23, 2019, the Company and PTP signed the agreement of cooperation in the use of 6 units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) in Tanjung Priok Port. This agreement is valid from September 1, 2019 until August 31, 2024.*

Persentase bagi hasil pendapatan yang disepakati adalah 35% untuk PTP dan 65% untuk Perusahaan berdasarkan tarif *Lift On* dan *Lift Off* yang berlaku.

*Agreed revenue sharing percentage are 35% for PTP and 65% for the Company based on applicable Lift On and Lift Off rate.*

Pada tanggal 22 November 2019, Perusahaan, PTP dan JPPI menandatangani perjanjian tentang pengalihan perjanjian dari Perusahaan ke JPPI. Perjanjian ini dibuat atas adanya arahan segmentasi bisnis anak perusahaan di lingkungan Pelindo *Grup*.

*On November 22, 2019, the Company, PTP and JPPI signed the agreement about the transfer of agreement from the Company to JPPI. This agreement was made in relation to direction of subsidiaries business segmentation within Pelindo Group.*

Berdasarkan pengalihan perjanjian tersebut, perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020.

*Based on the transfer of agreement, this agreement is valid from December 1, 2019 until November 30, 2020.*

Pada tanggal 30 Maret 2021 pengalihan perjanjian diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.

*on March 30, 2021, the transfer agreement is extended until December 31, 2021.*

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

- h) Perjanjian kerjasama penggunaan 6 (enam) unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) oleh PT PTP di Pelabuhan Tanjung Priok (lanjutan)

Pada tanggal 23 Maret 2022, Perusahaan dan PT PTP menandatangani Berita Acara kerjasama penggunaan 6 (enam) unit *Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) di Pelabuhan Tanjung Priok. Berita Acara ini dibuat berdasarkan berakhirnya perjanjian kerjasama pengelolaan peralatan antara Perusahaan dengan JPPI dan berakhirnya pengalihan perjanjian dari Perusahaan ke JPPI. Pada tanggal 23 Maret 2022 pengalihan perjanjian diperpanjang sampai dengan 31 Agustus 2024.

Berdasarkan Berita Acara ini, seluruh ketentuan perjanjian kembali mengacu kepada perjanjian awal Perusahaan dengan PT PTP. Perjanjian berlaku sejak 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024.

- i) Kerjasama operasi Lini II petikemas di Cabang Pelabuhan Pontianak

Pada tanggal 30 September 2019, Perusahaan dan Pelindo Cabang Pontiana menandatangani perjanjian kerjasama operasi lini II petikemas di Cabang Pelabuhan Pontianak.

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan hak operasi kegiatan lini II di Cabang Pelabuhan Pontianak kepada Perusahaan. Kegiatan operasi yang dimaksud tidak termasuk kegiatan labuh, jasa tambat, pemanduan kapal, penundaan kapal, jasa dermaga, fasilitas penunjang pelabuhan, sarana umum, dan pengadaan listrik, air, serta telepon.

Persentase bagi hasil pendapatan yang disepakati adalah 45% untuk Pelindo Cabang Pontianak dan 55% untuk Perusahaan.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan addendum tanggal 26 Desember 2019, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2020.

Berdasarkan perjanjian pada tanggal 20 Desember 2021, perjanjian ini diperpanjang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

- h) Agreement of cooperation in the use of 6 (six) units of Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) by PT PTP in Tanjung Priok Port (continued)

On March 23, 2022, the Company and PT PTP signed a Minute of Cooperation in the use of 6 (six) units of Rubbed Tyred Gantry Crane (RTGC) at Tanjung Priok Port. This Minute of Cooperation is made based on the expiration of the equipment management cooperation agreement between the Company and JPPI and the end of the transfer of the agreement from the Company to JPPI. on March 23, 2022, the transfer agreement is extended until August 31, 2024.

Based on this Minute of Cooperation, all terms of the agreement again refer to the Company's initial agreement with PT PTP. The agreement is valid from February 1, 2022 until August 31, 2024.

- i) Cooperation of Line II containers operation at Pontianak Branch Port

On September 30, 2019, the Company and Pelindo Pontianak Branch entered into an agreement about cooperation of Line II containers operation at Pontianak Branch Port.

This agreement aims to provide the operating rights of line II activities at Pontianak Branch Port to the Company. The said operational activities do not include anchoring activities, mooring services, ship scouting, ship delays, dock services, port support facilities, public facilities, and electricity, water and telephone procurement.

The agreed revenue sharing percentage are 45% for Pelindo Pontianak Branch and 55% for the Company.

This agreement was valid from October 1, 2019 until December 31, 2019. Based on addendum dated December 26, 2019, this agreement is extended until March 31, 2020.

Based on agreement dated December 20, 2021, this agreement is extended from January 1, 2021, until December 31, 2021.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

- i) Kerjasama operasi Lini II petikemas di Cabang Pelabuhan Pontianak (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2021, Pelindo dan PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") menandatangani perjanjian pengalihan usaha pelayanan jasa logistik. Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo mengalihkan perjanjian Kerjasama operasi Lini II petikemas di Cabang Pelabuhan Pontianak ini kepada SPSL. Pengalihan perjanjian kerjasama ini berlaku sampai 31 Desember 2022.

Bedasarkan perjanjian pada tanggal 15 Desember 2022, perjanjian ini diperpanjang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Efektif tanggal 1 Maret 2022, berdasarkan addendum atas kerjasama operasi lini II di Pelabuhan Pontianak tanggal 24 Maret 2022, besarnya bagi hasil pendapatan yang harus dibayarkan kepada SPSL sebesar 25% dari realisasi pendapatan kotor.

- j) Perjanjian kerjasama Penanganan Petikemas Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) dengan Terminal Petikemas Koja

Pada tanggal 28 Februari 2020, Perusahaan dan Terminal Petikemas Koja menandatangani perjanjian Penanganan Petikemas Pindah Lokasi Penimbunan. Lingkup pekerjaan merupakan pemindahan petikemas LCL dari Lapangan Terminal Petikemas Koja ke lapangan Perusahaan dan Penanganan Petikemas *Overdue* FCL (*dry* dan berbahaya). Kegiatan ini meliputi *trucking*, *Lift off* dan *Lift On* di Lapangan Terminal Perikemas Koja.

Persentase bagi hasil pendapatan yang disepakati adalah 70% untuk Terminal Petikemas Koja dan 30% untuk Perusahaan.

Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dihitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

Bedasarkan addendum tanggal 4 Februari 2022, perjanjian diperpanjang dihitung sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2023.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

- i) Cooperation of Line II containers operation at Pontianak Branch Port (continued)

On December 29, 2021, Pelindo and PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL") signed a business transfer agreement for logistics services. Based on the agreement, Pelindo transferred the cooperation agreement for the Line II container operations at the Pontianak Port Branch to SPSL. The transfer of this cooperation agreement is valid until December 31, 2022.

Based on agreement dated December 15, 2022, this agreement is extended from January 1, 2023, until December 31, 2023.

Effective March 1, 2022, based on addendum to the line II container cooperation at the Pontianak Port Branch dated March 24, 2022, the amount of revenue sharing paid to SPSL is 25% of realized gross income.

- j) Agreement of cooperation in the Handling of Containers for Moving Storage Locations (PLP) with Koja Container Terminal

On February 28, 2020, the Company and the Koja Container Terminal signed an agreement for Container Handling for Moving Storage Locations. The scope of work is the transfer of LCL containers from the Koja Container Terminal Lapangan to the Company's field and FCL *Overdue* Container Handling (*dry* and dangerous). These activities include *trucking*, *Lift off* and *Lift on* at the Koja Perikemas Terminal Field.

The percentage of the revenue share agreed in 70% for Koja Container Terminal and 30% for the Company.

This agreement is valid for one year from January 2, 2020 to January 1, 2021.

Based on the addendum dated February 4, 2022, the agreement was extended from January 2, 2022 until January 1, 2023.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**28. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Perjanjian dengan pihak berelasi (lanjutan)

- k) Remunerasi personil manajemen kunci.

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp7.200.375 dan Rp8.635.732, masing-masing untuk tahun 2022 dan 2021.

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN**

Perusahaan terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Perusahaan menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Perusahaan. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Perusahaan bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Perusahaan menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

**Risiko pasar**

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Harga pasar mengandung tiga tipe risiko: risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko harga. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, utang jangka panjang, dan beban akrual.

**Risiko nilai tukar mata uang asing**

Pada tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan simulasi yang rasional, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebesar 1%, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp957.490, terutama sebagai akibat dari kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas dalam Dolar AS.

**28. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION OF RELATED PARTIES  
(continued)**

Related parties agreement (continued)

- k) Key management personnel remuneration.

Total salaries and other short-term benefits for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors amounting to Rp7,200,375 and Rp8,635,732, for 2022 and 2021, respectively.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE  
AND POLICIES**

The Company is exposed to market risk, foreign exchange risk, price risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Company applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. Such risk management provides assurance to the Company those prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Company applies policies for managing each of these risks which are summarized below.

**Market risk**

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market prices comprise three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk, and price risk. Financial instruments affected by market risk included cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payable, other payables, long term liabilities, and accrued expenses.

**Foreign currency risk**

As of December 31, 2022, based on a sensible simulation, had the exchange rate of Rupiah against the US Dollar depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, income before tax for the years ended December 31, 2022 would have been lower/higher Rp957,490, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents denominated in US Dollar.



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko suku bunga atas arus kas**

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Perusahaan juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

31 Desember 2022/December 31, 2022					
Suku bunga mengambang/ Floating interest rate		Suku bunga tetap/ Fixed interest rate			
Kurang dari atau sama dengan Satu tahun/≤1 tahun/ Less than or Equal one year/ ≤ 1 year	Lebih dari satu tahun/ >1 tahun/ More than one year > 1 year	Kurang dari atau sama dengan Satu tahun/≤1 tahun/ Less than or Equal one year/ ≤ 1 year	Lebih dari satu tahun/ >1 tahun/ More than one year > 1 year	Total	
Kas dan setara kas	336.451.923	-	-	336.451.923	Cash and cash equivalent

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain tetap:

	Dampak/Effect	
Kenaikan 100 basis poin	132.114	100 basis points increase
Penurunan 100 basis poin	(132.114)	100 basis points decrease

**Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dihadapi Perusahaan sebagai akibat wanprestasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu distributor dan pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Kebijakan Perusahaan dalam mengantisipasi risiko kredit yang timbul dari distributor adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan hanya akan melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga yang dikenal dan terpercaya.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)**

**Cash flows interest rate risk**

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

Currently, the Company does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk are to evaluate periodically ratio of fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. The Company also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rate.

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company's financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income after tax with all other variables constant:

**Credit risk**

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss from defaulted third parties. Those third parties are the distributors and counterparties that fail to discharge their contractual obligations.

The Company policies in anticipation of this credit risk arose from the distributors are as follows:

1. The Company will only conduct business relationships with third parties who are recognized and credible.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko kredit (lanjutan)**

Kebijakan Perusahaan dalam mengantisipasi risiko kredit yang timbul dari distributor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2. Perusahaan hanya akan melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga yang dikenal dan terpercaya.
3. Mempunyai kebijakan untuk penjualan kredit dan semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.
4. Meminta kepada pihak ketiga tertentu yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perusahaan untuk memberikan jaminan berupa aset tetap.
5. Memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perusahaan.
6. Menetapkan jangka waktu pembayaran tidak lebih dari 8 hari serta melakukan pemantauan atas jumlah piutang secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tidak tertagih.

Perusahaan meminimalkan risiko kredit aset keuangan seperti kas setara kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

Eksposur maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat sebagaimana di ungkapkan pada Catatan 5, 6 dan 8. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan.

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Perusahaan saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)**

**Credit risk (continued)**

The Company policies in anticipation of this credit risk arose from the distributors are as follows: (continued)

2. The Company will only conduct business relationships with third parties who are recognized and credible.
3. Have a policy for credit sales and all third parties who will make credit trade that they have to go through credit verification procedures.
4. Requests certain third parties who will avail credit trade with the Company to provide collateral in the form of fixed assets.
5. Provides limits or ceiling to a third party who will avail credit trade with the Company.
6. Sets the term of payment not more than 8 days and monitor the amount of receivables on an ongoing basis to reduce the risk of doubtful accounts.

The Company minimizes credit risks on financial assets such as cash and cash equivalent by maintaining minimum cash balance and selecting qualified banks for the placement of funds.

The maximum exposure to the credit risk is represented by the carrying amounts as shown in Notes 5, 6, and 8. There is no significant concentration of credit risk.

**Liquidity risk**

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Company are currently significant as a result of increased activity of development or expansion of business, then in managing liquidity risk, the Company continues to monitor and maintain adequate levels of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Company.

In addition, the Company also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flows, including the maturity schedule of long-term liabilities and continues to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko likuiditas (lanjutan)**

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perusahaan berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 year	Jumlah/ Total	
Utang usaha	164.066.526	-	-	-	164.066.526	Trade payables
Utang lain-lain	1.409.891	-	-	-	1.409.891	Other payables
Beban akrual	92.081.976	-	-	-	92.081.976	Accrued expenses
Uang titipan	5.251.035	-	-	-	5.251.035	Customer deposits
<b>Total</b>	<b>262.809.428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>262.809.428</b>	<b>Total</b>

**Pengelolaan modal**

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan tertentu disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)**

**Liquidity risk (continued)**

The table below summarizes the maturity profile of the Company financial liabilities based on contractual payments.

**Capital management**

The primary objective of the Company capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios to support its business and maximize shareholder value.

The Company is required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital.

The Company manages their capital structure and adjusts it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2022 and 2021.

**30. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS**

Transaksi non-kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	1.960.673	-	Addition of fixed assets through trade payables

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

**30. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION**

Non-cash transactions of the Company are as follow:

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Arus kas/ Cash flow	Non- arus kas/Non-cash flow		31 Desember 2021/ December 31, 2021	
			Pengakuan bunga/ Interest recognition	Lainnya/ Others		
Liabilitas sewa	105.857	(105.857)	-	-	-	Lease liabilities

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun**  
**yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,**  
**Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**As of December 31, 2022**  
**and for The Year then Ended**  
**(Expressed in Thousands of Rupiah,**  
**Unless Otherwise Stated)**

**30. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)**

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flow	Non- arus kas/Non-cash flow		31 Desember 2020/ December 31, 2020	
			Pengakuan bunga/ Interest recognition	Lainnya/ Others		
Liabilitas sewa	1.111.729	(1.059.787)	53.915	-	105.857	Lease liabilities

**31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

- a) Aksi Korporasi Pengalihan Bisnis PT Nusantara Terminal Services kepada Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) Perusahaan No.SK.03/16/12/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 tanggal 16 Desember 2022 tentang Aksi Korporasi Pengalihan Bisnis PT Nusantara Terminal Services Kepada Perusahaan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui keputusan pengalihan bisnis PT Nusantara Terminal Services kepada Perusahaan. Pelaksanaan pengalihan bisnis akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023.

- b) Perubahan susunan Direksi

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham tentang perubahan susunan Direksi Perusahaan, yang dinyatakan dalam Akta Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., No.09 tanggal 11 April 2023 yang telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.09-0111925 tanggal 12 April 2023, komposisi Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama  
 Direktur Operasi  
 Plt. Direktur Komersial dan  
 Pengembangan Bisnis  
 Direktur Keuangan dan SDM

Ruri Indrasari Rachmaputri  
 Yandri Trisaputra

Ruri Indrasari Rachmaputri  
 Budi Azmi

**Directors**

President Director  
 Operation Director  
 Acting Commercial and Business  
 Development Director  
 Finance and HR Director

**30. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION (continued)**

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows: (continued)

**31. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**

- a) Corporate Action of Transferring Business of PT Nusantara Terminal Services to the Company

Based on the Shareholders' Resolution outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS Decision) of the Company No. SK.03/16/12/1/PAPR/DIUT/PLSL-22 dated December 16, 2022, regarding Corporate Actions to Transfer the Business of PT Nusantara Terminal Services to the Company, the shareholders of the Company agreed on the decision to transfer the business of PT Nusantara Terminal Services to the Company. The implementation of the business transfer will be effective on January 1, 2023.

- b) Changes of the Directors

Based on the shareholders' resolution on the changes of the Directors of the Company, as stated in Notarial Deed Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn No.09 dated April 11, 2023 which has been notified and received by the Ministry of Law and Human Rights by letter No. AHU-AH.01.09-0111925 dated April 12, 2023, the composition of the Company's Directors is as follows:

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2022 dan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,  
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MULTI TERMINAL INDONESIA  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2022  
and for The Year then Ended  
(Expressed in Thousands of Rupiah,  
Unless Otherwise Stated)**

**32. HAL LAINNYA**

COVID-19

Operasi Perusahaan telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia meliputi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak pandemi ini terhadap Perusahaan belum memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari pandemi ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Perusahaan di periode-periode berikutnya.

Kondisi peperangan di Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan tantangan yang luas. Mengingat situasi yang sedang berkembang, ada banyak faktor dan peristiwa yang belum atau tidak dapat diketahui yang dapat berdampak material terhadap operasi Perusahaan. Peristiwa terkait kondisi peperangan di Ukraina ini telah dan terus berdampak pada harga komoditas, rantai pasokan, risiko kredit termasuk yang terkait dengan piutang, perdagangan komoditas, perbendaharaan, dan faktor lainnya. Salah satu dari faktor-faktor ini, secara individu atau agregat, dapat berdampak material terhadap pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan Perusahaan.

Perusahaan telah dan mungkin terus menilai dampak yang disebabkan oleh kondisi peperangan di Ukraina terhadap operasi Perusahaan. Pengaruh lebih lanjut yang signifikan dari peperangan ini, bila ada, akan direfleksikan dalam pelaporan keuangan Perusahaan di periode-periode berikutnya.

**32. OTHER MATTERS**

COVID-19

*The Company's operation has and may continue to be impacted by the outbreak of COVID-19 pandemic. The effects of COVID-19 pandemic to the global and Indonesian economy include lower economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The effects of the pandemic to The Company is not significant. Further significant impact of the pandemic, if any, will be reflected in the The Company's financial reporting in the subsequent periods.*

The war in Ukraine

*Russia's recent invasion of Ukraine poses wide-ranging challenges. Given the evolving situation, there are many unknown factors and events that could materially impact to the Company operations. These events related to the war in Ukraine have and continue to impact commodity prices, our supply chain, credit risks including those related to receivables, commodity trading, treasury and other factors. Any of these factors, individually or in aggregate, could have a material effect on the The Company's earnings, cash flows and financial condition.*

*The Company has and may continue to assess the impact of the war in Ukraine to the Company's operations. Further significant impact of the war, if any, will be reflected in the Company's financial reporting in the subsequent periods.*



Laporan  
Tahunan  
**2022**  
Annual  
Report

# Business Optimization & Cost Efficiency for Commercial Excellence



**PT MULTI TERMINAL INDONESIA**

**HEAD OFFICE**

Jl. Pulau Payung No. 1

Tanjung Priok, Jakarta 14310

Phone : +6221-2910-4000 ( Call Center)

Email : [customercare@multiterminal.co.id](mailto:customercare@multiterminal.co.id)



[mtimultiscm.co.id](http://mtimultiscm.co.id)